

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 2009 ini merupakan penerbitan lanjutan dari Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi tahun-tahun sebelumnya dan dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Data dan Informasi pada tahun 2009.

Sumber data untuk penerbitan Buku Data Statistik Semester I Tahun 2009 ini adalah untuk Unit Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sampai dengan Juni 2009 dan untuk *stake holder* dari data laporan tahunan 2008 yang sudah dipublikasikan.

Kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pembacanya. Selanjutnya untuk memudahkan dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi ini maka setelah diterbitkannya Buku ini akan diunggah dalam website Ditjen Postel (www.postel.go.id) sehingga dapat dengan mudah diunduh dan dibaca secara luas.

Buku ini terwujud berkat kerja sama yang baik antara Tim Penyusun Buku Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Tim Ahli serta staf dari unit penyelenggara kegiatan statistik terkait. Untuk itu diucapkan terima kasih atas dedikasinya.

Namun demikian, sesuai pepatah *“tiada gading yang tidak retak”*, Kami menyadari adanya berbagai kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu kami harapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikannya. Kritik dan saran tersebut dapat dikirim secara langsung ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui email datastatistik@postel.go.id.

Selamat membaca.
Jakarta, Agustus 2009

Basuki Yusuf Iskandar
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
NIP : 19601022 198903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab 1	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Tujuan Penyusunan
	1.3. Metode Penyusunan
	1.3.1. Metode Pengumpulan
	1.3.2. Metode Penyajian Data
	1.4. Ruang Lingkup
	1.5. Sumber Data
	1.6. Manfaat Penyusunan Buku
Bab 2	Profil Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
	2.1. Visi
	2.2. Misi
	2.3. Fungsi Ditjen Postel
	2.4. Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
	2.4.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
	2.4.2. Direktorat Pos
	2.4.3. Direktorat Telekomunikasi
	2.4.4. Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio
	2.4.5. Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi
	2.4.6. Direktorat Kelembagaan Internasional
	2.4.7. Unit Pelaksana Teknis
	2.4.7.1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)
	2.4.7.2. Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP)
	2.4.7.3. Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Bab 3	Bidang Kepegawaian
	3.1. Jumlah Pegawai
	3.2. Tingkat Pendidikan
	3.2.1. Pegawai Setditjen
	3.2.2. Pegawai Direktorat
	3.2.3. Pegawai UPT

Bab 4	Bidang Regulasi 4.1. Peraturan Pemerintah 4.2. Peraturan Presiden 4.3. Peraturan Menteri Kominfo 4.4. Keputusan Menteri Kominfo 4.5. Peraturan Dirjen Postel 4.6. Keputusan Bersama Menteri Kominfo 4.7. Surat Edaran Menteri Kominfo
Bab 5	Bidang Pos 5.1. Ruang Lingkup 5.2. Konsep dan Definisi 5.3. Uraian Data Statistik PT. Pos 5.3.1. Alat Pos 5.3.1.1. Jumlah Kantor Pos 5.3.1.2. Pelayanan Pos Bergerak 5.3.1.3. Pelayanan Pos Lainnya 5.3.1.4. Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya 5.3.2. Jangkauan Pelayanan Pos 5.3.3. Produksi Pos PT. Pos Indonesia 5.3.4. PSO 5.4. Bidang Jasa Titipan 5.4.1. Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan 5.4.2. Produksi Pos PT. Pos Indonesia 5.4.3. Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan 5.5. Penerbitan Prangko
Bab 6	Bidang Telekomunikasi 6.1. Ruang Lingkup 6.2. Konsep dan Definisi 6.3. Statistik Telekomunikasi Indonesia 6.3.1. Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia 6.3.2. Kapasitas Penyelenggaraan Telekomunikasi 6.3.3. Perkembangan Pelanggan Jaringan Telekomunikasi 6.3.4. Teledensitas 6.3.5. Pendapatan Operator Jaringan Telekomunikasi 6.3.5.1. Pendapatan Operasional 6.3.5.2. EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Ammortization) 6.3.5.3. ARPU (Average Revenue Per User) 6.3.6. Biaya Operasional Penyelenggara Telekomunikasi 6.3.7. Karyawan Operator Telekomunikasi 6.4. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) 6.4.1. Jumlah Desa WPUT

Bab 7	Bidang Frekuensi 7.1. Ruang Lingkup 7.2. Konsep dan Definisi 7.3. Penggunaan Frekuensi (ISR) 7.3.1. Penggunaan Berdasarkan Pita Frekuensi 7.3.2. Penggunaan Berdasarkan Service 7.3.3. Penggunaan Berdasarkan Propinsi 7.3.4. Pola Penggunaan menurut Wilayah Kepulauan 7.4. Monitoring dan Penertiban Penggunaan Frekuensi oleh UPT 7.4.1. Monitoring dan Penertiban UPT Tahun 2008 7.4.2. Monitoring dan Penertiban UPT Tahun 2009
Bab 8	Bidang Standardisasi 8.1. Ruang Lingkup 8.2. Konsep dan Definisi 8.3. Penerbitan Sertifikat 8.3.1. Perkembangan Penertiban Sertifikat Peralatan 8.3.2. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Bulanan
Bab 9	Bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi 9.1. Ruang Lingkup 9.2. Statistik Pengujian Perangkat 9.2.1. Hasil Pengujian (RHU) 9.2.2. Surat Perintah Pembayaran (SP2)
Bab 10	Bidang Kelembagaan Internasional 10.1. Ruang Lingkup 10.2. Kegiatan Kelembagaan Internasional 10.2.1. Kegiatan Multilateral 10.2.2. Kegiatan Regional 10.2.3. Kegiatan Bilateral 10.2.4. Kegiatan Kerjasama Investasi dan Pemasaran 10.2.5. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Orbit dan Satelit
Bab 11	Analisis Statistika Ekonomi 11.1. Ruang Lingkup 11.2. Peran Ditjen Postel dalam Penerimaan Negara 11.2.1. PNBPN Bidang Perposan 11.2.2. PNBPN Bidang Telekomunikasi 11.2.3. PNBPN Bidang Standardisasi 11.2.4. PNBPN Bidang Frekuensi 11.2.5. PNBPN Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi 11.2.6. Komposisi PNBPN Bidang Postel dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara 11.3. Peran Industri Pos dan Telekomunikasi dalam Pendapatan Nasional

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) yang mempunyai visi “Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos, dan telekomunikasi yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional” melakukan 3 (tiga) fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu : pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga fungsi di atas merupakan penjabaran dari fungsi penetapan kebijakan yang dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Menteri yang salah satu ruang lingkupnya adalah di bidang pos dan telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh Menteri dalam hal perumusan perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis pos dan telekomunikasi nasional. Dengan demikian, maka pengaturan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Ditjen Postel mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen Postel selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi dengan baik,

sehingga penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional dapat dinikmati oleh rakyat banyak dan tidak terbatas pada masyarakat di kota-kota besar saja.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Data statistik ini adalah merangkum, menyusun dan menganalisa data statistik dalam lingkup Ditjen Postel, sehingga khususnya Ditjen Postel dapat menggunakannya sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dan umumnya *stakeholder* dapat melihat, menganalisa dan menggunakan data – data statistik yang tersedia dalam buku ini.

1.3. Metode Penyusunan

1.3.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penyusunan data statistik Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Semester I ini dilakukan dengan beberapa cara. Penggunaan beberapa alternatif cara ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengumpulan data sehingga data yang terkumpul bisa maksimal dan penyajian data lebih lengkap. Alternatif cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- (a). Membuat format data yang dibutuhkan untuk penyajian dan analisis data yang disampaikan dan dikumpulkan dari dan kepada unit kerja terkait di Ditjen Postel;
- (b). Mendapatkan data langsung (jemput bola) dari sumber data seperti data dari PT. Pos Indonesia, Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS);
- (c). Memanfaatkan data yang tersedia, termasuk yang masih dalam format data mentah (*raw data*) untuk kemudian dilakukan pengolahan untuk penyajian data statistik;
- (d). Memanfaatkan data yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait maupun *stakeholder* seperti data dari publikasi BPS, *annual report* dari operator seluler dan publikasi lain yang terkait.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan tersebut, kemudian disusun format penyajian data yang sama untuk masing-masing data meskipun jenis data yang didapatkan berbeda.

1.3.2. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan tabel baik langsung maupun melalui pengolahan data lebih dahulu dalam bentuk format data yang sama untuk penyajian data statistik masing-masing unit kerja di Ditjen Postel. Penyajian data dalam buku Statistik Ditjen Postel Semester I 2009 ini dilakukan dalam bentuk :

- (1) Statistik deskriptif frekuensi, yaitu penyajian data-data frekuensi/jumlah dari indikator-indikator data statistik yang dipilih untuk masing-masing bidang/unit kerja;
- (2) Statistik komposisi/proporsi, yaitu penyajian data proporsi dari masing-masing variabel dari indikator yang ada terhadap total nilai indikator;
- (3) Statistik trend, yaitu penyajian yang menunjukkan kecenderungan arah perkembangan dari indikator yang dipilih, untuk menunjukkan trend atas variabel tersebut dari waktu ke waktu.

Penyajian data dilakukan dalam format tabel frekuensi maupun dalam bentuk grafik/diagram (chart). Grafik/diagram yang dimunculkan dalam penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram *pie* dan diagram grafik trend.

1.4. Ruang lingkup

Dalam penyusunan buku ini, tim penulis membatasi ruang lingkup untuk data – data internal Ditjen Postel sampai bulan Juni tahun 2009, dan untuk data – data *stakeholder* dari *annual report* sampai tahun 2008. Data yang disajikan meliputi data tahunan maupun data bulanan. Ruang lingkup dalam penyajian buku Data Statistik Semester I Tahun 2009 Ditjen Postel ini meliputi :

- (1) Statistik kepegawaian dan sumberdaya manusia Ditjen Postel;
- (2) Statistik peraturan terkait bidang Pos dan Telekomunikasi;
- (3) Statistik sarana dan produksi perposan, termasuk jasa titipan;
- (4) Statistik telekomunikasi (internal dan stakeholder);
- (5) Statistik pengelolaan spektrum frekuensi radio dan monitoring frekuensi;
- (6) Statistik sertifikasi perangkat telekomunikasi;
- (7) Statistik kelembagaan internasional;
- (8) Statistik pengujian perangkat telekomunikasi;
- (9) Statistik peran ekonomi pos dan telekomunikasi.

1.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyajian data statistik bidang Pos dan Telekomunikasi Semester I Tahun 2009 ini berasal dari berbagai sumber yang sudah disetujui dan dapat digunakan untuk keperluan publikasi. Data yang digunakan berasal dari :

- (1) Unit kerja di lingkup Ditjen Postel seperti Setditjen Postel, Direktorat di lingkungan Ditjen Postel, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan dan Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (dengan data sampai dengan Juni 2009);
- (2) *Stakeholder* terkait Bidang Pos dan Bidang Datakom dari PT. Pos Indonesia;
- (3) *Annual Report* tahun 2008 yang dipublikasikan di awal tahun 2009 dari beberapa operator telekomunikasi;
- (4) Badan Pusat Statistik, berupa data yang sudah dipublikasikan dalam buku statistik maupun belum disajikan dalam format buku;
- (5) Nota Keuangan dari Departemen Keuangan.

1.6. Manfaat Penyusunan Buku

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan buku statistik ini adalah:

- (1) Memberikan informasi yang terkini data – data yang terdapat dalam ruang lingkup Ditjen Postel dan data – data *stakeholder* yang telah disusun secara sistematis, jelas dan ringkas;
- (2) Memberi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum dapat mempergunakan data – data statistik bidang Pos dan Telekomunikasi untuk masing – masing keperluan.

Bab 2

Profil Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

2.1. Visi

Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional.

2.2. Misi

- Meningkatkan kualitas pengaturan dan sumber daya manusia;
- Meningkatkan pemerataan pelayanan ke seluruh pelosok nusantara;
- Meningkatkan iklim usaha dan peran serta masyarakat;
- Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa;
- Mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tepat guna;
- Meningkatkan pembinaan potensi pos dan telekomunikasi.

2.3. Fungsi Ditjen Postel

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel), berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan Departemen Komunikasi dan Informatika di bidang pos, telekomunikasi, informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;

- (3) Perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (5) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- (6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Selama ini, Ditjen Postel menjalankan 3 (tiga) fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perijinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

2.4. Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

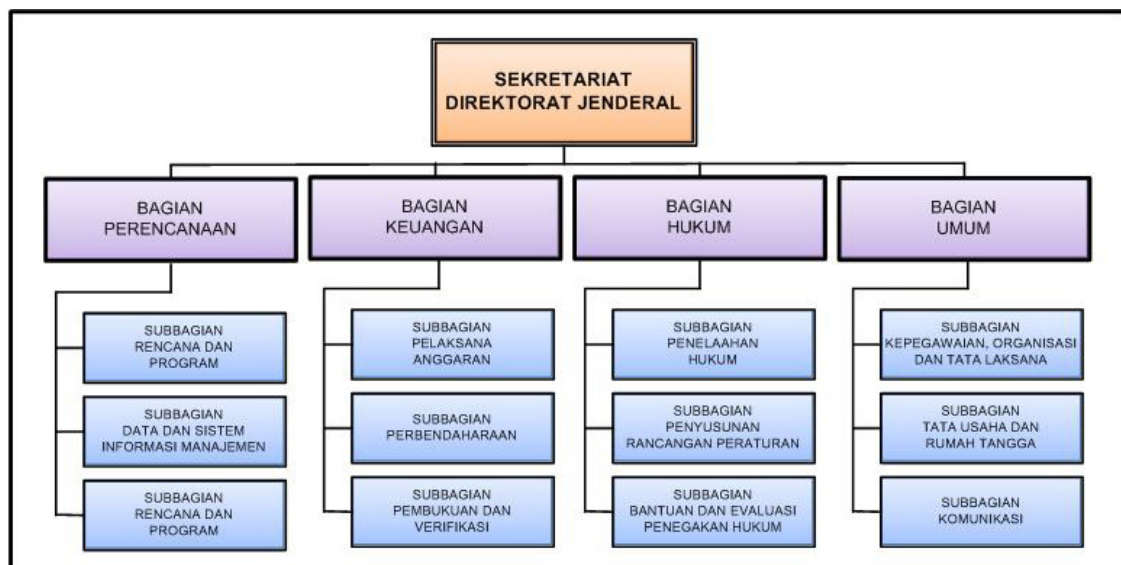
- (1) Sekretariat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Direktorat Pos;
- (3) Direktorat Telekomunikasi;
- (4) Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio;
- (5) Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi;
- (6) Direktorat Kelembagaan Internasional;
- (7) Unit Pelaksana Teknis :
 1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
 2. Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan;
 3. Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

2.4.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Setditjen Postel) memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjalankan fungsi :

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan bantuan teknik luar negeri dan data serta sistem informasi manajemen bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi;
- (2) Pengelolaan urusan keuangan;
- (3) Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pos dan telekomunikasi;
- (4) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, rumah tangga, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Gambar 2.1. Struktur Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

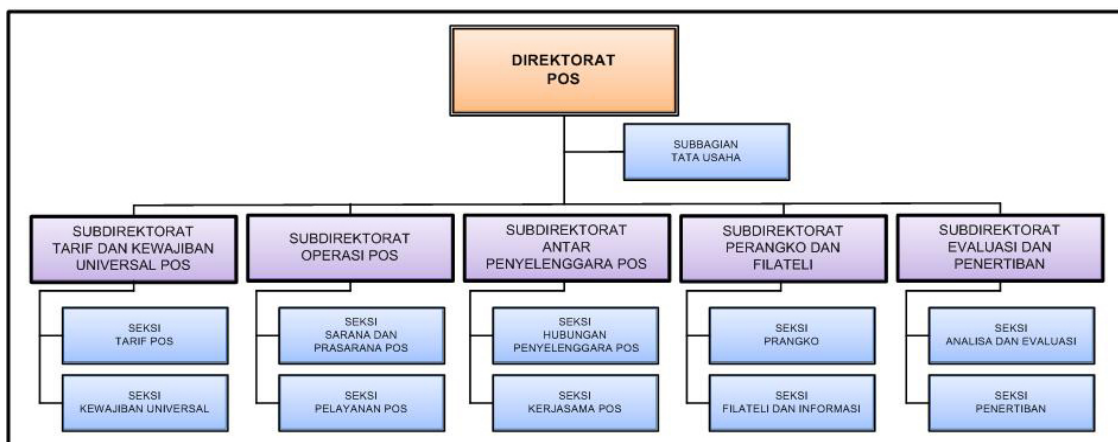


2.4.2. Direktorat Pos

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang pos berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Direktorat Pos mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pos. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Pos mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif dan kewajiban universal perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (2) Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan kewajiban universal perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (3) Pemberian bimbingan teknis bidang produk perposan, operasi perposan penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (4) Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan jasa titipan;
- (5) Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang produk dan tarif perposan operasi perposan penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (6) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Direktorat Pos

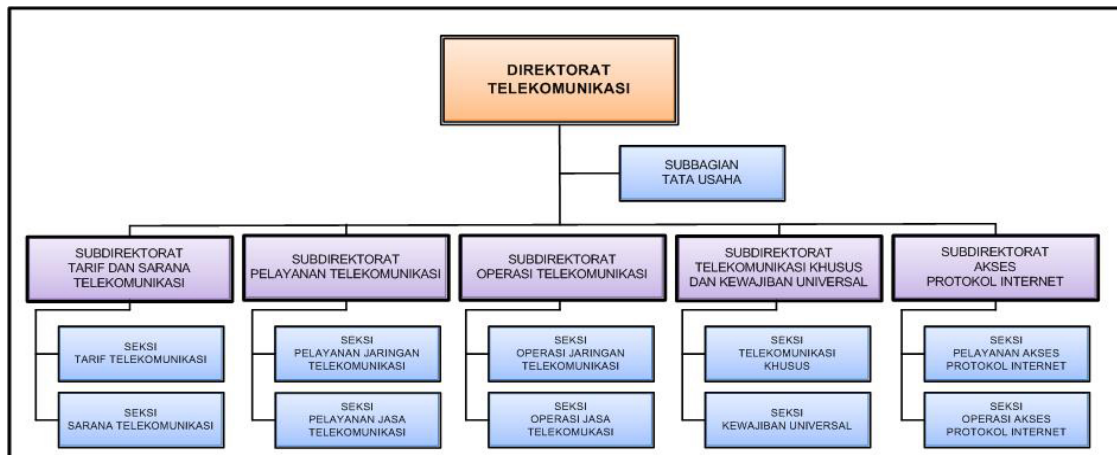


2.4.3. Direktorat Telekomunikasi

Direktorat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Direktorat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi di bidang hubungan telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (2) Penyusunan rencana strategis pembangunan dan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional;
- (3) Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (4) Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (5) Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (6) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang tarif dan sarana akses protokol internet, penyelenggaraan jasa, jaringan akses protokol internet, telekomunikasi khusus dan pelayanan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (7) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Direktorat Telekomunikasi dan Informatika

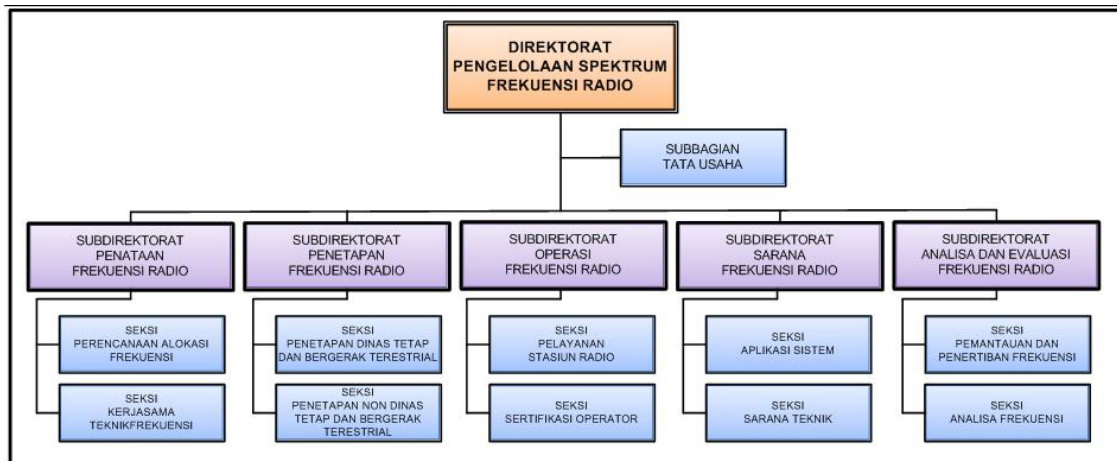


2.4.4. Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melakukan pengaturan, penyusunan program, mengadakan bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi dan peningkatan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi dan sarana frekuensi radio;
- (2) Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang penataan, penetapan, operasi dan sarana frekuensi radio;
- (3) Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi dan sarana frekuensi radio;
- (4) Penyiapan dan pemrosesan perijinan penggunaan frekuensi radio;
- (5) Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang operasi frekuensi radio;
- (6) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Frekuensi Radio

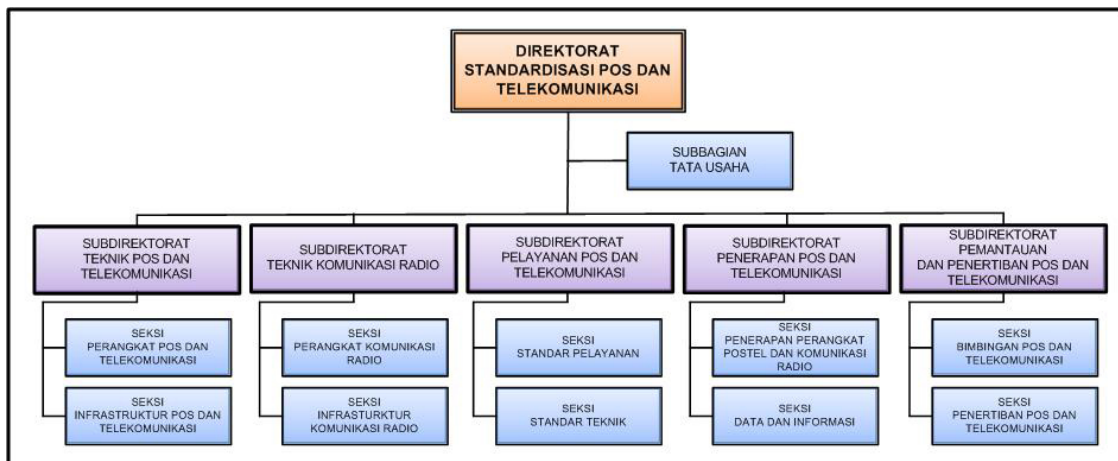


2.4.5. Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi

Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang standardisasi pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Tugas dari Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi ini adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang standar teknik dan standar pelayanan pos dan telekomunikasi serta komunikasi radio. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;
- (2) Penyiapan perumusan standar di bidang standardisasi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;
- (3) Pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;
- (4) Pemantauan dan penertiban standardisasi pos dan telekomunikasi;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.5. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi



2.4.6. Direktorat Kelembagaan Internasional

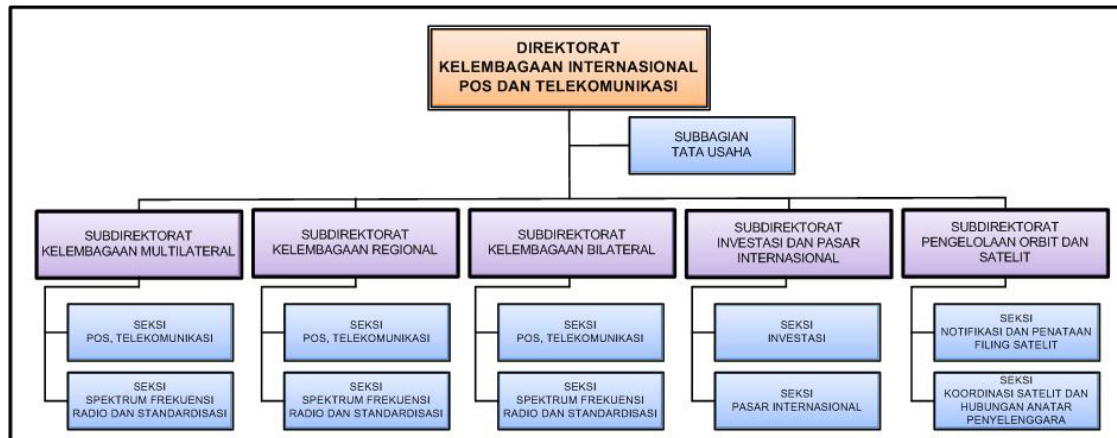
Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi, di bidang kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;
- (2) Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;
- (3) Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;

- (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional, kegiatan fora internasional dan investasi asing serta pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standarisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Gambar 2.6. Struktur Organisasi Direktorat Kelembagaan Internasional



2.4.7. Unit Pelaksana Teknis

2.4.7.1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20/PER/M.KOMINFO/4/2007 tanggal 30 April 2007.

Peranan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses Pengujian alat/perangkat telekomunikasi melakukan pengujian antara lain:

- (1) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;
- (2) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;
- (3) *Electromagnetic Compatibility* Alat/Perangkat Telekomunikasi;
- (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;
- (5) Jasa Penyewaan Alat.

Dari perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia yang semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara terus menerus mengembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

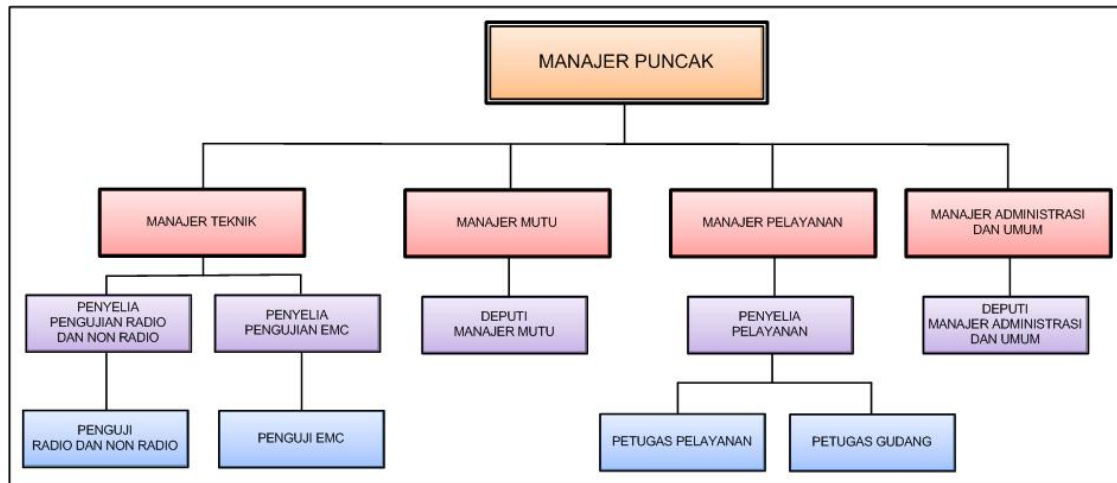
Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Dengan misi menjadi laboratorium pengujian bertaraf internasional, BBPPT mempunyai misi untuk :

- (1) Meningkatkan kualitas pengujian perangkat telekomunikasi;
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Mendukung tumbuh kembangnya industri telematika dalam negeri;
- (5) Meningkatkan peran serta kerjasama nasional dan internasional bidang laboratorium;
- (6) Meningkatkan ruang lingkup (inovasi) layanan jasa laboratorium;
- (7) Mendukung penerapan standar wajib bagi perlindungan keselamatan, keamanan, dan kesehatan.

Gambar 2.7. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi



Tugas pokok Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi. Fungsi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah :

- (1) Penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- (2) Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- (3) Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- (4) Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi, *electromagnetic compatibility* (EMC), dan kalibrasi;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dilengkapi dengan sarana pendukung berupa:

- (1) Laboratorium Pengujian Perangkat Radio;
- (2) Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel;
- (3) Laboratorium Pengujian EMC;
- (4) Laboratorium Kalibrasi.

Jenis layanan pengujian yang dilayani oleh laboratorium-laboratorium di lingkungan BBPPT adalah :

- (1) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;
- (2) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;
- (3) Pengujian *Electromagnetic Compatibility* Alat/Perangkat Telekomunikasi;
- (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;
- (5) Jasa Penyewaan Alat.

2.4.7.2. Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan

Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) dibentuk dalam rangka pengelolaan pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika pedesaan yang dilaksanakan melalui pihak ketiga. Adapun tujuan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan adalah mempercepat pemerataan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pedesaan sebagai bentuk tanggungjawab pelayanan dari Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pembentukan BTIP didasari atas azas adil dan merata dalam pelayanan telekomunikasi. Azas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasil dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

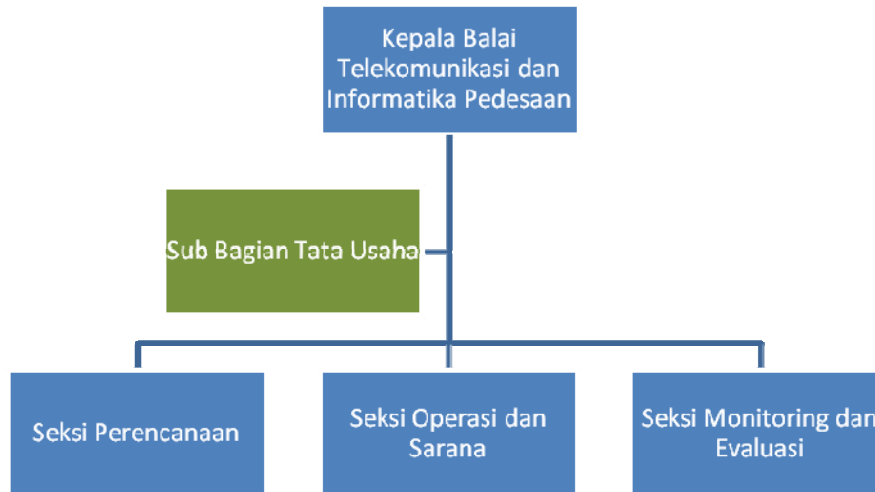
Visi dari pembentukan BTIP adalah sebagai “pionir penyediaan infrastruktur telematika pedesaan sebagai landasan bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial serta ekonomi dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan wilayah dan masyarakat serta menjembatani kesenjangan digital”.

Visi ini diterjemahkan dalam misi BTIP untuk :

- (1) Melaksanakan kegiatan pembiayaan jasa penyediaan sarana dan prasarana telematika pedesaan, dan perusahaan serta pengawasannya secara transparan, profesional dan akuntabel;
- (2) Menyediakan akses dan layanan telematika pedesaan yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat melalui pihak ketiga;

Tugas dan fungsi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan adalah melaksanakan tugas pengelolaan pembiayaan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika.

Gambar 2.8. Struktur Organisasi Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan



Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan dan mengelola dana kontribusi pelayanan universal, mengimplementasikan evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan yang dilaksanakan oleh mitra usaha. Dalam melaksanakan program perluasan akses telekomunikasi ke perdesaan, BTIP menetapkan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Masing-masing program tersebut adalah :

Program Jangka Pendek

Terwujudnya desa berdering pada tahun 2009 untuk 38.471 desa di seluruh Indonesia

Program Jangka Menengah

Terwujudnya desa punya internet (Desa Pinter) tahun 2015 dengan mengimplementasikan layanan akses informasi diseluruh kecamatan untuk informasi cuaca, harga komoditi, pendidikan dan kebutuhan lainnya dalam rangka kemudahan informasi untuk masyarakat.

Program Jangka Panjang

Terbentuknya masyarakat cerdas pada tahun 2015 melalui penyelenggaraan pemusatan pelatihan pemanfaatan akses informasi, penyelenggaraan TV Broadcast (*agregator broadcast*) berbasis kebutuhan masyarakat dan pelayanan informasi lainnya

2.4.7.3. Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- (2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- (3) Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- (4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- (5) Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- (6) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- (7) Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- (8) Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- (1) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
- (2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
- (3) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- (4) Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Bab 3

Bidang Kepegawaian

Data dan informasi statistik bidang kepegawaian ini akan memberikan gambaran tentang perkembangan SDM Ditjen Postel dan unit kerja didalamnya, baik di Kantor Pusat maupun di Unit Pelayanan Teknis. Penyajian data kepegawaian ini disusun berdasarkan unit kerja dan tingkat pendidikan. Kuantitas dan kualitas yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan SDM Ditjen Postel sebagai pelaksana tugas dapat menjadi indikator yang mencerminkan kemampuan Ditjen Postel dalam menjalankan fungsi regulator dalam penyelenggaraan pos dan fasilitator sektor telekomunikasi di Indonesia.

3.1. Jumlah Pegawai

Pembahasan jumlah pegawai Ditjen Postel ini harus memperhatikan juga perubahan yang terjadi pada Ditjen Postel yang sebelumnya bergabung dalam Departemen Perhubungan dan sejak 2006 bergabung ke Departemen Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian diperlukan adanya pendataan khusus untuk pegawai yang statusnya diperbantukan ke Departemen Komunikasi dan Informatika. Jika pada tahun 2004 sampai 2007 belum terdata pegawai yang diperbantukan pada Depkominfo, maka pada tahun 2008 mulai terdata pegawai yang diperbantukan yang jumlahnya 18 orang dan sampai Juli 2009 sebanyak 25 orang. Pegawai yang diperbantukan tersebut diantaranya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Departemen Teknis lainnya.

Dari perkembangan jumlah pegawai dalam lima tahun terakhir, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam jumlah pegawai yang ada di Kantor Pusat Ditjen Postel meskipun terjadi fluktuasi kecil jumlah pegawai di masing-masing Direktorat. Fluktuasi pegawai terjadi dari tahun 2006 ke 2007 dan dari 2007 ke 2008. Pada pegawai di Setditjen misalnya meningkat cukup banyak pada tahun 2007 namun menurun kembali pada 2008 mendekati jumlah pegawai pada 2006. Sementara pada pegawai di Direktorat perubahan banyak terjadi dari 2007 ke 2008 dimana terjadi penambahan pegawai pada direktorat tertentu

seperti Pos, Telekomunikasi, Standardisasi dan Kelembagaan Internasional, namun terjadi penurunan pada Direktorat lain seperti Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio. Jika dilihat pola perubahan pegawainya, terjadi pergeseran dari pegawai di Setjen ke pegawai Direktorat karena secara total tidak terjadi perubahan jumlah pegawai yang signifikan.

Perubahan jumlah pegawai yang signifikan hanya terjadi pada pegawai untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah. Perubahan yang besar dari pegawai di UPT terjadi dari tahun 2007 ke 2008 dimana jumlah pegawai UPT meningkat sampai 20.7%. Peningkatan yang cukup besar pada pegawai di UPT ini menyebabkan secara total jumlah pegawai di Ditjen Postel ini meningkat sampai 12,8% dari 2007 ke 2008. Sementara pada tahun 2009 hampir pada semua bidang terjadi penambahan pegawai sehingga dari 2008 ke Juli 2009 jumlah pegawai meningkat 1,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, jumlah pegawai sampai Juli 2009 meningkat sampai 40,35%. Perkembangan jumlah pegawai di Ditjen Postel ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

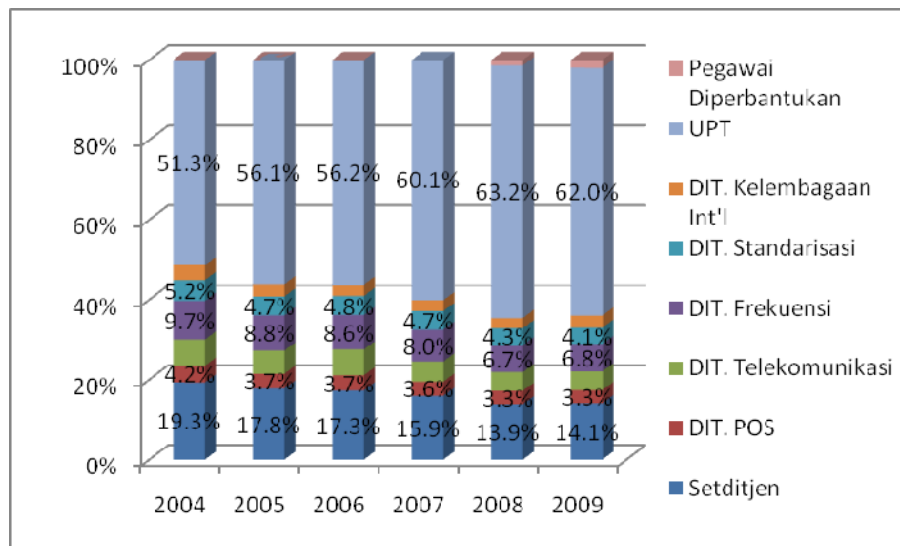
Tabel 3.1 Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel tahun 2004 – 2008.

No	Unit Kerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Setditjen	185	193	185	184	184	190
2	DIT. POS	40	40	40	41	44	44
3	DIT. Telekomunikasi	63	63	69	58	62	63
4	DIT. Frekuensi	93	96	92	92	89	92
5	DIT. Standardisasi	50	51	51	54	57	55
6	DIT. Kelembagaan Int'l	36	34	31	31	34	39
7	UPT	492	609	600	694	838	887
8	Pegawai Diperbantukan	0	0	0	0	18	26
	Jumlah	959	1.086	1.068	1.154	1.326	1.398

*) Sampai Juli 2009

Peningkatan jumlah pegawai UPT yang besar juga terjadi pada tahun 2005 dimana jumlah pegawai UPT meningkat 23,8% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pegawai pada unit kerja lain cenderung stabil dalam lima tahun terakhir. Kalaupun terjadi penurunan pada tahun tertentu, kemudian meningkat kembali pada tahun berikutnya.

Gambar 3.1. Perkembangan Proporsi jumlah pegawai di Ditjen Postel



Dilihat dari komposisinya berdasarkan unit kerja, pegawai di Ditjen Postel sebagian besar adalah pegawai yang berada di UPT. Bahkan proporsi pegawai di UPT ini menunjukkan proporsi yang semakin besar dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Gambar 3.1 dari semula 51,3% pada tahun 2004 menjadi 62,2% pada Juli 2009. Hal ini terjadi karena pegawai di UPT yang terus meningkat sementara pada unit kerja lain cenderung tetap. Besarnya proporsi pegawai yang berasal dari UPT ini dikarenakan jumlah UPT di lingkup Ditjen Postel yang cukup banyak dan tersebar di wilayah Indonesia serta sifatnya yang tenaga lapang. Sementara pegawai di Setditjen menunjukkan proporsi yang semakin kecil terutama pada tahun 2008.

3.2 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh, terjadi peningkatan pada jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang mencerminkan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan pegawai di Ditjen Postel. Jika pada 2004 belum ada pegawai dengan pendidikan Strata 3 (Doktor), maka sampai Juli 2009 sudah ada pegawai dengan pendidikan strata 3. Sementara untuk pegawai berpendidikan Strata 2 (Magister/Master) pada kurun waktu tersebut juga meningkat dengan rata-rata peningkatan 15,3% per tahun dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana meningkat dengan peningkatan rata-rata 13,5% per tahun. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2004, peningkatan jumlah pegawai

dengan tingkat pendidikan Magister dan Sarjana ini masing-masing mencapai 95,1% dan 87,4%.

Tabel 3.2 Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan.

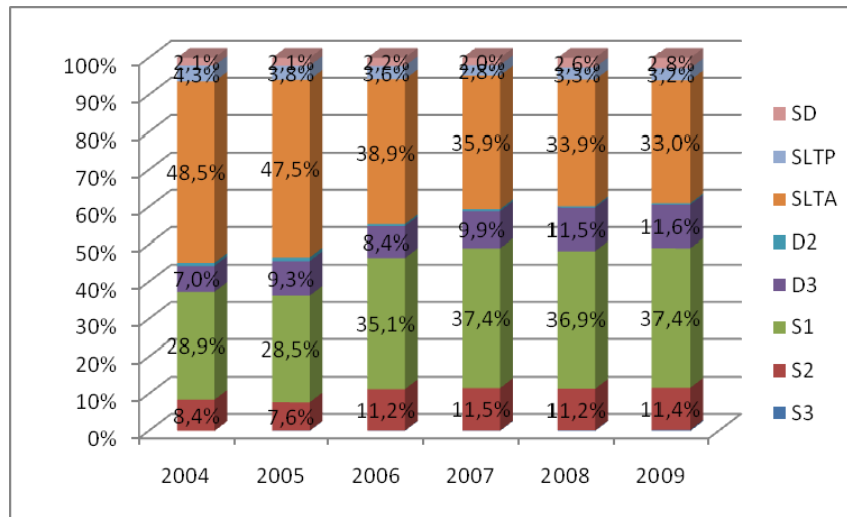
Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
2004	0	81	277	67	8	465	41	20	959
2005	1	83	310	101	11	516	41	23	1.086
2006	1	122	383	92	6	424	39	24	1.091
2007	1	135	440	116	6	422	33	23	1.176
2008	2	149	489	153	5	450	44	34	1.326
2009*	4	158	519	161	5	458	45	39	1389

*) Sampai Juli 2009

Peningkatan jumlah pegawai dengan pendidikan lebih tinggi ini juga menyebabkan komposisi pegawai yang berpendidikan lebih tinggi juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Proporsi pegawai dengan pendidikan Sarjana ke atas pada Juli 2009 sudah mencapai 49% atau hampir separuh dari seluruh pegawai di Ditjen Postel, setelah pada tahun 2004 proporsinya hanya sekitar 37%. Gambar 3.2 yang memperlihatkan komposisi pegawai Ditjen Postel berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa meskipun proporsi pegawai berpendidikan Sarjana pada 2008 mengalami penurunan dibanding tahun 2007, namun ini lebih disebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai yang penambahannya lebih banyak untuk pegawai berpendidikan belum sarjana. Namun trend komposisi pegawai menunjukkan semakin meningkatnya proporsi pegawai berpendidikan Sarjana dan pasca sarjana.

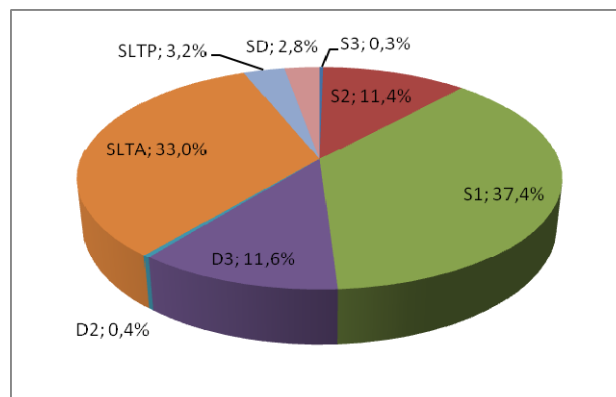
Tuntutan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat memang menuntut SDM yang berada pada sisi regulator bidang pos dan telekomunikasi ini memiliki kapasitas dan pengetahuan yang lebih baik untuk dapat melayani publik stakeholder

Gambar 3.2. Proporsi pegawai di Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-Juli 2009



Komposisi pegawai Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan di tahun terakhir yakni tahun 2008 sekarang ini dapat dilihat pada gambar 3.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa masih ada pegawai dengan pendidikan SD dan SMP namun dengan persentasi yang rendah (kurang dari 7%). Pada saat yang sama sudah ada pegawai dengan pendidikan Strata 3 meskipun baru 0,3% dan pegawai dengan pendidikan Strata 2 yang sudah mencapai 11,2%.

Gambar 3.3 Komposisi pegawai Ditjen Postel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008



3.2.1 Pegawai Setditjen Postel

Sebagaimana dipaparkan diawal, jumlah pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal (Setdijen) Postel mengalami fluktuasi terutama dalam periode 2004-2006, meskipun sejak tahun 2006 jumlah pegawai relatif tetap. Bahkan jika dilihat pada Tabel 3.3 terlihat jumlah pegawai Setditjen Postel pada tahun 2004 sama dengan tahun 2008. Fluktuasi jumlah pegawai Setditjen yaitu yang semula meningkat kemudian menurun kembali terjadi karena

adanya pegawai yang pensiun dan terutama karena adanya mutasi pegawai ke unit kerja lain.

Tabel 3.3 Perkembangan jumlah pegawai Setditjen Postel menurut tingkat pendidikan**.

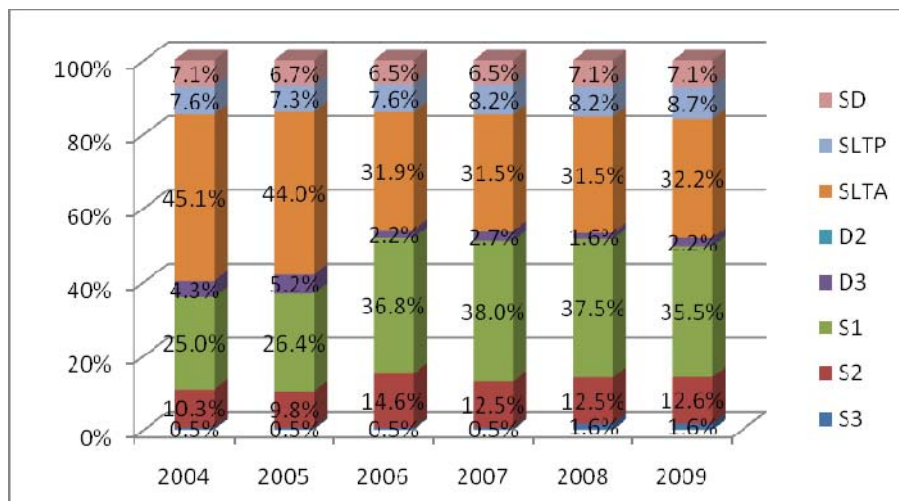
No	Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2004	1	19	47	8	0	83	14	13	185
2	2005	1	19	51	10	0	85	14	13	193
3	2006	1	27	68	4	0	59	14	12	185
4	2007	1	23	70	5	0	58	15	12	184
5	2008	3	23	69	3	0	58	15	13	184
6	2009*	3	21	65	4	0	59	16	13	183

*) Sampai Juli 2009

**) Belum termasuk pegawai dengan status dokter paramedis

Dari komposisi pegawai Setditjen Postel menurut pendidikan seperti ditunjukkan pada gambar 3.4 terlihat bahwa terjadi pergeseran komposisi dengan meningkatnya komposisi pegawai dengan pendidikan lebih tinggi (Sarjana ke atas). Proporsi pegawai berpendidikan sarjana yang sampai tahun 2005 baru mencapai 26,4%, pada Juli 2009 sudah mencapai 35,5% dari total pegawai. Bahkan pada Juli 2009 sudah terdapat 1,6% pegawai di Setditjen Postel yang berpendidikan S3. Sebaliknya, pegawai dengan pendidikan SMU ke bawah berkurang proporsinya dari 59,8% pada tahun 2004 menjadi 48,1%. Dalam pengembangan ke depan, perlu ditingkatkan pegawai dengan pendidikan tinggi untuk mendukung kinerja dan fungsi regulator yang dijalankan oleh Ditjen Postel.

Gambar 3.4. Komposisi pegawai di SetDitjen Postel menurut Pendidikan 2004-2008



3.2.2 Pegawai Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Pegawai di Direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Postel meliputi pegawai yang berada di lima Direktorat di Ditjen Postel. Kelima Direktorat tersebut adalah Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Direktorat Standardisasi dan Direktorat Kelembagaan Internasional. Perkembangan jumlah pegawai di Direktorat ini juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir meskipun terjadi fluktuasi jumlah pegawai. Jumlah pegawai yang menurun pada tahun 2006 meningkat kembali pada 2007. Demikian pula dari 2008 ke Juli 2009. Namun dalam lima tahun terakhir, jumlah pegawai di Direktorat hanya meningkat 5,7% seperti ditunjukkan oleh Tabel 3.4.

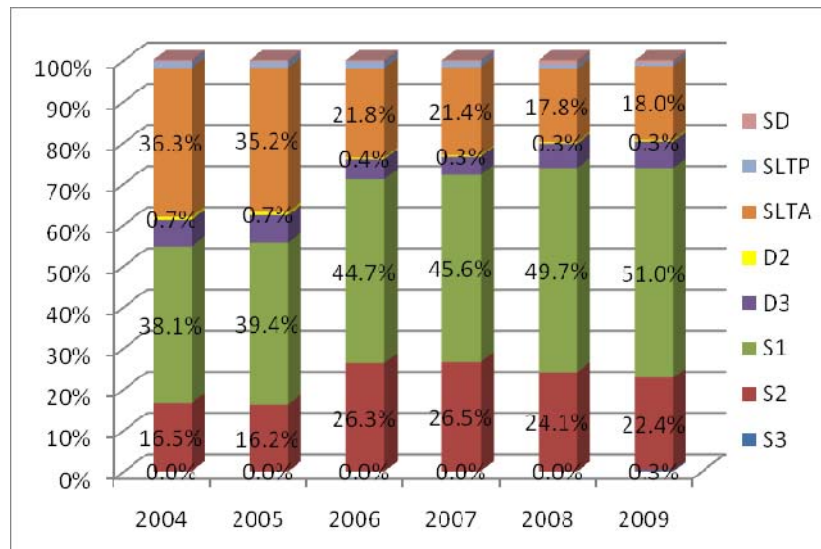
Tabel 3.4 Jumlah pegawai Direktorat di Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan.

No	Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2004	0	46	106	18	2	101	4	1	278
2	2005	0	46	112	19	2	100	4	1	284
3	2006	0	70	119	13	1	58	4	1	266
4	2007	0	78	134	13	1	63	4	1	294
5	2008	0	69	142	17	1	51	3	3	286
6	2009*	1	66	150	19	1	53	2	3	294

*) Sampai Juli 2009

Jika dilihat dari komposisinya menurut tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Direktorat Jenderal Postel menunjukkan terjadinya pergeseran komposisi dengan semakin meningkatnya proporsi pegawai dengan pendidikan tinggi. Jika pada 2004 pegawai dengan pendidikan sarjana keatas baru mencapai 54,6%, pada Juli 2009 sudah mencapai 73,9%, bahkan sudah ada pegawai dengan pendidikan Strata 3 (Doktoral). Untuk pegawai dengan pendidikan strata sarjana bahkan meningkat dari 45,6% pada 2007 menjadi 51% pada Juli 2009. Sebaliknya proporsi pegawai dengan pendidikan SMU ke bawah menunjukkan penurunan menjadi kurang dari 20% sampai Juli 2009. Pergeseran komposisi ini menunjukkan komitmen Ditjen Postel untuk meningkatkan kualitas SDM untuk memenuhi perkembangan yang cepat pada bidang teknologi informasi.

Gambar 3.5. Komposisi pegawai di Direktorat di Lingkungan Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2008



3.2.3 Pegawai UPT

Pegawai UPT di lingkup Ditjen Postel merupakan jumlah pegawai terbesar dibanding unit kerja lainnya karena lokasi UPT yang tersebar dan jumlahnya yang cukup banyak meliputi berbagai fungsi pelayanan. Disamping jumlahnya yang cukup banyak, peningkatan jumlah pegawai di UPT juga tergolong besar dibanding unit kerja lainnya. Meskipun juga mengalami fluktuasi jumlah pegawai terutama dengan penurunan setelah tahun 2006, namun dari 2004 ke Juli 2009, jumlah pegawai di UPT meningkat sebesar 68,9%. Peningkatan terbesar terjadi dari 2007 ke 2008 yang meningkat sebesar 24,3%. Penurunan yang terjadi dari 2006 ke 2007 disebabkan karena penataan kembali organisasi UPT, sampai akhirnya jumlah pegawai UPT kembali meningkat.

Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Pegawai UPT Ditjen Postel Menurut Tingkat Pendidikan.

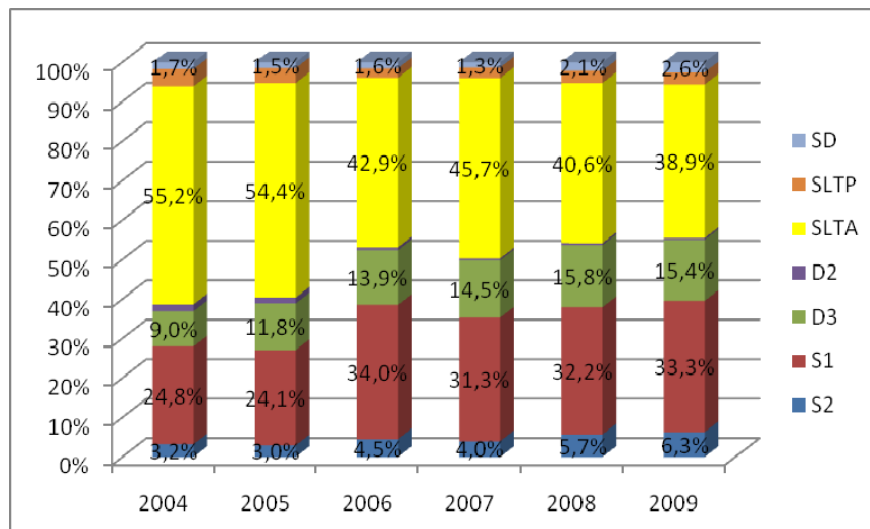
No	Tahun	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2004	17	130	47	9	290	23	9	525
2	2005	18	147	72	9	331	23	9	609
3	2006	32	240	98	5	303	17	11	706
4	2007	27	211	98	3	308	18	9	674
5	2008	48	270	132	4	340	26	18	838
6	2009	56	295	137	4	345	27	23	887

*) Sampai Juli 2009

Berdasarkan komposisinya menurut tingkat pendidikan, juga terjadi peningkatan proporsi pegawai yang berpendidikan tinggi (Sarjana dan Magister) meskipun dengan peningkatan

yang fluktuatif. Proporsi pegawai berpendidikan Sarjana dan Magister yang pada 2004 baru mencapai 28%, pada Juli 2009 sudah mencapai 37,8%. Untuk pegawai dengan pendidikan magister sendiri juga meningkat komposisinya dari 3,2% pada 2004 menjadi 5,7% sampai Juli 2009. Sebaliknya proporsi pegawai dengan pendidikan SMU kebawah menurun cukup tajam dari 61,5% pada 2004 menjadi tinggal 46% pada Juli 2009. Perubahan komposisi pegawai UPT menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.6.

Gambar 3.6. Komposisi Pegawai UPT Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2008



Bab 4

Bidang Regulasi

Data statistik produk regulasi menyampaikan informasi peraturan yang dikeluarkan terkait dengan bidang pos dan telekomunikasi dari sisi jumlah maupun komposisinya. Informasi peraturan ini berasal dari peraturan yang dikeluarkan dari tahun 2005 sampai dengan 2008 berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kominfo, Keputusan Menteri Kominfo, Peraturan Dirjen Postel, Keputusan Bersama Menteri Kominfo, dan Surat Edaran Menteri Kominfo. Peraturan ini kemudian diklasifikasi sesuai dengan bidang dan unit kerja dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi.

4.1 Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan dengan kedudukan hukum paling tinggi setelah Undang-Undang. Selama lima tahun terakhir sampai dengan Juni 2009, hanya dikeluarkan dua peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam periode 2005-2009 yaitu peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2009. Peraturan tersebut terkait dengan bidang kerja di Ditjen Postel, namun lebih terkait dengan penetapan tarif untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor Pos dan Telekomunikasi untuk Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2005.

Tabel 4.1 Statistik Peraturan Pemerintah menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009*	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	1	0	0	0	1	1

*) Sampai Bulan Juni 2009

4.2 Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan dengan tingkatan kekuatan hukum tertinggi ketiga setelah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam kurun waktu 2005 - Juni 2009 dikeluarkan empat Peraturan Presiden yang terkait dengan bidang kerja Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Satu peraturan dikeluarkan pada 2006 dan tiga peraturan dikeluarkan pada 2008. Dari sisi komposisi, Peraturan Presiden yang dikeluarkan seluruhnya terkait dengan bidang pos.

Tabel 4.2 Statistik Peraturan Presiden menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009*	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	1	0	3	0	4
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0

*) Sampai Bulan Juni 2009

4.3 Peraturan Menteri Kominfo

Peraturan Menteri Kominfo adalah jenis peraturan yang paling banyak dikeluarkan dibanding jenis peraturan lain dalam kurun waktu 2005 - Juni 2009. Dalam periode tersebut telah dikeluarkan 71 buah Peraturan Menteri (Permen) Kominfo dengan rincian 14 peraturan pada tahun 2005, 16 peraturan pada 2006, 8 peraturan pada 2007, 18 peraturan pada 2008 dan 15 peraturan sampai Juni 2009. Banyaknya jumlah peraturan jenis ini karena umumnya Peraturan Kominfo ini lebih bersifat teknis untuk kepentingan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, komposisi peraturan juga lebih banyak terkait dengan bidang-bidang teknis pada empat direktorat utama di Ditjen Postel Tabel 4.3 menunjukkan, dari total 71 peraturan tersebut, 64,8% terkait dengan bidang kerja Direktorat Telekomunikasi, 26,8% terkait bidang frekuensi, 4,2 % terkait bidang standardisasi dan sisanya bidang perposan dan lain-lain.

Tabel 4.3 Statistik Peraturan Menteri Koinfo menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009*	JUMLAH
1	PERPOSAN	1	0	0	0	0	1
2	TELEKOMUNIKASI	10	11	5	16	4	46
3	FREKUENSI	2	5	2	0	10	19
4	STANDARDISASI	1	0	0	2	0	3
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	1	0	1	2

*) Sampai Bulan Juni 2009

4.4 Keputusan Menteri Koinfo

Peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Koinfo) juga merupakan peraturan yang lebih bersifat teknis namun lebih berorientasi ke internal. Dalam periode 2005 - Juni 2009, telah dikeluarkan 24 Keputusan Menteri Koinfo yaitu 10 keputusan pada 2006, 3 keputusan pada 2007 dan 4 keputusan pada 2008. Pada 2009, sampai bulan Juni telah dikeluarkan 7 Keputusan Menteri Koinfo. Dari sisi komposisinya, dari 17 keputusan yang dikeluarkan pada periode tersebut hanya terkait dengan dua bidang yaitu 37,5% terkait bidang Telekomunikasi dan 62,5% terkait bidang frekuensi.

Tabel 4.4 Statistik Keputusan Menteri Koinfo menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009*	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	3	2	3	1	9
3	FREKUENSI	0	7	1	1	6	15
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0

*) Sampai Bulan Juni 2009

4.5 Peraturan Dirjen Postel

Peraturan Dirjen Postel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Ditjen Postel dan dengan sendirinya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Postel. Dalam periode 2005 - Juni 2009 telah dikeluarkan 40 Peraturan Dirjen Postel dengan yang terbanyak pada tahun 2005 dan 2008 yaitu 11 dan 13 peraturan. Sementara pada tahun 2009, sampai bulan Juni baru dikeluarkan 3 Peraturan Dirjen Postel. Dari sisi komposisinya, paling banyak peraturan Dirjen Postel dikeluarkan terkait dengan bidang standardisasi yang mencapai

67,5% dari peraturan yang dikeluarkan. Sementara peraturan yang terkait dengan bidang telekomunikasi hanya 8 peraturan atau 20%.

Tabel 4.5 Statistik Peraturan Dirjen Postel menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009*	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	1	0	1
2	TELEKOMUNIKASI	2	4	2	0	0	8
3	FREKUENSI	1	0	0	0	0	1
4	STANDARDISASI	8	4	2	11	2	27
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	1	0	1	1	3

*) Sampai Bulan Juni 2009

4.6 Keputusan Bersama Menteri Kominfo

Keputusan Bersama Menteri Kominfo adalah peraturan yang dibuat dalam bentuk keputusan bersama antara Menteri Kominfo dengan lembaga lain. Karena sifat keputusannya tersebut, maka tidak banyak dikeluarkan peraturan jenis ini, termasuk pada periode 2005 - Juni 2009. Pada periode tersebut hanya dikeluarkan dua Keputusan Bersama Kominfo yaitu pada 2005 dan 2009 terkait dengan bidang frekuensi dan standardisasi.

Tabel 4.6 Statistik Keputusan Bersama Menteri Kominfo menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009*	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	1	0	0	0	0	1
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	1	1
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0

*) Sampai Bulan Juni 2009

4.7 Surat Edaran Menteri Kominfo

Surat Edaran Menteri Kominfo adalah peraturan yang dibuat untuk kepentingan internal sektor terkait dengan bidang kerja Departemen Komunikasi dan Informasi. Selama periode 2005 - Juni 2009 hanya diterbitkan dua Surat Edaran Menteri Kominfo yaitu pada 2006 dan 2009 yang terkait dengan bidang Telekomunikasi dan bidang standardisasi.

Tabel 4.7 Statistik Surat Edaran Menteri Koinfo menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009*	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	1	0	0	0	1
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	1	1
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0

*) Sampai Bulan Juni 2009

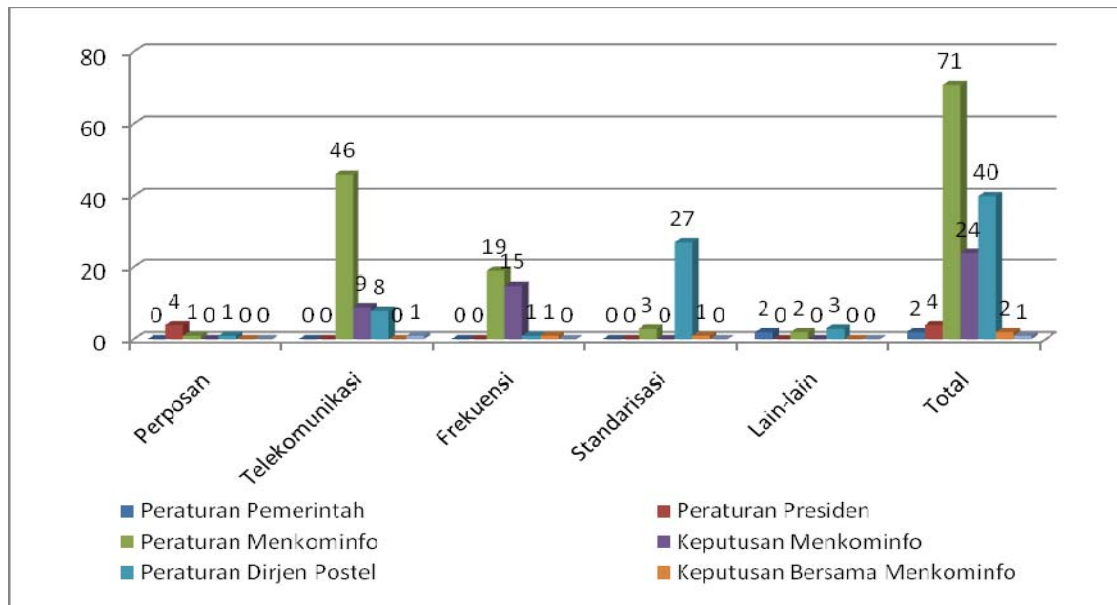
Secara total, dari seluruh jenis regulasi yang dikeluarkan pada kurun waktu 2005 - Juni 2009, komposisinya paling banyak adalah peraturan yang terkait dengan bidang telekomunikasi. Dari total 144 peraturan yang diterbitkan pada periode tersebut, 44,4% adalah peraturan yang terkait dengan bidang telekomunikasi, diikuti dengan bidang Frekuensi sebanyak 25 % dan bidang Standardisasi sebanyak 21,5%. Peraturan yang terkait dengan bidang perposan hanya sebanyak 4,7%.

Tabel 4.8. Jumlah Produk Regulasi yang Dikeluarkan pada Periode 2005 - Juni 2009.

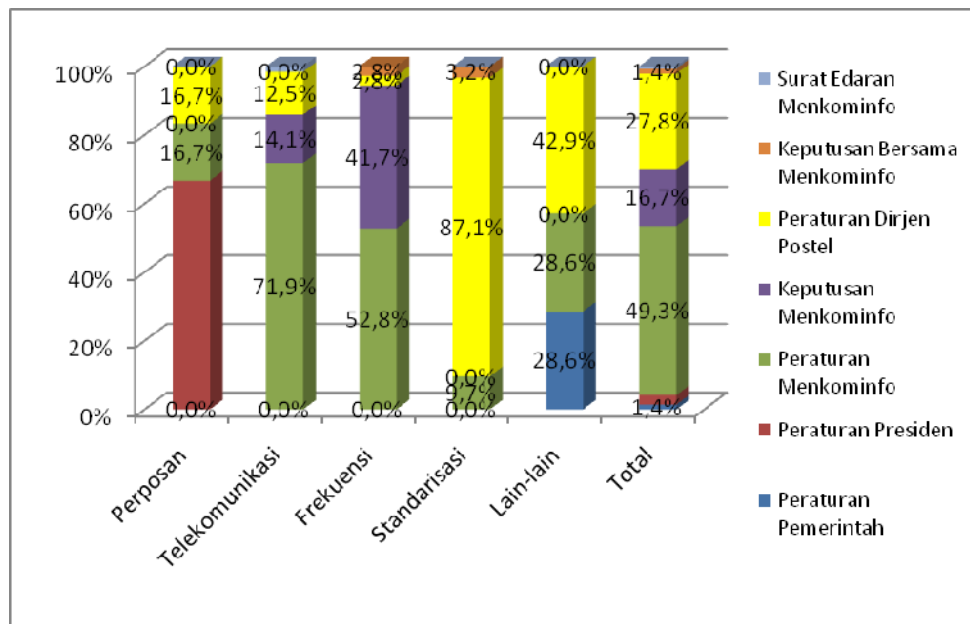
Jenis Peraturan	Perposan	Telekomu nikasi	Frekuensi	Standari- sasi	Lain-lain	JUMLAH
Peraturan Pemerintah	0	0	0	0	2	2
Peraturan Presiden	4	0	0	0	0	4
Peraturan Menkominfo	1	46	19	3	2	71
Keputusan Menkominfo	0	9	15	0	0	24
Peraturan Dirjen Postel	1	8	1	27	3	40
Keputusan Bersama Menkominfo	0	0	1	1	0	2
Surat Edaran	0	1	0	0	0	1
JUMLAH	6	64	36	31	7	144

Berdasarkan jenis peraturannya, komposisi peraturan bidang Pos dan Telekomunikasi yang dikeluarkan pada periode 2005 - 2008 adalah peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Koinfo yang proporsinya mencapai 49,3% dari total peraturan yang diterbitkan. Urutan terbanyak kedua adalah peraturan berupa Peraturan Dirjen Postel dengan proporsi 27,8% diikuti Keputusan Menkominfo sebesar 16,7%. Sementara regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden masing-masing hanya 1,4% dan 2,8%. Jumlah dan komposisi peraturan bidang Postel dalam periode 2005 - 2008 diperlihatkan pada gambar 4.1 dan 4.2.

Gambar 4.1 Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005-Juni 2009.



Gambar 4.2 Komposisi produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005 - Juni 2009



Bab 5

Bidang Pos

Penyusunan data statistik pos tahun 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi bidang perposan yang meliputi pos dan jasa titipan di Indonesia serta perkembangannya sampai dengan akhir tahun 2008 dan pertengahan tahun 2009. Data yang disajikan meliputi sarana dan peralatan bidang perposan nasional, pelayanan, fasilitas pelayanan dan jangkauan pelayanan, produksi pos dan jasa titipan sampai tahun 2008 dan semester I tahun 2009. Penyajian data ini juga mencoba menunjukkan kinerja PT. Pos dalam memberikan pelayanan perposan kepada masyarakat Indonesia. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan kinerja bidang perposan dan logistik di Indonesia.

5.1 Ruang Lingkup

Untuk penyajian statistik pos ini, data diperoleh dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (selanjutnya disebut PT. Pos). Sedangkan data jasa titipan diperoleh dari masing-masing propinsi yang datanya telah dikumpulkan di Direktorat Pos. PT. Pos terdiri atas 11 Wilayah Usaha Pos (Wilpos), dimana setiap Wilpos meliputi propinsi sebagai berikut:

1. Wilpos I : Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara
2. Wilpos II : Sumatera Barat dan Riau
3. Wilpos III : Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan
4. Wilpos IV : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Wilpos V : Jawa Barat
6. Wilpos VI : Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
7. Wilpos VII : Jawa Timur
8. Wilpos VIII : Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
9. Wilpos IX : Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar
10. Wilpos X : Sulsel, Sultra, Sulteng dan Sulut
11. Wilpos XI : Maluku dan Irian Jaya

Ruang lingkup data yang disajikan dalam statistik perposan tahun 2008 ini meliputi:

1. Banyaknya Kantor Pos di seluruh Indonesia pada tahun 2008 yang terdiri dari Kantor Pos, Kantor Pos Cabang Kabupaten, Kantor Pos Cabang Dalam Kota, Kantor Pos Cabang Luar Kota, Loker Ekstensi, Pelayanan Pos Bergerak, Pelayanan pos lainnya, serta Fasilitas Pos Lainnya.
2. Realisasi produksi surat pos yang meliputi:
 - 2.1 Surat Pos Dalam Negeri
 - a). Surat Pos Standar
 - 1). Biasa
 - 2). Tercatat
 - 3). Perlakuan Khusus
 - b). Surat Pos Prioritas
 - 1). Surat Pos Kilat
 - 2). Surat Pos Kilat Khusus Produk Regional
 - 3). Surat Pos Perlakuan Khusus
 - 2.2 Surat Pos Luar Negeri
 - a). Surat Pos Standar
 - 1). Biasa
 - 2). Tercatat
 - b). Surat Pos Prioritas
 - 1). Express Mail Service (EMS)
 - 2). Speedpost
 - 3). Expresspost
 - c). Surat Pos Luar Negeri Lainnya
 - 2.3 Realisasi Produksi PT. (Persero) Pos Indonesia lainnya
 - a). Paket Pos
 - b). Wesel Pos
 - c). Giro dan Cek Pos
3. Jumlah penyelenggara jasa titipan dan produksinya.

5.2 Konsep dan Definisi

Karena bidang pos dan jasa titipan mengandung banyak sekali istilah, berikut ini disampaikan penjelasan berupa definisi dari terminologi yang digunakan.

1. Kantor Pos adalah Unit Pelayanan Teknis dalam penyelenggaraan jasa perposan, terdiri dari:
 - a. Kantor Pos adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyediakan jasa, pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia;
 - b. Kantor Pos Cabang Kabupaten adalah unit usaha PT. Pos Indonesia disuatu kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta eksploitasinya kepada kantor pos yang berada di kota tersebut;
 - c. Kantor Pos Cabang Dalam Kota adalah fasilitas pelayanan pos di ibukota kecamatan yang belum ada kantor posnya, bertempat di kantor kecamatan atau tempat lain di ibukota kecamatan itu yang disediakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh pegawai pemerintah daerah;
 - d. Kantor Pos Cabang Luar Kota adalah unit usaha PT. Pos Indonesia di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta eksploitasinya kepada Kantor Pos.
2. Locket Ekstensi adalah sarana, pelayanan pos berbentuk locket yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia yang lokasinya di luar kantor pos.
3. Pelayanan Pos Bergerak adalah terdiri dari:
 - a. Pos Keliling Kota (M) adalah penyediaan jasa pos bergerak di tempat tertentu dalam kota secara tetap dan teratur dengan menggunakan mobil atau kendaraan bermotor roda empat;
 - b. Pos Keliling Desa (PKD) adalah kegiatan penyediaan jasa pos yang bergerak dari desa ke desa secara tetap dan teratur dengan menggunakan kendaraan roda dua;
 - c. Pos Pemasaran Keliling (Pos Sarling) adalah unit pelayanan pos bergerak yang melaksanakan tugasnya secara tetap dan teratur dari pintu ke pintu (*door to door*) dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua;

4. Pelayanan Pos Lainnya, adalah terdiri dari:
- a. Waralaba adalah unit pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan kerjasama bagi hasil dengan PT. Pos;
 - b. Rumah Pos adalah unit pelayanan pos yang berlokasi di unit pemukiman transmigrasi yang dikelola oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Kanwil/Kandep Transmigrasi dan diberi bimbingan dan panjar kerja berupa benda pos dan materai (BPM) dari PT. (Persero) Pos Indonesia;
 - c. Agen Pos adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di kota;
 - d. Agen Pos Desa adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa;
 - e. Agen Pos Koperasi adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa;
 - f. Dipo BPM adalah sarana pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak tertentu atas ijin yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia untuk melakukan penjualan benda pos dan materai sesuai dengan harga nominal;
 - g. Pos Serba adalah sarana pelayanan pos dengan tampilan menarik yang menyediakan layanan, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan layanan pos. Pengelolanya adalah pegawai PT. Pos Indonesia yang diberi tugas atau pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama. Lokasi pos serba diruang kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk;
 - h. Pos Desa adalah fasilitas fisik pelayanan di luar ibukota kecamatan yang belum ada kantor pos, bertempat di kantor desa/kelurahan atau tempat lain di luar ibukota kecamatan yang disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan diselenggarakan oleh pegawai perangkat pemerintah desa kelurahan;
 - i. Kantor Pos Desa adalah unit pelayanan pos di desa kelurahan;
 - j. Warpos Kesra adalah fasilitas pelayanan pos yang diselenggarakan oleh paguyuban keluarga sejahtera;

- k. Pos Sekolah adalah fasilitas pelayanan pos di sekolah-sekolah untuk keperluan para siswa dan sekolah, yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan mengikut sertakan organisasi resmi atau koperasi siswa dibawah pembinaan dan bimbingan kepala sekolah dan kepala kantor pos.
- 5. Fasilitas Pos Lainnya, adalah terdiri dari:
 - a. Kotak Pos adalah kotak berkunci yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia, dipasang pada dinding kantor pos atau tempat lain yang disediakan untuk disewa oleh masyarakat yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos itu. Tiap kotak pos diberi nomor urut tersendiri;
 - b. Tromol Pos adalah kotak atau wadah lain yang terkunci, disediakan di kantor pos oleh pemakai jasa pos yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos atau wadah itu. Tromol pos dapat juga digunakan untuk pengeposan kiriman;
 - c. Bis Surat adalah kotak surat milik PT. Pos Indonesia yang disediakan bagi masyarakat sebagai tempat untuk memasukkan surat pos yang akan dikirim;
 - d. Peti Pos adalah kotak yang disusun dan terdiri dari 16 sampai 20 kotak yang terkunci yang ditempatkan di tempat umum seperti pusat pertokoan, rumah susun dan lain lain sebagai sarana mempermudah pengantar pos menyampaikan kiriman pos.
- 6. Sentral Giro
 - a. Sentral Giro (SG) adalah unit pelaksana teknis yang bertindak sebagai pusat penyelenggaraan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu. Pada sentral giro ini disediakan juga loket pelayanan giro pos;
 - b. Sentral Giro Gabungan (SGG) adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu, yang digabungkan pada Kantor Pos, karena volume pekerjaan belum memenuhi syarat untuk berdiri sendiri. Pimpinannya dirangkap oleh Kepala Kantor Pos;
 - c. Sentral Giro Gabungan Khusus adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan administrasi rekening giro pos (khusus penerimaan setoran keuangan negara pajak) di kota tertentu yang digabungkan dengan kantor pos

yang sekota dengan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang tidak ada Sentral Giro/ Sentral Giro Gabungannya;

- d. Sentral Pengelolaan Pos (SPIP) adalah unit pelaksana teknis yang khusus mengadakan satu jenis pekerjaan berupa pengelolaan dan antaran surat pos;
- e. Kios Benda Pos dan Materai (BPM) adalah sarana pelayanan pos berupa kios yang disertai tugas menjual benda pos dan meterai. Kios ini biasanya di halaman kantor pos atau sekitarnya.

7. Produksi Pos adalah

- a. Surat adalah berita atau pemberitaan secara tertulis atau terekam menurut persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Surat Pos adalah himpunan bagi surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkus;
- c. Paket Pos adalah kemasan yang berisi barang dengan syarat-syarat tertentu, seperti bentuk, ukuran dan berat yang dikirim melalui pos;
- d. Wesel Pos adalah sarana pelayanan pengiriman uang di dalam negeri dan ke luar negeri melalui pos yang paling sederhana dan ekonomis;
- e. Kiriman adalah satuan surat pos atau paket pos dalam proses pertukaran;
- f. Kiriman Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan;
- g. Giro Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindah bukuan melalui pos;
- h. Cek Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos;
- i. Barang Cetak adalah hasil penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul maupun tidak;
- j. Express Mail Service (EMS) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara ekspres ke Luar negeri dengan angkutan udara. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan;

- k. Pos Cepat Antar Kota Terbatas (Pos Patas) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam negeri dengan angkutan udara darat. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan;
 - l. Pos Kilat Khusus adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara khusus dengan angkutan udara dan darat. Pengirim menerima bukti kirim, bukti terima dan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan;
 - m. Pos Cepat Antaran Kota (Pos Canta) adalah layanan pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam kota berikut jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan;
 - n. Surat Elektronik (Ratron) adalah layanan pengiriman surat (termasuk dokumen) melalui media elektronik.
8. Jasa titipan adalah layanan jasa tertentu dari sektor pos yang diijinkan untuk diselenggarakan oleh perusahaan swasta.
- a. Barang cetakan adalah dokumen yang beratnya tidak melebihi 1 kg;
 - b. Paket adalah barang yang dikemas dalam bentuk paket;
 - c. Bungkusan kecil adalah paket yang beratnya tidak melebihi 1 kg;
 - d. Sekogram adalah paket yang beratnya sampai 7 kg dapat berupa dokumen;
 - e. Surat kabar adalah media cetak;
 - f. Koli adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit jumlah barang (koli);
 - g. Kg adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit berat dalam satuan kg.

5.3 Uraian Data Statistik PT. Pos

Berikut ini disajikan data statistik PT. Pos serta ulasan ringkasnya yang menggambarkan statistik perposan di Indonesia.

5.3.1 Alat Pos

Pada bagian ini disajikan data dan informasi statistik alat dan sarana penunjang pos yang terdiri dari sebaran kantor pos menurut jenis dan lokasi (wilayah pos). Pelayanan pos lainnya menurut jenis pelayanan dan lokasi (wilayah pos dan pulau), pelayanan pos bergerak

menurut jenis dan lokasi (wilayah pos), fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis dan lokasi (wilayah pos) dan jangkauan pelayanan pos yang meliputi jangkauan pelayanan di kecamatan, desa dan lokasi transmigrasi. Data-data yang disajikan meliputi data lima tahun terakhir, data sampai akhir tahun 2008 dan data sampai semester I Tahun 2009.

5.3.1.1 Jumlah Kantor Pos

a. Perkembangan Jumlah Kantor Pos Tahun 2004-2009

Jaringan pelayanan ditunjukkan dengan banyaknya kantor pos yang dikelola langsung oleh PT. Pos Indonesia terdiri atas Kantor Pos, Kantor Pos Cabang Kabupaten, Kantor Pos Cabang Luar Kota, Kantor Pos Cabang Dalam Kota. Data jumlah kantor pos, kantor pos cabang kabupaten, kantor pos cabang dalam kota dan luar kota dari tahun 2004 sampai 2009 ditunjukkan pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1. Tabel dan gambar tersebut juga menunjukkan perkembangan jumlah kantor pos yang dikelola langsung PT. Pos untuk masing-masing jenis sekaligus perbandingan antar masing-masing jenis

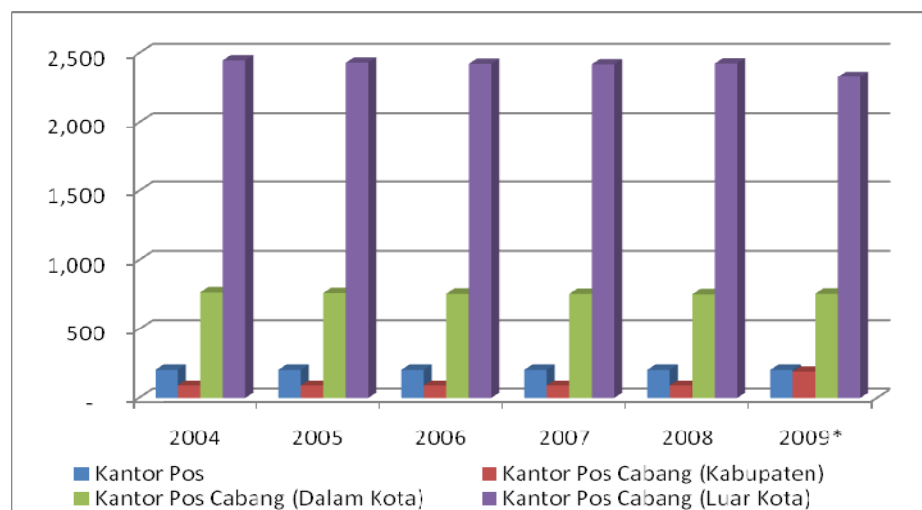
Tabel 5.1 Perkembangan jumlah kantor Pos menurut jenisnya tahun 2004-2009.

No	Jenis Kantor Pos	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Kantor Pos	207	207	207	207	207	207
2	Kantor Pos Cabang (Kabupaten)	88	88	88	88	88	195
3	Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)	765	760	755	754	751	755
4	Kantor Pos Cabang (Luar Kota)	2.450	2.433	2.425	2.422	2.427	2.329
Jumlah		3.510	3.488	3.475	3.471	3.473	3.486

*) Sampai Juni 2009

Sumber : PT. Pos Indonesia

Gambar 5.1. Perkembangan jumlah Kantor Pos yang dikelola PT. Pos Tahun 2004-2009



Data perkembangan kantor pos menunjukkan secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah total Kantor Pos dari tahun 2008 ke 2009 (sampai dengan bulan Juni) sebesar 0,37%. Peningkatan ini adalah yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2008 hanya meningkat 0,06%. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah kantor pos cenderung mengalami penurunan terutama yang disebabkan penurunan pada jumlah kantor pos cabang dalam kota dan luar kota. Peningkatan jumlah kantor pos ini diduga terkait dengan peningkatan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kantor pos.

Setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kantor pos yaitu pemekaran wilayah (kabupaten dan kecamatan) yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan perlu direspon juga oleh PT. Pos dan peningkatan kebutuhan pelayanan untuk kegiatan bukan pos seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah dan penyalurannya diantaranya melalui kantor pos

Namun perkembangan jumlah kantor pos tersebut juga menunjukkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 dalam komposisi kantor pos yang dikelola oleh PT. Pos meskipun selama lima tahun sebelumnya cenderung stagnan. Perubahan paling banyak terjadi pada Kantor Pos Cabang (Kabupaten) dan Kantor Pos Cabang (Luar Kota). Jika dilihat dari pola perubahannya, tampak bahwa banyak Kantor Pos Cabang (Luar Kota) yang berubah status menjadi Kantor Pos Cabang (Kabupaten). Hal ini terlihat dari penambahan yang signifikan dari tahun 2008 ke 2009 untuk Kantor Pos Cabang (Kabupaten). Sebaliknya terjadi penurunan yang signifikan pada Kantor Pos Cabang (Luar Kota).

b. Distribusi Jumlah Kantor Pos Tahun 2004-2009

Jika dilihat pola persebarannya, jumlah kantor pos paling banyak terdapat pada wilayah Pulau Jawa khususnya pada wilayah pos (Wilpos) VI dan VII. Jumlah kantor pos terbanyak ada di wilayah Pos VI yang mencakup propinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, disusul oleh wilpos VII yang mencakup wilayah Jawa Timur. Sementara untuk wilayah luar Jawa, jumlah kantor pos paling banyak berada di wilayah pos IX yang mencakup seluruh wilayah

Kalimantan, disusul wilayah pos III yang mencakup Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung) seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2. Namun dari sisi kepadatan, wilayah Pos IV yang meliputi Banten, DKI Jakarta plus Bogor dan Bekasi merupakan daerah dengan kepadatan kantor pos yang tinggi.

Banyaknya jumlah kantor pos di wilayah pos IV adalah wajar mengingat wilayah tersebut juga memiliki aktivitas sosial ekonomi yang tinggi dan membutuhkan pelayanan pos yang lebih banyak

Tabel 5.2. Perkembangan jumlah kantor Pos menurut Wilpos tahun 2004-2009

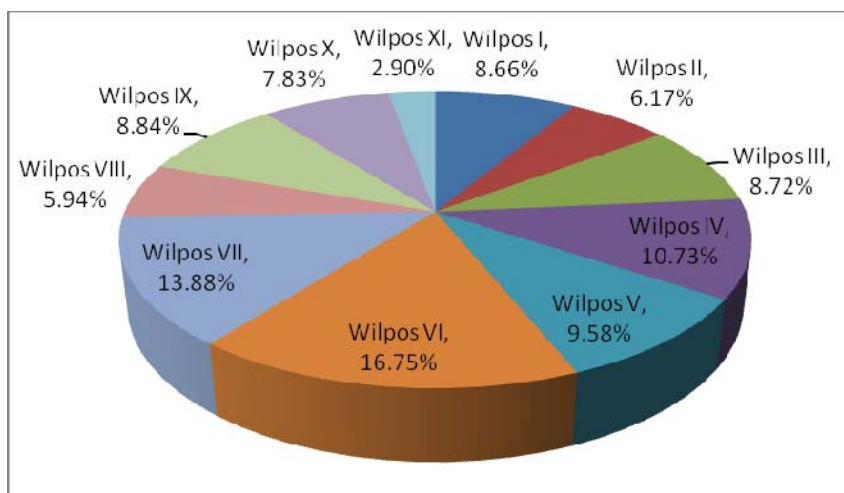
No.	Wilayah Pos	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	I	308	300	298	298	299	302
2	II	220	218	218	215	215	215
3	III	320	316	306	306	304	304
4	IV	338	331	375	375	374	374
5	V	387	383	338	338	334	334
6	VI	577	574	574	574	574	584
7	VII	488	485	484	484	484	484
8	VIII	210	207	205	206	207	207
9	IX	314	314	306	305	308	308
10	X	276	273	272	272	273	273
11	XI	109	109	99	99	101	101
Jumlah		3.547	3.510	3.475	3.472	3.473	3.486

*) Sampai Juni 2009

Sumber : PT. Pos Indonesia

Dari sisi proporsi terlihat bahwa jumlah kantor pos di wilpos VI mengambil proporsi 16,75% dari total kantor pos di Indonesia, disusul wilpos VII yang mencapai 13,88%. Jika didasarkan atas pulau juga terlihat bahwa jumlah kantor pos di pulau Jawa yang mencakup wilpos IV, V, VI dan VII mengambil lebih dari 50% dari total kantor pos di Indonesia. Sementara untuk wilpos XI yang mencakup wilayah Papua dan Maluku yang sebesar 2,90% dari jumlah kantor pos nasional.

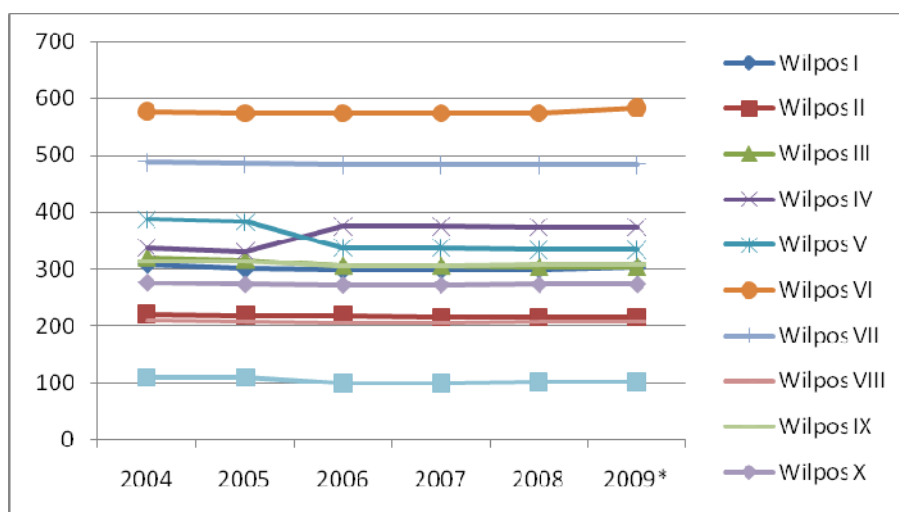
Gambar 5.2. Distribusi Kantor Pos (total) menurut Wilayah Pos sampai Juni 2009



Wilayah pos IV juga menjadi wilayah yang mengalami peningkatan jumlah kantor pos terutama dalam dua tahun terakhir dibanding wilayah lainnya. Pada saat jumlah kantor pos di wilayah lain berkurang jumlahnya atau hanya sedikit mengalami penambahan, jumlah kantor pos di wilpos IV justru meningkat.

Peningkatan jumlah kantor pos pada Wilpos IV pada saat Wilpos lain justru mengalami penurunan menunjukkan bahwa arah pengembangan penyediaan sarana kantor pos lebih didasarkan atas tingginya kebutuhan untuk mendukung dinamika dan kegiatan publik dibandingkan atas luaran area yang harus dilayani

Gambar 5.3. Trend perubahan jumlah Kantor Pos menurut Wilayah Pos 2004-2009



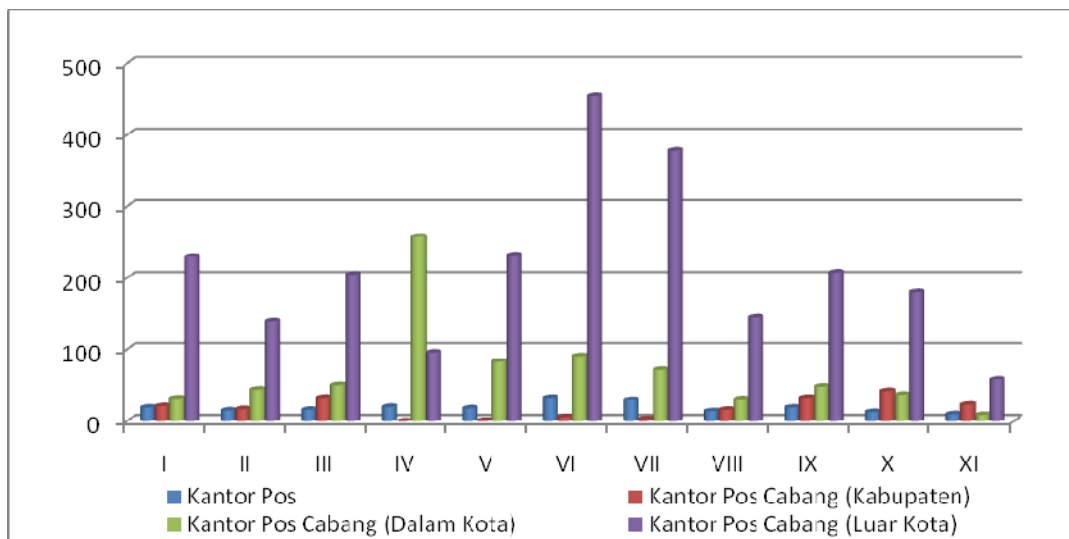
Jika dilihat dari sebaran menurut jenis Kantor Pos, terlihat bahwa pada wilayah pos IV paling banyak adalah jenis kantor pos cabang dalam kota, sementara pada wilpos lainnya paling banyak adalah kantor pos cabang luar kota seperti ditunjukkan pada Tabel 5.3. ***Hal ini wajar mengingat daerah-daerah di wilpos IV sebagian besar adalah daerah-daerah perkotaan sehingga kebutuhan kantor pos cabang paling banyak adalah untuk kantor pos cabang dalam kota.*** Tabel 5.3. juga memperlihatkan bahwa kantor pos cabang dalam kota juga lebih banyak pada wilayah pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

Tabel 5.3. Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Jenis dan Wilayah Pos 2009

No	Tahun	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Kantor Pos	19	15	16	20	18	33	30	14	19	13	10	207
2	Kantor Pos Cabang (Kabupaten)	21	17	33	0	1	6	3	16	33	42	23	195
3	Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)	32	44	50	258	83	91	72	31	48	37	9	755
4	Kantor Pos Cabang (Luar Kota)	230	139	205	96	232	454	379	146	208	181	59	2329
Jumlah		302	215	304	374	334	584	484	207	308	273	101	3486

*)Data Bulan Juni 2009

Gambar 5.4. Perbandingan jumlah kantor Pos antar Wilpos Pos menurut jenisTahun 2009



Berdasarkan gambar diagram histogram 4.4 terlihat pola persebaran sebagai berikut:

- Pada wilpos IV lebih didominasi oleh kantor pos cabang dalam kota. Kantor Pos cabang dalam kota juga terlihat lebih menonjol jumlahnya di wilpos IV, V, VII dan VII yang merupakan wilayah di pulau Jawa dibanding wilpos lainnya.

- Kantor pos cabang luar kota paling banyak juga terdapat di wilayah pulau Jawa terutama di wilpos VI dan VII yang secara total juga memiliki jumlah kantor pos paling banyak untuk semua jenis;
- Wilpos XI bersama Wilpos II dan VIII memiliki total jumlah kantor pos paling sedikit dibanding wilpos lainnya, terutama karena jumlah kantor pos cabang yang juga sedikit dibanding wilpos lainnya. Jika dikaitkan dengan luasan wilayah, maka kepadatan kantor pos di wilpos XI paling rendah dibandingkan dengan daerah lain;
- Dari pola persebaran yang ada, terlihat bahwa kepadatan penduduk dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat lebih menentukan dalam pengembangan kantor pos pada semua jenis. Hal ini terlihat dengan lebih banyaknya kantor pos untuk semua jenis di pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah lainnya.

5.3.1.2. Pelayanan Pos Bergerak

Pelayanan Pos Bergerak merupakan upaya PT. Pos untuk memperluas jangkauan pelayanan pos dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pos dalam bentuk penyediaan sarana dalam bentuk Pos Keliling Kota, Pos Keliling Desa, dan Pos Pasar Keliling (Pos Sarling). Dilihat dari jumlah unit, Pos Keliling Desa merupakan yang terbanyak hampir di semua wilayah, dibanding dengan bentuk pelayanan pos bergerak lainnya.

Banyaknya pos keliling desa ini disebabkan wilayah Indonesia yang lebih banyak berada pada wilayah perdesaan dibanding perkotaan. Disamping itu, akses penduduk desa yang lebih sulit terhadap pelayanan pos menyebabkan perlunya menyediakan sarana pelayanan pos bergerak yang lebih banyak bagi masyarakat

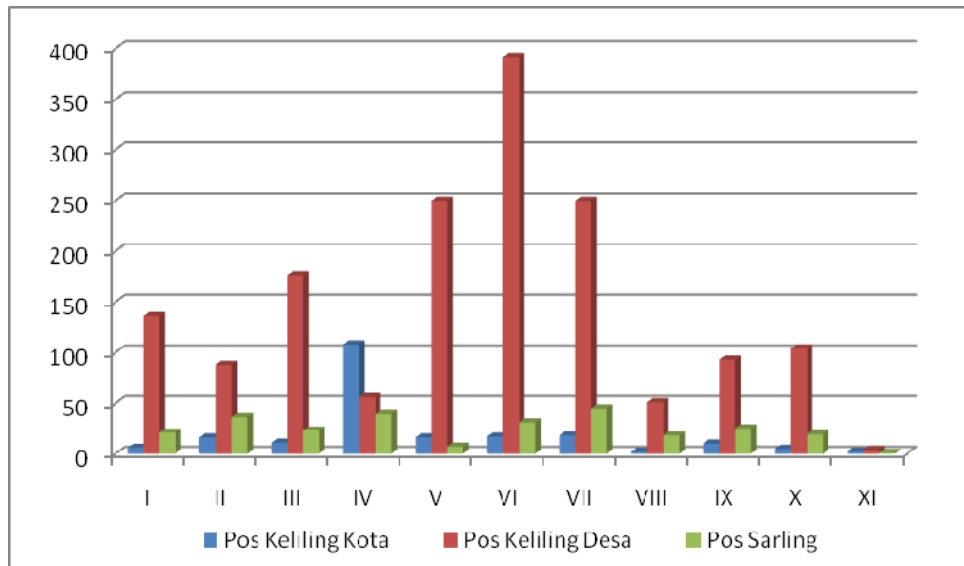
Tabel 5.4. Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Jenis dan Wilayah Pos 2009

No	Pos Pelayanan Bergerak	Satuan	Wilayah Pos											Jumlah
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Pos Keliling Kota	Unit	6	16	11	108	16	17	18	2	10	5	2	211
		Trayek	6	17	16	112	20	21	22	2	16	9	2	243
		Terminal	15	35	30	182	38	45	43	5	40	19	3	455
2	Pos Keliling Desa	Unit	136	88	176	56	250	392	250	51	93	104	4	1600
		Trayek	239	155	328	95	455	673	428	103	153	160	10	2799
		Terminal	440	446	546	212	1014	1432	919	211	285	329	28	5862
3	Pos Sarling	Unit	21	36	23	39	7	31	45	18	25	19	1	265
		Trayek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Terminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pos Pelayanan Bergerak	Unit	163	140	210	203	273	440	313	71	128	128	7	2076
		Trayek	245	172	344	207	475	694	450	105	169	169	12	3042
		Terminal	455	481	576	394	1052	1477	962	216	325	348	31	6317

*)Data Bulan Juni 2009

Dari sisi sebaran antar wilayah pos terlihat bahwa Kantor Pos bergerak paling banyak terjadi pada Wilayah Pos VI yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan DIY, diikuti dengan Wilpos V yang meliputi Wilpos Jawa Barat (minus Bogor dan Bekasi) dan Wilpos VII yang meliputi Jawa Timur. Sementara untuk daerah daerah luar Jawa, jumlah pos pelayanan bergerak masih relatif sedikit dengan jumlah kurang dari 500 pos pelayanan bergerak kecuali di Wilpos III yang meliputi 5 propinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Pada setiap wilayah pos, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.5 juga terlihat lebih banyak pelayanan pos bergerak dalam bentuk Pos Keliling Desa diikuti dengan Pos Sarling, namun dengan perbedaan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah pedesaan. Namun untuk wilayah pos IV, sarana pelayanan pos bergerak justru lebih banyak dalam bentuk Pos Keliling Kota karena daerah-daerah pada wilayah pos IV kebanyakan adalah wilayah perkotaan. Sebaliknya Pos Keliling Desa adalah pelayanan pos bergerak yang paling sedikit jumlahnya di wilayah tersebut.

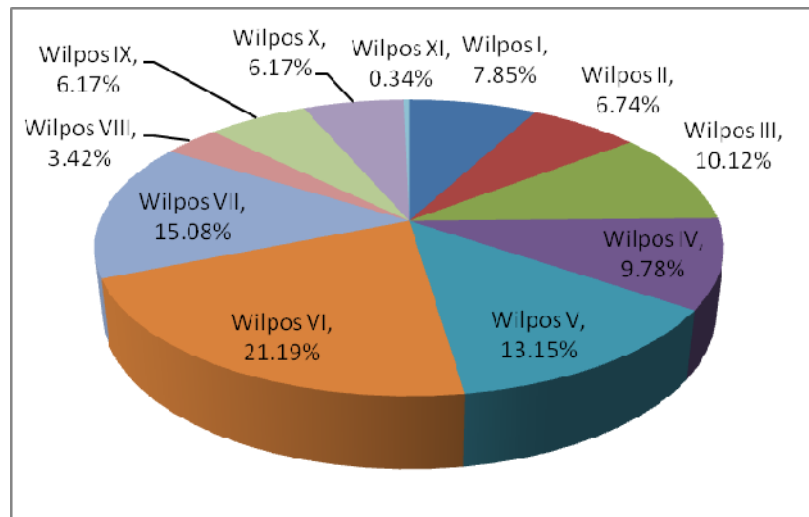
Gambar 5.5. Perbandingan jumlah Pelayanan Pos Bergerak antar Wilpos Pos menurut jenis Tahun 2009



Secara keseluruhan, meskipun memiliki luasan wilayah yang sempit, namun pelayanan pos bergerak paling banyak masih terdapat di wilpos-wilpos yang berada di Pulau Jawa seperti Wilpos IV, V, VI dan VII. Pada tahun 2009, di empat wilayah pos tersebut terdapat sekitar 59% dari total pelayanan pos bergerak dengan terbanyak berada dengan terbanyak berada di wilpos VI (Jawa Tengah-DIY). Sementara pada wilpos X dan XI yang meliputi Kawasan Timur Indonesia hanya kurang dari 7% pelayanan pos bergerak. Bahkan di wilayah pos Papua dan Maluku, kurang dari 1% wilayah pos. Dari sini terlihat bahwa penyediaan pelayanan pos bergerak lebih didasarkan kepada jumlah atau kepadatan penduduk yang dilayani daripada luasan wilayah.

Dalam konteks mendorong pertumbuhan diluar Jawa, seharusnya peningkatan jumlah pelayanan pos bergerak ini lebih didorong ke luar Jawa dan tidak lagi terpusat di Jawa

Gambar 5.6. Proporsi jumlah pelayanan pos bergerak antar Wilpos Tahun 2009



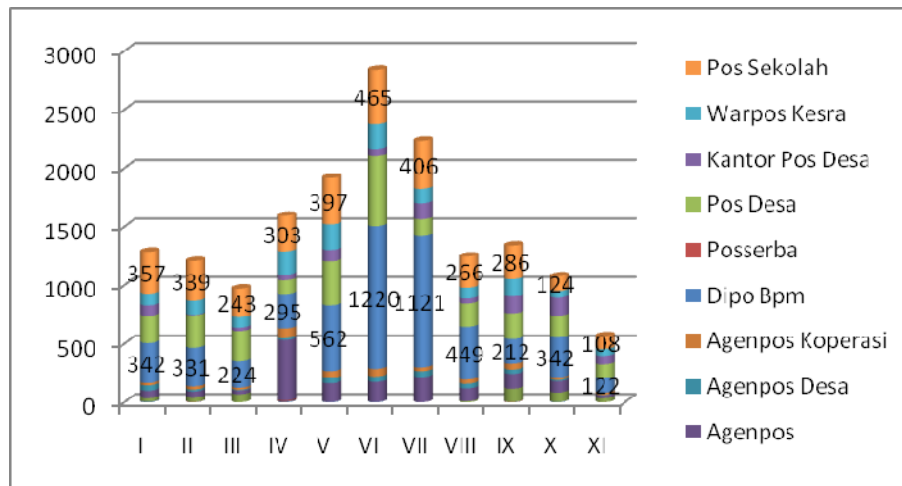
5.3.1.3. Pelayanan Pos Lainnya

Selain dalam bentuk kantor pos, pelayanan perposan di Indonesia oleh PT. Pos dilakukan juga melalui bentuk pelayanan pos lainnya untuk dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Terdapat 12 bentuk pelayanan pos lainnya dari mulai waralaba, pos, mailing room, agen pos sampai dengan warpos Kesra dan Pos sekolah. Diantara bentuk pelayanan tersebut, bentuk pelayanan pos lainnya yang paling banyak adalah pelayanan dalam bentuk Dipo BPM, diikuti dengan pos sekolah. **Banyaknya Dipo BPM hampir pada seluruh daerah karena sifat dari Dipo BPM yang penyelenggaraanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu (tidak harus PT. Pos) atas izin PT. Pos untuk melakukan penjualan benda pos dan materei sesuai harga nominal. Hal ini memungkinkan pihak lain ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Dipo BPM untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak.**

Tabel 5.5. Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Lainnya menurut jenis dan Wilayah Pos 2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Waralaba	5	1	0	6	3	3	1	0	1	3	0	23
2	Mailling Room	0	2	0	10	0	0	0	0	2	0	1	15
3	Rumahpos	30	35	68	0	0	0	0	9	113	80	33	368
4	Agenpos	64	54	32	517	159	171	215	110	127	97	27	1.573
5	Agenpos Desa	46	17	7	15	45	47	49	40	37	12	3	318
6	Agenpos Koperasi	20	27	18	83	59	64	32	36	49	21	18	427
7	Dipo Bpm	342	331	224	295	562	1.220	1.121	449	212	342	122	5.220
8	Posserba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pos Desa	233	277	259	117	375	596	145	199	219	184	119	2.723
10	Kantor Pos Desa	88	5	29	47	99	64	136	43	145	154	75	885
11	Warpos Kesra	101	118	91	200	218	213	127	93	147	59	59	1.426
12	Pos Sekolah	357	339	243	303	397	465	406	266	286	124	108	3.294
	Jumlah	1.286	1.206	971	1.593	1.917	2.843	2.232	1.245	1.338	1.076	565	16.272

Gambar 5.7. Jumlah pelayanan pos lainnya antar Wilpos Tahun 2009



Pada beberapa daerah dengan jumlah penduduk maupun desa yang banyak seperti di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, jumlah Dipo BPM ini jauh lebih banyak daripada bentuk pelayanan pos lainnya. Namun pada daerah lainnya seperti di Wilpos III, IV, VIII dan IX, pelayanan pos lainnya dalam bentuk Pos Sekolah lebih banyak daripada Dipo BPM meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Jika dilihat berdasarkan pulau, terlihat bahwa di Pulau Jawa penyelenggaraan Dipo BPM lain banyak dilakukan.

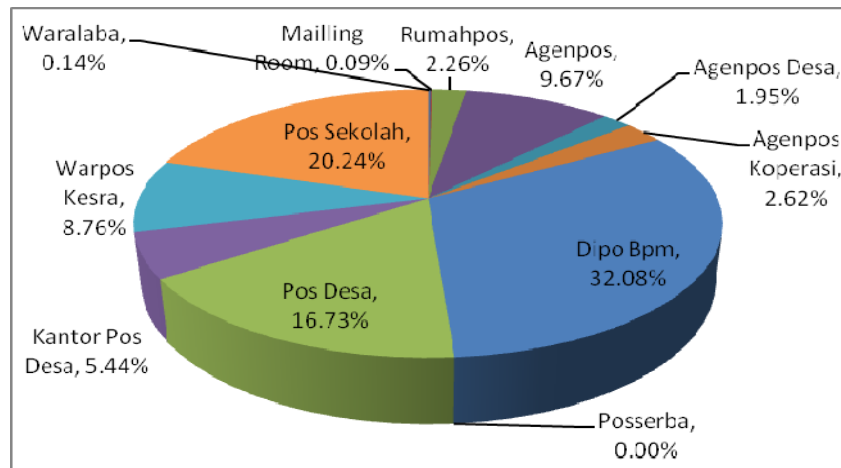
Jumlah Dipo BPM yang jauh lebih banyak pada wilpos di Jawa menunjukkan bahwa di pulau Jawa, ketertarikan dan keterlibatan pihak lain dalam penyelenggaraan pos lainnya jauh lebih besar dibanding pulau lainnya. Hal ini juga terkait dengan pasar untuk benda pos ini yang sangat besar di pulau Jawa dibanding pulau lainnya.

Tabel 5.6. Sebaran Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis dan Pulau Tahun 2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah kepulauan						Jumlah
		Suma- tera	Jawa	Bali, NTB, NTT	Kaliman- tan	Sula- wesi	Maluku, Irian	
1	Waralaba	6	13	0	1	3	0	23
2	Mailling Room	2	10	0	2	0	1	15
3	Rumahpos	133	0	9	113	80	33	368
4	Agenpos	150	1.062	110	127	97	27	1.573
5	Agenpos Desa	70	156	40	37	12	3	318
6	Agenpos Koperasi	65	238	36	49	21	18	427
7	Dipo Bpm	897	3.198	449	212	342	122	5.220
8	Posserba	0	0	0	0	0	0	0
9	Pos Desa	769	1.233	199	219	184	119	2.723
10	Kantor Pos Desa	122	346	43	145	154	75	885
11	Warpos Kesra	310	758	93	147	59	59	1.426
12	Pos Sekolah	939	1.571	266	286	124	108	3.294
	Jumlah	3.463	8.585	1.245	1.338	1.076	565	16.272

Secara total, proporsi jumlah Dipo BPM mencapai 32% dari jenis pelayanan pos lainnya, diikuti oleh pos sekolah yang mencapai 20,24% dan Pos Desa sebesar 16,73%. Perkembangan ini juga menunjukkan cukup besarnya keterlibatan dan partisipasi pihak lain diluar PT. Pos dalam pelayanan kepada masyarakat meskipun masih sebatas dalam bentuk penjualan benda pos dan materai. **Sementara partisipasi pelayanan untuk jasa pos lainnya yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan agen pos, agen pos desa dan agen pos koperasi masih rendah (kurang dari 15%) dan hanya menonjol di perkotaan.** Gambar 5.8 menunjukkan bahwa bentuk pelayanan pos lainnya dalam bentuk agen pos mencapai 9,67% sementara agen pos desa hanya 1,95%.

Gambar 5.8. Proporsi Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis Tahun 2009



5.3.1.4. Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya

Selain melalui kantor pos dan pelayanan pos lainnya, pelayanan perposan kepada masyarakat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fasilitas pelayanan pos lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah Kotak Pos (PO Box), Tromol Pos, Bis Surat dan Peri Pos yang pemanfaatannya bersifat umum maupun pemanfaatan khusus oleh badan usaha/perorangan terhadap suatu fasilitas pelayanan seperti Kotak Pos dan Tromol Pos. Tabel 5.7. menunjukkan tidak terjadi penambahan fasilitas pelayanan pos lainnya dalam lima tahun terakhir pada semua jenis fasilitas pelayanan pos lainnya.

Bahkan tingkat pemanfaatan dari kotak pos yang disediakan juga tidak mengalami peningkatan. Sejak tahun 2004, tingkat pemanfaatan oleh pihak lain terhadap fasilitas kotak pos yang disediakan hanya stagnan pada tingkat 65%.

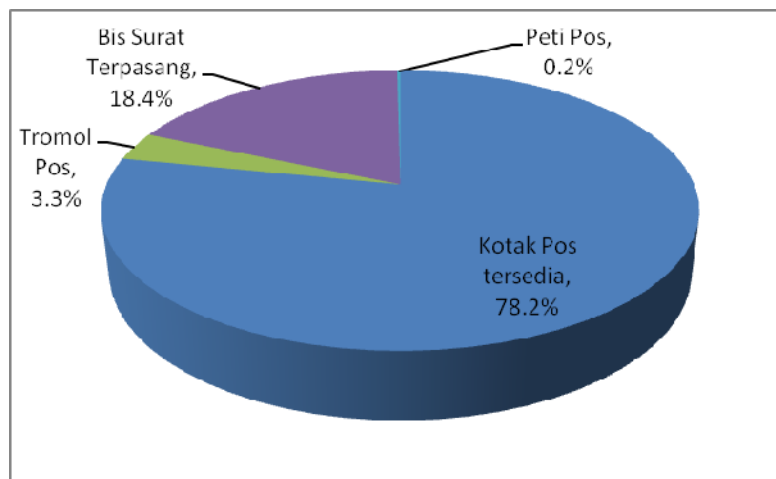
Tabel 5.7. Perkembangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya 2004-2009*

	Fasilitas Pos	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Kotak Pos tersedia	77.768	77.768	77.768	77.768	77.768	77.768
2	Kotak Pos Disewa	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560
3	Tromol Pos	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
4	Bis Surat Terpasang	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
5	Peti Pos	199	199	199	199	199	199
	Jumlah	99.497	99.497	99.497	99.497	99.497	99.497

*)Sampai Bulan Juni 2009

Dari sisi sebaran jumlah, fasilitas pos lainnya yang paling banyak disediakan oleh PT. Pos adalah dalam bentuk kotak pos tersedia yang mencapai 77.768 buah atau 78,2% dari total fasilitas pelayanan pos yang disediakan. Gambar diagram 5.9 menunjukkan bahwa proporsi bis surat terpasang hanya mencapai 18,4% dari fasilitas pelayanan pos yang tersedia. Proporsi jumlah fasilitas pelayanan yang lebih banyak untuk kotak pos dapat dipahami mengingat penyediaanya relatif mudah dan tersebar pada Kantor pos serta memberikan sumber pendapatan bagi PT. Pos melalui penyewaan fasilitas pelayanan Kotak Pos tersebut.

Gambar 5.9. Proporsi fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009



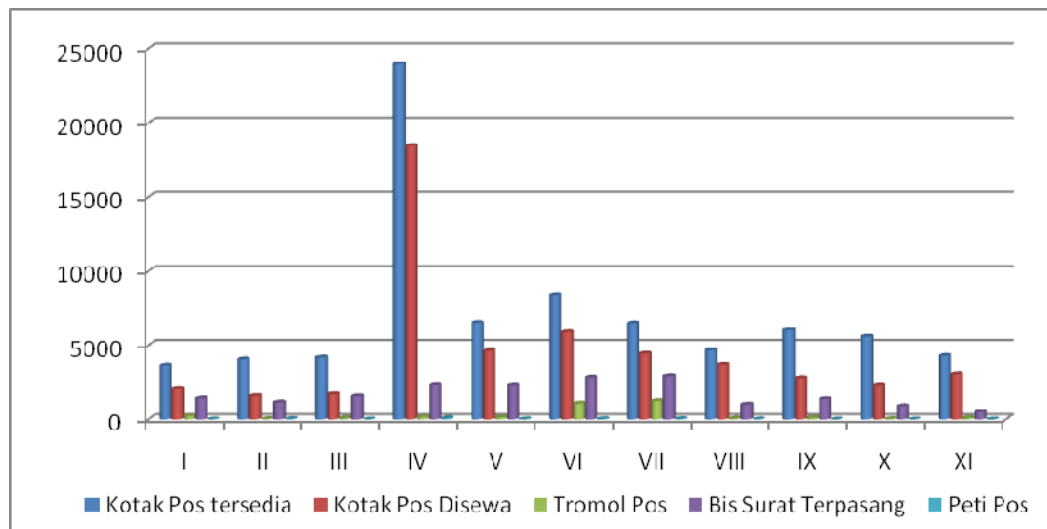
Jumlah fasilitas kotak pos yang lebih banyak dibanding fasilitas lainnya juga terjadi pada semua wilayah pos dan semua pulau. Jumlah penyediaan kotak pos bahkan sangat tinggi pada daerah-daerah perkotaan seperti pada wilayah pos IV yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah perkotaan. Pada wilayah pos IV ini, proporsi fasilitas kotak pos tersedia mencapai 90% dari total fasilitas pos lainnya yang disediakan PT. Pos seperti ditunjukkan oleh Tabel 5.8. Jumlah kotak pos tersedia di wilayah pos IV ini jauh lebih banyak daripada wilayah pos lainnya. Namun untuk fasilitas dalam bentuk Tromol pos, penyediaan yang jauh lebih banyak dibanding wilayah pos lainnya justru terdapat di wilayah pos VI dan VII dengan karakteristik wilayah pedesaan padat penduduk. Jumlah tromol pos pada kedua wilayah pos ini bahkan jauh lebih banyak daripada wilayah pos IV dan V yang juga berada di pulau Jawa.

Tabel 5.8. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos 2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Kotak Pos tersedia	3.658	4.058	4.181	23.971	6.514	8.365	6.486	4.661	6.009	5.578	4.287	77.768
2	Kotak Pos Disewa	2.090	1.570	1.693	18.465	4.613	5.879	4.438	3.704	2.766	2.321	3.021	50.560
3	Tromol Pos	218	35	89	169	143	1.073	1.237	69	112	30	95	3.270
4	Bis Surat Terpasang	1.419	1.154	1.550	2.338	2.321	2.812	2.898	1.004	1.366	901	497	18.260
5	Peti Pos	6	33	1	84	9	24	27	7	5	3	0	199
	Jumlah *	5.301	5.280	5.821	26.562	8.987	12.274	10.648	5.741	7.492	6.512	4.879	99.497

*) tidak termasuk Kotak Pos Disewa

Gambar 5.10. Sebaran fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009



Dari sebaran menurut pulau, terlihat pada Tabel 5.9 bahwa fasilitas pelayanan pos lainnya hampir terpusat di Jawa untuk semua jenis fasilitas pelayanan pos yang disediakan PT. Pos. Secara total, sekitar 58,8% fasilitas pelayanan PT. Pos terdapat di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Sumatera hanya 16,5% dan di Papua dan Maluku hanya 4,9%. Bahkan untuk jenis pelayanan tromol pos di Pulau Jawa mencapai 80% dan untuk Peti Pos mencapai 72,4%.

Dari sebaran ini terlihat bahwa penyediaan fasilitas pelayanan pos memang masih dipusatkan di Jawa disamping karena jumlah penduduk yang lebih besar dan aktivitas sosial-ekonomi yang lebih tinggi sehingga diperkirakan membutuhkan dukungan pelayanan perposan lainnya yang lebih besar

Tabel 5.9. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Pulau 2009

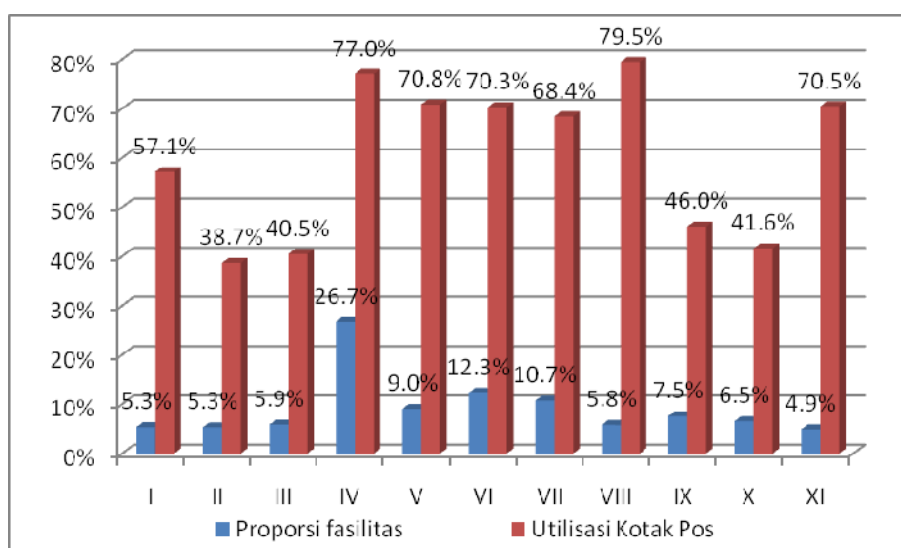
No	Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah kepulauan						Jumlah
		Suma- tera	Jawa	Bali, NTB, NTT	Kaliman- tan	Sula- wesi	Maluku, Irian	
1	Kotak Pos tersedia	11.897	45.336	4.661	6.009	5.578	4.287	77.768
2	Kotak Pos Disewa	5.353	33.395	3.704	2.766	2.321	3.021	50.560
3	Tromol Pos	342	2.622	69	112	30	95	3.270
4	Bis Surat Terpasang	4.123	10.369	1.004	1.366	901	497	18.260
5	Peti Pos	40	144	7	5	3	0	199
	Jumlah *	16.402	58.471	5.741	7.492	6.512	4.879	99.497

*) Tidak termasuk Kotak Pos Disewa

Sebaran menurut wilayah pos juga menunjukkan bahwa untuk keseluruhan fasilitas pelayanannya juga lebih banyak di wilayah pos yang berada di pulau Jawa seperti wilayah pos IV dan VI meskipun tidak terlalu dominan. Gambar 5.9. menunjukkan fasilitas pos lainnya di wilayah pos IV mencapai 26,7% dari total pelayanan pos lainnya diseluruh wilpos.

Dari sisi pemanfaatan atas fasilitas pelayanan dalam bentuk kotak pos yang tersedia menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan kotak pos yang disediakan oleh PT. Pos baru mencapai 65%. Namun tingkat pemanfaatan tertinggi justru berada di wilayah pos VIII yang mencakup wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 79,5%, diikuti oleh wilayah pos IV yang mencakup wilayah Jabotabek dan Banten. Wilayah perkotaan dengan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi ternyata tidak menjadikan tingkat pemanfaatan kotak pos di wilayah pos ini menjadi paling tinggi. **Tingginya pemanfaatan kotak pos di wilayah pos VIII ini diperkirakan karena tingginya industri pariwisata dan kegiatan pendukungnya, termasuk perdagangan barang kerajinan yang banyak berhubungan dengan pihak luar negeri.** Hal yang menarik juga adalah tingginya tingkat utilisasi kotak pos di Wilpos XI yang mencakup Papua dan NTT yang mencapai 70,5%. Sementara di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tingkat utilitasnya tergolong rendah yaitu dibawah 50% kecuali untuk Wilpos I. Namun secara keseluruhan, wilayah Jawa masih memiliki tingkat utilisasi Kotak Pos yang paling tinggi.

Gambar 5.9. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilpos 2009



5.4.2. Jangkauan Pelayanan Pos.

Jangkauan pelayanan pos yang dilakukan oleh PT. Pos dapat dibagi menjadi tiga yaitu jangkauan pelayanan pos di Kecamatan, Jangkauan pelayanan pos di lokasi transmigrasi dan jangkauan pelayanan pos di Kelurahan/Desa.

a. Pelayanan Di Kecamatan

Untuk menjangkau pelayanan di tingkat kecamatan dilakukan melalui Kantor Pos, Kantor Pos Cabang (Kabupaten, Dalam Kota, Luar Kota), Kantor Pos Desa dan Kantor Pos Keliling. Tabel 5.10. menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah kecamatan dari tahun 2004 ke 2009, seluruh wilayah kecamatan telah dilayani oleh pelayanan pos. Peningkatan jangkauan pelayanan untuk merespon peningkatan jumlah kecamatan paling banyak dilakukan melalui pelayanan oleh Kantor Pos Cabang dalam kota. Sementara untuk pelayanan melalui Kantor Cabang Luar Kota justru mengalami penurunan. **Namun pada 2009, peningkatan paling banyak dalam pelayanan dilakukan oleh kantor pos cabang kabupaten yang merupakan perubahan dari pelayanan yang semula dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota (terjadi perubahan status dari kantor pos cabang luar kota menjadi kantor pos cabang kabupaten).**

Tabel 5.10. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Kecamatan 2004-2009

No	Jangkauan Pelayanan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Jumlah Kecamatan	3.782	3.790	3.791	3.823	3.896	3.900
2	Dilayani Kp- I-VI (Kprk)	206	206	206	206	206	206
3	Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab	88	88	88	88	88	195
4	Dilayani Kp-VI-X Cab/DK	287	289	285	286	292	292
5	Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk	2.258	2.256	2.233	2.228	2.238	2.136
6	Dilayani Kantor Pos Desa	854	853	852	873	875	874
7	Dilayani Pos Keliling Kota/Desa	89	98	127	142	197	197
8	Jumlah Kec. Dilayani	3.782	3.790	3.791	3.823	3.896	3.900
9	Jumlah Kec. Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0

*) Sampai Juni 2009

Dilihat dari sebaran antar wilayah pos, jangkauan pelayanan pos di kecamatan paling banyak terdapat di wilayah pos VI dan VII yang meliputi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah kecamatan yang banyak pada kedua wilayah tersebut. Pelayanan di tingkat kecamatan pada kedua wilayah pos tersebut maupun wilayah pos lainnya juga paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota dibandingkan unit pelayanan lainnya.

Tabel 5.11. Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan di Wilayah Usaha Pos Tahun 2009

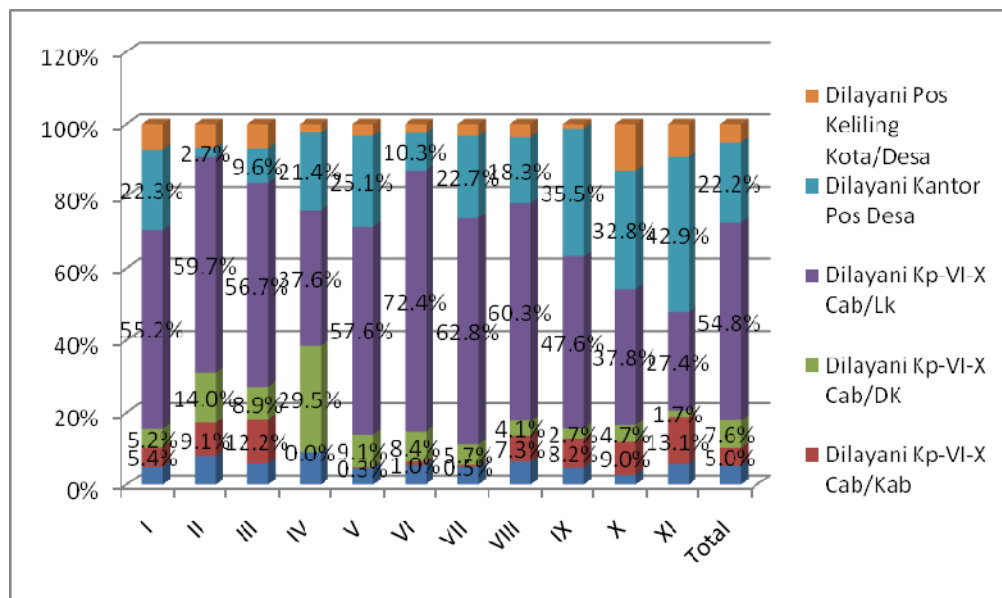
No	Jangkauan Pelayanan di Kecamatan	Wilayah Pos											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Kecamatan	386	186	270	210	394	609	599	219	403	466	175	3.917
2	Dilayani Kp- I-VI (Kprk)	19	15	16	19	18	33	30	14	19	13	10	206
3	Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab	21	17	33	0	1	6	3	16	33	42	23	195
4	Dilayani Kp-VI-X Cab/DK	20	26	24	62	36	51	34	9	11	22	3	298
5	Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk	213	111	153	79	227	441	376	132	192	176	48	2.148
6	Dilayani Kantor Pos Desa	86	5	26	45	99	63	136	40	143	153	75	871
7	Dilayani Pos Keliling Kota/Desa	27	12	18	5	13	15	20	8	5	60	16	199
8	Jumlah Kec. Dilayani	386	186	270	210	394	609	599	219	403	466	175	3.917
9	Jumlah Kec. Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 5.10. menunjukkan bahwa pada hampir semua Wilpos, pelayanan paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota. Namun untuk wilayah pos IV, pelayanan di kecamatan oleh kantor pos cabang luar kota tidak berbeda banyak dengan pelayanan oleh kantor pos cabang dalam kota. Dari diagram tersebut juga terlihat bahwa pelayanan di kecamatan yang dilakukan oleh kantor pos desa juga cukup signifikan terutama di Indonesia Timur seperti Wilpos X dan XI yang meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua, juga pada wilpos

IX yang mencakup wilayah Kalimantan. Pola ini menunjukkan bahwa peran Kantor Pos Desa cukup besar dalam menjangkau pelayanan pos untuk tingkat kecamatan.

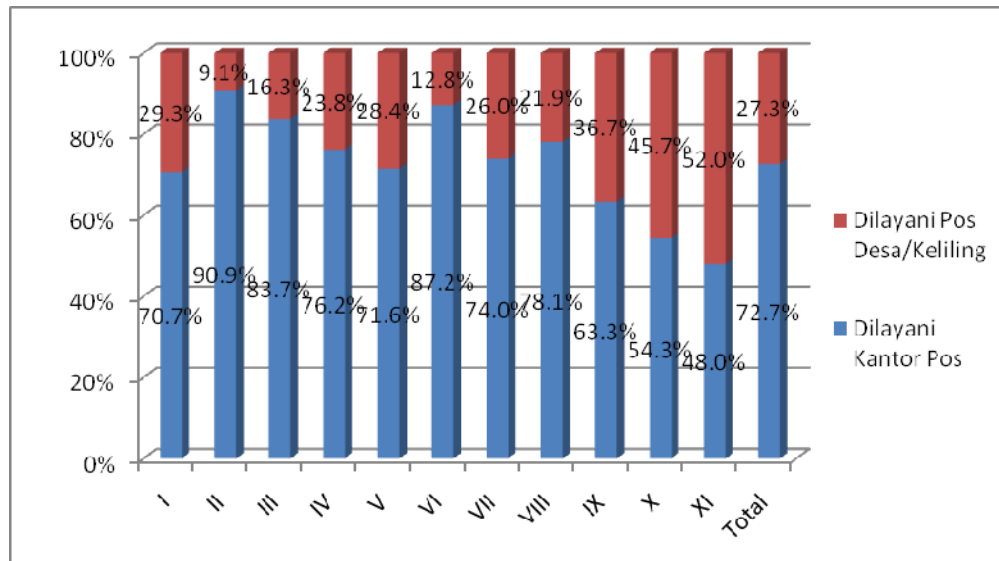
Pola ini menunjukkan bahwa peran Kantor Pos Desa cukup besar dalam menjangkau pelayanan pos untuk tingkat kecamatan.

Gambar 5.10. Komposisi Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan menurut Wilpos tahun 2009



Jika dibandingkan jangkauan pelayanan pos di kecamatan antara pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pos dengan Pos Desa atau Pos keliling, nampak bahwa pelayanan di kecamatan masih lebih banyak dilakukan oleh kantor pos baik kantor pos cabang kabupaten maupun cabang dalam kota/luar kota. Proporsi pelayanan oleh kantor pos untuk jangkauan pelayanan di Kecamatan mencapai 72,7%. Pelayanan melalui kantor pos cabang untuk pelayanan di Kecamatan terutama banyak dilakukan di wilayah pos II, III dan VI yang proporsinya mencapai lebih dari 80%. Namun untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia, pelayanan oleh pos desa atau pos keliling cukup signifikan. Bahkan untuk wilayah pos XI yang meliputi Papua dan Maluku, jangkauan pelayanan di kecamatan lebih banyak dilakukan oleh kantor pos desa dan pos keliling dibanding kantor pos cabang.

Gambar 5.11. Perbandingan jangkauan pelayanan kecamatan antar Kantor Pos dengan Pos Keliling menurut Wilpos tahun 2009



Dari pola pelayanan yang ada terlihat bahwa keberadaan Pos Desa dan Pos Keliling cukup efektif untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama di Kawasan Timur Indonesia

b. Pelayanan di Lokasi Transmigrasi

Jangkauan pelayanan di lokasi transmigrasi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam lima tahun. Hal ini karena jumlah lokasi transmigrasi yang juga tidak mengalami peningkatan (tidak ada lagi permukaan daerah transmigrasi baru) sehingga PT. Pos tidak meresponnya dengan peningkatan jumlah pelayanan untuk menjangkau lokasi transmigrasi. Namun tabel 5.12 juga menunjukkan bahwa seluruh lokasi transmigrasi sudah terjangkau pelayanan pos dalam lima tahun terakhir. Penurunan pelayanan oleh pos keliling diimbangi dengan peningkatan pelayanan oleh rumah pos dan agen pos desa.

Tabel 5.12. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi 2004-2009

No	Jangkauan Pelayanan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Jumlah Lokasi Transmigrasi	951	951	951	951	951	951
2	Dilayani Kantor Pos Cab LK	242	243	243	243	243	243
3	Dilayani Kantor Pos Desa	6	6	6	6	6	6
4	Dilayani Pos Keliling	293	293	293	293	288	288
5	Dilayani Rumah Pos	405	404	404	404	407	407
6	Dilayani Agenpos Desa	5	5	5	5	7	7
7	Jumlah Lokasi Dilayani	951	951	951	951	951	951
8	Jumlah Lokasi Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0

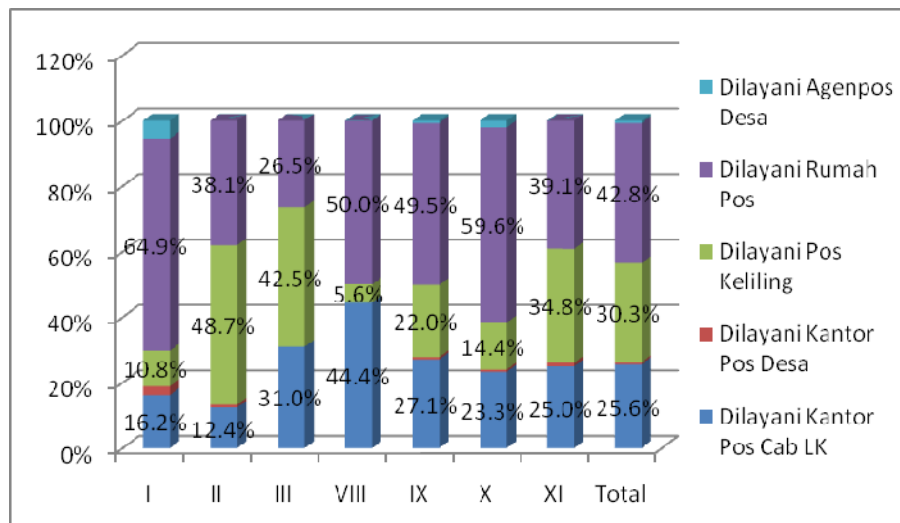
*) sampai Juni 2009

Pelayanan untuk lokasi transmigrasi paling banyak dilakukan melalui rumah pos dan pos keliling. Untuk menjangkau wilayah yang cukup jauh dan penduduk yang tidak terlalu padat, pelayanan melalui pos keliling dan rumah pos memang merupakan cara yang paling efektif dan efisien dari sisi biaya dan kebutuhan sarana dan SDM. Gambar 5.12 menunjukkan secara keseluruhan pelayanan di lokasi transmigrasi yang dilakukan melalui rumah pos mencapai 42,8% dan yang melalui pos keliling mencapai 30,3% dari total jangkauan pelayanan. Hampir semua wilpos yang memiliki lokasi transmigrasi, pelayanan paling banyak dilakukan melalui rumah pos, kecuali untuk Wilpos III dan II yang lebih banyak dilakukan oleh pos keliling. Bahkan untuk Wilpos III, selain melalui Pos Keliling, pelayanan untuk lokasi transmigrasi berikutnya paling banyak dilakukan melalui Kantor Pos Cabang Luar Kota. Pelayanan oleh kantor pos cabang luar kota juga banyak dilakukan di wilpos IX.

Tabel 5.13. Jangkauan Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi di Wilayah Pos Tahun 2009

No	Jangkauan Pelayanan	Wilayah Pos											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Lokasi Transmigrasi	37	113	268	0	0	0	0	18	277	146	92	951
2	Dilayani Kantor Pos Cab LK	6	14	83	0	0	0	0	8	75	34	23	243
3	Dilayani Kantor Pos Desa	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6
4	Dilayani Pos Keliling	4	55	114	0	0	0	0	1	61	21	32	288
5	Dilayani Rumah Pos	24	43	71	0	0	0	0	9	137	87	36	407
6	Dilayani Agenpos Desa	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	7
7	Jumlah Lokasi Dilayani	37	113	268	0	0	0	0	18	277	146	92	951
8	Jumlah Lokasi Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 5.12. Proporsi Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi menurut Wilpos tahun 2009



c. Jangkauan Pelayanan di Desa.

Jangkauan pelayanan di desa oleh PT Pos dilakukan melalui berbagai unit pelayanan mulai dari kantor pos, kantor pos cabang, pos keliling, agen pos sampai warung pos. Tabel 5.14 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah desa dengan adanya berbagai pemekaran wilayah administratif (dari kabupaten sampai kecamatan dan desa), belum sepenuhnya dapat direspon oleh pelayanan pos yang menjangkau desa. Jumlah desa meningkat cukup besar dari 68.298 sampai tahun 2006 menjadi 70.629 (3,4%) pada tahun 2007.

Tabel 5.14. Perkembangan Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa Tahun 2004-2009

No	Jangkauan Pelayanan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Jumlah Kelurahan/Desa	68.298	68.298	68.298	68.298	70.629	70.629
2	Dilayani KPrk	6.045	6.045	6.045	6.045	5.705	5.705
3	Dilayani Kantor Pos Cabang Luar Kota	9.718	9.698	9.578	9.554	10.888	10.516
4	Dilayani Kantor Pos Desa	2.584	2.581	2.578	2.617	3.558	3.552
5	Dilayani Pos Keliling Desa	11.466	11.466	5.810	5.445	5.307	5.307
6	Dilayani Pos Desa	2.994	2.986	2.940	2.864	2.759	2.759
7	Dilayani Agenpos Desa	422	422	422	422	430	430
8	Dilayani Warpos Kesra	1.256	1.252	1.252	1.252	1.220	1.220
9	Jumlah Kel/Desa Terjangkau	34.485	34.450	28.625	28.199	29.867	29.489
10	% Kel/Desa Terjangkau	50,49	50,44	41,91	41,29	42,29	41,75
11	Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau	33.813	33.848	39.673	40.099	40.762	41.140
12	% Kel/Desa Belum Terjangkau	49,51	49,56	58,09	58,71	57,71	58,25

*) sampai Juni 2009

Meskipun jumlah desa yang terjangkau layanan juga meningkat sebesar 4,6%, namun tingkat keterjangkauan desa terhadap pelayanan pos mengalami penurunan terutama sejak tahun 2006.

Tabel 5.14 menunjukkan tingkat pencapaian desa yang terjangkau pelayanan pos menurun dari 50,44% pada 2005 menjadi 41,91% pada 2006 dan tidak banyak berubah dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh berkurang drastisnya pelayanan yang dilakukan melalui pos keliling desa sejak tahun 2006 dengan penurunan hampir 50%. Peningkatan jumlah desa yang harus dilayani bahkan justru diikuti dengan semakin menurunnya pelayanan melalui pos keliling desa yang sebenarnya sangat diandalkan untuk menjangkau pelayanan di desa. Pelayanan pos untuk menjangkau desa yang semula mengandalkan pos keliling kini lebih banyak mengandalkan kantor pos cabang luar kota yang jumlahnya juga terus meningkat.

Jika dilihat dari sebaran jangkauan pelayanan pos di desa menurut wilayah pos, terlihat bahwa jangkauan pelayanan pos didesa hanya cukup tinggi untuk desa-desa di wilayah pos IV sampai VI yang berada di pulau Jawa. Namun pada tahun 2009, jangkauan pelayanan pos di desa untuk wilayah pos VIII (Bali, Nusa Tenggara) dan X (Sulawesi) juga telah mencapai lebih dari 50%. Dari jenis pelayanan yang dilakukan untuk menjangkau desa, pada seluruh wilpos di tahun 2009 ini paling banyak melalui kantor pos cabang luar kota. Secara keseluruhan, pelayanan melalui kantor pos cabang luar kota ini mencapai 35,7%, diikuti oleh pelayanan pos keliling yang hanya mencapai 18%

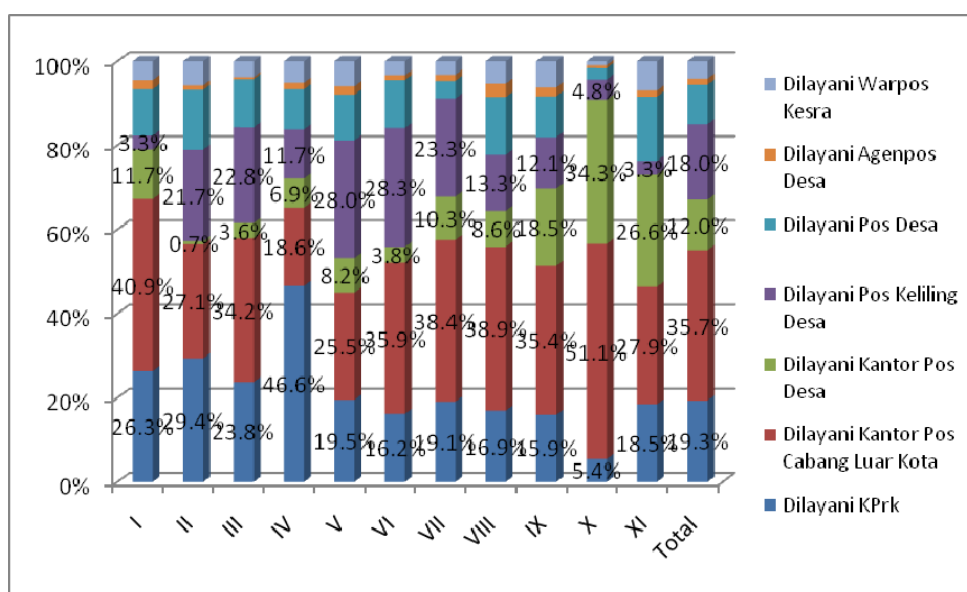
Jangkauan pelayanan pos didesa hanya cukup tinggi untuk desa-desa di wilayah pos IV sampai VI yang berada di pulau Jawa

Tabel 5.15. Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa di Wilayah Usaha Pos Tahun 2009

No	Jangkauan Pelayanan	Wilayah Pos											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Kelurahan/Desa	11334	4795	7176	2110	5244	8903	8379	2905	9588	7337	2858	70629
2	Dilayani KPrk	592	602	570	655	710	818	753	254	374	221	156	5705
3	Dilayani Kantor Pos Cabang Luar Kota	920	556	820	262	928	1816	1516	584	832	2078	236	10548
4	Dilayani Kantor Pos Desa	264	15	87	97	297	192	408	129	435	1394	225	3543
5	Dilayani Pos Keliling Desa	75	446	546	164	1018	1432	919	199	285	195	28	5307
6	Dilayani Pos Desa	248	292	274	134	395	577	165	206	229	110	129	2759
7	Dilayani Agenpos Desa	49	22	12	22	72	58	58	48	49	28	12	430
8	Dilayani Warpos Kesra	101	118	91	72	218	168	127	80	147	39	59	1220
9	Jumlah Kel/Desa Terjangkau	2249	2051	2400	1406	3638	5061	3946	1500	2351	4065	845	29512
10	% Kel/Desa Terjangkau	19.84	42.8	33.4	66.6	69.4	56.9	47.1	51.6	24.5	55.4	29.6	41.78
11	Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau	9085	2744	4776	704	1606	3842	4433	1405	7237	3272	2013	41117
12	% Kel/Desa Belum Terjangkau	80.16	57.2	66.6	33.4	30.6	43.2	52.9	48.4	75.5	44.6	70.4	58.22

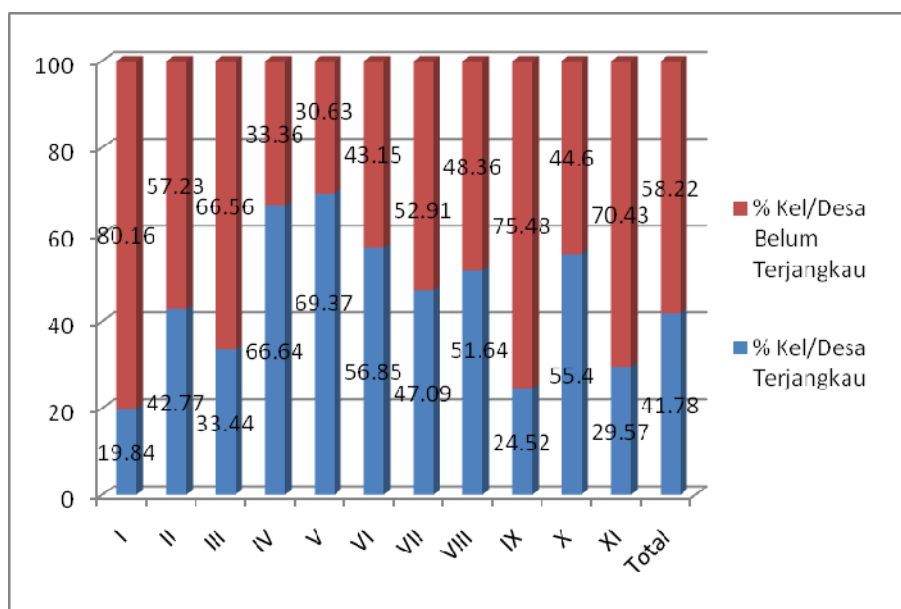
Namun untuk beberapa wilayah pos seperti ditunjukkan oleh grafik pada gambar 5.13. pelayanan paling banyak juga dilakukan oleh unit pelayanan lain seperti Kantor Pos maupun pos keliling. Pelayanan untuk menjangkau desa di Wilpos II (Sumatera bagian tengah) dan terutama wilpos IV (Jabotabek dan Banten) lebih banyak dilakukan oleh Kantor Pos. Untuk wilpos IV ini, pelayanan lebih banyak dilakukan oleh kantor pos karena lokasi desa yang relatif mudah akses ke perkotaan atau lokasi kantor pos sehingga lebih banyak dilayani oleh kantor pos. Sementara pelayanan melalui pos keliling desa cukup signifikan terdapat di Wilpos V. Pada Wilpos X (Sulawesi), jangkauan pelayanan desa yang dilakukan oleh kantor pos desa juga banyak dilakukan meskipun lebih sedikit daripada yang dilakukan melalui kantor cabang luar kota.

Gambar 5.13. Proporsi Pelayanan Pos di Desa menurut Wilpos tahun 2009



Sementara dari sisi keterjangkauan pelayanan tingkat desa, diagram batang pada Gambar 5.14 menunjukkan bahwa tingkat keterjangkauan paling tinggi masih terdapat pada desa-desa di pulau Jawa dibandingkan daerah di luar Jawa yang rata-rata mencapai lebih dari 50% kecuali untuk wilpos VII. Tingkat keterjangkauan pelayanan pos desa paling tinggi terdapat di wilpos V (Jawa Barat) dan wilpos IV (Jabotabek dan Banten).

Gambar 5.14. Perbandingan Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Pos di Desa menurut Wilpos tahun 2009



Pada daerah di luar Jawa, tingkat keterjangkauan pelayanan pos paling rendah ada di Wilpos I (Sumatera Utara dan NAD) yang hanya mencapai 19,8% dan Wilpos IX (Kalimantan) yang hanya mencapai 24,5%. Tingkat keterjangkauan yang lebih baik justru ditunjukkan di wilpos VIII (Bali dan Nusa Tenggara) dan X (Sulawesi) yang meskipun berada di luar Jawa, namun tingkat keterjangkauan pelayanan pos di desa mencapai lebih dari 50%.

Berdasarkan tingkat keterjangkauan pelayanan pos terlihat bahwa tingkat keterjangkauan desa oleh pelayanan pos belum cukup tinggi, bahkan menunjukkan angka yang cukup rendah untuk daerah yang aksesnya seharusnya tidak sulit seperti Wilpos I.

5.4.3. Produksi Pos PT. Pos Indonesia

Produksi perposan digambarkan dengan produksi (jumlah surat/paket) yang dilayani oleh PT. Pos dari mulai surat biasa sampai kilat khusus dalam negeri, paket biasa dan khusus dan pengiriman surat ke luar negeri (EMS dan Express Post) dan paket pos luar negeri. Tabel 5.16 menunjukkan terjadinya penurunan produksi PT. Pos hampir pada semua jenis kecuali untuk pengiriman paket kilat khusus dalam negeri dan EMS. Namun secara total, produksi PT. Pos mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan drastis produksi dialami PT. Pos terutama sejak tiga tahun terakhir.

Tabel 5.16. Produksi Perposan Indonesia Tahun 2004-2009

No.	Produksi Pos Reguler	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Dalam Negeri							
	Surat Biasa	ribu pucuk	299.254	298.967	284.473	91.038	39.925	10.245
	Surat Kilat	ribu pucuk	22.351	21.321	20.381	14.821	15.380	1.979
	Surat Kilat Khusus	ribu pucuk	71.184	71.255	71.834	54.600	24.380	31.543
	Paket Biasa	ribu pucuk	60.547	65.367	78.887	82.779	12.003	15.134
	Paket Kilat Khusus	ribu pucuk	1.275	1.472	1.557	2.221	8.050	8.156
2	Keluar Negeri							
	EMS	ribu pucuk	6.425	6.225	6.198	14.949	6.579	14.075
	Express Post	ribu pucuk	1.453	1.413	381	752	151	163
	Paketpos Biasa LN	ribu pucuk	2.455	2.434	2.234	3.021	494	40
	Paketpos Cepat LN	ribu pucuk	498	496	490	486	7	7

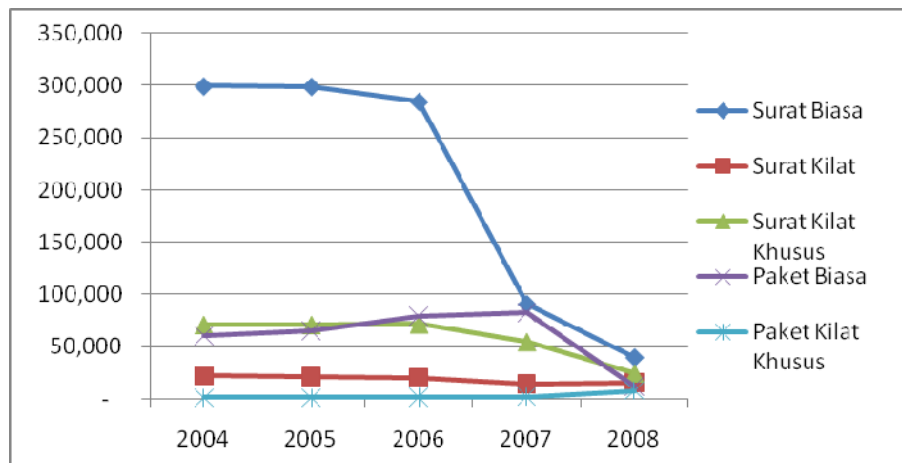
*) sampai Juni 2009

Grafik trend produksi PT. Pos yang ditunjukkan oleh Gambar 5.15 memperlihatkan untuk produksi dalam negeri, penurunan paling tajam dialami oleh surat biasa yang menurun

tajam dari 2006 ke 2007 dan terus menurun pada 2009. Pola yang sama terjadi pada produksi surat kilat khusus. Sementara untuk paket biasa, penurunan tajam baru terjadi dari 2007 ke 2008. Sedangkan untuk pengiriman ke luar negeri, penurunan tajam pada semua jenis produk terjadi dari 2007 ke 2008 .

Penurunan produksi untuk surat biasa yang sangat tajam diduga terkait dengan semakin sedikitnya penggunaan surat melalui pos sebagai sarana pemberi kabar/informasi, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat seperti penggunaan sarana telekomunikasi dalam bentuk telepon selular dan internet yang semakin mudah dan murah menyebabkan bergesernya sarana penyampaian informasi dari surat manual ke surat elektronik dan pesan singkat. Semakin terjangkaunya penggunaan internet dan telepon selular diduga menyebabkan masyarakat menjadikan penggunaan surat manual terutama yang bersifat biasa menjadi alternatif terakhir dalam penyampaian informasi atau dokumen ketika sarana yang lain seperti pesan singkat dan surat elektronik tidak dapat digunakan. Akibatnya pengiriman surat terutama surat biasa juga mengalami penurunan tajam. **Penurunan yang juga terjadi pada paket terutama paket biasa diduga terkait dengan pesaingan yang semakin ketat dalam bisnis pengiriman paket/kurir untuk pengiriman dokumen dan terutama barang dengan semakin banyaknya usaha pada bidang tersebut. Akibatnya PT. Pos harus bersaing secara ketat dengan pelaku usaha sejenis.**

Gambar 5.15. Trend Produksi Perposan Indonesia menurut jenis Tahun 2004-2009

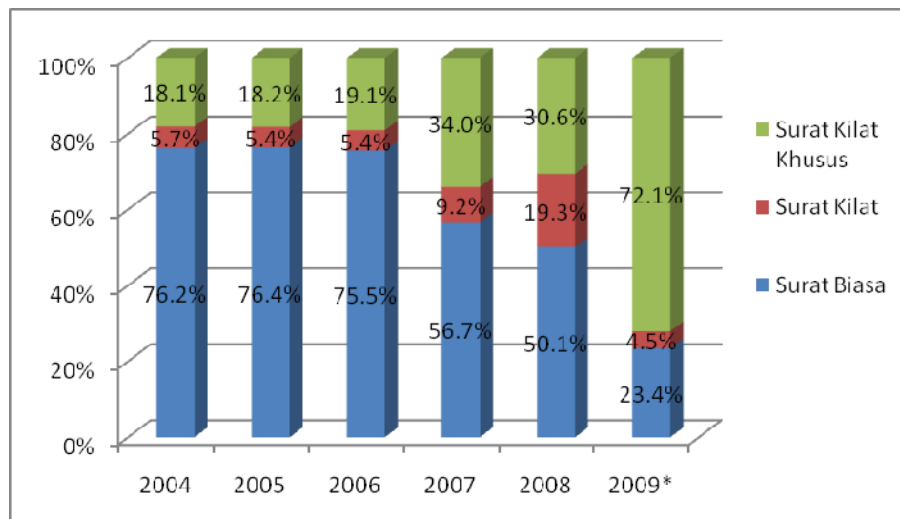


Penurunan produksi untuk surat biasa yang sangat tajam diduga terkait dengan semakin sedikitnya penggunaan surat melalui pos sebagai sarana pemberi kabar/informasi, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi

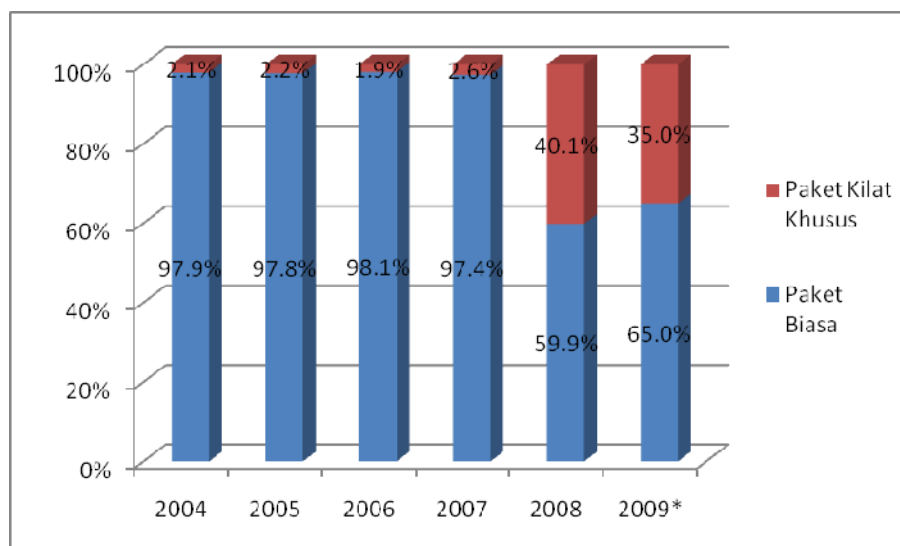
a. Pos Reguler Dalam Negeri.

Produksi perposan untuk jenis surat dan paket dalam negeri juga mengalami pergeseran proporsi antar jenis surat dan paket. Seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 5.16, surat biasa yang semula mendominasi produksi perposan sampai tahun 2006, kini digeser oleh surat kilat khusus. Produksi surat pos biasa pada 2009 hanya mencapai 23,4% dari total produksi, sementara surat kilat khusus mencapai 72,1%. Sementara untuk produksi paket, yang semula lebih dari 95% didominasi oleh pengiriman paket biasa, pada 2009 proporsinya tinggal 65%. Sementara pangsa produksi paket kilat khusus meningkat menjadi 35%. Perubahan proporsi ini terjadi karena adanya penurunan tajam pada produksi surat biasa dan paket biasa dan menurunnya produksi perposan dari PT. Pos secara total.

Gambar 5.16. Proporsi Produksi Surat Indonesia menurut jenis Tahun 2004-2009



Gambar 5.17. Proporsi Produksi Surat Indonesia menurut jenis Tahun 2004-2009



b. Produksi Pos Reguler dari Luar Negeri

Produksi pos dalam bentuk surat dari luar negeri melalui PT. Pos juga mengalami penurunan yang tajam dari 2007 ke 2008. Produksi surat pos udara luar negeri menurut 57% pada 2008, sementara untuk surat pos laut dari luar negeri mengalami penurunan 42%. Untuk produksi lain seperti EMS, paket pos udara dan paket pos laut dari luar negeri mengalami peningkatan. EMS meningkat 152% pada 2008 sementara paket pos udara dari luar negeri bahkan meningkat sampai 391%. Produksi kedua jenis ini potensial untuk meningkat lebih tinggi lagi mengingat sampai Juni 2009 volumenya sudah melebihi produksi pada 2008.

Hanya paket pos laut dari luar negeri yang mengalami peningkatan rendah yaitu hanya 4,6%.

Dari pola pertumbuhan produksi ini, terlihat bahwa untuk kelompok surat, hanya EMS yang diperkirakan mampu bertahan untuk bersaing dan mengalami peningkatan karena masyarakat semakin membutuhkan pelayanan yang bersifat cepat dan seketika, namun mampu menjangkau wilayah yang luas.

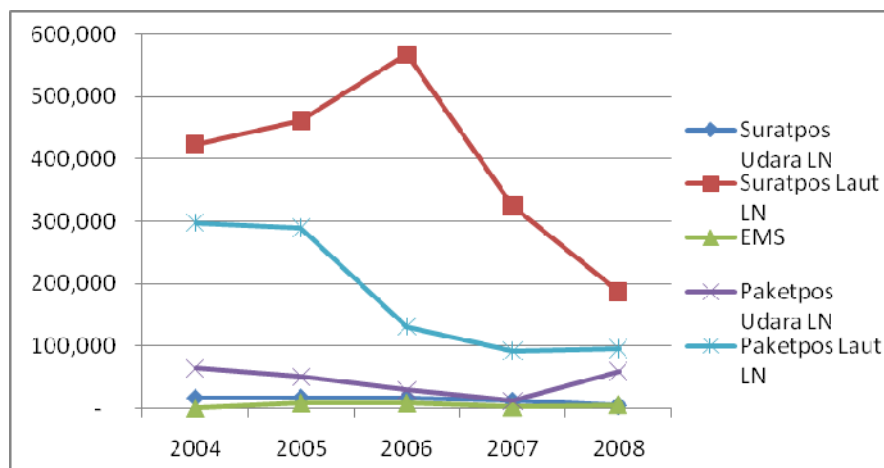
Keunggulan PT. Pos sebenarnya terletak pada kemampuan untuk menjangkau wilayah yang sangat luas bahkan sampai ke pelosok (kecamatan, desa, lokasi transmigrasi). Sehingga ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan menjangkau wilayah yang jauh, pelayanan PT. Pos menjadi pilihan yang utama.

Tabel 5.17. Produksi Surat Pos dari Luar Negeri Indonesia Tahun 2004-2009

No.	Jenis	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Direct Entry	ribu pucuk	1.254	1.567	2.829	10.067		
2	Suratpos Udara LN	ribu pucuk	17.251	17.297	17.190	12.158	5.231	2.133
3	Suratpos Laut LN	ribu pucuk	422.521	461.461	567.179	324.450	187.178	52.128
4	EMS	ribu pucuk	854	8.570	8.532	2.434	6.144	14.135
5	Paketpos Udara LN	ribu pucuk	64.584	50.920	29.733	12.194	59.869	66.444
6	Paketpos Laut LN	ribu pucuk	298.142	289.124	131.513	92.029	96.230	53.871
	Jumlah		804.606	828.939	756.976	453.332	354.652	188.711

*) sampai Juni 2009

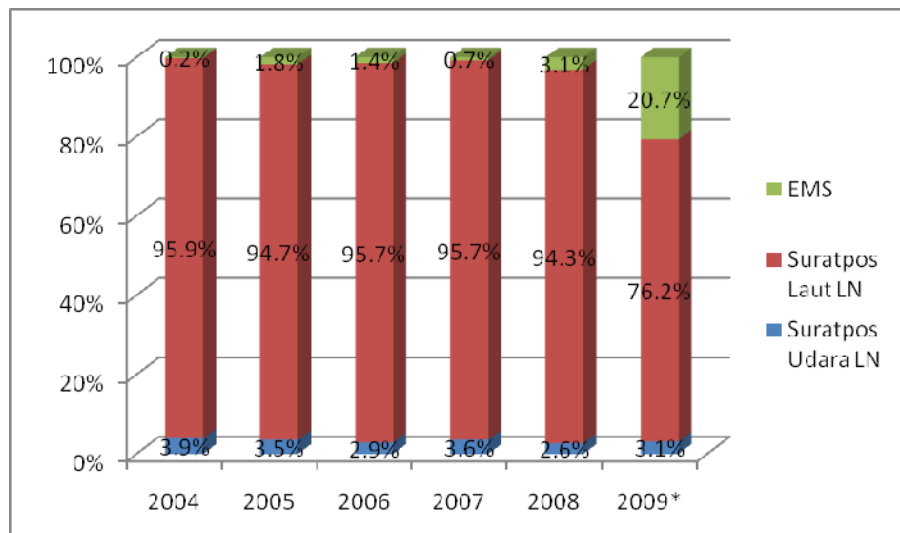
Gambar 5.18. Trend Produksi Pos dari Luar Negeri Tahun 2004-2009



Gambar 5.18 menunjukkan trend produksi perposan dari PT. Pos dalam lima tahun terakhir. Dari gambar tersebut terlihat trend penurunan yang tajam terutama untuk surat pos luar negeri dan paket pos laut luar negeri. Terlihat hanya paket pos udara dari luar negeri dan EMS yang mengalami peningkatan namun volume produksinya terutama untuk EMS masih sangat kecil. Sehingga pengaruh peningkatannya tidak signifikan dibanding penurunan yang terjadi pada surat dan paket pos laut dari luar negeri. **Dari trend ini juga terlihat bahwa penurunan terjadi pada pengiriman pelayanan dari luar negeri yang tidak dalam waktu cepat, namun volumenya selama ini cukup tinggi.**

Jika dilihat dari proporsi produksi untuk surat maupun paket pos dari luar negeri, penurunan yang terjadi juga menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pangsa produksi surat dan paket pos dari luar negeri. Produksi surat dari luar negeri yang semula didominasi surat pos laut dengan pangsa lebih dari 94% , proporsinya semakin berkurang dan sampai Juni 2009, pangsa tinggal 76% pada 2009. Sebaliknya pangsa EMS meningkat dari semula kurang dari 5% menjadi 20,7%.

Gambar 5.19. Proporsi Produksi Surat dari Luar Negeri Tahun 2004-2009

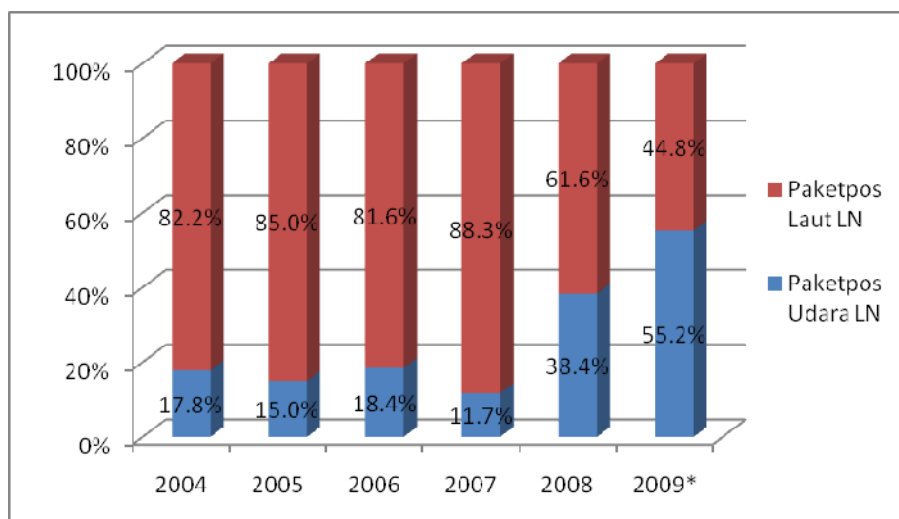


Pergeseran juga terjadi untuk pangsa produksi paket pos dari luar negeri antara paket pos laut dengan paket pos udara. Produksi yang semula lebih dominan paket pos laut luar negeri dengan pangsa lebih dari 80% mulai berkurang sejak 2008 dan pada 2009 pangsa menjadi 44,8%. Sebaliknya produksi paket pos udara mengalami peningkatan dan

pangsanya terus meningkat sehingga pada 2009, produksi paket pos udara dari luar negeri lebih tinggi dari produksi paket laut dengan pangsa mencapai 55,2%.

Pergeseran ini menunjukkan masyarakat cenderung hanya memilih pelayanan dari PT. Pos untuk pelayanan yang lebih cepat karena PT. Pos memiliki keunggulan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan jauh.

Gambar 5.20. Proporsi Produksi Paket dari Luar Negeri Tahun 2004-2009



c. Kinerja Wilayah Pos

Jika dilihat sebaran produksi perposan menurut wilpos, terlihat bahwa konsentrasi produksi pos baik dalam negeri maupun luar negeri masih terpusat di Pulau Jawa yang dicerminkan oleh produksi di wilayah pos IV, V, VI dan VII. Tabel 5.18 menunjukkan produksi perposan dalam negeri dan luar negeri paling tinggi ada di wilayah pos IV yang mencakup Banten dan Jabotabek, diikuti dengan Wilpos VI yang meliputi Jawa Tengah dan DIY. Sementara untuk Wilpos XI yang mencakup wilayah Papua dan Maluku menunjukkan produksi yang sangat rendah. Untuk wilayah luar Jawa, produksi pos yang tinggi terdapat di Wilpos III yang mencakup 5 propinsi di Sumatera Bagian Selatan dan Wilpos II (Sumatera Barat dan Riau) namun dengan total produksi yang masih jauh di bawah Wilpos IV dan VI.

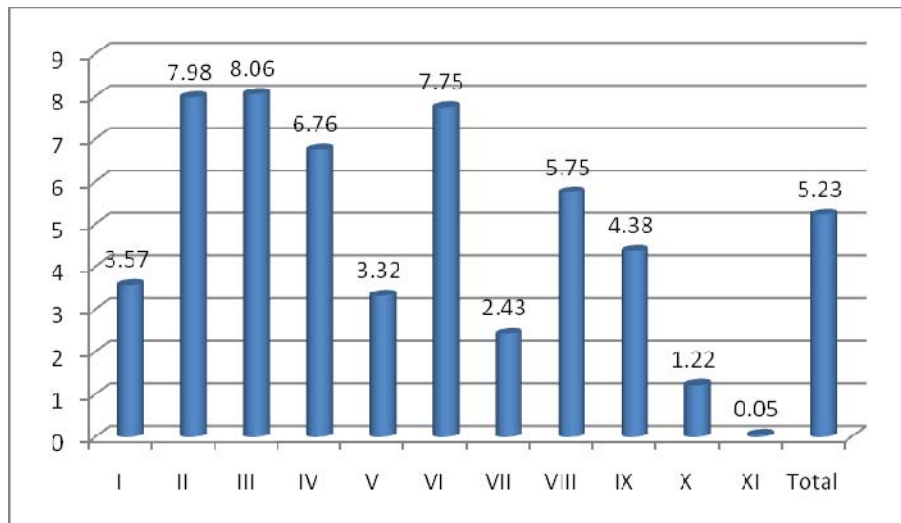
Hal yang menarik adalah ternyata produksi pos untuk Wilpos V dan VII yang merupakan daerah dengan penduduk yang juga cukup padat dan wilayah administratif yang banyak dengan tingkat sosial ekonomi yang relatif lebih baik, ternyata menunjukkan produksi perposan yang tidak terlalu tinggi, bahkan dibawah wilpos III.

Pada masing-masing Wilpos, produksi tertinggi untuk wilayah yang banyak bercorak perkotaan seperti Wilpos IV, VI dan VIII adalah untuk jenis surat biasa. Wilpos I dan X juga menunjukkan produksi surat biasa paling tinggi. Namun untuk wilayah pos VII dan IX justru menunjukkan produksi tertinggi untuk jenis surat kilat khusus. Sementara untuk Wilpos III, produksi paling tinggi justru untuk jenis paket kilat khusus. Tidak ada pola yang jelas antar wilayah pos terhadap produksi pos yang paling banyak dilayani. Namun daerah dengan aktivitas sosial-ekonomi yang tinggi memang menunjukkan produksi perposan yang lebih tinggi baik untuk surat maupun paket karena adanya kebutuhan untuk pelayanan yang mendukung aktivitas tersebut. Untuk produksi pos ke luar negeri, hampir pada semua wilayah paling tinggi adalah untuk jenis EMS kecuali untuk Wilpos I dan X.

Tabel 5.18. Produksi Perposan Indonesia di Setiap Wilayah Pos Tahun 2008

No.	Produksi Pos Reguler	Wilayah Pos											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Dalam Negeri												0
	Surat Biasa	2.500	764	671	16.484	2.658	11.431	1.996	2.414	426	578	4	39.925
	Surat Kilat	1.034	5.923	285	816	1.201	2.717	779	2.185	201	234	4	15.380
	Surat Kilat Khusus	992	1.057	1.052	9.785	1.513	2.114	3.144	1.199	3.067	442	17	24.380
	Paket Biasa	24	218	39	3.511	2.012	4.096	62	55	1.971	14	0	12.003
	Paket Kilat Khusus	37	192	7.412	85	28	71	164	35	18	6	2	8.050
2	Keluar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EMS	11	312	15	5.516	108	296	195	101	22	3	0	6.579
	Express Post	27	4	5	63	14	17	4	8	1	8	-	151
	Paketpos Biasa LN	0	0	0	476	0	1	9	7	0	0	-	494
	Paketpos Cepat LN	0	0	0	3	0	1	1	2	-	0	-	7

Gambar 5.21. Rasio antara produksi dengan jumlah pegawai menurut Wilpos



Jika dibuat perbandingan antara produksi pos reguler dengan jumlah pegawai pada setiap wilayah pos, terlihat adanya perbedaan “produktivitas” yang cukup tajam antar wilayah pos. Daerah-daerah di luar Jawa seperti di Wilayah pos II dan III justru menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pelayanan di Pulau Jawa, kecuali untuk Wilpos VI yang memiliki produktivitas cukup tinggi. Wilpos II dan III misalnya memiliki produktivitas yang cukup tinggi yaitu 7,98 dan 8,06. Sementara untuk Wilpos V dan VII yang berada di Jawa dengan jumlah penduduk dan kepadatan cukup tinggi ternyata justru menunjukkan produktivitas yang rendah yaitu 3,32 dan 2,43. Produktivitas yang paling rendah ditunjukkan oleh wilayah pos yang berada di Kawasan Timur Indonesia seperti Wilpos X dan XI.

d. Pos Express dan AdMail

Untuk produksi pos express, perkembangan dalam lima tahun terakhir justru menunjukkan fluktuasi produksi yang tinggi. Dari tahun 2005 sampai 2007 menunjukkan peningkatan produksi yang tinggi, namun menurun drastis pada 2008 sampai 80% dan meningkat kembali pada tahun 2009. Sementara untuk produksi pada kelompok Admail Pos, menunjukkan trend perkembangan yang bertolak belakang. Produksi esensial mail menunjukkan peningkatan yang pesat, namun untuk advertising mail justru menunjukkan produksi yang semakin menurun tajam. Kompetisi yang sangat ketat dalam jasa pelayanan perposan menyebabkan terjadinya fluktuasi dan trend penurunan dari produksi perposan

untuk Pos Express. PT. Pos yang selama ini menjadi pemain utama dalam industri perposan, kini mulai mendapat persaingan yang sangat ketat dengan pemain-pemain lain yang semakin banyak dan sangat mengandalkan kecepatan dan kualitas pelayanan. Sehingga PT. Pos tidak bisa lagi mengandalkan jangkauan yang luas dalam pelayanan namun juga kecepatan pelayanan dan kualitas pelayanan.

Tabel 5.19. Produksi Pos Express PT. Pos Tahun 2005-2009

No.	Jenis	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Pos Express						
	Kiriman Pos Ekspres	ribu pucuk	8.896	16.549	54.010	10.540	22.340
2	Admail Pos						
	Esensial Mail	ribu pucuk	3.037	2.678	29.101		
	Advertising Mail	ribu pucuk	51.499	17.501	12.158		

*) Sampai Juni 2009

5.4.4 PSO

Terdapat sejumlah Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK) dalam Wilpos tertentu yang mendapat bantuan PSO (*Public Service Obligation*). Tabel 5.21 menunjukkan pertumbuhan jumlah KPCLK dari tahun 2003 sampai 2008.

Tabel 5.21 Jumlah KPCLK dari tahun 2003-2008.

No	Tahun	Jumlah KPCLK
1	2003	1.772
2	2004	2.341
3	2005	2.306
4	2006	2.341
5	2007	2.341
6	2008	2.350

Terlihat dalam kurun waktu lima tahun peningkatan jumlah KPCLK cukup baik yakni sekitar 50 %. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam upaya pelayanan pos ke daerah terpencil yang termasuk dalam kewajiban publik (PSO). Peningkatan ini juga menunjukkan komitmen dari Ditjen Postel dan PT. Pos untuk memberikan kemudahan dan jangkauan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

5.5. Bidang Jasa Titipan

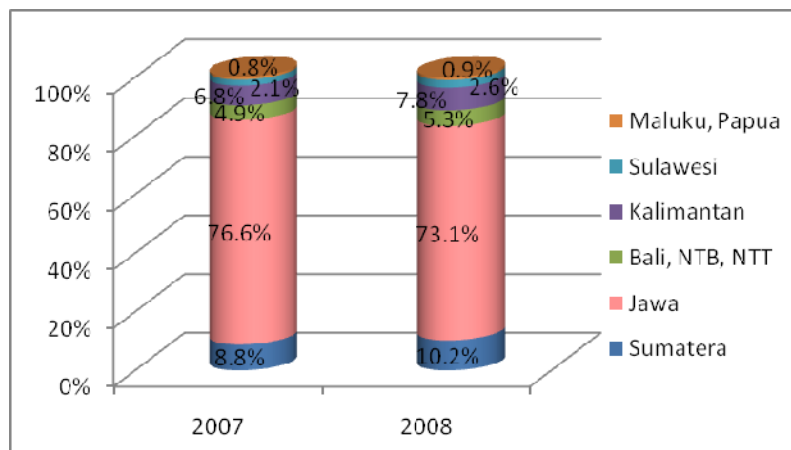
5.5.1. Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan

Penyebaran Penyelenggara Jasa Titipan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dimana lebih dari 70% penyelenggara jasa titipan berada di pulau Jawa dan sisanya tersebar di pulau-pulau lain. Namun dari perkembangan dua tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan usaha jasa penyelenggara jasa titipan hampir 15%. Penurunan usaha jasa titipan ini terjadi terutama di Pulau Jawa yang mencapai 18,8% dari 2007 ke 2008. Peningkatan justru terjadi di wilayah Sulawesi meskipun hanya satu penyelenggara.

Tabel 5.22. Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Pulau

No	Propinsi	Jumlah	
		2007	2008
1	Sumatera	68	67
2	Jawa	590	479
3	Bali, NTB, NTT	38	35
4	Kalimantan	52	51
5	Sulawesi	16	17
6	Maluku, Papua	6	6
Jumlah		770	655

Gambar 5.21. Proporsi Penyebaran Penyelenggara Jasa Titipan 2007-2008



Berdasarkan sebaran jasa penyelenggara titipan seperti ditunjukkan oleh Gambar 5.21. terlihat bahwa terjadi penurunan proporsi jasa penyelenggara titipan di Jawa dan peningkatan di wilayah-wilayah lainnya. Jika dilihat dari sebaran menurut propinsi seperti pada Tabel 5.23, penyelenggara jasa titipan memang lebih banyak berada di DKI Jakarta yang mejadi pusat kegiatan ekonomi, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur.

Penurunan yang dialami oleh penyelenggara jasa titipan terutama disebabkan oleh usaha yang tidak mampu bertahan ditengah persaingan yang semakin ketat terutama dalam pelayanan dan efisiensi biaya. Setelah mengalami *booming* dengan bertumbuhnya usaha jasa titipan pada tahun 2004-2005, usaha penyelenggara jasa titipan yang menjamur pada akhirnya harus bersaing secara ketat.

5.5.2. Produksi Jasa Titipan

Produksi yang dihasilkan dari penyelenggara jasa titipan terdiri dalam bentuk barang cetakan, paket, bungkus kecil, sekogram dan surat kabar. Pada Tabel 5.24 terlihat bahwa produksi jasa titipan hampir didominasi di pulau Jawa dengan proporsi mencapai 94% berat produksi jasa titipan nasional. Produksi paling tinggi jasa titipan pada tahun 2008 terdapat di propinsi DKI Jakarta yang mencapai 42,3% berat produksi Jasa titipan nasional, diikuti oleh Jawa Tengah yang mencapai 31,8% berat produksi nasional.

Tabel 5.23. Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Propinsi

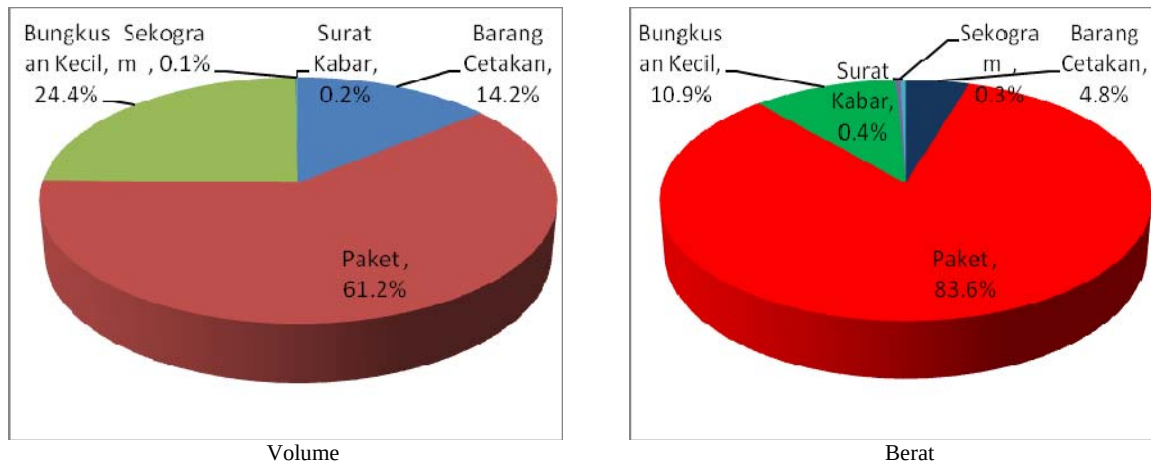
No	Propinsi	Jumlah		No	Propinsi	Jumlah	
		2007	2008			2007	2008
1	NAD	4	4	18	NTB	14	13
2	Sumatera Utara	25	24	19	NTT	1	1
3	Riau	8	9	20	Kalimantan Tengah	2	2
4	Kepulauan Riau	9	12	21	Kalimantan Barat	23	23
5	Sumatera Barat	3	1	22	Kalimantan Selatan	13	13
6	Jambi	0	0	23	Kalimantan Timur	14	13
7	Bengkulu	2	2	24	Sulawesi Selatan	11	11
8	Sumatera Selatan	7	5	25	Sulawesi Utara	5	6
9	Bangka Belitung	0	0	26	Sulawesi Tengah	0	0
10	Lampung	10	10	27	Sulawesi Tenggara	0	0
11	DKI Jakarta	414	318	28	Gorontalo	0	0
12	Jawa Barat	64	60	29	Maluku	2	2
13	Banten	18	18	30	Maluku Utara	0	0
14	Jawa Tengah	33	29	31	Papua Barat	1	1
15	DI Yogyakarta	11	8	32	Papua Tengah	1	1
16	Jawa Timur	50	46	33	Papua Timur	2	2
17	Bali	23	21	Jumlah		770	665

Tabel 5.24. Produksi Jasa Titipan PT. Pos Tahun 2008

NO.	PROPINSI	PRODUKSI										JUMLAH	
		BARANG CETAKAN		PAKET		BUNGKUSAN KECIL		SEKOGRAM		SURAT KABAR			
		Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg
1	DI ACEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SUMUT	10.779	93.992	11.619	152.242	19.335	66.373	0	1.837	845	2.150	42.578	316.594
3	RIAU	7.115	29.959	324.765	75.320	6.583	13.338	0	0	0	0	338.463	118.617
4	RIAU KEPULAUAN	260.391	39.098	65.859	388.907	90.933	518.555	6.140	467.864	11.686	95.902	435.009	1.510.326
5	SUMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JAMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BENGKULU	0	0	7.896	30.125	6.367	2.950	0	0	0	0	14.263	33.075
8	SUMSEL	4.946	30.663	2.852	16.732	6.922	32.713	0	0	0	0	14.720	80.108
9	BANGKA/BELITUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LAMPUNG	1.657	25.660	175.324	3.061	314.304	1.957.170	0	0	945	2.586	492.230	1.988.477
11	DKI JAKARTA	5.209.328	7.340.694	7.115.908	60.720.683	3.745.198	10.751.868	14.760	4.050	16.908	50.359	16.102.102	78.867.654
12	JABAR	25.695	99.658	1.870.109	10.928.341	194.428	253.031	0	0	0	0	2.090.232	11.281.030
13	BANTEN	1.297	112.309	5.432	542.143	611	17.064	0	0	0	97	7.340	671.613
14	JATENG	78.063	47.402	14.915.274	54.614.557	5.520.661	4.545.484	1.312	1.056	0	0	20.515.310	59.208.499
15	DI YOGYAKARTA	1.646	4.003	195.007	4.258.575	5.351	17.026	0	0	0	0	202.004	4.279.604
16	JATIM	52.592	490.538	841.722	17.697.487	245.432	1.596.231	1.125	2.695	24.041	517.148	1.164.912	20.304.099
17	BALI	41.918	66.179	167.492	3.746.138	14.319	39.661	2.148	116.251	935	0	226.812	3.968.229
18	NTB	23.206	28.919	56.944	715.961	8.167	13.152	2.496	2.496	0	0	90.813	760.528
19	NTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KALTENG	424	4.340	1.060	13.150	1.365	9.000	0	0	951	7.290	3.800	33.780
21	KALBAR	43.068	70.787	95.122	264.853	9.588	46.678	8.188	23.312	0	0	155.966	405.630
22	KALSEL	4.902	7.832	32.450	144.397	25.487	40.427	655	1.655	0	0	63.494	194.311
23	KALTIM	15.582	28.996	16.392	177.764	10.761	61.330	0	0	10.891	92.316	53.626	360.406
24	SULSEL	259.747	390.667	144.269	848.542	173.616	279.485	0	0	613	7.521	578.245	1.526.215
25	SULUT	765	14.492	13.519	355.514	3.572	12.262	0	0	3	30	17.859	382.298
26	SULTENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SULTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MALUKU	0	0	3.062	41.174	1.428	1.428	0	0	0	0	4.490	42.602
30	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA BARAT	678	521	53	401	139	119	0	0	0	0	870	1.041
32	PAPUA TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	PAPUA TIMUR	676	443	224	1.404	657	1.460	110	646	0	0	1.667	3.953
JUMLAH		6.044.475	8.927.152	26.062.354	155.737.471	10.405.224	20.276.805	36.934	621.862	67.818	775.399	42.616.805	186.338.689

Jika dilihat dari volume, produksi jasa titipan di Jawa Tengah memiliki volume lebih besar daripada produksi produksi DKI Jakarta. Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, namun volume maupun berat produksi jasa titipannya tidak terlalu signifikan. Dari sisi jenis barang yang diangkut, sebagian besar adalah dalam bentuk paket. Produksi jasa titipan dalam bentuk paket mencapai 83,6% total berat produksi jasa titipan, sementara dari sisi volume mencapai 61,2% dari total volume jasa titipan seperti terlihat pada gambar 5.22. Urutan berikutnya produksi jasa titipan nasional adalah dalam bentuk bungkusan kecil dan barang cetakan yang volumenya masing-masing mencapai 24,4% dan 14,2% volume jasa titipan total, namun beratnya hanya mencapai 10,9% dan 4,8% berat produksi jasa titipan nasional.

Gambar 5.22. Proporsi Volume dan Berat Produksi Jasa Titipan menurut Jenis 2008



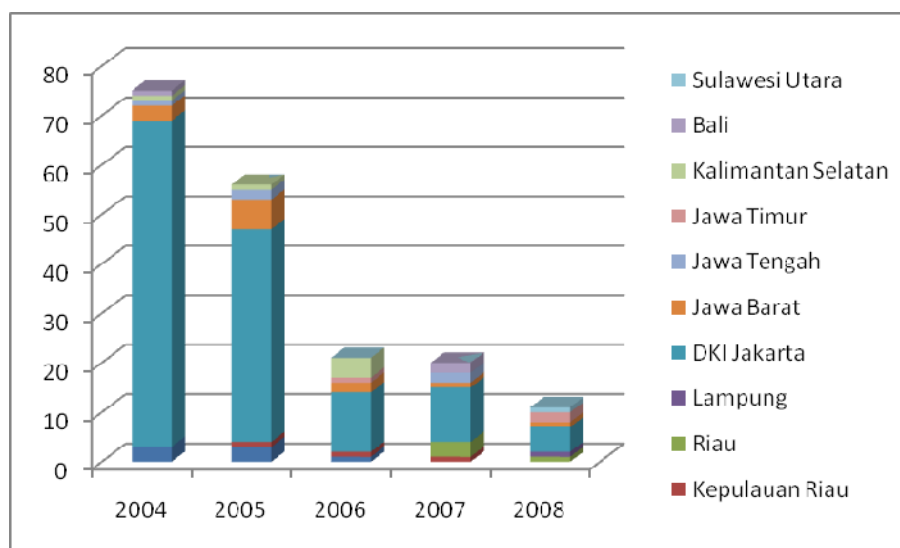
5.5.3. Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan

Jumlah izin yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jasa titipan di Indonesia menurun terus sejak tahun 2004 yang berjumlah 75 izin penyelenggaraan menjadi tercatat hanya 11 izin penyelenggaraan di tahun 2008 (data yang terhimpun sampai dengan laporan ini dibuat). Penurunan jumlah sebesar hampir 86% ini menunjukkan adanya kejenuhan jumlah perusahaan penyelenggara jasa titipan atau bisa juga disebabkan karena menurunnya mobilitas barang/produk jasa titipan yang terjadi di Indonesia. Dari 770 penyelenggara jasa titipan yang ada, terdapat sebanyak 183 izin dikeluarkan antara tahun 2004 sampai 2008. Dalam selang waktu lima tahun tersebut, penerbitan izin penyelenggara jastip juga menurun dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel 5.25. Meskipun pada tahun 2004 diterbitkan 11 izin, namun pada tahun 2007 hanya diterbitkan 20 izin dan bahkan pada tahun 2008 hanya diterbitkan 11 izin penyelenggara jasa titipan. Selebihnya yaitu sebanyak 587 izin penyelenggaraan dikeluarkan sebelum tahun 2004.

Tabel 5.25 Jumlah penerbitan izin penyelenggara jasa titipan tahun 2004 hingga 2008.

PROPINSI	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008
Sumatera Utara	3	3	1	0	0
Kepulauan Riau	0	1	1	1	0
Riau	0	0	0	3	1
Lampung	0	0	0	0	1
DKI Jakarta	66	43	12	11	5
Jawa Barat	3	6	2	1	1
Jawa Tengah	1	2	0	2	0
Jawa Timur	0	0	1	0	2
Kalimantan Selatan	1	1	4	0	0
Bali	1	0	0	2	0
Sulawesi Utara	0	0	0	0	1
JUMLAH	75	56	21	20	11

Gambar 4.23. Perkembangan Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan menurut Jenis 2008



5.6 Penerbitan Perangko

Statistik penerbitan perangko disajikan mulai tahun 2004 sampai dengan 2008. Jenis penerbitan perangko dalam penyajian data ini terbagi dua yaitu Perangko Nasional dan *Joint Issue Stamp* (JIS). *Joint Issue Stamp* adalah perangko yang diterbitkan berdasarkan kerjasama dengan negara lain dan beredar di masing-masing negara. Tahun 2006 dengan Slovakia, Tahun 2007 dengan ASEAN dan China, serta tahun 2008 dengan Jepang. Pada tahun 2009, *Joint Issue Stamp* dilakukan bersama dengan Iran. Sedangkan Perangko

Nasional adalah perangko yang diterbitkan dan beredar di Indonesia. Data penerbitan perangko dapat dilihat pada Tabel 5.26 berikut ini.

Tabel 5.26 Data penerbitan perangko Tahun 2004-2009

Tahun	Jumlah Seri		
	Nasional	Joint Issue Stamp (JIS)	Total
2004	11	0	11
2005	10	0	10
2006	8	1	9
2007	11	2	13
2008	16	1	17
2009*	7	1	8

*) sampai Juni 2009

Jumlah seri perangko yang diterbitkan sejak 2004 hingga 2008 meningkat dari 11 menjadi 17 seri secara total atau naik sebesar 54,5%. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerbitan perangko. Sampai dengan bulan Juni, pada tahun 2009 ini telah diterbitkan 8 perangko. Penerbitan perangko ini biasanya terkait dengan momentum atau peringatan peristiwa tertentu yang dapat diabadikan dalam bentuk perangko. Oleh karena itu pada tahun yang banyak kegiatan atau event atau peristiwa tertentu, lebih banyak perangko diterbitkan.

Bab 6

Bidang Telekomunikasi

Pembangunan telekomunikasi di Indonesia telah memasuki babak baru dengan semakin berkembang pesatnya industri teknologi informasi. Jangkauan telepon seluler sudah mencapai seluruh propinsi di Indonesia dan sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga semakin banyak dengan semakin banyaknya jenis jasa telekomunikasi yang disediakan dari mulai telepon tetap, telepon bergerak, wireless telepon dan sebagainya. Pertumbuhan pengguna jasa telekomunikasi dan pelanggan telepon khususnya untuk telepon bergerak juga semakin tinggi.

Peran industri telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi merupakan yang tertinggi dalam perekonomian nasional dibanding sektor-sektor lainnya. Kelompok transportasi dan komunikasi juga kini menjadi salah satu kelompok kebutuhan pokok yang digunakan dalam penghitungan inflasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri telah memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan aktifitas bisnis. Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan lagi dengan adanya teknologi telekomunikasi.

Perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah menyediakan produk berupa jasa – jasa telekomunikasi, baik domestik maupun internasional. Jasa – jasa telekomunikasi yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi data dan sewa sambungan, dan berbagai jasa bernilai tambah.

6.1. Ruang Lingkup

Pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan jumlah telepon pengguna berbayar dan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan perkembangan telekomunikasi itu, dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pembangunan yang terkait dengan pertelekomunikasian secara nasional maupun regional. Untuk mendukung keinginan ini, penyajian data telekomunikasi tentu merupakan suatu kebutuhan.

Ruang lingkup penyajian data telekomunikasi meliputi data dan statistik yang terkait dengan jasa penyelenggaraan telekomunikasi baik dari sisi operator, pelanggan, revenue dan pendapatan operator, satuan sambungan telekomunikasi sampai dengan program pengembangan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

6.2. Konsep dan Definisi

Penyelenggaran telekomunikasi di Indonesia meliputi Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa sebagai berikut :

- Jaringan Tetap :
 - o Jaringan Tetap Lokal berbasis sirkuit dan Paket switched;
 - o Jaringan Tetap sambungan Jarak Jauh;
 - o Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional;
 - o Jaringan Tetap tertutup.
- Jaringan Bergerak :
 - o Jaringan Bergerak Seluler;
 - o Jaringan Bergerak Terrestrial;
 - o Jaringan Bergerak satelit.
- Jaringan Telekomunikasi Khusus :
 - o Jaringan Telekomunikasi Khusus Perseorangan;
 - o Jaringan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah;
 - o Jaringan Telekomunikasi Khusus Badan Hukum.

- Jasa Telekomunikasi :
 - o Jasa Teleponi Dasar;
 - o Jasa Teleponi non Dasar;
 - o Jasa Nilai Tambah Teleponi.

Dalam perkembangan Jaringan bergerak seluler, terdapat beberapa nomor awal yang dimiliki oleh masing-masing operator yang ada. Di bawah ini daftar produk menurut nomor awal :

Nomor awal	Produk	Penyedia
0811	KartuHALO	Telkomsel
0812	SimPATI, KartuHALO	Telkomsel
0813	SimPATI, KartuHALO	Telkomsel
0814	Indosat 3,5G Broadband	Indosat (IndosatM2)
0815	Mentari , Matrix	Indosat
0816	Mentari, Matrix	Indosat
0817	XL Prabayar, XL Pascabayar	XL
0818	XL Prabayar, XL Pascabayar	XL
0819	XL Prabayar, XL Pascabayar	XL
0828	Ceria	Sampoerna Telekom
0831	Solusi	Natrindo Telepon Seluler
0838	Axis	Natrindo Telepon Seluler
0852	Kartu As	Telkomsel
0853	Kartu As Fress	Telkomsel
0855	Matrix Auto	Indosat
0856	IM3	Indosat
0857	IM3	Indosat
0858	Mentari	Indosat
0859	XL Prabayar	XL
0877	XL Prabayar	XL
0878	XL Prabayar	XL

0879	XL Prabayar	XL
0881	Smart	Smart Telecom
0888	Fren	Mobile-8
0889	Mobi	Mobile-8
0898	3	Hutchison Charoen Pokphand Telecom
0899	3	Hutchison Charoen Pokphand Telecom

Untuk menciptakan interpretasi yang sama dari setiap pemakai data terhadap terminologi yang digunakan dalam penyajian data telekomunikasi ini, diberikan pengertian atas penggunaan beberapa terminologi yang digunakan, yang meliputi :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
3. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
4. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

8. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
9. Kapasitas sentral telepon adalah banyaknya telepon yang tersedia yang telah terpasang dan siap untuk dipasarkan;
10. Telepon tersambung adalah banyaknya telepon yang telah tersambung dan siap untuk digunakan berkomunikasi;
11. Pelanggan atau pengguna adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
12. Teledensitas adalah indikator yang menunjukkan jumlah satuan sambungan telepon per seratus penduduk;
12. Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) bidang Telekomunikasi adalah kewajiban pelayanan dari pemerintah di bidang telekomunikasi dalam rangka mendukung peningkatan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi khususnya telepon;
13. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) adalah wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari program USO dibidang telekomunikasi di seluruh Indonesia. Propinsi-propinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta menjadi wilayah sasaran kebijakan dan program USO oleh pemerintah yang dibagi dalam 11 WPUT dengan pembagian :

WPUT I	: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
WPUT II	: Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung
WPUT III	: Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung
WPUT IV	: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
WPUT V	: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
WPUT VI	: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah
WPUT VII	: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara
WPUT VIII	: Papua, Irian Jaya Barat
WPUT IX	: Maluku, Maluku Utara
WPUT X	: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
WPUT XI	: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

6.3. Statistik Telekomunikasi Indonesia.

6.3.1. Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan wilayah yang luas merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri telekomunikasi. Oleh karena itu, jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia terus bertambah seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong berkembangnya investasi di bidang telekomunikasi. Tabel 6.1 menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara telekomunikasi untuk masing-masing jenis penyelenggaraan mengalami peningkatan dari 2008 ke Juni 2009 kecuali untuk penyelenggaraan jasa. Secara total jumlah penyelenggaraan telekomunikasi meningkat 2,2% dari 365 menjadi 373 penyelenggara.

Tabel 6.1. Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia 2008 - 2009

No	Jenis-Jenis Penyelenggaraan	2008	2009*
I	Penyelenggara Jaringan Tetap	65	72
	1. Penyelenggara jaringan tetap lokal		
	- Circuit Switch + Jasa Teleponi dasar	16	6
	- Packet Switch		14
	2. Penyelenggara jaringan tetap jarak jauh (SLJJ)	2	2
	3. Penyelenggara jaringan tetap Internasional (SLI)	2	3
	4. Penyelenggara jaringan tetap tertutup	44	47
II	Penyelenggara Jaringan Bergerak	15	17
	1. Penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio trunking	6	8
	2. Penyelenggara jaringan bergerak selular	8	8
	3. Penyelenggara jaringan bergerak satelit	1	1
III	Penyelenggara Jasa	271	269
	1. Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi (Calling Card, Premium Call dan Call Center)	58	29
	2. Penyelenggara jasa ISP	150	169
	3. Penyelenggara jasa NAP	32	39
	4. Penyelenggara jasa ITKP	25	25
	5. Penyelenggara jasa Siskomdat	6	7
IV	Penyelenggara Telekomunikasi Khusus	14	17

*) Sampai Juni 2009

Penambahan paling banyak ada pada penyelenggara jaringan tetap yang meningkat 8 penyelenggara atau 12,5 % dibanding tahun 2008. Penyelenggara jasa adalah jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang paling banyak dibanding jenis penyelenggaraan telekomunikasi lainnya disusul penyelenggaraan jaringan tetap. Pada bulan Juni 2009, penyelenggara jasa ini proporsinya mencapai 71,7% dan penyelenggara jaringan tetap proporsinya mencapai 19,2% dari total penyelenggara telekomunikasi.

Khusus untuk penyelenggara telepon seperti ditunjukkan pada Tabel 6.2., sampai Juni 2009 di Indonesia sudah terdapat 15 operator penyelenggara telepon dengan terbanyak adalah untuk operator telepon bergerak sebanyak 8 operator. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap lokal kabel baru 3 perusahaan dan penyelenggara telepon tetap nirkabel baru 4 perusahaan. Terdapat dua perusahaan yang menjadi penyelenggara telepon untuk tiga jenis penyelenggaraan telepon yaitu PT. Telkom dan PT. Indosat. Perkembangan

telepon bergerak di Indonesia memang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dari hanya 3 operator utama pada 6 tahun sebelumnya menjadi 8 operator. 2 operator terakhir yang intensif melakukan ekspansi adalah PT. Hutchison CP Telecommunication (Three/3) dan PT. Natrindo Telepon Seluler (AXIS).

Tabel 6.2 Operator penyelenggara telepon di Indonesia tahun 2009.

No	Jenis Penyelenggaraan	Nama Operator	Jumlah
1	Telepon Tetap Kabel	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	3
		PT. Indosat	
		PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)	
2	Telepon Tetap Nirkabel	PT. Telkom	4
		PT. Indosat	
		PT. Bakrie Telecom	
		PT. Mobile-8	
3	Telepon Bergerak	PT. Telkomsel	8
		PT. Indosat	
		PT. Excelkomindo	
		PT. Mobile-8	
		PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)	
		PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS)	
		PT. Hutchison CP Telecommunication	
		PT. Smart Telecom	

6.3.2. Kapasitas Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dari sisi kapasitas tersambung, peningkatan jumlah penyelenggara, diikuti dengan peningkatan kapasitas, termasuk untuk telepon tetap kabel dan wireless. Untuk telepon tetap wireless, kapasitas meningkat dalam tiga tahun terakhir dengan peningkatan terbesar ada tahun 2008 sebesar 156,2%. Peningkatan kapasitas pada telepon wireless ini terutama berasal dari kenaikan kapasitas dari Bakrie Telekom yang pada tahun 2008 meningkat 518% dan Telkom yang pada tahun 2007 meningkat 21,9% dan pada 2008 meningkat 112,7%.

Namun untuk penyelenggaraan telepon kabel, secara total kapasitas justru mengalami penurunan sebesar 1,4% terutama akibat penurunan kapasitas yang terjadi pada 2007 sebesar 16%. Penurunan kapasitas pada penyelenggaraan telepon tetap kabel dialami oleh seluruh operator yang bergerak dalam penyelenggaraan telepon tetap kabel. Dari sisi volume, penurunan terbesar dialami oleh PT. Telkom yang memang mendominasi dalam penyelenggaraan tetap kabel. Namun dari sisi tingkat penurunannya, paling besar dialami

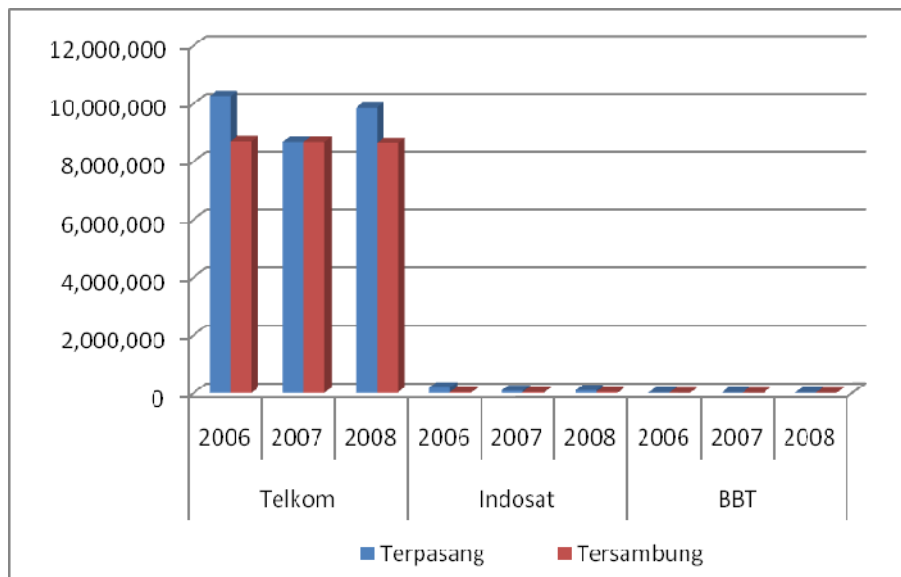
oleh Indosat yang pada tahun 2007 menurun sebesar 56% meskipun pada tahun 2008 meningkat kembali sebesar 12,9%.

Tabel 6.3. Kapasitas dan Telepon Tersambung telepon tetap kabel dan wireless Tahun 2006-2008

Jenis Penyelengaraan	Operator	2006		2007		2008	
		Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung
Tetap Kabel	Telkom	10.254.145	8.709.211	8.684.888	8.685.000	9.839.000	8.629.783
	Indosat	186.576	26.632	80.880	30.478	91.290	42.145
	BBT	5.388	2.500	5.404	2.393	5.404	2.300
Jumlah		10.446.109	8.738.343	8.771.172	8.717.871	9.935.694	8.674.228
Tetap Wireless	Telkom	7.698.039	4.175.853	9.383.924	6.363.000	19.861.324	13.305.181
	Indosat	2.365.000	358.980	3.403.900	627.934	3.771.400	761.589
	Bakrie	2.141.667	1.479.198	7.200.000	3.820.701	13.251.700	7.304.543
	Mobile 8					1.497.600	332.530
Jumlah		12.204.706	6.014.031	19.987.824	10.811.635	38.382.024	21.703.843

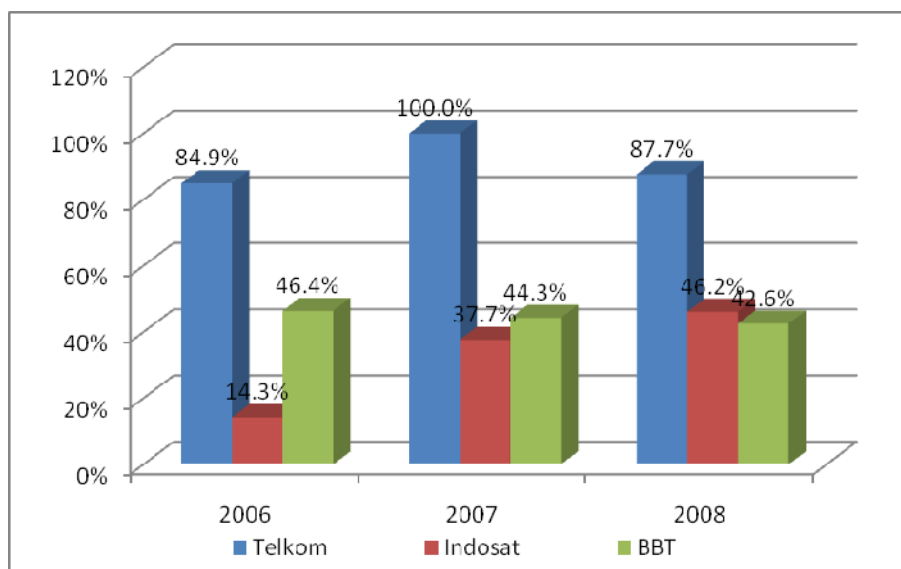
Penurunan kapasitas pada telepon tetap kabel diikuti juga dengan penurunan pada pemanfaatan tersambung dari kapasitas tersebut. Namun penurunan kapasitas tersambung ini lebih rendah daripada penurunan kapasitas terpasangnya. Dalam tiga tahun terakhir, penurunan kapasitas tersambung telepon tetap kabel hanya sebesar 0,4% sementara penurunan kapasitas terpasang yang mencapai 1,4%. Dengan demikian, selisih antara kapasitas terpasang dengan tersambung tidak terlalu besar terutama sejak tahun 2007 setelah adanya peningkatan kapasitas terpasang pada 2008. Gambar 6.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 untuk PT. Telkom hampir tidak ada perbedaan. Namun dengan meningkatnya kembali kapasitas terpasang PT Telkom pada tahun 2008 yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas tersambung, maka kapasitas tersambung secara keseluruhan berada dibawah kapasitas terpasang.

Gambar 6.1. Kapasitas dan Telepon tersambung telepon tetap kabel



Gambar 6.2 memperjelas tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang sambungan oleh masing-masing operator telepon tetap. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas sambungan milik PT. Telkom jauh lebih baik dibanding dua operator lainnya. Tingkat pemanfaatan kapasitas sambungan PT. Telkom paling rendah adalah 84,9% pada tahun 2006. Bahkan pada 2007 tingkat pemanfaatannya mencapai 100%. Sementara untuk operator lain, tingkat pemanfaatan atas kapasitas tersambung masih dibawah 50%.

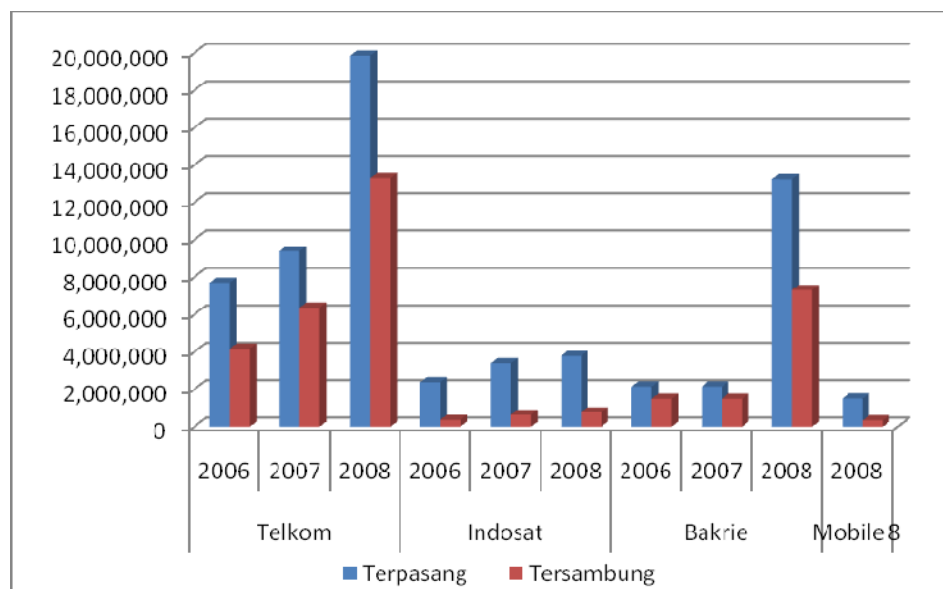
Gambar 6.2. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon tetap kabel 2006-2008



Gambar 6.2 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan kapasitas tersambung oleh PT. Indosat meskipun masih dibawah 50%. Setelah pada tahun 2006 tingkat pemanfatannya baru 14,3%, pada tahun 2008 tingkat pemanfaatan kapasitas tersambung Indosat telah mencapai 46,2% dan telah melebihi tingkat pemanfaatan kapasitas BBT. Peningkatan kapasitas tersambung yang lebih tinggi daripada kapasitas terpasang sambungan oleh PT. Indosat menyebabkan pemanfaatan kapasitas mengalami peningkatan pemanfaatan cukup tinggi.

Untuk telepon tersambung tetap wireless, gambar 6.3 menunjukkan bahwa kapasitas terpasang sambungan telepon wireless masih lebih besar daripada kapasitas tersambung untuk semua operator. Bahkan untuk Telkom, peningkatan kapasitas tersambung yang besar pada 2008 tidak dapat mencapai kapasitas terpasangnya yang juga meningkat dengan peningkatan lebih besar. Hal yang sama juga terjadi pada kapasitas terpasang dan kapasitas tersambung di PT. Bakrie Telecom.

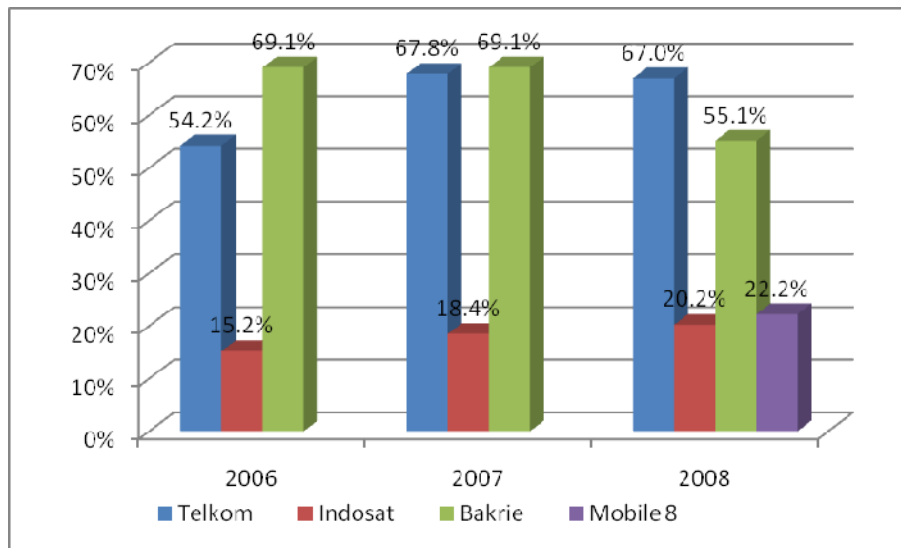
Gambar 6.3. Kapasitas dan Telepon tersambung telepon tetap wireless 2006-2008



Tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang untuk telepon tetap wireless menunjukkan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi bukan hanya oleh PT. Telkom, namun juga oleh PT. Bakrie Telecom. Dari gambar 6.4 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas Telkom meningkat dari 54,2% pada 2006 menjadi 67% pada 2008 meskipun pada 2008 kapasitas

terpasang sambungan Telkom ditingkatkan. Sementara tingkat kapasitas Bakrie mencapai hampir 70%. Namun ini lebih disebabkan kapasitas terpasang Bakrie yang masih kecil bahkan dibawah Indosat. Sehingga ketika kapasitas terpasangnya ditingkatkan pada 2008, tingkat pemanfaatannya menurun menjadi 55%. Indosat menunjukkan pemanfaatan yang rendah atas kapasitas yang dimiliki. Secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir pemanfaatan kapasitasnya kurang dari 20%.

Gambar 6.4. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon tetap wireless 2006 - 2008



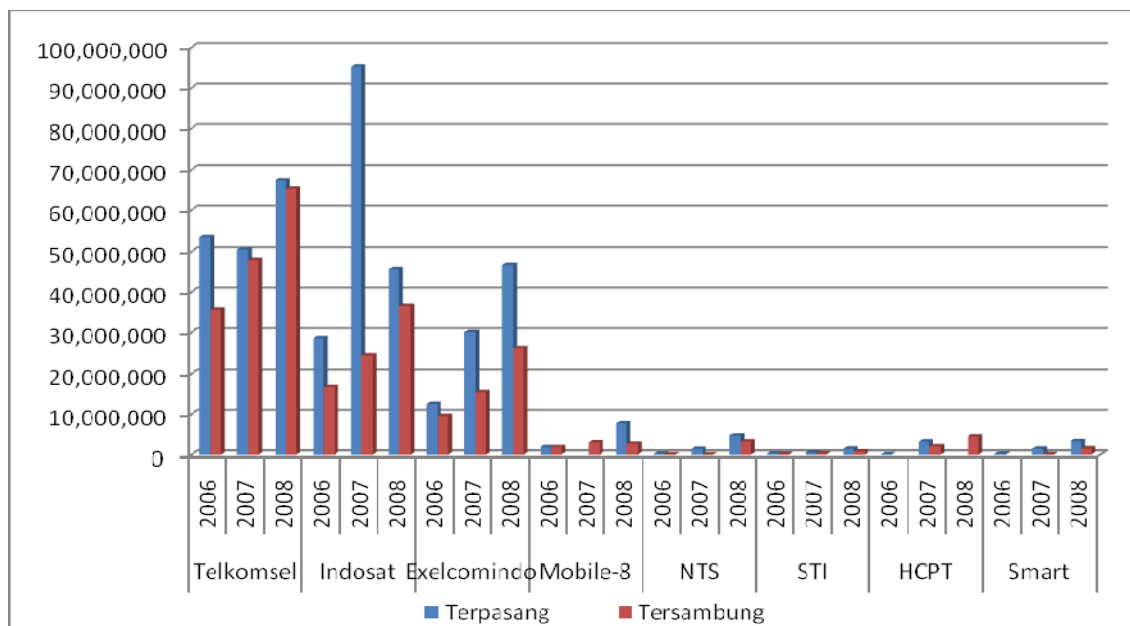
Untuk penyelenggaraan telepon tersambung bergerak, terdapat tiga pemain utama yang memiliki kapasitas terpasang sambungan relatif jauh lebih besar dibanding operator lainnya yaitu Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo dengan kapasitas terpasang sambungan pada tahun 2008 mencapai lebih dari 45 ribu sambungan. Sementara operator lain memiliki kapasitas sambungan yang kurang dari 10 ribu sambungan. Pertumbuhan kapasitas terpasang telepon bergerak juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan terutama yang berasal dari tiga operator utama kecuali Indosat yang kapasitas terpasangnya mengalami penurunan hampir 50% dari tahun 2007 ke 2008 dan menyebabkan total kapasitas terpasang sambungan telepon bergerak pada tahun 2008 menurun 3,1%. Secara rata-rata, pertumbuhan kapasitas terpasang telepon bergerak dalam tiga tahun terakhir mencapai 42,5% sementara peningkatan kapasitas tersambung mencapai 48,5%. Dengan demikian terjadi peningkatan pemanfaatan kapasitas.

Tabel 6.4. Kapasitas dan Telepon Tersambung telepon Bergerak Tahun 2006 - 2008

Operator	2006		2007		2008	
	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung
Telkomsel	53.300.000	35.597.000	50.500.000	47.890.000	67.300.000	65.299.991
Indosat	28.557.254	16.704.729	95.230.280	24.545.422	45.651.920	36.510.246
Excelcomindo	12.520.054	9.527.970	30.045.325	15.469.000	46.645.061	26.015.517
Mobile-8	1.825.888	1.825.888		3.012.801	7.748.400	2.701.914
Natrindo Telepon Seluler	257.481	12.715	1.451.085	4.788	4.719.107	3.234.800
STI	241.500	134.713	488.000	310.464	1.494.134	784.343
Hutchison CP Telecommuni-cation	132.600		3.250.000	2.039.406		4.500.609
Smart Telecom	200.000		1.470.000	115.000	3.300.000	1.530.823
Jumlah	97.034.777	63.803.015	182.434.690	93.386.881	176.858.622	140.578.243

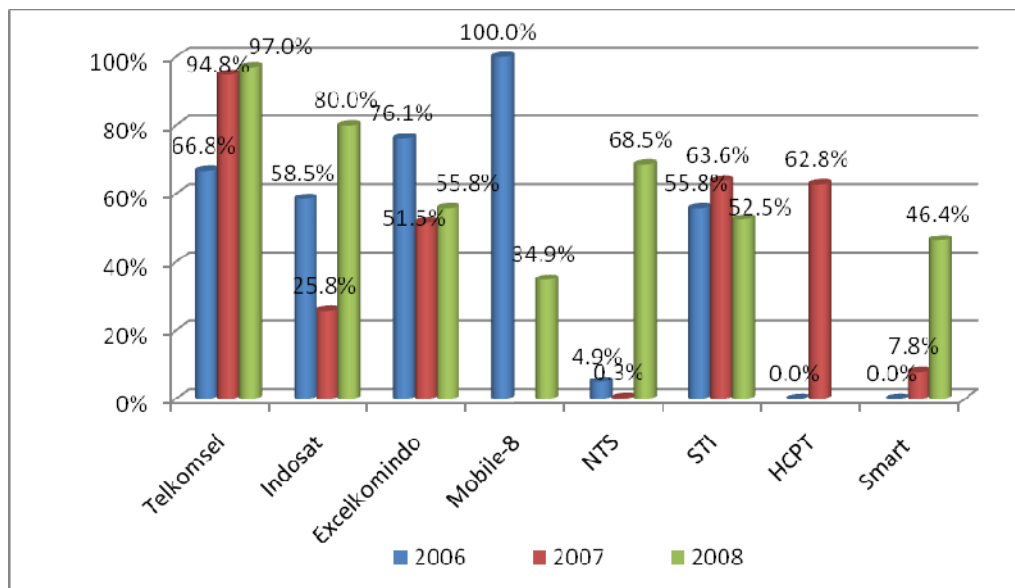
Perbandingan antara kapasitas terpasang dan tersambung pada gambar 6.5 menunjukkan bahwa untuk Telkomsel, selisih antara kapasitas terpasang dengan tersambung tidak terlalu besar. Namun untuk Indosat, terdapat selisih yang sangat besar antara kapasitas terpasang dengan tersambung pada tahun 2007. Hal inilah yang diduga menyebabkan kapasitas terpasang Indosat pada tahun 2008 diturunkan. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa selain ketiga operator utama tersebut, operator lain memiliki kapasitas terpasang maupun tersambung yang masih rendah.

Gambar 6.5. Kapasitas dan Telepon tersambung telepon bergerak 2006-2008



Dari sisi tingkat pemanfaatan kapasitas seperti diperlihatkan gambar 6.6, menunjukkan bahwa pemanfaatan kapasitas oleh Telkomsel sudah cukup tinggi dan meningkat signifikan dari 66,8% pada 2006 menjadi 97% pada 2008. Sementara Indosat yang tingkat pemanfaatan kapasitasnya hanya mencapai 25,8% meningkat menjadi 80% pada 2008 dengan adanya penurunan kapasitas terpasang pada satu sisi dan terjadinya peningkatan sambungan pada sisi lain. Exelcomindo mengalami penurunan pemanfaatan kapasitas dari 78% pada 2006 menjadi hanya 55,8%. Namun hal ini disebabkan oleh langkah peningkatan kapasitas terpasang yang dilakukan Exelcomindo sehingga meskipun terjadi peningkatan sambungan, pemanfaatan kapasitasnya masih belum optimal.

Gambar 6.6. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon bergerak 2006 - 2008



Operator telepon bergerak yang kecil seperti STI, HCPT dan Smart menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas yang relatif cukup baik dengan pemanfaatan kapasitas sudah lebih dari 60%. HCPT misalnya pada tahun 2008 pemanfaatan kapasitas sambungannya sudah mencapai 62,8% meskipun tahun sebelumnya masih sangat rendah. Sementara Smart Telecom juga menunjukkan perkembangan pemanfaatan kapasitas yang signifikan dari kurang 10% sampai 2007, pada tahun 2008 sudah mencapai 46,4%.

6.3.3. Perkembangan Pelanggan Jaringan Telekomunikasi.

Jumlah pelanggan jaringan tetap lokal menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2008 terutama untuk jaringan nirkabel (wireless). Untuk jaringan tetap kabel, jumlah

pelanggan sebenarnya tidak menunjukkan penambahan yang berarti, bahkan menunjukkan trend yang fluktuatif dimana jumlah pelanggan dalam 5 tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan pada 2006 namun menurun kembali sejak 2007.

Sementara untuk jaringan tetap nirkabel menunjukkan trend peningkatan yang sangat pesat. Dalam lima tahun terakhir sampai Maret 2009, jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel telah meningkat sekitar lima kali lipat dibanding tahun 2004 dengan peningkatan dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata 97% per tahun. Peningkatan paling signifikan berasal dari dua operator utama yaitu Telkom Flexi dan Bakrie Telecom yang meningkat masing-masing 87,1% dan 160,5% per tahun dalam lima tahun terakhir.

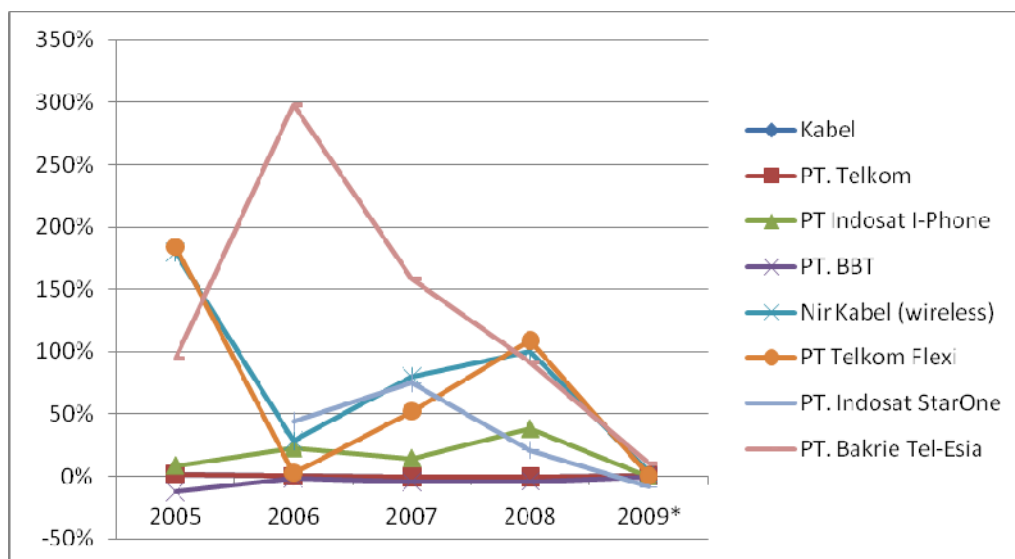
Tabel 6.5. Perkembangan Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2005 - 2009

No	Jenis Infrastruktur	2005	2006	2007	2008	2009*
A	Kabel	8.710.385	8.738.343	8.717.872	8.674.228	8.701.445
1	PT. Telkom	8.686.131	8.709.211	8.685.000	8.629.783	8.657.000
2	PT Indosat I-Phone	21.724	26.632	30.479	42.145	42.145
3	PT. BBT	2.530	2.500	2.393	2.300	2.300
B	Nir Kabel (wireless)	4.683.363	6.014.031	10.811.635	21.703.843	22.460.425
1	PT Telkom Flexi	4.061.800	4.175.853	6.363.000	13.305.181	13.399.000
	Prabayar	3.240.500	3.381.426	5.535.000	12.568.620	12.715.000
	Pasca bayar	821.300	794.427	828.000	736.561	684.000
2	PT. Indosat StarOne	249.434	358.980	627.934	761.589	698.774
	Prabayar	229.726	338.435	594.203	681.362	621.529
	Pasca bayar	19.708	20.545	33.731	80.227	77.245
3	PT. Bakrie Tel- Esia	372.129	1.479.198	3.820.701	7.304.543	8.030.121
	Prabayar	351.826	1.414.920	3.695.817	7.196.518	7.931.221
	Pasca bayar	20.303	64.278	124.884	108.025	98.900
4	PT. Mobile-8				332.530	332.530
	Prabayar					
	Pasca bayar					
	Jumlah	13.393.748	14.752.374	19.529.507	30.378.071	31.161.870

Peningkatan yang pesat pada jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel tidak terlepas dari persaingan yang ketat antar operator telepon tetap nirkabel sehingga masing-masing berusaha menarik pelanggan sebanyak mungkin diantaranya dengan mempermudah proses menjadi pelanggan dan fasilitas yang ditawarkan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian dari operator telepon tetap kabel dalam usaha meningkatkan jumlah pelanggan.

Trend pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap semakin jelas ditunjukkan oleh gambar 6.7. Pada gambar 6.7 terlihat pertumbuhan pelanggan dari operator telepon tetap kabel yang rendah dan memiliki kecenderungan menurun. Sementara pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel meskipun menunjukkan trend pertumbuhan yang fluktuatif, namun berada pada level pertumbuhan yang tinggi seperti ditunjukkan oleh pertumbuhan pelanggan Bakrie Tel. (Esia) dan Telkom (Flexi). Fluktuasi ini diduga lebih disebabkan oleh persaingan dan strategi pemasaran baru yang ditawarkan oleh masing masing operator. Sehingga ketika pertumbuhan pelanggan dari satu operator telepon nirkabel menurun, pertumbuhan pelanggan operator lain justru meningkat.

Gambar 6.7. Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2004-2009

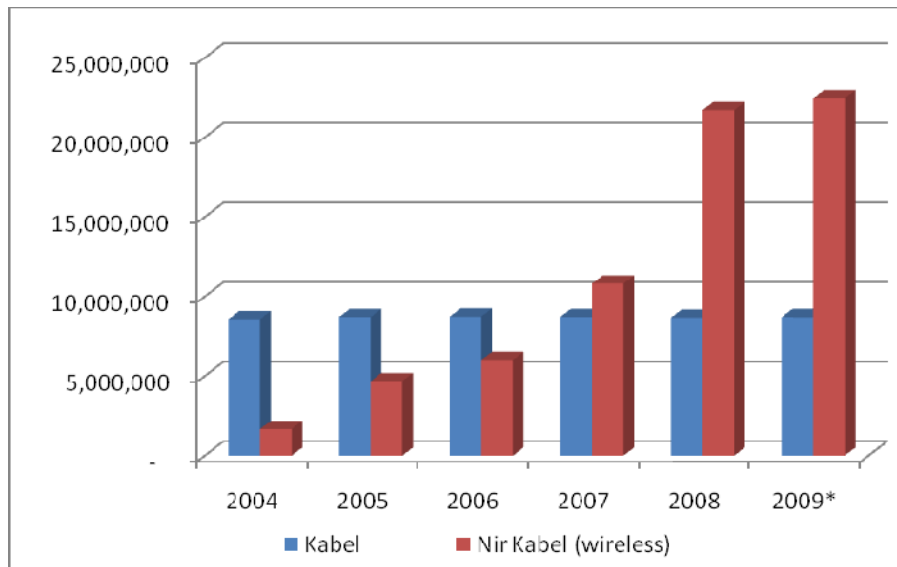


*) Sampai Juni 2009

Jika dibandingkan antara jumlah pelanggan telepon tetap kabel dan nirkabel, gambar 6.8 menunjukkan bahwa jumlah pelanggan telepon tetap kabel cenderung stagnan. Sementara pelanggan telepon tetap nirkabel menunjukkan peningkatan yang sangat cepat dan besar. Bahkan sejak tahun 2007, jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel telah lebih besar daripada jumlah pelanggan tetap kabel dan mulai tahun 2008, jumlah pelanggan tetap nirkabel telah jauh lebih banyak daripada pelanggan telepon tetap kabel.

Jumlah pelanggan telepon tetap kabel dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh 0,3% per tahun sementara jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel tumbuh 9,2% per tahun

Gambar 6.8 Perbandingan Jumlah Pelanggan Telepon Kabel dan Nirkabel 2004-2009*



*) Sampai Maret 2009

Dari sisi jumlah pelanggan, penyelenggaraan telepon tetap nirkabel didominasi oleh dua operator utama yaitu PT. Telkom dengan produk Telkom Flexi dan PT. Bakrie Telecom dengan produk Esia. Tabel 6.6 menunjukkan bahwa jumlah pelanggan kedua operator ini sampai Maret 2009 masing-masing berjumlah 12,4 juta dan 8,03 juta pelanggan. Jika digabungkan, kedua operator ini menguasai lebih dari 95% pangsa pasar untuk telepon tetap nirkabel di Indonesia. Dua operator yang baru muncul belakangan dalam pasar telepon tetap nirkabel yaitu PT. Indosat melalui produk StarOne dan PT. Mobile-8 melalui produk Hapi masih kecil jumlah pelanggannya. Bahkan untuk StarOne yang telah muncul sejak tahun 2004, jumlah pelanggannya justru menurun dari 2008 ke 2009.

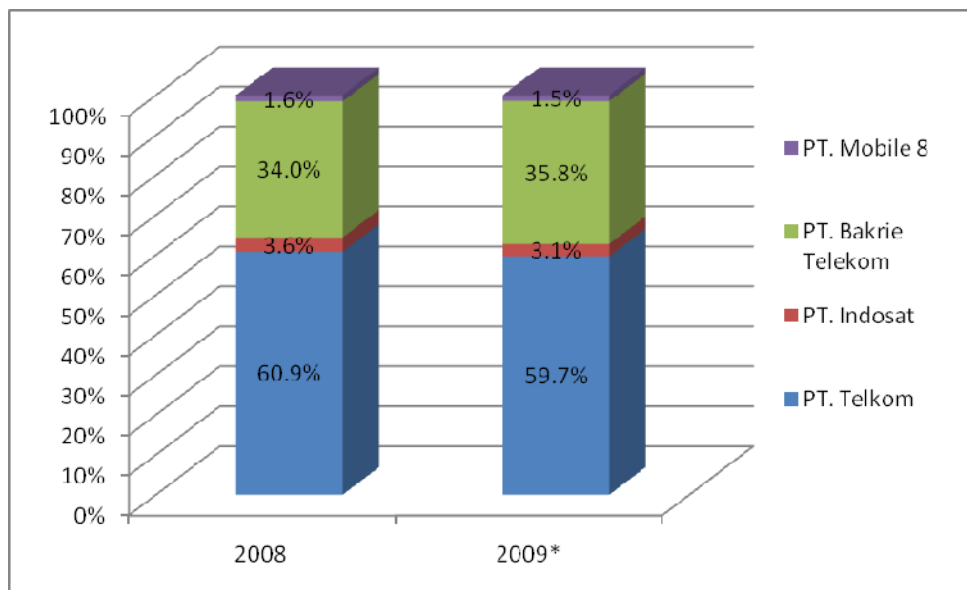
Tabel 6.6. Profil Penyelenggara Jaringan Telepon tetap Wireless

No	Operator	Produk	Tahun Mulai Operasi	2008		2009*	
				Jumlah Pelanggan	Pangsa Pasar	Jumlah Pelanggan	Pangsa Pasar
1	PT. Telkom	Telkom Flexi	2002	13.051.181	61,8%	13.399.000	60,6%
2	PT. Indosat	StarOne	2004	761.589	3,6%	698.774	3,2%
3	PT. Bakrie Telekom	Esia	2003	7.302.543	34,6%	8.030.121	36,3%
4.	PT. Mobile 8	Hapi	2008	332.530	1,6%	332.530	1,5%

*) Sampai Maret 2009

Dari penguasaan pangsa pasar, seperti ditunjukkan pada gambar 6.9, terjadi sedikit pergeseran dalam penguasaan pangsa pasar telepon tetap nirkabel ini. Telkom Flexi yang menguasai 60,0% pangsa pasar pada tahun 2008, sampai Maret 2009 mengalami penurunan pangsa pasar menjadi 59,7%. Sementara PT. Bakrie Telecom melalui produk Esia, pangsa pasarnya meningkat dari 34% pada tahun 2008 menjadi 35,8% sampai Maret 2009. Peningkatan ini juga merupakan pengambilan sebagian pangsa dari dua operator kecil lain yaitu PT. Indosat dan PT. Mobile-8 yang juga mengalami penurunan pangsa pasar. Peningkatan pangsa pasar dari PT. Bakrie Telecom dalam pasar telepon tetap nirkabel tidak terlepas dari berbagai strategi pemasaran dan inovasi produk yang semakin menarik dan terjangkau oleh konsumen, termasuk melalui berbagai paket *bundling* dengan pesawat telepon (*handset*) yang menggunakan operator PT. Bakrie Telecom (Esia).

Gambar 6.9. Komposisi Pangsa Pasar Penyelenggara Jaringan Telepon Tetap Wireless



*) Sampai Maret 2009

Pada pasar telepon bergerak seluler, juga terjadi peningkatan jumlah pelanggan khususnya sejak tahun 2005. Sampai dengan Maret 2009, jumlah pelanggan telepon bergerak seluler mencapai lebih dari 140 juta pelanggan yang berasal dari 8 operator telepon seluler bergerak di Indonesia. Peningkatan jumlah pelanggan ini berasal dari bertambahnya jumlah operator (dari hanya 4 operator pada 2004 menjadi 8 operator pada 2009) maupun peningkatan jumlah pelanggan yang meningkat di masing-masing operator dari variasi

produk yang ditawarkan yang semakin mudah diakses konsumen. Sebagian besar dari pelanggan telepon bergerak seluler ini adalah pelanggan dengan sistem Prabayar yang proporsinya mencapai 97,5% dari total pelanggan telepon bergerak seluler. Pada masing-masing operator, pelanggan jenis Prabayar ini proporsinya berkisar antara 95% sampai dengan 98%. Pada operator utama seperti Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo, pelanggan Prabayar ini proporsinya masing-masing mencapai 97,3%, 97% dan 98,4%.

Tabel 6.7. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler

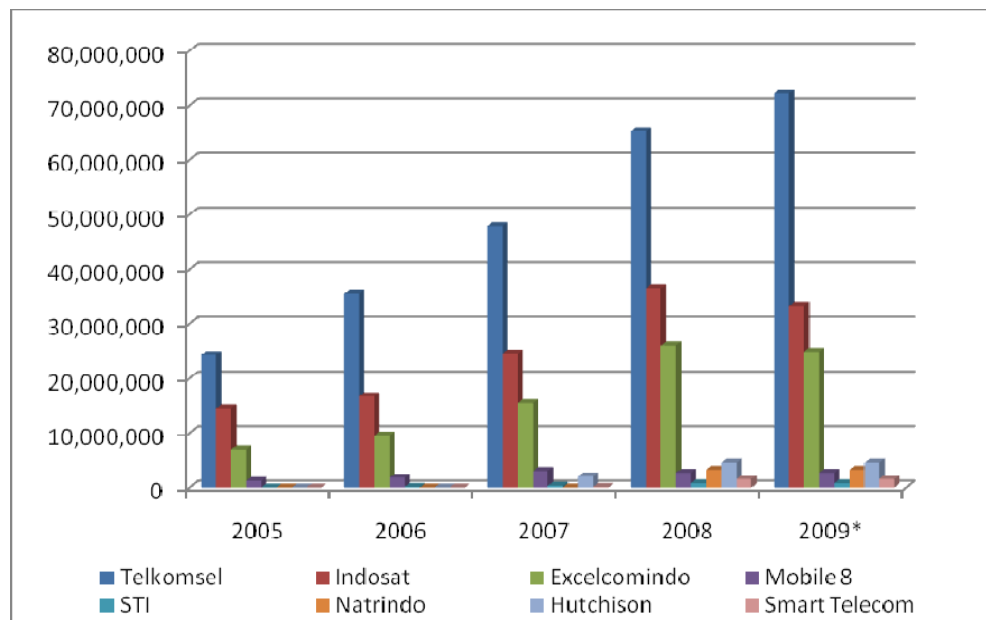
No	Operator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Telkomsel	16.291.000	24.269.000	35.597.000	47.890.000	65.299.991	72.133.000
	Prabayar	14.963.000	22.798.000	33.935.000	45.977.000	63.359.619	70.179.000
	Pasca bayar	1.328.000	1.471.000	1.662.000	1.913.000	1.940.372	1.954.000
2	Indosat	9.754.607	14.512.453	16.704.729	24.545.422	36.510.246	33.266.296
	Prabayar	9.214.663	13.836.046	15.878.870	23.945.431	35.591.033	32.267.029
	Pasca bayar	539.944	676.407	825.859	599.991	919.213	999.267
3	Excelcomindo	3.791.000	6.978.519	9.527.970	15.469.000	26.015.517	24.892.000
	Prabayar	3.743.000	6.802.325	9.141.331	14.988.000	25.599.297	24.500.000
	Pasca bayar	48.000	176.194	386.639	481.000	416.220	392.000
4	Mobile 8	500.000	1.200.000	1.825.888	3.012.801	2.701.914	2.701.914
	Prabayar		1.150.000	1.778.200	2.920.213	2.552.975	2.552.975
	Pasca bayar		50.000	47.688	92.588	148.939	148.939
5	STI		10.609	134.713	310.464	784.343	784.343
	Prabayar			133.746	310.176	784.129	784.129
	Pasca bayar			967	288	214	214
6	Natrindo		21.537	12.715	4.788	3.234.800	3.234.800
	Prabayar			10.155	4.788	3.234.800	3.234.800
	Pasca bayar			2.560	-	-	-
7	Hutchison		-	-	2.039.406	4.500.609	4.500.609
	Prabayar				2.036.202	4.490.202	4.490.202
	Pasca bayar				3.204	10.407	10.407
8	Smart Telecom		-	-	115.000	1.530.823	1.530.823
	Prabayar					1.456.372	1.456.372
	Pasca bayar					74.451	74.451
	Jumlah	30.336.607	46.992.118	63.803.015	93.386.881	140.578.243	143.043.785

*) Sampai Maret 2009

Gambar 6.10 menunjukkan perkembangan jumlah pelanggan dari masing-masing operator yang menunjukkan trend peningkatan pada hampir semua operator secara proporsional. Dari tahun 2004 sampai dengan Maret 2009, pelanggan telepon bergerak seluler meningkat

371,5% dengan pertumbuhan pelanggan rata-rata 37,9% per tahun. Peningkatan jumlah pelanggan oleh masing-masing operator dalam lima tahun terakhir rata-rata diatas 30% per tahunnya dengan pertumbuhan pelanggan terbesar dialami oleh Exelcomindo dan Mobile-8 yang meningkat 49,4% per tahun. Dari gambar tersebut juga terlihat adanya tiga operator yang menjadi pemain utama dalam telepon seluler bergerak yaitu Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo yang memang muncul lebih awal.

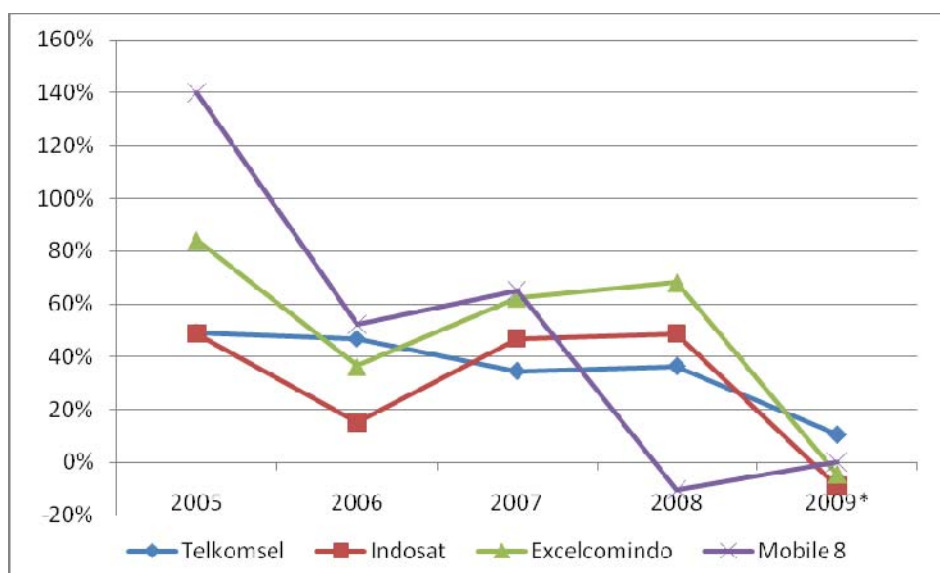
Gambar 6.10. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler



*) Sampai Maret 2009

Dari sisi pertumbuhan pelanggan, gambar 6.11 menunjukkan adanya trend penurunan pertumbuhan pelanggan telepon bergerak seluler. Jika pada tahun 2005, hampir semua operator memiliki pertumbuhan pelanggan yang tinggi, pada tahun 2006 pertumbuhan melambat juga hampir pada semua operator telepon bergerak seluler. Penurunan ini diduga terkait dengan kenaikan harga BBM pada akhir 2005 yang cukup tinggi dan memicu kenaikan harga-harga lain. Hal ini disamping mengurangi permintaan di sisi konsumen, juga menyebabkan operator mengurangi promosi dan pengembangan produk. Pertumbuhan meningkat lagi pada tahun 2007 namun kembali menurun pada 2008 dan 2009 (sampai bulan Maret). Pertumbuhan pelanggan Telkomsel mengalami penurunan yang paling tajam meskipun dari 2008 ke Maret 2009 justru menunjukkan peningkatan dasar operator lain menurun pertumbuhannya.

Gambar 6.11. Perkembangan Pertumbuhan Pelanggan Telepon Bergerak Seluler



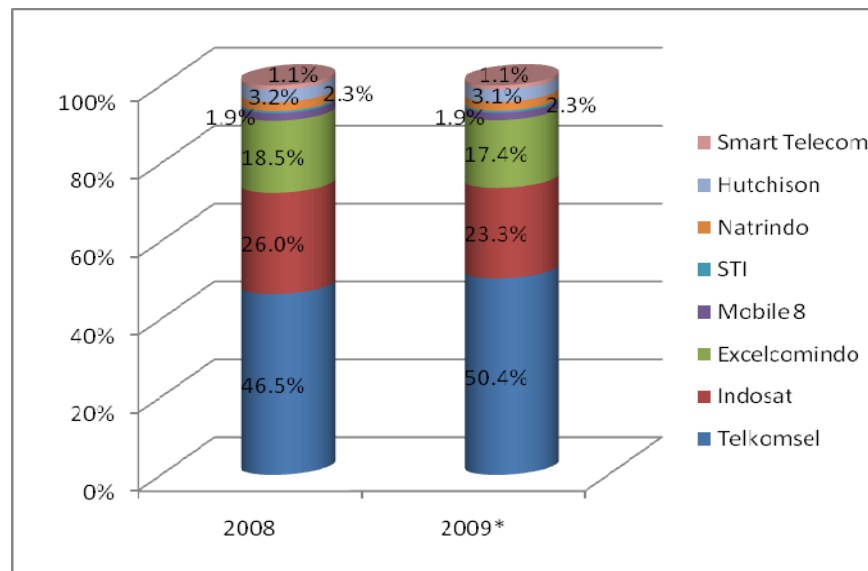
*) Sampai Maret 2009

Trend penurunan pertumbuhan pelanggan telepon bergerak seluler dalam 4 tahun terakhir diduga disebabkan oleh mulai adanya kejenuhan pasar akibat persaingan yang sangat ketat diantara operator. Jumlah pelanggan yang sudah melebihi setengah penduduk Indonesia menjadi indikasi pasar yang sudah mulai jenuh

Pasar telepon bergerak seluler didominasi oleh tiga operator utama yaitu Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo dengan penguasaan pangsa pasar mencapai 91,1% oleh ketiga operator tersebut sampai Maret 2009. Pertumbuhan pelanggan Telkomsel yang meningkat di 2009 menyebabkan terjadinya pergeseran pangsa pasar telepon bergerak seluler dari 2008 ke 2009, khususnya diantara ketiga operator tersebut. Pangsa pasar Telkomsel meningkat dari 46,5% menjadi 50,4% di tahun 2009. Peningkatan ini berasal dari menurunnya pangsa pasar Indosat dan Exelcomindo masing-masing dari 26% dan 18,5% pada tahun 2008 menjadi 23,3% dan 17,4% pada Maret 2009.

Sisa pangsa pasar yang kurang dari 10% diperebutkan oleh empat operator yang relatif baru dengan pangsa terbesar ada di Hutchinson melalui produk Three (3) yang mengambil pangsa 3,1% pada 2009. Perolehan ini cukup fenomenal mengingat Hutchinson relatif lebih belakangan muncul di banding Mobile-8 namun memiliki pangsa pasar yang lebih besar.

Gambar 6. 12. Pergeseran pangsa pasar telepon bergerak seluler



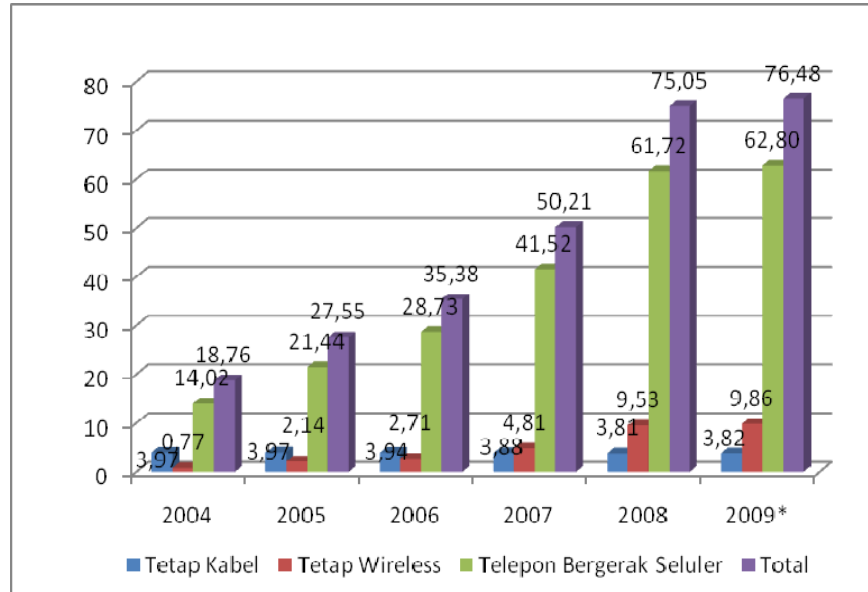
6.3.4. Teledensitas.

Teledensitas adalah indikator yang lazim digunakan di lingkungan telekomunikasi untuk menunjukkan jumlah per seratus jiwa yang dapat dilayani oleh satu satuan sambungan telepon. Sampai dengan Juni 2009 teledensitas telepon tetap di Indonesia mencapai 3,82%. Ini artinya, 4 satuan sambungan telepon tetap kabel yang terpasang digunakan 100 orang. Angka ini tergolong rendah terutama jika dibandingkan dengan negara maju atau bahkan negara tetangga ASEAN. Namun jika dilihat berdasarkan penggunaan seluruh jenis telepon termasuk telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler, teledensitas Indonesia sudah mencapai 76,48%. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir. Perkembangan teledensitas Indonesia untuk masing-masing jenis telepon ditunjukkan oleh gambar 6.13.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa teledensitas meningkat dengan pesat dalam lima tahun terakhir sejalan dengan peningkatan teledensitas telepon bergerak seluler. Sementara untuk teledensitas telepon tetap kabel sendiri sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan yaitu dari 3,97 pada tahun 2004 bahkan menurun menjadi 3,82 sampai Juni 2009. Bahkan pada tahun 2007, teledensitas telepon tetap nirkabel sudah lebih tinggi

daripada telepon tetap kabel yang awalnya lebih tinggi. Namun demikian, untuk telepon tetap baik kabel maupun nirkabel, masih menunjukkan tingkat teledensitas yang rendah.

Gambar 6.13. Perkembangan Teledensitas untuk tiap jenis Telepon di Indonesia



6.3.5. Pendapatan Operator Jaringan Telekomunikasi.

Untuk menilai kinerja Pendapatan dari operator telepon, digunakan tiga indikator yaitu :

- Pendapatan operasional,
- EBITDA (Earning Before Interest Tax Depreciation and Ammortization), dan
- ARPU (Average Revenue Per User).

6.3.5.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional operator jaringan telekomunikasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan kecuali pada Mobile-8. Pendapatan operator mencerminkan total pendapatan yang didapat oleh operator dalam pengoperasian jasa pelayanan telekomunikasi bergerak kepada pelanggan. Tabel 6.8 yang menampilkan perkembangan pendapatan operasional dari operator telepon seluler menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan dari operator, maka pertumbuhan pendapatannya cenderung akan semakin kecil meskipun secara nominal nilainya besar. Telkom Group (mencakup Telkomsel dan Telkom-Flexy) yang pada tahun 2008 membukukan pendapatan lebih dari Rp.

60 Trilyun, pertumbuhan pendapatannya pada 2009 justru hanya 2,1%. Sementara Bakrie Telecom yang memiliki pendapatan operasional pada 2008 baru mencapai Rp. 2.2 triliun menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang cukup besar yaitu 70,7%.

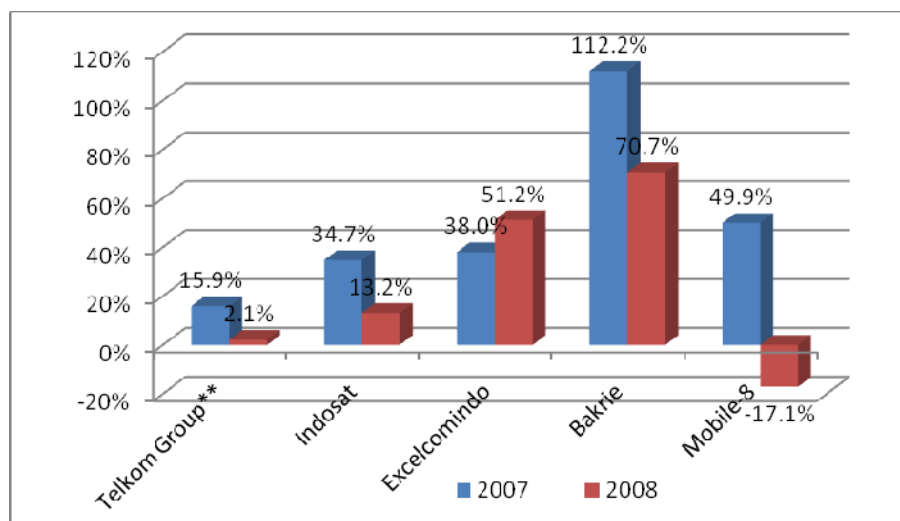
Tabel 6.8. Pendapatan Operasional Operator Telepon Seluler (Rp. Milyar)

No	Operator	2006	2007	2008
1	Telkom Group**	51.294	59.440	60.689
3	Indosat	12.239	16.488	18.659
4	Excelcomindo	4.682	6.460	9.765
5	Bakrie	608	1.290	2.202
6	Mobile-8	589	883	732

**) mencakup seluruh operator telekomunikasi yang berada dalam group PT. TELKOM

Pertumbuhan pendapatan operasional juga menunjukkan trend penurunan dari 2007 ke 2008 seperti yang terlihat pada gambar 6.14. Mobile-8 bahkan menunjukkan penurunan pendapatan operasional sampai 17,1% setelah pada tahun 2007 pendapatan operasionalnya tumbuh hampir 50%. Peningkatan pertumbuhan operasional hanya dialami oleh PT. Excelcomindo dimana pendapatan operasionalnya pada tahun 2008 tumbuh 51,2% setelah tahun sebelumnya tumbuh 38%. Kecenderungan penurunan Pendapatan operasional ini sejalan dengan semakin menurunnya pertumbuhan pelanggan karena persaingan yang semakin ketat sementara pasar mulai jenuh. Sementara pertumbuhan pendapatan operasional Excelcomindo yang masih menunjukkan peningkatan karena strategi pemasaran yang cukup berhasil, termasuk dengan fasilitas dan bonus bagi pelanggan.

Gambar 6.14. Pertumbuhan Pendapatan Operator Telepon Seluler



6.3.5.2. EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Ammortization*)

EBITDA adalah pendekatan pendapatan yang dihitung dari penerimaan operator telepon seluler sebelum dikurangi dengan bunga, pajak, penyusutan/depresiasi dan amortisasi. Tabel 6.9 menyajikan EBITDA dari lima operator utama telepon seluler di Indonesia. Dari tabel tersebut terlihat bahwa EBITDA dari Telkom Group yang mencakup Telkomsel dan Telkom-Flexi menunjukkan nilai yang jauh lebih besar daripada operator lainnya. Bahkan EBITDA dari Indosat belum sampai Rp. 10 Triliun. Namun secara umum, EBITDA operator telepon seluler menunjukkan trend peningkatan.

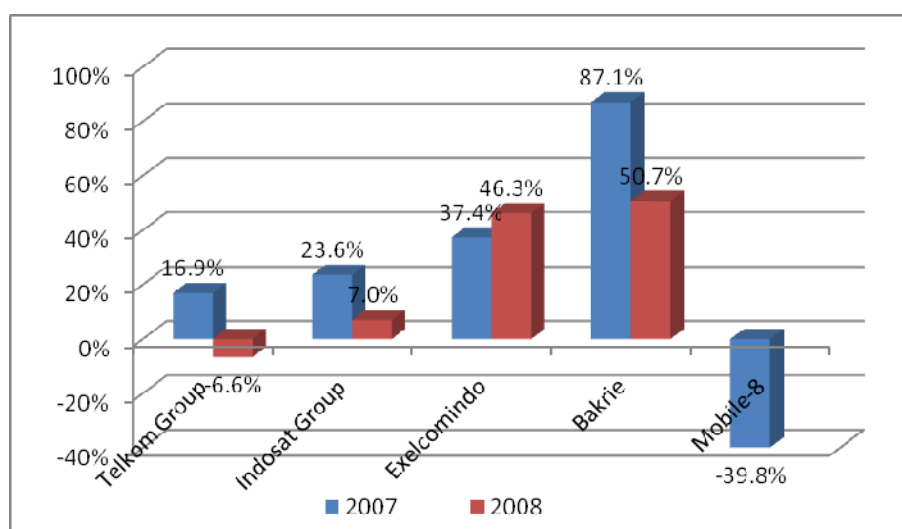
Tabel 6.9 EBITDA Operator Utama Telepon Seluler di Indonesia (Rp. Milyar)

No	Operator	2006	2007	2008
1	Telkom Group	31.716	37.067	34.621
2	Indosat Group	7.051	8.714	9.321
3	Exelcomindo	2.554	3.509	5.132
4	Bakrie	292	545	822
5	Mobile-8	397	239	N.A

Namun jika dilihat dari trend pertumbuhannya, gambar 6. 15 menunjukkan bahwa pada tahun 2008, penurunan EBITDA justru terjadi pada operator yang paling besar yaitu Telkom Group. Setelah tumbuh sebesar 16,9% pada tahun 2007, EBITDA Telkom Group justru mengalami penurunan sebesar 6,6% pada 2008. Penurunan EBITDA Telkom Group pada tahun 2008 diperkirakan terkait dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan dengan cukup besar pada tahun 2008 yang berimplikasi pada meningkatnya biaya penyusutan dan lainnya. Exelcomindo menunjukkan pertumbuhan EBITDA yang semakin meningkat dari 2007 ke 2008 seiring dengan meningkatnya pendapatan operasionalnya.

Sementara Bakrie Telecom menunjukkan pertumbuhan EBITDA paling tinggi dibanding operator seluler lainnya. Peningkatan EBITDA dari Bakrie Telekom ini terkait dengan ekspansi yang dilakukan Bakrie Telekom yang diiringi dengan berbagai inovasi produk dan perbaikan kualitas layanan yang menyebabkan bertambahnya pelanggan secara signifikan seperti ditunjukkan pada tabel sebelumnya.

Gambar 6.15. Pertumbuhan EBITDA Operator Utama Telepon Seluler



6.3.5.3. ARPU (Average Revenue Per User)

ARPU menunjukkan pendapatan rata-rata operator dari satu pelanggan yang menggunakan produknya. Artinya, meskipun jumlah pelanggan sedikit, namun bisa jadi ARPU dari operator tersebut besar jika pelanggan cukup intensif menggunakan jasa sambungan telepon seluler dari operator tersebut. Tabel 6.10 menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan ARPU pada semua operator dengan penurunan yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Bakrie Telekom mengalami penurunan ARPU dari Rp. 500.953 pada 2004 menjadi Rp.39.000. Artinya, jika semula Bakrie Telecom memperoleh Pendapatan Rp. 500.935 per pelanggannya pada 2004, menurun hanya menjadi Rp Rp. 39.000 per pelanggan.

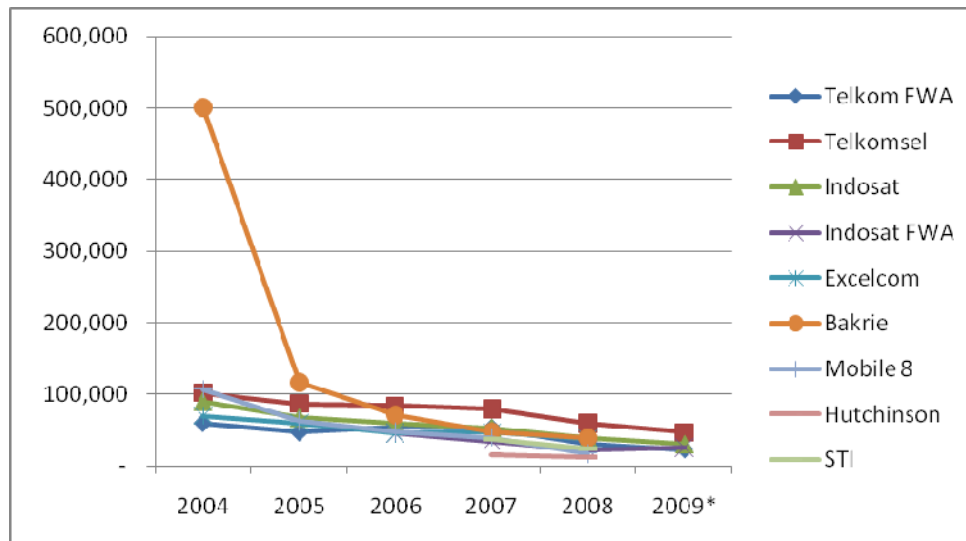
Tabel 6.10. Perkembangan ARPU Telepon Tahun 2004-2009*

Operator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Telkom FWA	60.000	47.000	54.000	53.000	31.335	23.000
Telkomsel	102.000	87.000	84.000	80.000	59.000	47.000
Indosat	89.489	67.113	60.023	52.828	38.282	30.625
Indosat FWA	N/A	N/A	45.905	34.641	22.858	25.601
Excelcom	70.000	60.000	46.000	47.000	37.000	N.A
Bakrie	500.935	116.913	70.891	48.315	39.000	N.A
Mobile 8	107.273	62.332	48.013	39.791	17.621	N.A
Hutchinson				14.971	11.414	N.A
STI				37.147	23.857	

*) Sampai Kwartal I 2009

Penurunan ARPU dari 2004 ke Maret 2009 atau Desember 2008 berkisar antara 53% sampai 92% dengan penurunan terbesar dialami oleh Bakrie Telekom yang ARPU-nya menurun dari 2004 ke 2008 sebesar 92,2%. Secara rata-rata, penurunan ARPU yang dialami oleh operator seluler berkisar antara 14% sampai 41,8% per tahunnya. Gambar 6.16 menunjukkan penurunan ARPU yang sangat tajam yang dialami oleh Bakrie Telekom, sementara operator lain juga menunjukkan penurunan ARPU meskipun cenderung lebih landai. Penurunan ARPU ini diduga terkait dengan kejenuhan pasar dan semakin banyaknya pelanggan telepon baik tetap maupun bergerak sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan operator dan sebagian pelanggan tidak hanya menggunakan satu operator secara intensif. Kemudahan menjadi pelanggan juga menyebabkan pelanggan mudah berganti operator telepon seluler.

Gambar 6.16. Trend Perkembangan ARPU Operator Telepon di Indonesia



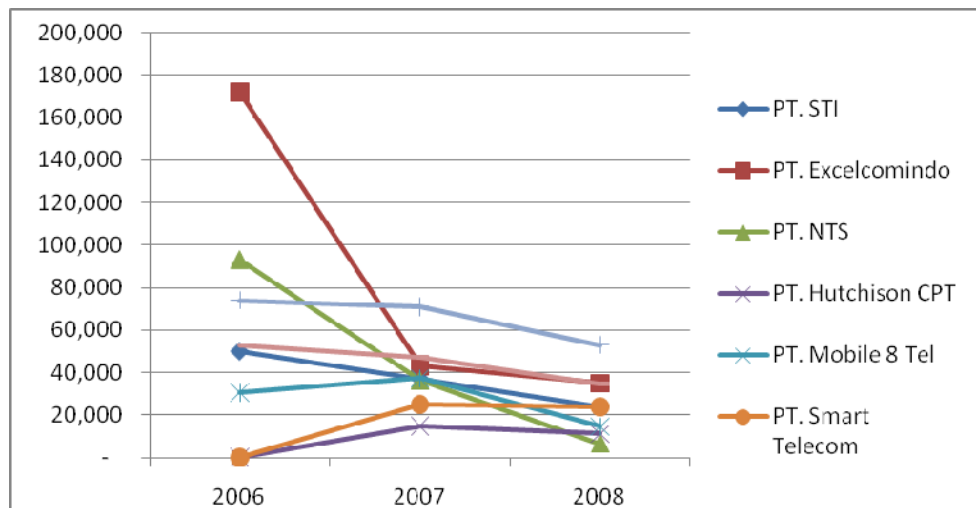
Jika dilihat secara khusus terhadap ARPU telepon bergerak seluler seperti ditunjukkan oleh Tabel 6.11 terlihat bahwa penurunan ARPU sangat terlihat untuk jenis pelanggan prabayar. Bahkan untuk operator telepon bergerak seluler yang sudah besar dan cukup dikenal oleh pelanggan seperti Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo. Penurunan ARPU prabayar dari Exelcomindo dari 2006 ke 2008 mencapai 79,7% dengan rata-rata penurunan 46,8% per tahun. Sementara penurunan ARPU prabayar untuk Telkomsel dan Indosat TBK dari 2006 ke 2008 mencapai 28,4% dan 34,3% dengan penurunan rata-rata 43% dan 17% per tahunnya.

Beberapa operator baru juga mengalami penurunan ARPU untuk jenis pelanggan prabayar meskipun tidak signifikan seperti ditunjukkan oleh gambar 6.17. Penurunan ARPU prabayar ini diduga terkait dengan persaingan yang ketat antar operator yang salah satunya dalam bentuk kemudahan untuk menjadi pelanggan prabayar (biaya awal yang semakin murah dengan banyak fasilitas) sehingga membuat pelanggan mudah berpindah operator tanpa harus intensif memanfaatkan jasa operator tersebut.

Tabel 6.11. Perkembangan ARPU Telepon Bergerak Seluler Tahun 2006 - 2008

No	Nama Operator	2006			2007			2008		
		Pra-bayar	Pasca bayar	Blend ed	Pra-bayar	Pasca bayar	Blend ed	Pra-bayar	Pasca bayar	Blend ed
1	STI	49.800	55.000	51.500	37.000	196.000	37.147	23.813	186.483	210.296
2	Excelcomindo	172.000	42.000	46.000	43.000	155.000	47.000	35.000	152.000	37.000
3	Natrindo Telepon Selular	93.159	29.027	56.128	36.124	48.351	41.666	6.500	0	6.500
4	Hutchison CPT	-	-	-	14.829	114.049	14.971	11.161	128.928	11.414
5	Mobile 8 Tel	30.803	100.899	32.838	37.218	115.312	39.791	14.495	73.963	17.621
6	Smart Telecom	-	-	-	25.000	110.000	45.000	24.000	55.000	26.000
7	Telkomsel	74.000	274.000	84.000	71.086	264.000	80.000	53.000	216.000	59.000
8	Indosat Tbk	52.713	194.761	60.023	47.028	182.682	52.828	34.654	182.147	38.282

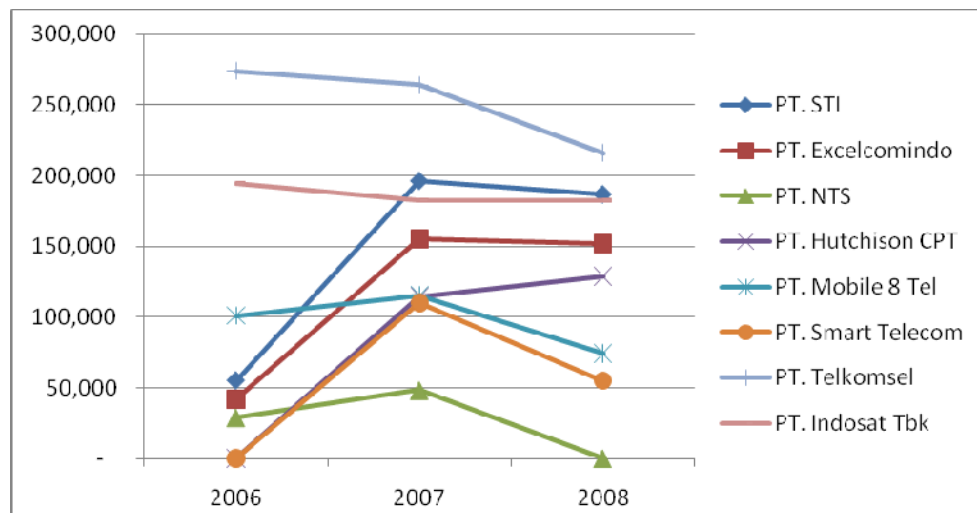
Gambar 6.17. Trend Perkembangan ARPU Prabayar Telepon Bergerak Seluler



Untuk pelanggan pasca bayar, ARPU penyelenggara telepon bergerak tidak terlalu menunjukkan trend penurunan. Gambar 6.18 menunjukkan untuk beberapa operator, ARPU pasca bayar justru menunjukkan kenaikan signifikan dari 2006 ke 2007 seperti yang dialami Excelcomindo dan terutama operator baru seperti Hutchinson, STI dan Smart Telecom

meskipun kemudian menurun kembali pada tahun 2008. Namun penurunan ARPU Prabayar ini pada tahun berikutnya tidak terlalu besar sehingga secara rata-rata, pertumbuhannya masih positif. Bahkan untuk Hutchinson, ARPU Prabayar-nya terus menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga menunjukkan trend peningkatan yang kuat. Hanya operator besar lama seperti Telkomsel dan Indosat yang menunjukkan trend penurunan ARPU dalam 3 tahun terakhir namun dengan penurunan yang relatif kecil.

Gambar 6.18 Trend Perkembangan ARPU Pascabayar Telepon Bergerak Seluler



Kinerja Pendapatan dengan indikator ARPU untuk jasa telepon juga menunjukkan trend yang fluktuatif, meningkat pada tahun 2007 namun kemudian menurun pada tahun 2008. Pola ini dialami oleh hampir semua operator telepon tetap baik untuk telepon tetap kabel maupun telepon tetap nirkabel Prabayar. Untuk telepon tetap nirkabel pascabayar dan campuran (*blended*), tabel 6.12 menunjukkan Pendapatan ARPU yang justru semakin menurun. Penurunan paling besar dialami oleh Indosat khususnya akibat penurunan yang terjadi pada tahun 2008 untuk ARPU telepon tetap kabel sehingga secara rata-rata penurunannya mencapai 43% per tahun. Sementara untuk telepon tetap nirkabel Prabayar dan nirkabel campuran, penurunan ARPU yang dialami Indosat mencapai 32% dan 23,8%.

ARPU dari Telkom sebagai operator utama telepon tetap menunjukkan trend penurunan yang tidak terlalu tajam. Penurunan ARPU untuk telepon tetap kabel PT. Telkom dalam 3 tahun terakhir hanya mencapai 3,5% per tahun, sementara untuk telepon tetap nirkabel Prabayar dan nirkabel pascabayar hanya 8% dan 9,5% per tahun. Penurunan cukup besar

hanya untuk telepon tetap nirkabel campuran yang mencapai 21,8% per tahun. Penurunan ARPU yang kecil dari PT. Telkom karena telepon tetap ini memiliki karakteristik khusus dimana pelanggan tidak mudah berpindah ke operator lain, apalagi Telkom adalah pemain utama untuk telepon tetap kabel. Penggunaan telepon tetap kabel untuk keperluan tertentu seperti bisnis dan pemerintahan memang tidak mudah tergantikan dengan penggunaan telepon bergerak sehingga penggunaan oleh pelanggan masih tinggi.

Tabel 6.12. Perkembangan ARPU Telepon Tetap

No	Operator	Tahun	Kabel	Nirkabel Prabayar	Nirkabel Pascabayar	Nirkabel Blended
1	PT. Telkom	2006	179.330	34.745	135.278	54.464
		2007	186.000	45.000	114.000	53.000
		2008	166.131	24.509	110.314	31.335
2	PT. Bakrie Telecom	2006	121.410	57.396	190.973	63.200
		2007	-	45.326	131.329	48.315
		2008	0	39.000	130.000	39.000
3	PT. Batam Bintan Telekomunikasi	2006	1.023.000			
		2007	856.000	-	-	-
		2008	776.198	0	0	0
4	PT. Indosat	2006	278.029	25.333	211.875	40.083
		2007	316.965	26.590	170.160	34.641
		2008	797	17.955	94.955	22.858

6.3.6. Biaya Operasional Penyelenggara Telekomunikasi

Biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh operator salah satunya ditunjukkan dengan biaya operasional operator telepon tetap maupun bergerak. Tabel 6.13 menunjukkan perkembangan biaya operasional masing-masing operator telekomunikasi. Dari tabel tersebut terlihat kecenderungan biaya operasional yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan dan kapasitas terpasang sambungan yang dilakukan oleh masing-masing operator seperti dipaparkan sebelumnya. Biaya operasional Telkom Group merupakan yang terbesar diantara operator lain karena mencakup penyelenggaraan jasa telepon tetap dan tetap bergerak. Pada tahun 2007 biaya operasional Telkom Group mencapai hampir Rp. 33 Triliun. Namun untuk operator telepon bergerak, biaya operasional Telkomsel mengalami peningkatan pesat dan sejak tahun 2005 sudah lebih besar dari biaya operasional Indosat yang sebelumnya lebih tinggi. Dalam lima tahun

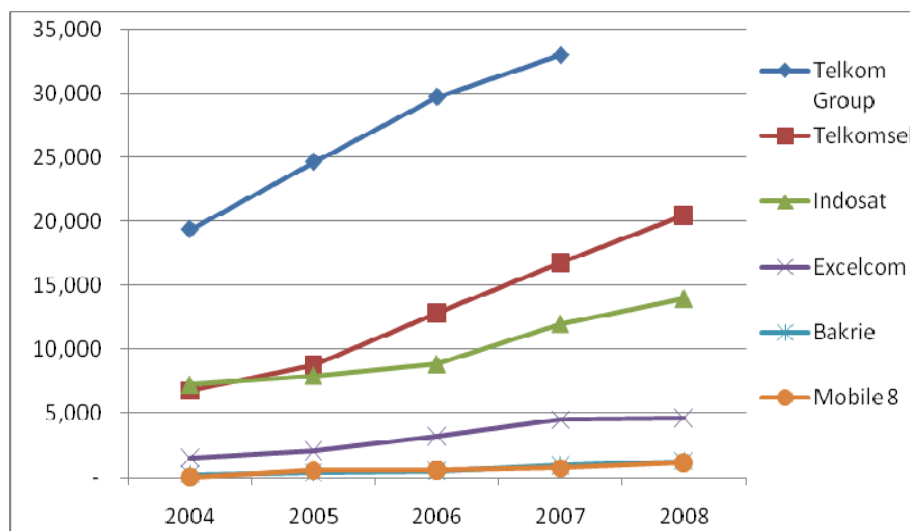
terakhir, peningkatan biaya operasional Telkomsel mencapai 202,8%, sementara biaya operasional Indosat dari 2004 ke 2008 hanya meningkat 92,5%. Operator telekomunikasi yang memiliki pangsa pasar lebih kecil seperti Bakrie dan Mobile 8 juga menunjukkan biaya operasional yang semakin besar.

Tabel 6.13. Perkembangan Biaya Operasional Operator Seluler 2004 - 2008 (Rp. Miliar)

Operator	2004	2005	2006	2007	2008
Telkom Group	19.360	24.636	29.701	32.967	NA
Telkomsel	6.745	8.771	12.836	16.792	20.425
Indosat	7.232	7.938	8.841	11.969	13.925
Excelcom	1.507	2.055	3.224	4.480	4.600
Bakrie	229	344	469	972	1.270
Mobile 8	N.A	530	560	715	1.119
Hutchinson					2.054
STI					344

Dari sisi pertumbuhan biayanya, gambar 6.19 menunjukkan semua operator menunjukkan dengan trend biaya operasional yang meningkat. Peningkatan terbesar dialami oleh Bakrie Telecom yang dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 56,1% diikuti dengan Exelcomindo yang meningkat rata-rata 33,7% dalam lima tahun terakhir. Sementara untuk operator besar, peningkatan terbesar dialami oleh Telkomsel dimana biaya operasionalnya meningkat 32,2% per tahun. Peningkatan biaya operasional paling rendah dialami oleh Indosat dimana biaya operasionalnya hanya meningkat rata-rata 18,2% per tahun.

Gambar 6.19 Trend Peningkatan biaya operasional operator telekomunikasi



6.3.7. Karyawan Operator Telekomunikasi

Pertumbuhan pelanggan yang pesat dan peningkatan kapasitas sambungan yang dilakukan oleh operator telekomunikasi ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan karyawan. Meskipun jumlah pelanggan meningkat pesat, namun jumlah karyawan operator seluler hanya meningkat sedikit seperti ditunjukkan oleh Tabel 6.14. Bahkan untuk beberapa operator seperti Telkom Group, Indosat dan Mobile-8 justru mengalami penurunan. Dalam lima tahun terakhir, karyawan Telkomsel hanya meningkat 5,5% per tahun. Peningkatan karyawan paling banyak dialami oleh Bakrie Telecom yang meningkat rata-rata 43,4% per tahun dengan peningkatan terbesar terjadi pada 2007 yang meningkat hampir 100%. Sementara karyawan Telkom dari 2004 ke 2008 bahkan menurun sampai 14% dengan penurunan rata-rata 3,9% per tahun.

Tabel 6.14. Perkembangan Jumlah karyawan Operator Seluler 2004 - 2008

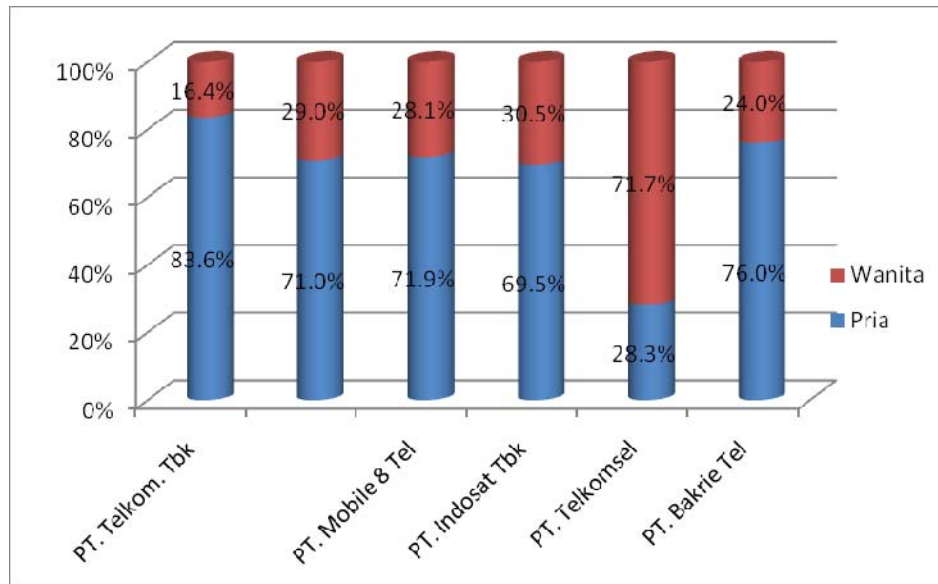
Operator	2004	2005	2006	2007	2008
Telkom*	29.375	28.179	27.658	25.361	25.016
Telkomsel	3.331	3.566	3.797	4.080	4.129
Indosat	7.820	8.137	7.786	7.645	7.700
Excelcom	1.543	1.867	2.042	2.136	2.114
Bakrie	437	544	743	1.485	1.671
Mobile 8	873	846	790	867	865
Hutchinson					N.A
STI					N.A

Persaingan yang sangat ketat antar operator telekomunikasi untuk merebut pasar dan dengan kondisi pasar yang mulai jenuh, memaksa operator untuk melakukan efisiensi secara ketat, termasuk dengan mengurangi jumlah karyawan agar mampu bertahan dan memperoleh profit yang memadai.

Dari sisi komposisinya antara pria dengan wanita, hampir pada semua operator menunjukkan lebih banyak pegawai pria dan wanita. Secara total dari enam operator telekomunikasi utama, proporsi pegawai pria mencapai 74,8% dan pegawai wanita hanya 25,2%. Proporsi karyawan pria terbesar ada di PT. Telkom seperti ditunjukkan oleh gambar

6.20 yang mencapai 83.6%. Namun hal yang menarik adalah bahwa di Telkomsel, proporsi pegawai wanita justru lebih besar daripada pegawai pria dengan proporsi 71,7% berbanding 28,3%.

Gambar 6.20. Komposisi Gender Pegawai Operatir Seluler Tahun 2008



Komposisi pegawai di Telkomsel menunjukkan komposisi yang unik dimana proporsi pegawai wanita jauh lebih besar daripada pegawai pria.

6.4. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT)

6.4.1. Jumlah Desa WPUT

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dan pemanfaatan sarana telekomunikasi secara lebih luas, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika membuat sebuah program peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap telekomunikasi. Program ini merupakan implementasi dari Kebijakan Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation/USO*) sebagai perwujudan Indonesia dalam melaksanakan *ITU Information Society Declaration*. Tema besar dari program ini adalah terwujudnya masyarakat ekonomi berbasis telekomunikasi secara bertahap. Program ini dilaksanakan dalam bentuk penetapan desa-desa yang menjadi wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT), yaitu desa-desa yang belum

mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan telekomunikasi dan di targetkan untuk mendapat pelayanan telekomunikasi.

Pada tahun 2009 ini, telah ditetapkan 36.471 desa yang menjadi target wilayah pelayanan universal seperti ditunjukkan pada tabel 6.15 dan tersebar di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta. Berdasarkan sebaran desanya, jumlah desa yang masuk program WPUT paling banyak berada di wilayah Sumatera, diikuti dengan Jawa. Meskipun wilayah di pulau Jawa relatif lebih mudah mengakses pelayanan telekomunikasi, namun ternyata masih banyak yang belum terakses pelayanan telekomunikasi yang ditunjukkan dengan masih menjadi prioritas dalam program WPUT. Berdasarkan sebaran propinsinya, propinsi Nagroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi propinsi yang paling banyak desanya masuk dalam program WPUT, diikuti dengan Sumatera Utara. Sementara untuk wilayah di luar Jawa dan Sumatera, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menjadi propinsi paling banyak desanya masuk dalam program WPUT.

Tabel 6.15 Target Jumlah Desa untuk Program WPUT Tahun 2009

No	Propinsi	Σ Desa	No	Propinsi	Σ Desa	No	Propinsi	Σ Desa
1	NAD	5.264	12	Jabar	1.196	23	Sulsel	1.134
2	Sumut	3.561	13	Jateng	2.921	24	Sulbar	237
3	Sumbar	1.695	14	DIY	30	25	Sulteng	745
4	Jambi	838	15	Jatim	2.303	26	Sultra	1.053
5	Riau	872	16	Bali	201	27	Sulut	563
6	Kepri	90	17	NTB	247	28	Gorontalo	196
7	Babel	167	18	NTT	2.091	29	Maluku	720
8	Bengkulu	1.015	19	Kalbar	1.026	30	Malut	589
9	Sumsel	1.891	20	Kalteng	1.131	31	Irjabar	768
10	Lampung	805	21	Kaltim	879	32	Papua	247
11	Banten	666	22	Kalsel	1.330	Total		36.471

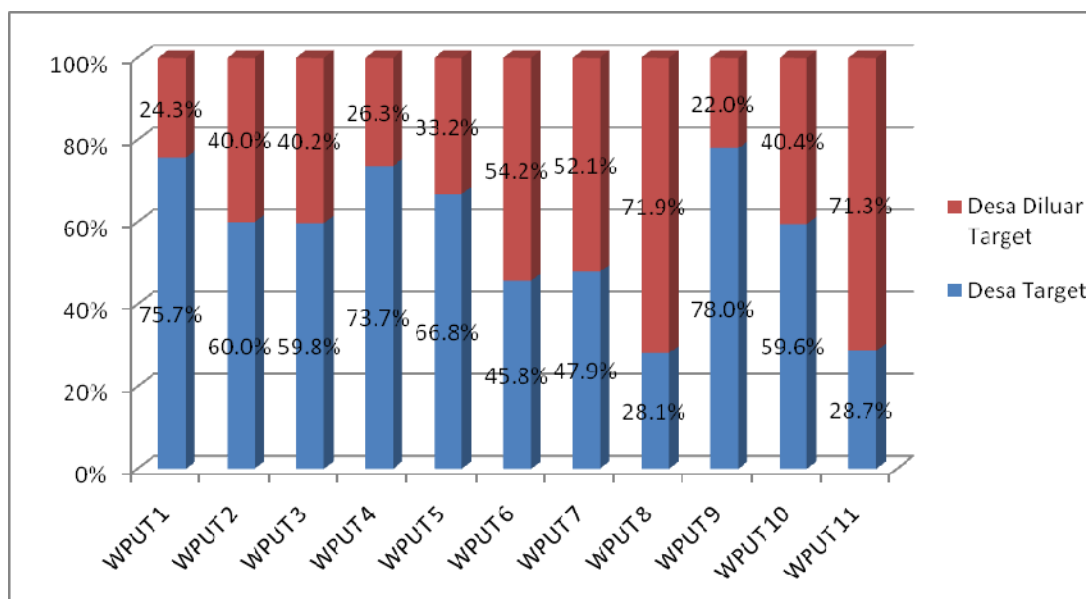
Meskipun memiliki akses relatif cukup baik terhadap pelayanan telekomunikasi dibanding kawasan timur Indonesia, namun Sumatera masih menjadi prioritas dalam program WPUT 2009

Jika dilihat dari proporsinya terhadap seluruh desa yang ada berdasarkan WPUT seperti ditunjukkan pada gambar 6.21, terlihat bahwa pada WPUT 9 dan WPUT, proporsi desa yang

menjadi target program USO ini cukup besar. Lebih dari 75% desa di kedua WPUT ini yang mencakup wilayah NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Maluku dan Maluku Utara menjadi target dari program USO pada 2009. Khusus untuk WPUT 9, hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah desa yang menjadi target WPUT tidak besar, namun proporsi atau cakupan terhadap total desa yang ada di wilayah tersebut cukup besar.

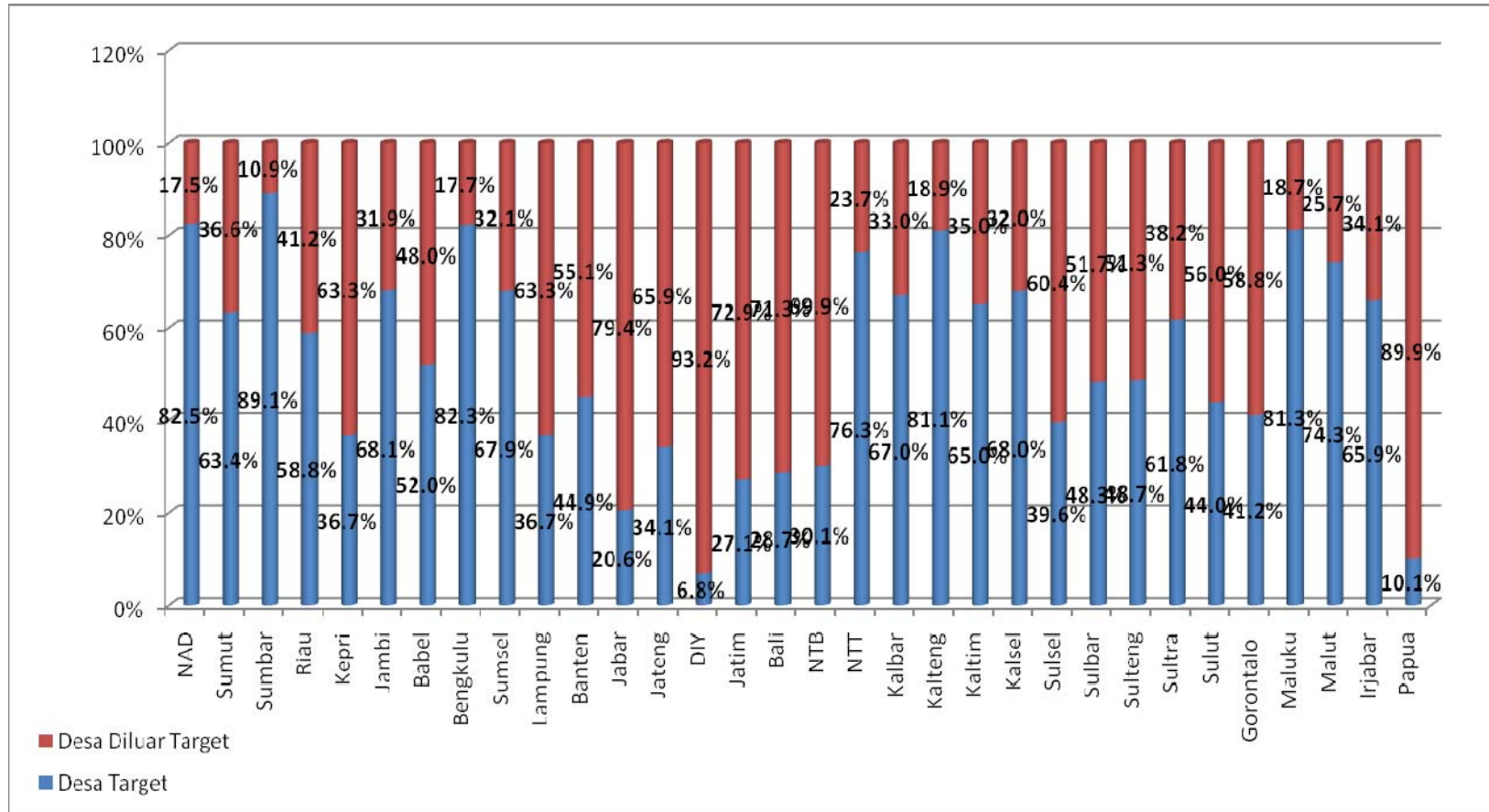
Sementara propinsi-propinsi yang masuk dalam WPUT 8 dan WPUT 11 menjadi wilayah yang rendah proporsi desa yang masuk menjadi target program USO pada tahun 2009. Rendahnya coverage desa yang masuk dalam target program USO di WPUT 8 yang mencakup wilayah Papua dan Irian Jaya Barat disebabkan oleh kondisi geografis yang sangat sulit sehingga cukup berat untuk memberikan jangkauan layanan telekomunikasi. Namun untuk WPUT 11, rendahnya proporsi desa yang masuk program USO ini lebih disebabkan karena sebagian besar desa di wilayah ini sudah terjangkau oleh pelayanan telekomunikasi mengingat WPUT ini mencakup propinsi-propinsi di pulau Jawa. Sehingga meskipun jumlah desa di pulau Jawa yang masuk program USO cukup besar, namun proporsinya dibanding jumlah desa yang ada, relatif kecil karena sebagian besar desa sudah terjangkau layanan telekomunikasi.

Gambar 6.21. Proporsi Desa Target Program USO Telekomunikasi Tahun 2009 menurut WPUT



Berdasarkan proporsinya di tingkat propinsi, gambar 6.22. menunjukkan bahwa *coverage* program USO paling banyak ada di propinsi Sumatera Barat, NAD, Bengkulu, Maluku dan Kalimantan Tengah. Lebih dari 80% desa di propinsi tersebut menjadi target dalam program USO 2009. Sementara *coverage* paling rendah ada di propinsi Papua dimana hanya 10,1% desa yang masuk program USO. Di propinsi DI Yogyakarta meskipun hanya 6,8% desa yang masuk program USO, namun sebagian besar desa lain sudah terjangkau pelayanan telekomunikasi.

Gambar 6.22. Proporsi Desa Target Program USO Telekomunikasi Tahun 2009 menurut Propinsi



Bab 7

Bidang Frekuensi

Penyajian data statistik bidang frekuensi ini dilakukan untuk memotret pola penggunaan frekuensi dan pelanggaran yang dilakukan sebagai wujud dari hasil pengaturan frekuensi oleh Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai regulator. Pengaturan dan penataan frekuensi dilakukan untuk menghindari terjadinya interferensi baik interferensi antar sistem maupun interferensi antar pengguna dalam suatu sistem. Pengaturan dan penataan frekuensi juga dilakukan untuk tujuan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi sehingga tidak terjadi pemborosan dalam pemakaiannya. Selain itu perlu juga diketahui konsentrasi pemakaian spektrum berdasarkan pita maupun kanal agar diketahui pemakaian terbanyak atau yang masih kosong. Oleh karena itu diperlukan suatu analisa data statistik frekuensi agar dapat diketahui penggunaannya.

7.1 Ruang Lingkup

Data statistik frekuensi yang disajikan dalam laporan ini meliputi jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan pita frekuensi, jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan jenis penetapan frekuensi, dan jumlah penggunaan frekuensi berdasarkan service. Statistik frekuensi yang ditampilkan dalam laporan ini meliputi :

- 1) Statistik penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan pita frekuensi (misalnya VLF, LF, MF, HF, dst.), 2007 - Juli 2009;
- 2) Penggunaan frekuensi berdasarkan service dan subservice. 2007 - Juli 2009;
- 3) Penggunaan frekuensi menurut propinsi, service dan subservice Sampai Juli 2009;
- 4) Monitoring penertiban penggunaan frekuensi oleh UPT Tahun 2008 - Juni 2009;
- 5) Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi oleh UPT Tahun 2008 - Juni 2009.

Data statistik frekuensi diperoleh langsung dari Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel pada posisi data terakhir yaitu bulan Juli 2009.

7.2. Konsep dan Definisi

Sub bab ini berisi definisi dari terminologi yang digunakan dalam penyajian data frekuensi agar dapat memberi interpretasi yang sama terhadap terminologi yang digunakan.

1. Telekomunikasi adalah setiap transmisi, emisi atau penerimaan isyarat, sinyal, tulisan, gambar-gambar dan suara atau pernyataan pikiran apapun melalui kawat, radio, optik atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa);
3. Alokasi Spektrum Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi radio tertentu dengan maksud untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas astronomi berdasarkan persyaratan tertentu;
4. Radio adalah istilah umum yang dipakai dalam penggunaan gelombang radio;
5. Gelombang Radio atau Gelombang Hertz adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih rendah dari 3 000 GHz, yang merambat dalam ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan;
6. Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan perantaraan gelombang radio;
7. Komunikasi radio terrestrial adalah Setiap komunikasi radio selain komunikasi radio ruang angkasa atau radio astronomi;
8. Komunikasi radio ruang angkasa adalah Setiap komunikasi radio yang mencakup penggunaan satu atau lebih stasiun ruang angkasa, atau penggunaan satu atau lebih satelit pemantul ataupun objek lain yang ada di ruang angkasa;
9. Navigasi radio adalah Radio penentu yang digunakan untuk keperluan navigasi, termasuk pemberitahuan sebagai adanya peringatan tentang benda yang menghalangi;

10. Radio Astronomi adalah Astronomi yang berdasarkan penerimaan gelombang radio yang berasal dari kosmos.

7.2 Penggunaan Frekuensi (ISR)

7.2.1. Penggunan Berdasarkan Pita Frekuensi

Penggunaan frekuensi (ISR) pada tahun 2009 menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan setelah meningkat dari tahun 2007 ke 2008. Jumlah penggunaan frekuensi yang pada tahun 2008 mencapai 537.848, pada tahun 2009 sampai bulan Juli baru mencapai 270.585 meskipun penggunaan frekuensi untuk spektrum SHF sampai bulan Juli 2009 ini sudah lebih besar dari penggunaan pada tahun 2008. Dari sisi nama spektrumnya, penggunaan frekuensi paling banyak di Indonesia yang digunakan adalah untuk spektrum UHF yang berada pada pita frekuensi 300 MHz sampai 3 GHz.

Tabel 7.1. Jumlah Penggunaan Frekuensi (ISR) berdasarkan pita frekuensi

No.	Nama Spektrum	Pita Frekuensi	2007	2008	2009*
1	VLF	(3 kHz – 30 kHz)	N.A	N.A	N.A
2	LF	(30 kHz – 300 kHz)	N.A	N.A	N.A
3	MF	(300 kHz – 3 MHz)	454	454	405
4	HF	(3 MHz – 30 MHz)	17.466	17.795	6.830
5	VHF	(30 MHz – 300 MHz)	33.328	42.166	23.632
6	UHF	(300 MHz – 3 GHz)	264.758	354.726	87.515
7	SHF	(3 GHz - 30 GHz)	86.040	122.693	152.201
8	EHF	(30 GHz – 300 GHz)	14	14	2
Jumlah			402.060	537.848	270.585

Data VLF (Very Low Frequency) dan LF (Low Frequency) tidak dapat dimunculkan karena penggunaan frekuensi rendah (kurang dari 300 kHz) menyangkut penggunaan untuk keperluan khusus seperti untuk keperluan militer dan tidak banyak bandwidth yang pada band ini dalam spektrum radio.

Selain spektrum UHF, penggunaan frekuensi (ISR) paling banyak dilakukan juga untuk spektrum SHF yang berada pada pita frekuensi 3 GHz sampai 30 GHz). Penggunaan spektrum frekuensi ini bahkan menunjukkan kecenderungan peningkatan sejak 2007. Namun untuk frekuensi tinggi lainnya yang masuk dalam spektrum EHF dengan pita

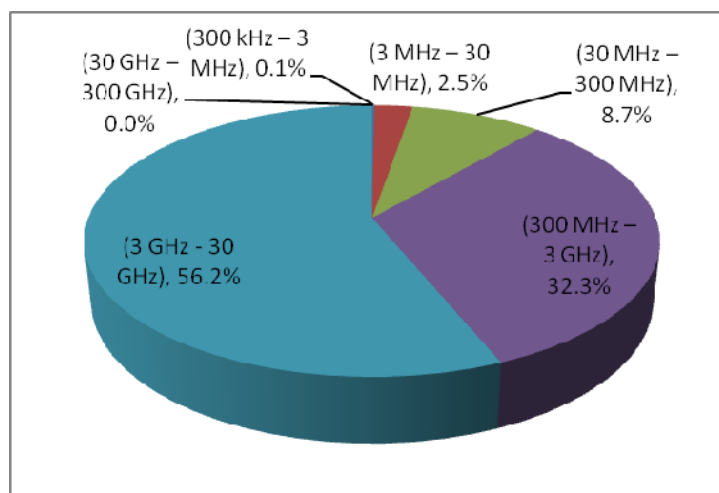
frekuensi 30 GHz dan 300 GHz juga tidak banyak digunakan seperti halnya penggunaan frekuensi sangat rendah.

Pertumbuhan pengguna pita frekuensi ini juga menunjukkan fluktuasi yang besar. Hampir pada semua pita frekuensi mengalami penurunan penggunaan frekuensi (ISR) pada tahun 2009 (sampai bulan Juli) setelah meningkat pada tahun 2008, kecuali untuk penggunaan pita SHF yang terus mengalami peningkatan. Namun penurunan ini diduga karena penggunaan pada tahun 2009 ini masih berlangsung pada pertengahan tahun. Diperkirakan penggunaan pita frekuensi pada tahun 2009 masih akan terus meningkat dan pada beberapa spektrum akan lebih besar daripada penggunaan pada tahun 2008.

Dari komposisi penggunaannya, gambar 7.1 menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari pengguna pita frekuensi adalah untuk penggunaan spektrum SHF yang berada pada pita 3 GHz sampai 30 GHz. Pengguna frekuensi pada spektrum ini mencapai 56,26% dari total pengguna frekuensi. Pengguna terbanyak kedua adalah untuk spektrum UHF yang berada pada pita 300 MHz sampai 3 GHz dengan pengguna mencapai 32,3% dari total pengguna frekuensi. Penggunaan paling sedikit adalah pada pita frekuensi yang tergolong sangat tinggi dan sangat rendah (diluar VLF dan LF).

Komposisi ini sedikit berbeda dengan komposisi pengguna frekuensi pada tahun 2008 terutama antara pengguna spektrum SHF dan UHF. Pada tahun 2008, penggunaan pita frekuensi lebih didominasi oleh penggunaan untuk spektrum UHF dengan penggunaan mencapai 66% dari total penggunaan frekuensi. Sementara pengguna spektrum SHF pada tahun 2008 hanya mencapai 22,8% dari total penggunaan frekuensi.

Gambar 7.1. Komposisi Penggunaan Frekuensi berdasarkan Pita Frekuensi.



7.2.2. Penggunaan Berdasarkan Service

Penggunaan frekuensi (ISR) berdasarkan service menunjukkan kecenderungan peningkatan untuk beberapa jenis service seperti untuk Fixed Service, Land Mobile dan Satellite. Penggunaan frekuensi untuk fixed service menunjukkan peningkatan sampai Juni 2009 sebesar 30,9% dibanding tahun sebelumnya. Sementara penggunaan untuk land mobile (public) menunjukkan kenaikan sebesar 36% dibanding penggunaan tahun sebelumnya. Namun penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) justru mengalami penurunan sebesar 17,9% dibanding tahun sebelumnya.

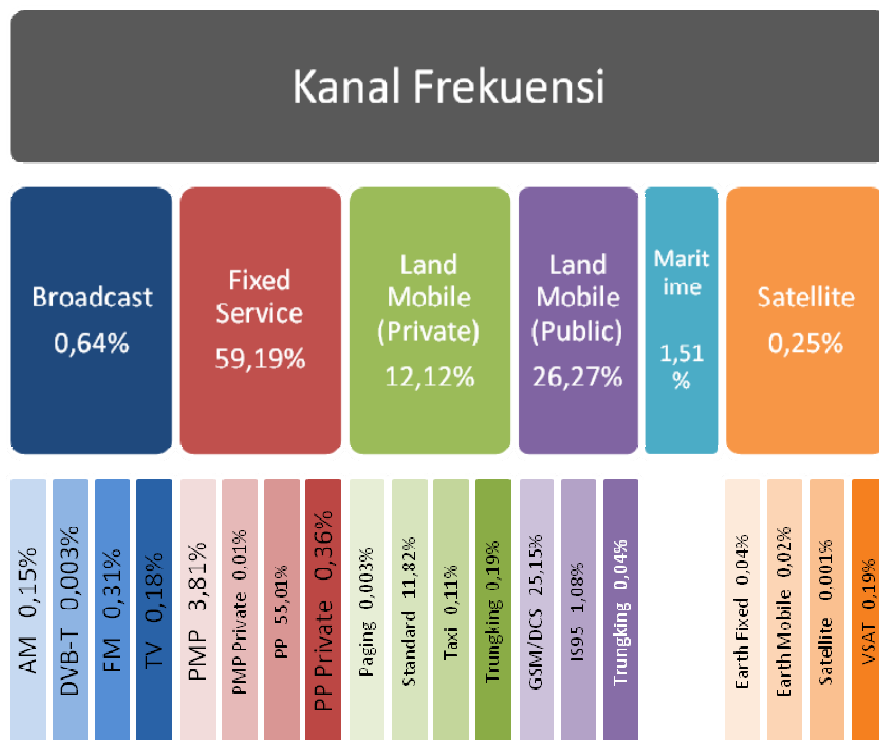
Tabel 7.2. Jumlah penggunaan kanal frekuensi menurut service

No.	Service	2007	2008	2009*
1	Aeronautical/Penerbangan	6		1.277
2	Broadcast (TV & Radio)	1.754	1.737	1.739
3	Fixed Service	94.525	122.949	160.988
4	Land Mobile (Private)	50.761	40.092	32.921
5	Land Mobile (Public)	156.597	52.705	71.685
6	Maritim	4		8211
7	Satellite	548	627	684
	Total	304.195	218.110	277.505

*)Sampai Juni 2009

Penggunaan frekuensi berdasarkan service ini dapat dirinci lebih lanjut berdasarkan subservice untuk masing-masing jenis service. Penggunaan untuk broadcast dirinci menjadi penggunaan untuk AM, DVB-T, FM dan TV. Penggunaan untuk fixed service dirinci menjadi penggunaan untuk PMP, PMP Private, PP dan PP Private. Penggunaan untuk Land Mobile (Private) dirinci menjadi penggunaan untuk paging, standard, Taxi dan Trunking. Penggunaan untuk Land Mobile (Public dirinci menjadi penggunaan untu GSM/DCS, IS95 dan Trunking). Penggunaan untuk Satellite dirinci menjadi penggunaan untuk Earth Fixed, Earth Mobile, Satellite dan VSAT. Gambar 7.2 menunjukkan komposisi penggunaan frekuensi menurut service dan subservice pada tahun 2009 sampai bulan Juli.

Gambar 7.2. Komposisi Penggunaan Frekuensi menurut Service dan Subservice sampai Juli 2009



Dari gambar 7.2 terlihat bahwa proporsi penggunaan terbesar dari frekuensi menurut service adalah penggunaan untuk fixed service, diikuti dengan penggunaan untuk land mobile (public) dan land mobile (private). Proporsi penggunaan frekuensi untuk fixed service mencapai 59,2% dari total penggunaan frekuensi di seluruh Indonesia. Sementara penggunaan frekuensi untuk land mobile (public) dan land mobile (private), masing-masing mencapai 26,27% dan 12,12% dari total penggunaan frekuensi.

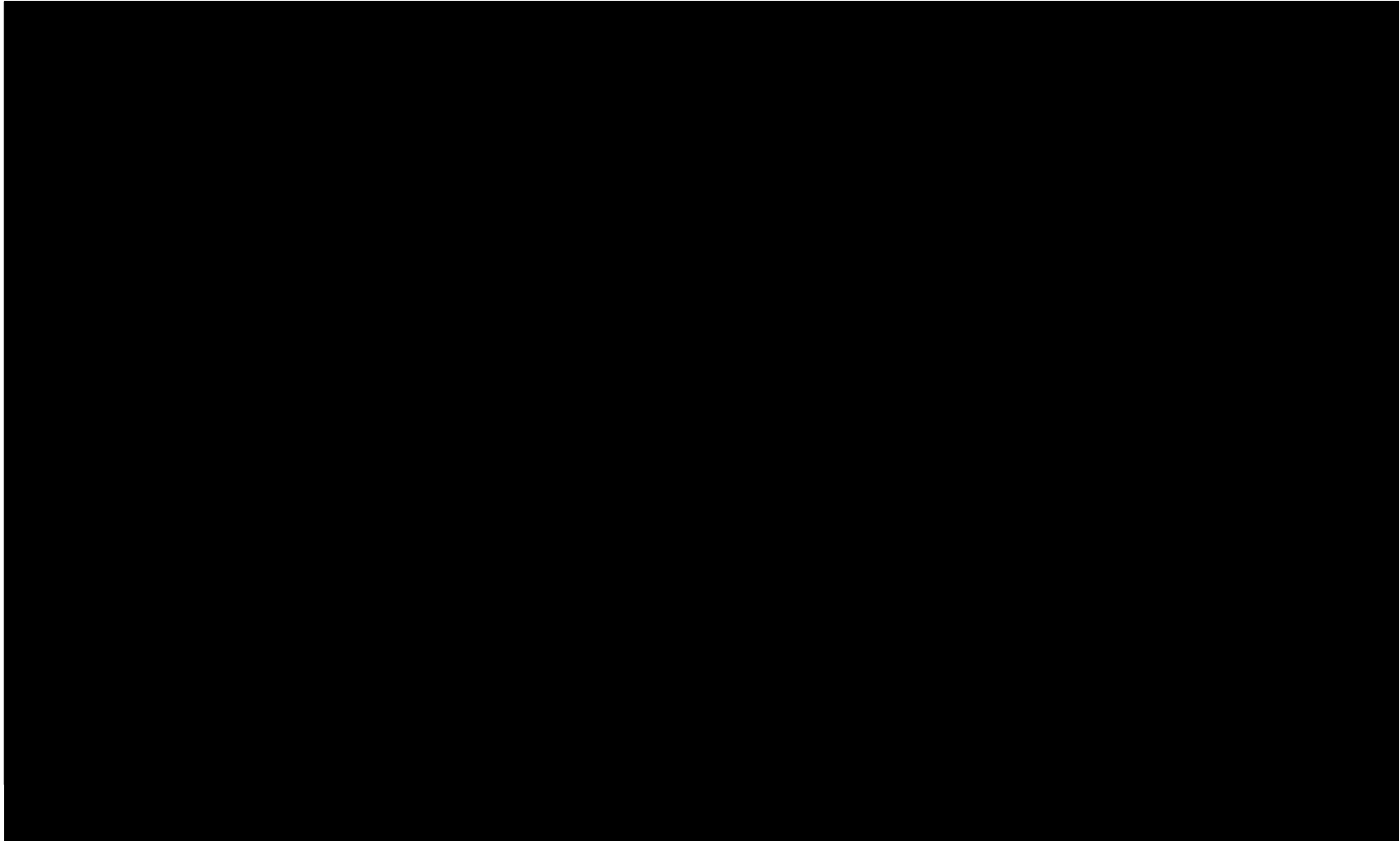
Jika dirinci lebih jauh sampai subservice, terlihat bahwa proporsi penggunaan terbesar dari pita frekuensi berdasarkan subservicenya adalah untuk PP (fixed service) yang mencapai 55% dari total penggunaan pita frekuensi. Penggunaan terbesar kedua menurut subservice adalah penggunaan untuk subservice GSM/DCS yang mencapai 25,1% dari total penggunaan. Dengan proporsi penggunaan yang besar untuk kedua jenis subservice tersebut (PP fixed service dan GSM/DCS) maka proporsi penggunaan frekuensi untuk subservice lainnya tergolong kecil-kecil. Penggunaan subservice lainnya kurang dari 3% kecuali untuk penggunaan PMP yang mencapai 3,81%. Penggunaan paling rendah adalah untuk satellite yang proporsinya hanya 0,001% dari total penggunaan frekuensi menurut subservice.

7.2.3. Penggunaan Berdasarkan Propinsi

Penggunaan frekuensi (ISR) berdasarkan lokasi (propinsi) dan service/subservice ditunjukkan oleh tabel 7.3. Data pada tabel 7.3 tersebut belum termasuk penggunaan untuk service maritim karena sifat penggunaannya yang bergerak (*mobile*) sehingga tidak dapat ditetapkan lokasi (propinsi) penggunaannya. Sementara pada service dan subservice lainnya dapat ditetapkan lokasi penggunaannya. Namun tidak semua jenis service dan subservice dalam penggunaan frekuensi digunakan di semua daerah. Pada daerah tertentu, tidak ada penggunaan frekuensi untuk service tertentu.

Dari tabel 7.3 terlihat bahwa penggunaan frekuensi masih terpusat dan didominasi oleh penggunaan di Pulau Jawa dibanding daerah lainnya dimana penggunaan di Jawa mencapai 53,06% dari total penggunaan frekuensi di seluruh Indonesia. Selain di Jawa, penggunaan frekuensi paling banyak ada di Sumatera yang penggunaannya mencapai 25,55% dari total penggunaan frekuensi. Propinsi yang paling banyak menggunakan frekuensi adalah Jawa Barat bersama Jawa Timur dan DKI Jakarta. Proporsi penggunaan frekuensi di Jawa Barat mencapai 14,54% dari total penggunaan frekuensi di Indonesia. Sementara proporsi penggunaan frekuensi di Jawa Timur dan DKI Jakarta masing-masing mencapai 12,04% dan 11,24% dari total penggunaan frekuensi nasional. Diluar Jawa, penggunaan frekuensi paling banyak di Sumatera Utara 17.811 atau dengan proporsi 6,67% dari penggunaan frekuensi nasional.

Tabel 7.3. Penggunaan Frekuensi menurut Propinsi, Service dan Subservice sampai Juli 2009 *



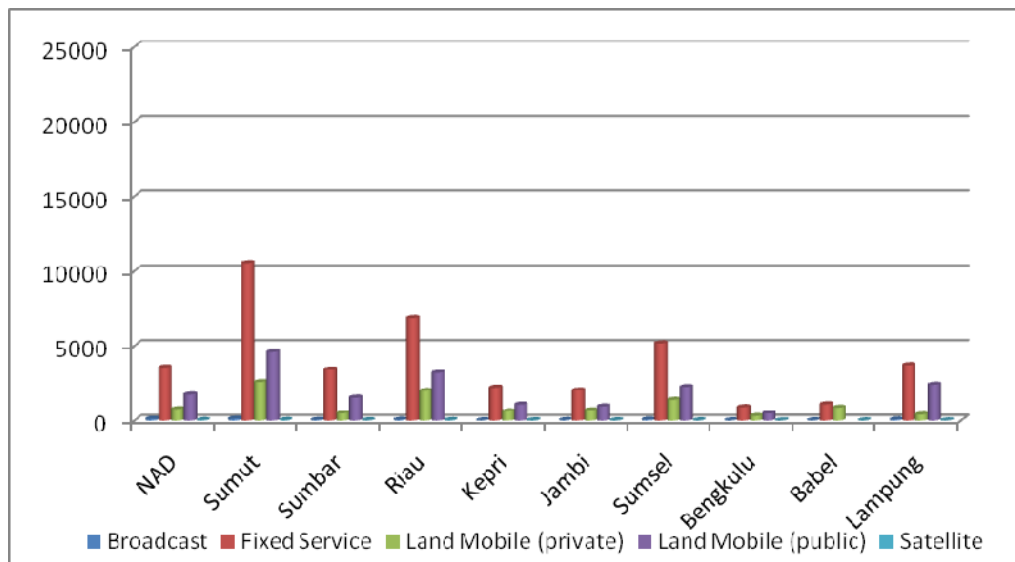
*) Tidak termasuk penggunaan untuk maritime service karena sifatnya yang bergerak (mobile) yang tidak dapat ditetapkan lokasinya.

Penggunaan frekuensi untuk wilayah Indonesia Timur masih tergolong rendah. Total penggunaan frekuensi untuk di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua masih kurang dari 8% dari penggunaan frekuensi nasional. Bahkan untuk Papua dan Maluku, penggunaan frekuensi hanya 1,68% dari penggunaan frekuensi nasional. Penggunaan frekuensi yang cukup signifikan hanya terjadi di Sulawesi Selatan (2,85%), Bali (2,79%) dan Kalimantan Timur (3,47%) dari total penggunaan frekuensi nasional. Dari pola penyebaran penggunaan frekuensi ini terlihat bahwa penggunaan frekuensi antar daerah sangat ditentukan bukan hanya oleh jumlah penduduk tapi dinamika kegiatan sosial ekonomi khususnya terkait dengan kemajuan ekonomi suatu daerah.

7.2.4. Pola Penggunaan menurut Wilayah Kepulauan

Penggunaan frekuensi untuk wilayah Sumatera seperti diperlihatkan pada gambar 7.3 menunjukkan bahwa penggunaan paling besar ada di propinsi Sumatera Utara , Riau dan Sumatera Selatan. Dari persebaran ini juga menunjukkan bahwa penggunaan frekuensi banyak terkait dengan dinamika kegiatan sosial ekonomi dan tingkat perkembangan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah tersebut. Penggunaan frekuensi di Bengkulu dan Bangka Belitung yang dinamika kegiatan sosial dan terutama ekonominya tidak cukup tinggi menggunakan frekuensi yang juga tidak terlalu besar.

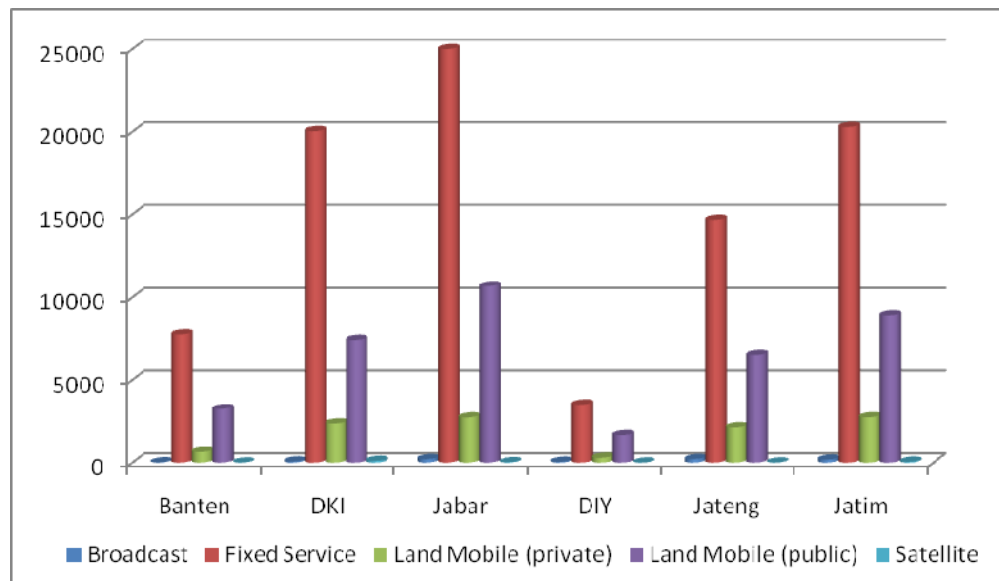
Gambar 7.3. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Sumatera



Dari sisi jenis servicenya, penggunaan frekuensi pada semua propinsi di Sumatera paling banyak adalah untuk jenis fixed service, diikuti dengan penggunaan untuk land mobile (public) dan land mobile (private). Penggunaan frekuensi di Propinsi NAD dan Sumatera Utara untuk fixed service jauh diatas penggunaan untuk land mobile (private) dan land mobile (public). Sementara di Lampung, tidak terlalu berbeda jumlah penggunaan .

Penggunaan frekuensi di pulau Jawa adalah yang tertinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Penggunaan frekuensi di pulau Jawa paling tinggi ada di Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta dimana penggunaan frekuensi di ketiga propinsi tersebut masing-masing lebih dari 10%. Penggunaan frekuensi di Pulau Jawa ini paling rendah ada di Propinsi DI Yogyakarta. Dari sebaran penggunaan frekuensi di pulau Jawa ini terlihat bahwa luasan wilayah propinsi juga menentukan besarnya penggunaan frekuensi, kecuali untuk DKI Jakarta yang memang memiliki kepadatan kegiatan sosial ekonomi yang sangat tinggi sehingga meskipun wilayahnya tidak luas, namun penggunaan frekuensinya lebih tinggi.

Gambar 7.4. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Jawa

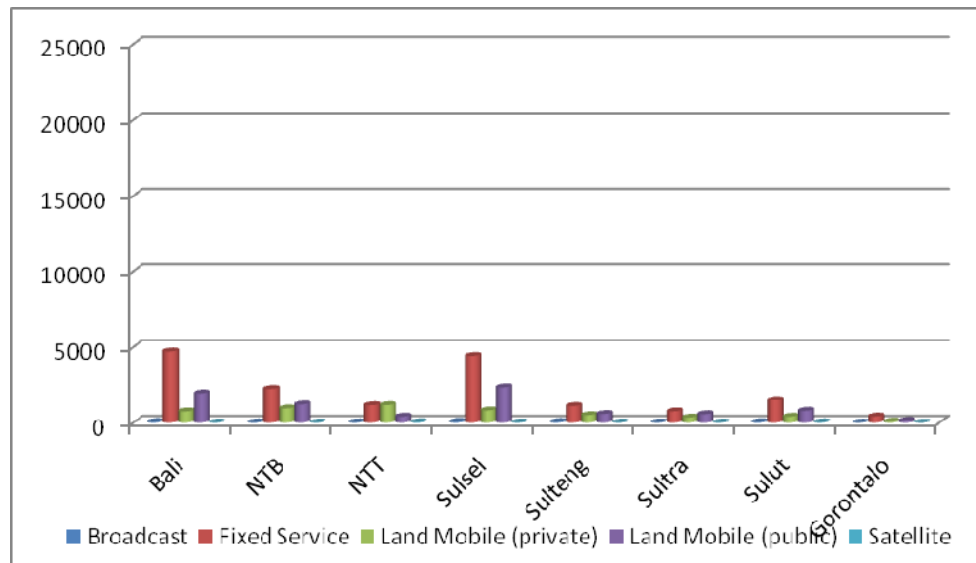


Dari sisi jenis penggunaan frekuensi, penggunaan frekuensi paling banyak di Pulau Jawa adalah juga untuk penggunaan fixed services, diikuti dengan penggunaan untuk land mobile (public). Penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) di pulau Jawa ternyata tidak terlalu tinggi hampir disemua daerah, kecuali untuk di Jawa Tengah dimana penggunaan

untuk land mobile (private) tidak terlalu berbeda jauh jumlahnya dengan penggunaan untuk land mobile (public). Sementara penggunaan frekuensi untuk broadcast dan satellite masih rendah meskipun di DKI Jakarta.

Penggunaan frekuensi di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti diperlihatkan pada gambar 7.5 menunjukkan bahwa penggunaan frekuensi di wilayah ini masih sangat rendah kecuali untuk Bali dan Sulawesi. Penggunaan frekuensi yang sangat rendah terutama terlihat di Propinsi Gorontalo sebagai perusahaan yang baru berkembang dan juga di Sulawesi Tengah dan NTT yang memiliki kegiatan sosial ekonomi tidak terlalu tinggi menunjukkan penggunaan frekuensi yang rendah. Penggunaan frekuensi di propinsi-propinsi selain Bali, Sulawesi Selatan dan NTB, besarnya masih kurang dari 3.000 atau kurang dari 1,5% total penggunaan nasional.

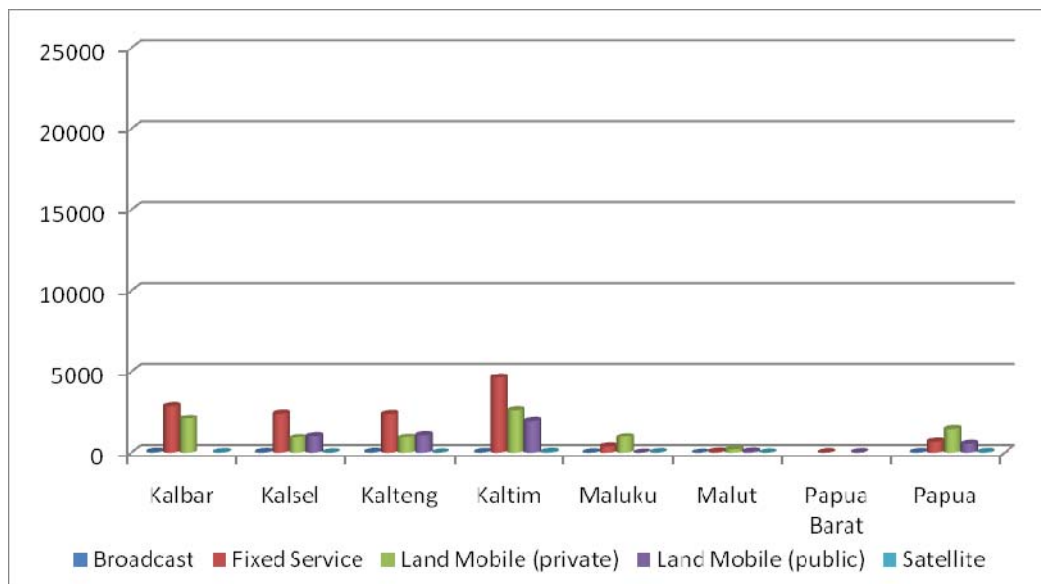
Gambar 7.5. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi



Dari sisi jenis penggunaan frekuensi, penggunaan frekuensi di wilayah Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara ini paling banyak juga untuk penggunaan fixed service , diikuti dengan land mobile (public). Namun untuk penggunaan frekuensi di NTB dan NTT, penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) juga cukup tinggi. Bahkan di propinsi NTT, penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) lebih tinggi daripada untuk land mobile (public) dan hampir sama dengan jumlah penggunaan untuk fixed service.

Penggunaan frekuensi di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua menunjukkan tingkat penggunaan yang sangat berbeda. Penggunaan frekuensi di wilayah Maluku dan Papua masih sangat rendah sementara penggunaan di wilayah Kalimantan sudah cukup signifikan khususnya di Kalimantan Timur. Jumlah penggunaan frekuensi di wilayah Kalimantan rata-rata jumlahnya sudah diatas 4.000 sementara di Kawasan Timur Indonesia kecuali untuk Papua masih kurang dari 2.000. Penggunaan frekuensi di wilayah ini paling besar ada di Kalimantan Timur yang mencapai 9.000, diikuti dengan Kalimantan Barat.

Gambar 7.6. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua



Berdasarkan jenis penggunaannya, seperti di wilayah lain penggunaan frekuensi di wilayah ini paling banyak juga untuk fixed service. Namun berbeda dengan wilayah lain, penggunaan untuk land mobile (private) cukup tinggi di wilayah ini bahkan lebih tinggi daripada penggunaan untuk land mobile (public). Bahkan penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) di Papua lebih tinggi daripada penggunaan frekuensi untuk fixed mobile. Kondisi geografis yang sulit (pegunungan) dan konsentrasi kepadatan kegiatan sosial-ekonomi yang terpusat pada beberapa titik saja di Papua diduga terkait dengan pola penggunaan frekuensi di Papua sehingga lebih banyak penggunaan untuk land mobile (private).

7.2 Monitoring dan Penertiban Penggunaan Frekuensi oleh UPT

Kegiatan monitoring penggunaan frekuensi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitoring yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran dalam penggunaan frekuensi di masing-masing wilayah berdasarkan hasil pantauan terhadap kegiatan yang menggunakan frekuensi. Terdapat tiga kategori pelanggaran dalam penggunaan frekuensi ini yaitu penggunaan frekuensi yang tidak memiliki izin (illegal), izin penggunaan frekuensi yang sudah kadaluarsa, dan penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya. Selanjutnya berdasarkan temuan pelanggaran tersebut dilakukan penertiban terhadap kegiatan yang menggunakan frekuensi yang melanggar tersebut. Ada empat jenis tindakan penertiban yang dilakukan yaitu dari mulai SOS, peringatan, penyitaan sampai penyegelan atas kegiatan tersebut.

7.2.1. Monitoring dan Penertiban UPT Tahun 2008.

Sepanjang tahun 2008, ditemukan 1.536 pelanggaran dalam penggunaan frekuensi dari monitoring yang dilakukan diseluruh 33 UPT monitoring yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Pelanggaran paling banyak ditemukan di wilayah UPT Semarang sebanyak 179 pelanggaran, diikuti wilayah UPT Bandung (97 pelanggaran) dan UPT Jambi sebanyak 94 pelanggaran. Berdasarkan wilayahnya, pelanggaran penggunaan frekuensi ini paling banyak terjadi di wilayah Jawa sesuai dengan banyaknya penggunaan frekuensi di wilayah ini, disusul dengan wilayah Sumatera. Kedua wilayah ini masing-masing memberi kontribusi 32,8% dan 33% dari total pelanggaran penggunaan frekuensi.

Namun meskipun intensitas pelanggaran cenderung tinggi pada daerah dengan penggunaan frekuensi tinggi seperti Jawa dan Sumatera, namun jumlah pelanggaran ini tidak proporsional dengan jumlah penggunaan frekuensi antar daerah. Wilayah Jawa dengan penggunaan frekuensi jauh lebih besar daripada Sumatera ternyata jumlah pelanggarannya hampir sama dengan wilayah Sumatera. Bahkan beberapa daerah dengan penggunaan frekuensi tidak terlalu banyak dan aktivitas sosial ekonomi juga tidak tergolong padat seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi tengah menunjukkan tingkat pelanggaran tinggi.

Berdasarkan monitoring tahun 2008, jumlah pelanggaran di UPT Manado dan Palu masing-masing sebesar 83 dan 73.

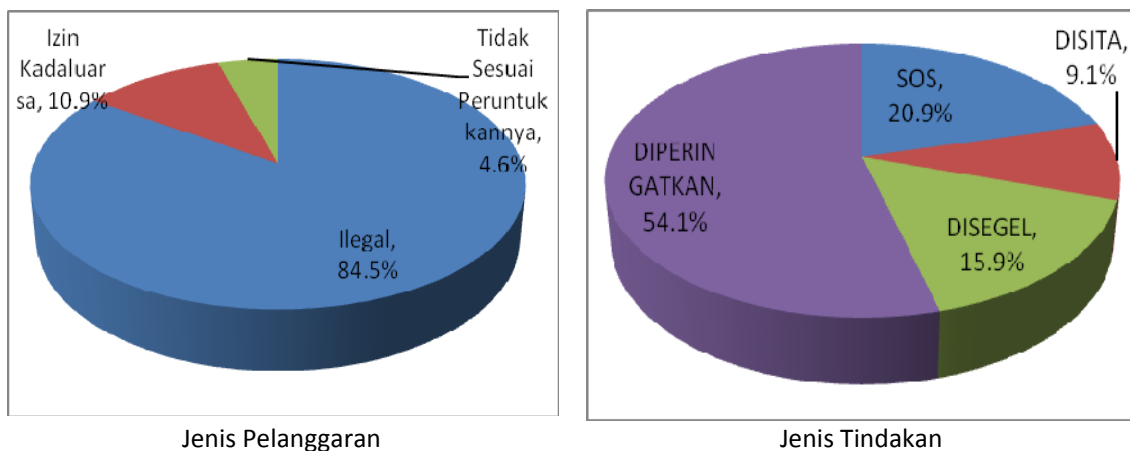
Tabel 7.4. Hasil Penertiban Frekuensi oleh UPT Tahun 2008

No	WILAYAH PENERTIBAN	PELANGGARAN				TINDAKAN PENERTIBAN			
		Ilegal	Izin Kadalu- a-rsa	Tidak Sesuai Peruntu- kkannya	Jumlah	SO S	Disit a	Dise- gel	Diperi- ngatka n
1	UPT NAD	36	4	7	47	33	12	23	5
2	UPT MEDAN	42	0	15	57	7	7	4	21
3	UPT PADANG	32	0	0	32	19	0	3	6
4	UPT PEKANBARU	68	0	0	68	19	0	10	9
5	UPT JAMBI	76	0	18	94	0	16	48	5
6	UPT BABEL	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UPT BATAM	43	0	0	43	0	0	8	10
8	UPT PALEMBANG	37	0	0	37	0	2	5	35
9	UPT BENGKULU	88	0	0	88	0	11	5	66
10	UPT LAMPUNG	23	0	15	38	0	0	3	26
11	UPT DKI JAKARTA	45	0	0	45	1	5	0	39
12	UPT BANTEN	57	0	0	57	6	4	4	0
13	UPT BANDUNG	67	28	2	97	42	0	8	67
14	UPT YOGYAKARTA	48	10	4	62	22	0	0	11
15	UPT SEMARANG	86	87	6	179	0	13	0	141
16	UPT SURABAYA	69	0	0	69	8	9	19	38
17	UPT DENPASAR	57	2	4	63	0	1	5	37
18	UPT MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0
19	UPT KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	0
20	UPT SAMARINDA	37	10	0	47	10	0	24	13
21	UPT BALIKPAPAN	32	0	0	32	11	0	9	3
22	UPT PONTIANAK	0	0	0	0	0	0	0	0
23	UPT PALANGKARAYA	41	0	0	41	0	0	0	22
24	UPT BANJARMASIN	0	0	0	0	0	0	0	0
25	UPT MANADO	83	0	0	83	8	8	3	36
26	UPT PALU	73	0	0	73	50	0	0	23
27	UPT MAKASAR	30	0	0	30	0	0	0	0
28	UPT AMBON	13	0	0	13	5	0	0	0
29	UPT GORONTALO	36	0	0	36	3	18	2	18
30	UPT TERNATE	0	0	0	0	0	0	0	0
31	UPT KENDARI	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UPT JAYAPURA	3	0	0	3	0	0	3	0
33	UPT MERAUKE	76	26	0	102	0	0	0	1

Jika dilihat dari jenis pelanggarannya, paling banyak pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi yang tanpa izin, diikuti dengan pelanggaran dalam bentuk izin yang sudah kadaluarsa. Dari total pelanggaran penggunaan frekuensi yang terjadi, sebanyak 84,5%

adalah pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi tanpa izin (*illegal*). Sementara pelanggaran dalam bentuk izin kadaluarsa dan peruntukan yang tidak sesuai, proporsinya masing-masing 10,9% dan 4,6%. Dari pola pelanggaran ini terlihat bahwa masih banyak terdapat kerawanan dalam pemanfaatan penggunaan frekuensi dengan menggunakan frekuensi secara *illegal*. Untuk itu bukan hanya penertiban yang perlu dilakukan, namun juga pembinaan pada *stakeholder* terkait. Disamping itu patut dipertimbangkan pula untuk memberikan kemudahan dalam legalisasi pemanfaatan penggunaan frekuensi.

Gambar 7.7. Komposisi Jenis Pelanggaran dan Tindakan Penertiban oleh UPT Tahun 2008



Berdasarkan jenis tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, gambar 7.7 juga menunjukkan bahwa tindakan paling banyak dilakukan adalah dalam bentuk peringatan disusul dengan tindakan SOS. Dari total tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2008, 54,1% adalah dalam bentuk peringatan dan dalam bentuk SOS 20,9%. Sementara tindakan dalam bentuk penyitaan sebanyak 9,1% dan tindakan dalam bentuk penyegelan sebanyak 15,9%. Dari komposisi tersebut terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh UPT sebagian besar masih tindakan persuasif dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi dan pemanfaatan frekuensi masih tindakan penertiban tetap tegas dilakukan.

7.2.2. Monitoring dan Penertiban UPT Tahun 2009.

Monitoring dan penertiban yang dilakukan oleh UPT pada tahun 2009, sampai dengan Juli telah ditemukan 352 jenis pelanggaran dalam penggunaan frekuensi dari 12 wilayah kerja UPT yang teridentifikasi adanya pelanggaran. Dari jumlah tersebut, pelanggaran paling banyak ditemukan di wilayah UPT Semarang dan UPT Jambi yang masing-masing ditemukan 98 dan 91 pelanggaran. Temuan pelanggaran juga cukup signifikan terjadi di wilayah UPT Medan dan UPT Manado yang mencakup wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara seperti ditunjukkan pada tabel 7.5.

Tabel 7.5. Hasil Penertiban Frekuensi oleh UPT Tahun 2009

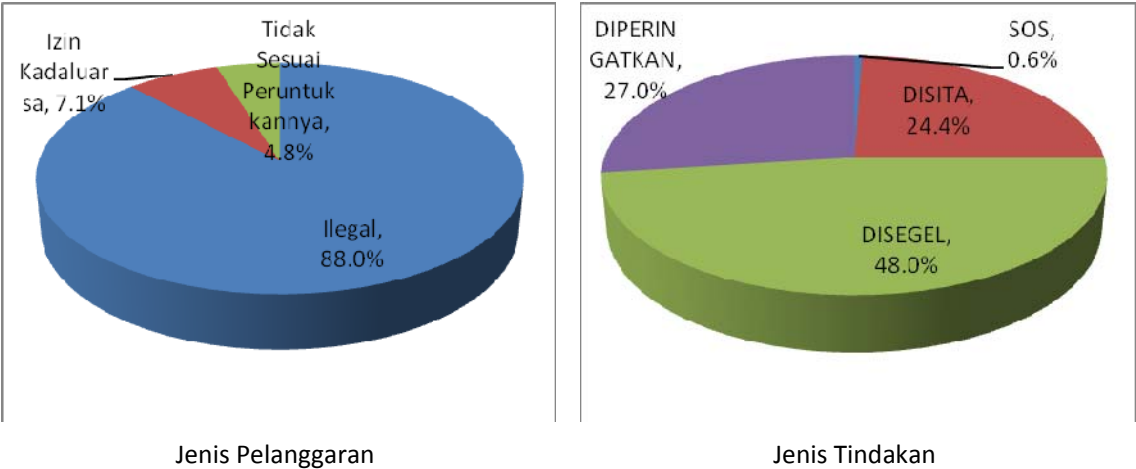
No	WILAYAH PENERTIBAN	PELANGGARAN				TINDAKAN PENERTIBAN			
		Ilegal	Izin Kadalu arsa	Tidak Sesuai Peruntu kkannya	Jumlah	SO S	Disit a	Dise gel	Diperi ngatka n
1	UPT DENPASAR	10	0	2	12	0	3		9
2	UPT MEDAN	29	0	0	29	0	9	12	8
3	UPT SEMARANG	98	16	0	114	0	17	97	0
4	UPT PALEMBANG	4	0	0	4	0	0	4	0
5	UPT JAMBI	90	0	14	104	0	1	35	68
6	UPT BANDUNG	9	8	0	17	0	17	0	0
7	UPT MANADO	30	0	0	30	1	8	21	0
8	UPT MATARAM	10	0	0	10	0	10	0	0
9	UPT TERNATE	11	1	0	12	1	11	0	0
10	UPT NAD	0	0	1	1	0	0	0	1
11	UPT BATAM	18	0	0	18	0	10	0	8
12	UPT BABEL	0	0	1	0	0	0	0	1

Dari sisi jenis jenis pelanggaran yang terjadi sampai dengan bulan Juni 2009, pelanggaran paling banyak terjadi juga dalam bentuk penggunaan frekuensi tanpa izin (*illegal*). Pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi secara *illegal* ini mencapai 88% dari total pelanggaran yang terjadi. Sementara untuk pelanggaran dalam bentuk izin yang sudah kadaluarsa, proporsinya mencapai 7,1% dan pelanggaran penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan mencapai 4,8% dari total pelanggaran yang ditemukan.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan sampai dengan bulan Juni tahun 2009, paling banyak tindakan justru dalam bentuk penyegelan. Dari total penertiban yang dilakukan, 48% dilakukan dalam bentuk penyegelan kepada kegiatan pengguna frekuensi tersebut. Sementara tindakan dalam bentuk peringatan hanya 27% dan

tindakan dalam bentuk penyitaan hanya 24,4% seperti ditunjukkan pada gambar 7.7. Bahkan tindakan dalam bentuk SOS proporsinya hanya 0,6%. Dari komposisi tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran, tampaknya pada tahun 2009 jenis pelanggaran yang dilakukan lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga tindakan yang diambil juga lebih tegas.

Gambar 7.7. Komposisi Jenis Pelanggaran dan Tindakan Penertiban oleh UPT Tahun 2009



Bab 8

Bidang Standardisasi

Penyajian statistik bidang standardisasi ini akan memaparkan data dan analisis dari hasil penerbitan sertifikat dari pengujian peralatan telekomunikasi. Penerbitan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi dari sisi jenisnya terdiri dari empat jenis yaitu sertifikat baru, sertifikat perpanjangan, sertifikat revisi dan sertifikat perpanjangan dan revisi.

- Sertifikat baru adalah sertifikat yang diterima untuk pengujian alat/perangkat yang baru pertama kali diuji.
- Sertifikat revisi adalah sertifikat yang dikeluarkan sebagai revisi atas sertifikat awal/baru jika terjadi kesalahan dalam penerbitan (data, detail teknis) atau ada perubahan pada sebagian komponen perangkat.
- Sertifikat perpanjangan adalah sertifikat yang diterbitkan atas perpanjangan pengujian dari alat yang sudah diuji sebelumnya dan masa basa berlaku sertifikat sudah habis sehingga perlu diperpanjang.
- Sertifikat perpanjangan dan revisi adalah sertifikat yang diterbitkan jika dalam proses perpanjangan sertifikat juga terjadi perubahan pada alat/perangkat telekomunikasi yang diperpanjang sertifikatnya sehingga diperlukan revisi data dalam perpanjangan sertifikatnya.

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi perangkat telekomunikasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominikasi dan Informastika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

8.1. Ruang Lingkup

Data standardisasi yang disajikan dalam laporan ini akan diuraikan secara terperinci dengan kurun waktu masing-masing data sebagai berikut:

1. Data penerbitan sertifikat baru pada tahun 2004 - Juni 2009
2. Data penerbitan sertifikat perpanjangan pada tahun 2006 - Juni 2009.
3. Data penerbitan sertifikat revisi pada tahun 2006 - Juni 2009.
4. Data penerbitan sertifikat perpanjangan sekaligus revisi pada tahun 2006 - Juni 2009.
5. Penerbitan sertifikasi per bulanan untuk semua jenis sertifikat tahun 2008 – Juni 2009.

Data sertifikasi standardisasi perangkat yang dipaparkan dalam laporan ini diperoleh langsung dari Direktorat Standardisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dalam penyajian data ini, tidak dipisahkan antara data sertifikasi untuk masing-masing kelompok perangkat (terminal, transmisi dan sentral) maupun jenis di masing-masing kelompok perangkat mengingat semakin bervariasinya jenis perangkat yang diuji. Sehingga dalam penyajiannya digabung menjadi satu untuk masing-masing jenis sertifikat.

8.2 Konsep dan Definisi

Sub bab ini berisi definisi dari terminologi yang digunakan dalam penyajian data standardisasi agar dapat memberi interpretasi yang sama terhadap terminologi yang digunakan.

- 1) Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- 2) Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Perangkat telekomunikasi ini terdiri dari tiga kelompok yaitu :
 - a. Peralatan Transmisi, meliputi : *Microwave Radio Link (MRL), Transceiver, Antenne, Cable, Satelit, Very Small Aperture Terminal, Wireless Access, Ractifier, HDSL, Repeater, Wireless Boradband, Broadband Wireless Access (BWA), Radio Broadband Wireless System (BWS), General Packet Radio Services (GPRS)* dan *Multi Service Optical Network*,

- b. Peralatan Terminal meliputi : GSM, CDMA, WCDMA, GSM/CDMA, *Marine, Faksimili, Industrial Science Medical, Telephone, Radio Trunking Portable (RTP), Televisi, Immobilizer, Modem, Modem Radio, Handy Talkie (HT), Radio Mobile, Pager, Video, Cordless Phone, Customer Premise Equipment (CPE), Batere Kering dan Bluetooth,*
 - c. Peralatan Sentral, meliputi : *PABX, Base Station, Base Transciever Station (BTS), Radio Base Station (RBS), Multiplexer, Switching, DWDM, Network, Router, Access, TCSM, Serving GPRS Support Node (SGSN), Pencatat Data Pembicaraan Telepon, Wireless Aplication Protocol (WAP), Wireless LAN (WLAN), Wireless Local Loop (WLL), Data Distribution Frame (DDF), IP DSLAM, Gateway, Universal Closure, Short Message Center, Kotak Terminal Batas, Sentra Telepon Digital (STD), Module, Voice Mail System (VMS), dan Voice Compression Device.*
- 3) Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
 - 4) Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;
 - 5) Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasi informasi tentang alat dan perangkat yang telah bersertifikat;
 - 6) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku;
 - 7) Persyaratan teknis adalah parameter listrik/elektronis, persyaratan keselamatan dan atau persyaratan electromagnetic compatibility yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

8.3. Penerbitan Sertifikat

8.3.1. Perkembangan Penertiban Sertifikat Peralatan

Penerbitan sertifikat perangkat menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 8.1. Dalam kurun waktu dari 2006 sampai 2008, penerbitan sertifikat untuk seluruh jenis sertifikat meningkat rata-rata 62,7% tiap tahun.

Peningkatan paling banyak untuk sertifikat baru yang jumlahnya juga jauh lebih besar daripada sertifikat revisi maupun perpanjangan. Untuk penerbitan jenis sertifikat baru, peningkatannya dari 2004 sampai 2008 meningkat rata-rata 66,4%. Jumlah penertiban sertifikati pada 2009 sampai bulan Juni juga sedah mencapai 61% dari jumlah tahun sebelumnya. Sehingga diperkirakan penerbitan sertifikat baru ini di tahun 2009 akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

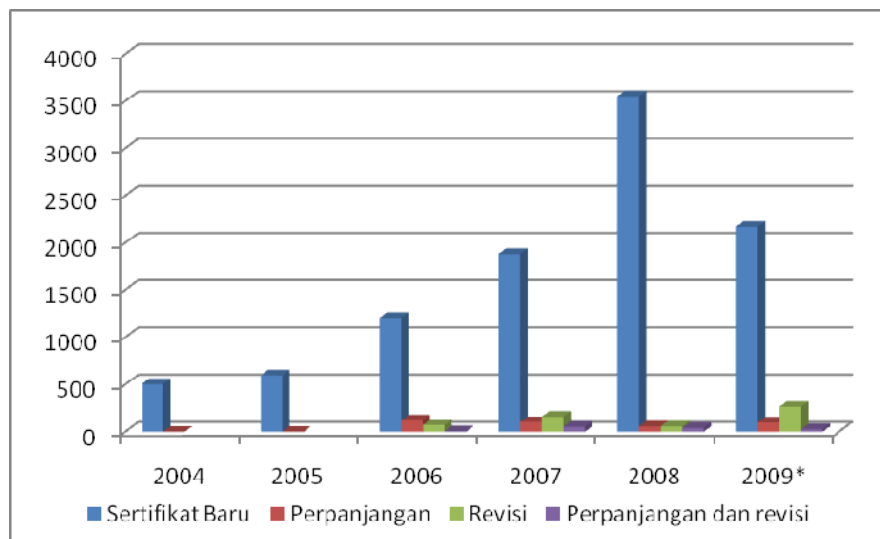
Semakin banyaknya kebutuhan dan penggunaan perangkat telekomunikasi karena perkembangan teknologi dan diversifikasi alat maupun perangkat telekomunikasi. Semakin berkembangnya teknologi membuat peralatan yang dikembangkan dibidang telekomunikasi juga semakin beragam dan bervariasi. Disisi lain, kebutuhan publik terhadap telekomunikasi juga semakin tinggi sehingga permintaan terhadap berbagai perangkat telekomunikasi baru juga semakin tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan.

Tabel 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk masing-masing Jenis 2004 - 2009

Jenis Sertifikat	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Sertifikat Baru	503	596	1.207	1.882	3.551	2.168
Perpanjangan	N.A	N.A	119	102	55	97
Revisi			70	158	56	262
Perpanjangan dan revisi			4	52	40	26

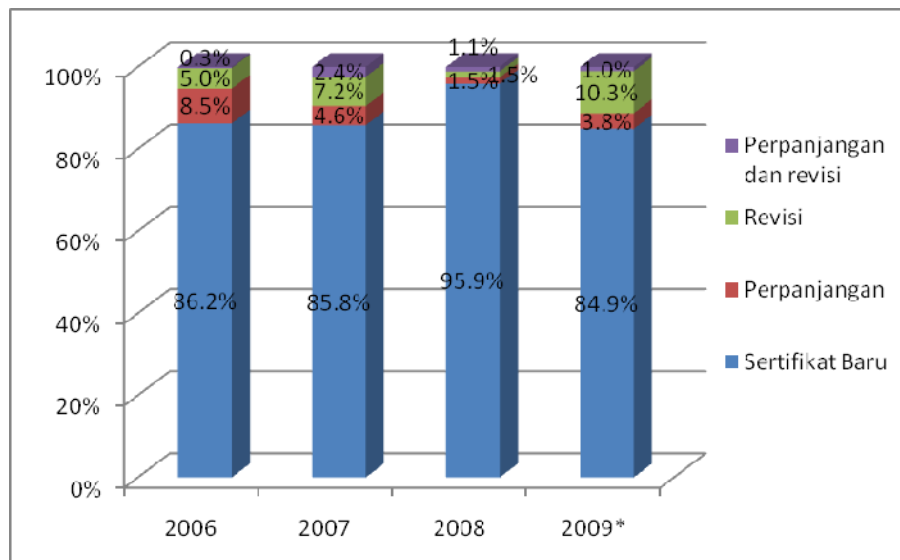
*) Sampai Juni 2009

Gambar 8.1. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi 2004-2009



Gambar 8.1. juga menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat perangkat menunjukkan trend peningkatan yang positif dari tahun 2004 sampai 2009. Peningkatan tersebut terutama didominasi oleh penerbitan perangkat baru. Sementara untuk jenis sertifikat lainnya relatif tidak banyak peningkatan karena sifatnya yang hanya sebagai pelengkap dari sertifikat baru. Dari sisi komposisi jenis sertifikat yang diterbitkan, gambar 8.2 menunjukkan bahwa sebagian besar memang untuk penerbitan sertifikat baru. Pada tahun 2008, dari total penerbitan sertifikat perangkat, hampir 96% merupakan penerbitan sertifikat baru. Namun pada tahun 2009, terdapat kecenderungan meningkatnya penerbitan sertifikat revisi. Berdasarkan data sampai dengan bulan Juni 2009, penerbitan sertifikat revisi sudah mencapai 10% dari total sertifikat yang diterbitkan. Meskipun demikian penerbitan untuk sertifikat baru masih paling banyak yaitu 85% dari total sertifikat yang diterbitkan. Hal ini menunjukkan masih tingginya peralatan telekomunikasi yang masuk dan memerlukan pengujian.

Gambar 8.2. Komposisi Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi menurut jenis 2006 - 2009

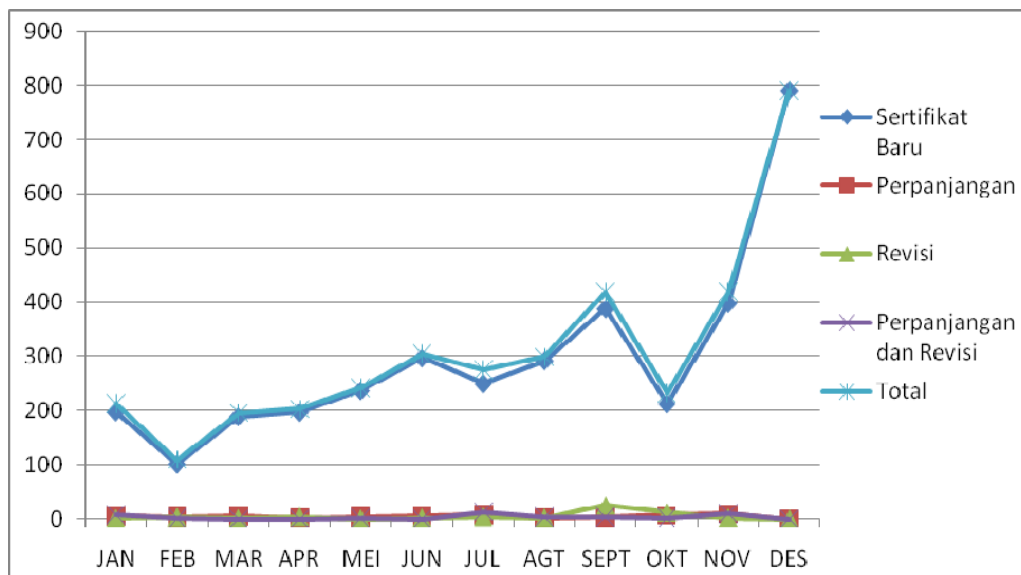


8.3.2. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Bulanan

Berdasarkan siklus bulanan, gambar 8.3 menunjukkan terjadinya fluktuasi antar bulan dalam penerbitan sertifikat. Pola tersebut juga menunjukkan fluktuasi penerbitan sertifikat tiap bulanannya sangat ditentukan oleh fluktuasi pada penerbitan sertifikat baru. Dari pola fluktuasi bulanan terlihat bahwa puncak penerbitan sertifikat perangkat pada tahun 2008

cenderung terjadi pada akhir tahun. Ini ditunjukkan dengan semakin tingginya penerbitan ijin pada bulan November dan puncaknya pada bulan Desember. Tingginya penerbitan sertifikat peralatan telekomunikasi pada akhir tahun ini diperkirakan terkait dengan pengadaan berbagai perangkat telekomunikasi yang baru dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun dan semakin meningkat pada akhir tahun, serta dengan mulai diterapkan secara ketat pengawasan import alat dan perangkat telekomunikasi dalam kerangka system National Single Window (NSW) di wilayah Kepabebean Indonesia. Dengan demikian pengujian peralatan dan penerbitan sertifikasi untuk standarisasi peralatan banyak dilakukan pada bulan-bulan tersebut.

Gambar 8.3. Fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi Tahun 2008



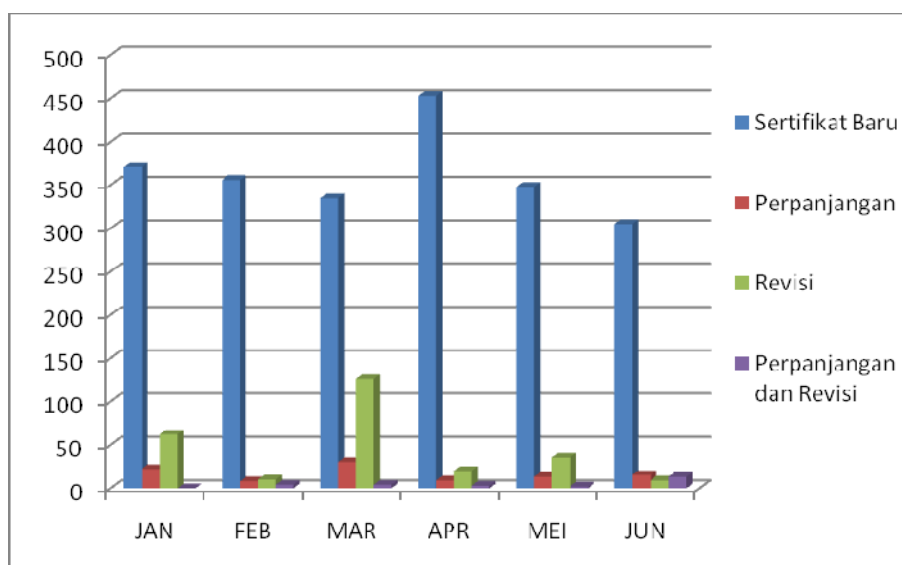
Penerbitan sertifikat peralatan telekomunikasi pada tahun 2009 sampai bulan Juni 2009 juga menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah penerbitan sertifikat pada tiap bulannya. Namun penerbitan sertifikat baru pada tahun 2009 ini tergolong cukup tinggi dan jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari tabel 8.3 terlihat bahwa penerbitan sertifikat sampai bulan Juni 2009 menunjukkan setiap bulannya diterbitkan lebih dari 300 sertifikat. Pada bulan April 2009 bahkan sertifikat baru yang diterbitkan mencapai 453 sertifikat.

Tabel 8.3. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi Tahun 2009

NO	Jenis Serifikat	Bulan						Jumlah
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
1	Sertifikat Baru	371	356	335	453	348	305	2168
2	Perpanjangan	22	8	30	9	13	15	97
3	Revisi	62	10	126	20	35	9	262
4	Perpanjangan dan Revisi	0	4	4	3	2	13	26
Total		455	378	495	485	398	342	2553

Namun dari fluktuasi penerbitan sertifikat bulanan terlihat bahwa terjadi peningkatan penerbitan sertifikat revisi pada bulan Maret 2009 yang jumlahnya mencapai 129 sertifikat. Secara total tabel 8.3 memang menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata jumlah sertifikat yang diterbitkan setiap bulannya meskipun tren penerbitannya masih menunjukkan fluktuasi. Penerbitan sertifikat pada tahun 2009 juga masih didominasi oleh penerbitan sertifikat baru meskipun penerbitan sertifikat revisi juga signifikan jumlahnya pada bulan Januari dan Maret 2009. Pada bulan Mei dan Juni terjadi kecenderungan menurunnya jumlah sertifikat yang diterbitkan, terutama untuk penerbitan sertifikat baru meskipun jumlahnya masih diatas bulan yang sama pada tahun lalu. Fluktuasinya berbeda dengan tahun 2008 dimana penurunan jumlah penerbitan sertifikat terjadi pada bulan Februari dan Juli.

Gambar 8.4. Perkembangan penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi Tahun 2009*



*) Sampai Juni 2009

Bab 9

Bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Penyajian data statistik pada bidang pengujian perangkat akan menampilkan data-data produksi dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) tahun 2008 - 2009. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Kegiatan pengujian yang dilakukan di BBPPT meliputi proses pengujian alat/perangkat telekomunikasi antara lain : Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat. Produk atau hasil akhir dari pengujian ini adalah bukti hasil pengujian alat yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengujian perangkat Telekomunikasi (RHU).

Proses pengujian diawali dengan pengajuan oleh pemohon (pemilik alat) lengkap dengan persyaratan yang dibutuhkan ke BBPPT. Permohonan selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan pengujian. Setelah dinyatakan lengkap, pengujian terhadap alat/perangkat dilakukan sesuai dengan jenis alatnya dan laboratorium atau saran pengujian yang tersedia di BBPPT. Hasil pengujian dokumentasikan dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Uji dan data hasil pengujian disampaikan ke Direktorat Standarisasi.

Terhadap pelaksanaan pengujian, dikenakan tarif pengujian yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pengujian dan fungsi alat yang diuji. Pendapatan dari pelaksanaan pengujian merupakan penerimaan negara bukan pajak di Ditjen Postel.

9.1. Ruang Lingkup

Data yang dimunculkan dalam statistik bidang pengujian perangkat telekomunikasi berupa rekapitulasi hasil uji (RHU) yang diterbitkan oleh BBPPT. Setiap alat/perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia wajib melalui pengujian, sebelum digunakan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan informasi pengujian yang terdiri dari nama pemohon, nama alat, merek/type, asal negara pembuat dan informasi nomor dan tanggal RHU.

Bagian kedua penyajian data adalah besarnya penagihan dari jasa pengujian yang tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SP2). Data yang digunakan berasal dari data penanganan SP2 yang menyediakan informasi nama permohonan, nama alat, merek/type, negara pabrik pembuat, tanggal diterima, jenis perangkat, besarnya pembayaran dan waktu pembayaran. Secara keseluruhan, lingkup penyajian data statistik pengujian perangkat ini

- 1) RHU bulanan Januari-Desember tahun 2008
- 2) RHU bulanan Januari – Juli 2009
- 3) SP2 bulanan Januari-Juli 2009.

9.2. Statistik Pengujian Perangkat

9.2.1. Hasil Pengujian (RHU)

Hasil pengujian perangkat telekomunikasi yang dilakukan BBPPT pada tahun 2008 menunjukkan adanya bulan-bulan puncak dimana pengujian perangkat berlangsung lebih intensif dibanding bulan lainnya. Tabel 9.1 menunjukkan bahwa peningkatan pengujian perangkat oleh BBPPT terjadi pada bulan-bulan dipertengahan tahun yaitu bulan Juli, Agustus dan September dibanding bulan-bulan di awal tahun atau akhir tahun. Pada awal tahun dan akhir tahun, jumlah perangkat yang diuji tidak sampai 150 buah. Namun pada bulan-bulan di pertengahan tahun jumlah pengajuan mencapai lebih dari 200 perangkat.

Dari sisi asal negara pabrikan, gambar 9.1 menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia dan dilakukan pengujian di BBPPT pada tahun 2008 adalah perangkat telekomunikasi buatan China. Negara asal kedua sumber perangkat telekomunikasi paling banyak diuji adalah perangkat dari Amerika Serikat. Jumlah perangkat

telekomunikasi dari China yang diuji di BBPPT pada tahun 2008 mencapai 55% dari total 2.303 perangkat yang diuji di BBPPT. Sementara perangkat telekomunikasi asal Amerika Serikat yang diuji mencapai 8,6% dari total perangkat, diikuti perangkat telekomunikasi dari Jepang yang mencapai 5% dari total perangkat..

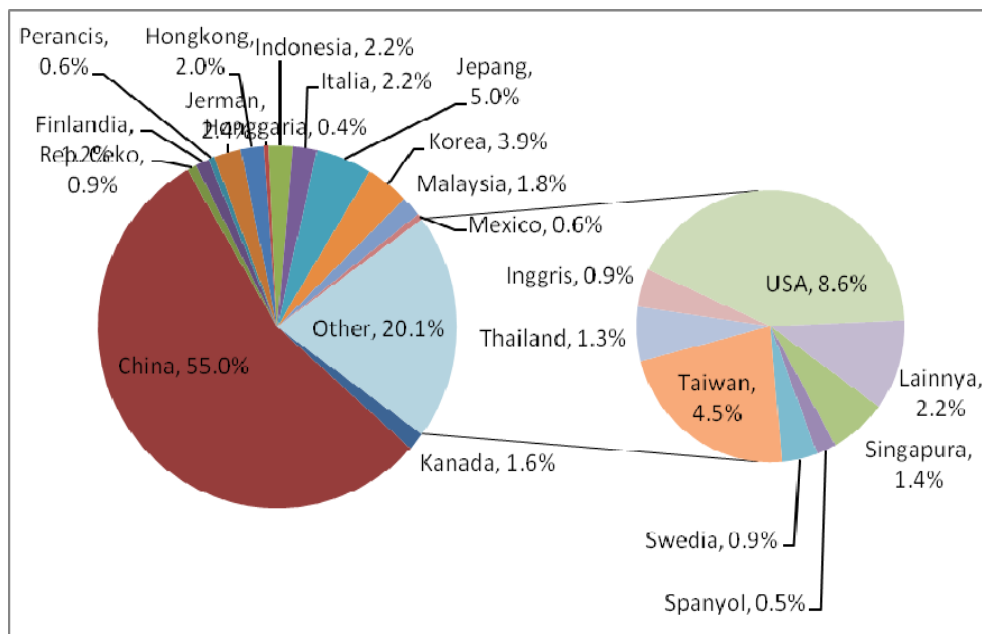
Tabel 9.1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Negara Asal Tahun 2008

Negara Asal	BULAN												Total
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
Kanada	8	6	1	2	2	4	2	2	4	1	1	4	37
China	40	48	69	104	99	124	163	129	177	141	98	74	1.266
Rep. Ceko	0	4	1	0	1	0	1	7	0	2	4	0	20
Finlandia	5	0	7	7	2	2	4	0	0	1	0	0	28
Perancis	1	0	0	3	2	1	1	1	0	1	1	2	13
Jerman	9	0	2	0	2	6	3	6	5	12	8	3	56
Hongkong	1	3	3	0	3	4	4	4	7	6	4	8	47
Honggaria	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	1	3	10
Indonesia	1	0	0	1	23	2	8	2	6	1	6	1	51
Italia	6	1	1	0	6	16	6	2	4	1	3	4	50
Jepang	12	6	8	10	21	6	11	7	9	4	16	6	116
Korea	11	8	6	4	12	5	8	9	11	6	9	1	90
Malaysia	2	5	0	1	0	1	1	15	6	3	8	0	42
Mexico	0	3	0	1	0	0	2	1	3	1	2	0	13
Singapura	1	2	1	1	2	1	5	8	7	4	0	0	32
Spanyol	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	4	0	11
Swedia	1	0	0	1	3	2	0	2	9	1	0	1	20
Taiwan	7	4	6	3	10	12	14	13	16	7	8	3	103
Thailand	1	3	2	0	0	0	7	1	10	2	2	2	30
Inggris	0	1	2	0	1	2	3	2	1	5	0	4	21
USA	25	9	12	22	26	19	20	11	12	17	16	8	197
Lainnya	4	2	11	3	7	1	2	2	1	11	6	0	50
Total	135	105	132	164	225	209	266	226	291	229	197	124	2.303

Gambar 9.1 juga menunjukkan adanya perangkat dari dalam negeri yang juga harus melalui pengujian di BBPPT. Sebanyak 50 perangkat atau 2,2% dari total pengujian yang dilakukan BBPPT adalah perangkat telekomunikasi yang berasal dari Indonesia. Dari sisi variasi asal negara, cukup banyak perangkat yang berasal dari negara-negara Eropa yang dilakukan pengujian di BBPPT seperti produk dari Jerman (2,4%), Finlandia (1,2%) dan Italia (2,2%), disamping dari Kanada yang juga cukup signifikan pada tahun 2008 yaitu sebanyak 1,6% dari total perangkat yang diuji. Sangat menonjolnya China dalam jumlah perangkat yang diuji menunjukkan bahwa produk perangkat telekomunikasi dari China mulai mendominasi pasar di Indonesia.

Selain dari negara industri di Asia, Eropa dan Amerika, produk perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPPT juga cukup banyak dari negara tetangga di ASEAN. Produk perangkat telekomunikasi dari Malaysia mencapai 1,4% dari total perangkat yang diuji. Sementara perangkat telekomunikasi dari Singapura dan Thailand juga proporsinya mencapai 1,4% dan 1,3% dari total perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPPT pada tahun 2008.

Gambar 9.1. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Negara Asal Tahun 2008



Pada tahun 2009, sampai dengan bulan Juli telah dilakukan pengujian terhadap 1.353 jenis dan merek perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Jumlah ini berarti telah mencapai 57,8% dari total perangkat yang diuji pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, paling banyak pengujian dilakukan pada bulan April yang dilakukan pengujian terhadap 277 perangkat telekomunikasi seperti terlihat pada Tabel 9.2. Sementara pada bulan sebelumnya (Maret) hanya dilakukan pengujian terhadap 118 jenis/type perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia.

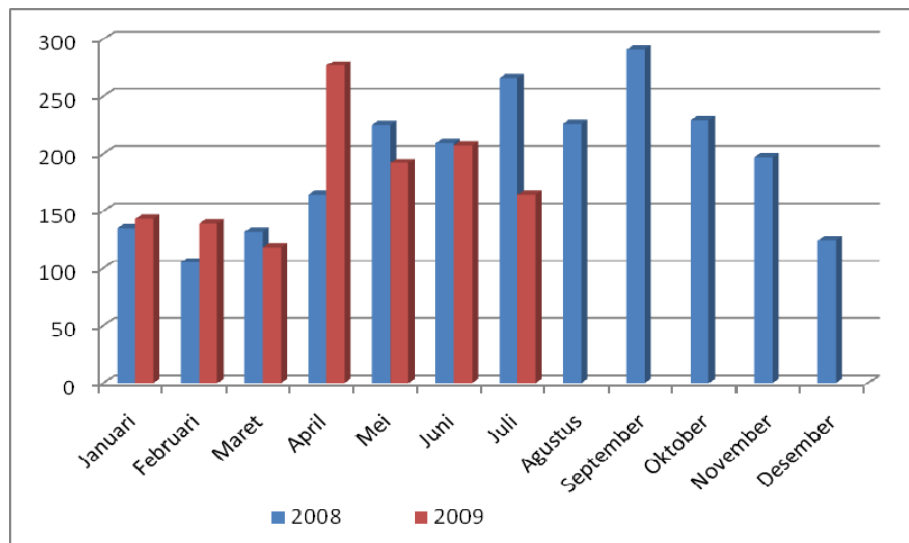
Jika dibandingkan dengan tahun 2008 seperti ditunjukkan pada gambar 9.3, terlihat bahwa pada bulan-bulan di awal tahun, pengujian yang berlangsung pada tahun 2009 lebih tinggi daripada tahun 2008. Jumlah perangkat yang diuji pada bulan Januari, Februari dan April pada 2009 lebih tinggi daripada bulan yang sama pada tahun 2008. Namun setelah bulan

April, jumlah pengujian tiap bulannya sampai bulan Juli, lebih banyak perangkat yang diuji pada tahun 2008 dibanding bulan yang sama pada tahun 2009.

Tabel 9.2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Negara Asal Tahun 2009

Negara Asal	BULAN							Total
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	
Kanada	1	1	7	2	3	1	0	15
China	73	73	64	147	108	136	112	713
Rep. Ceko	0	0	0	0	2	0	0	2
Finlandia	0	0	0	0	1	0	2	3
Perancis	0	0	3	2	1	4	0	10
Jerman	7	8	3	4	5	1	1	29
Hongkong	12	3	0	5	2	5	0	27
Honggaria	1	5	0	2	0	0	0	8
Indonesia	3	3	1	4	2	2	4	19
Italia	4	0	3	16	10	11	8	52
Jepang	2	13	4	12	3	2	5	41
Korea	3	5	1	9	9	7	8	42
Malaysia	4	0	0	7	4	2	1	18
Mexico	1	1	2	7	1	2	0	14
Singapore	1	4	0	2	0	1	2	10
Spanyol	0	0	1	0	0	1	3	5
Swedia	9	2	1	1	0	0	0	13
Taiwan	10	7	8	8	13	7	6	59
Thailand	0	2	1	10	4	1	3	21
Inggris	1	2	0	6	0	2	3	14
USA	7	8	16	25	20	17	4	97
Lainnya	4	2	3	8	4	5	2	28
Total	143	139	118	277	192	207	164	1.353

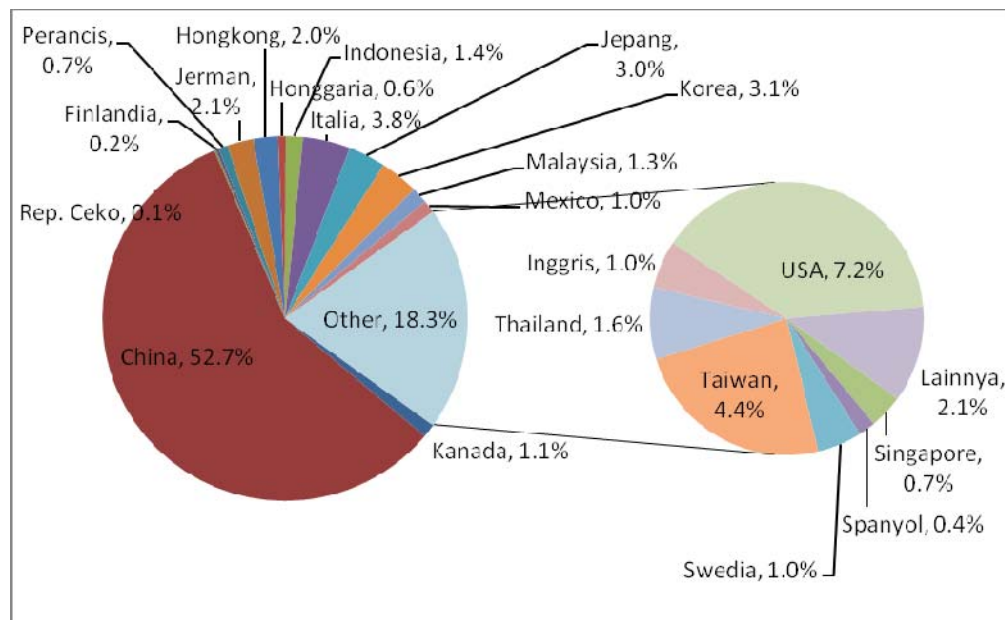
Gambar 9.2. Perbandingan jumlah perangkat yang diuji setiap bulannya Tahun 2008 dan 2009



Dari sisi asal negara pabrikan, pengujian perangkat pada tahun 2009 juga lebih banyak dilakukan terhadap perangkat buatan China, diikuti oleh Amerika Serikat dan Italia. Sampai dengan bulan Juli 2009 jumlah perangkat telekomunikasi buatan China yang diuji di BBPPT mencapai 52,7% dari seluruh perangkat telekomunikasi yang diuji. Sementara perangkat telekomunikasi dari Amerika Serikat dan Italia masing-masing mencapai 7,2% dan 3,8% dari total perangkat telekomunikasi yang diuji sampai Juli 2009.

Pada tahun 2009, terdapat juga perangkat dari dalam negeri yang dilakukan pengujian di BBPPT sebanyak 19 perangkat atau 1,4% dari total perangkat yang diuji. Pada tahun 2009, cukup signifikan pengujian perangkat yang berasal dari Taiwan dan Korea yang dilakukan pengujian di BBPPT yang masing-masing mencapai 4,4% dan 3,1% dari total perangkat yang diuji. Sebaliknya perangkat telekomunikasi dari Eropa tidak terlalu signifikan jumlahnya yang diuji pada tahun 2009.

Gambar 9.3. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Negara Asal Tahun 2008



9.2.2. Surat Perintah Pembayaran (SP2).

Data penganganan surat perintah pembayaran (SP2) Tahun 2009 menunjukkan nilai penagihan dari SP2 yang diterbitkan pada tahun 2009 sampai dengan awal Agustus 2009

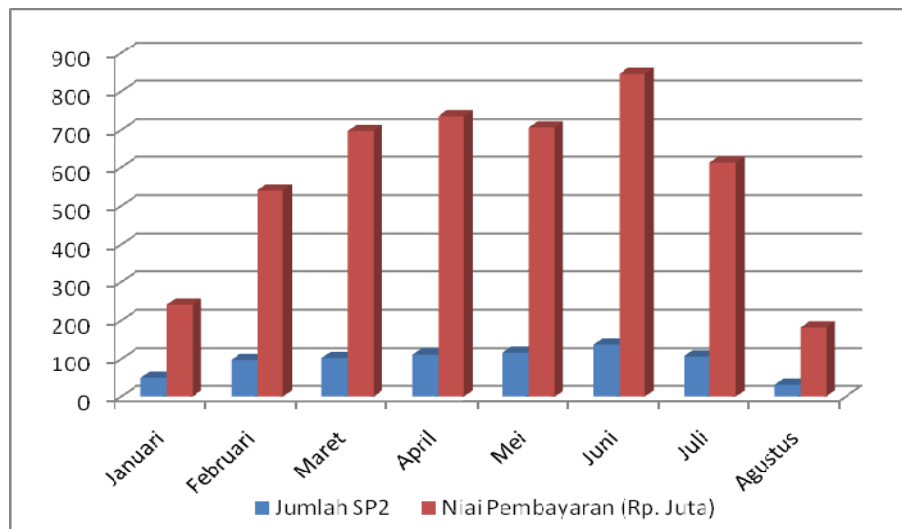
telah mencapai Rp. 4.561, 25 juta. Dari siklus penagihan perbulannya pada tahun 2009, nilai penanganan SP2 terbesar terjadi pada bulan Juni yang mencapai 138 buah dengan nilai Rp. 845,5 juta seperti ditunjukkan pada Tabel 9.3.

Tabel 9.3. Jumlah dan Nilai Penanganan Surat Perintah Pembayaran (SP2) Tahun 2009

No	Bulan	Jumlah SP2	Niai Pembayaran (Rp)	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp)
1	Januari	49	241.500.000	4.928.571
2	Februari	98	539.750.000	5.507.653
3	Maret	103	697.500.000	6.771.845
4	April	112	735.500.000	6.566.964
5	Mei	117	706.500.000	6.038.462
6	Juni	138	845.500.000	6.126.812
7	Juli	107	613.000.000	5.728.972
8	Agustus	31	182.000.000	5.870.968

Selain pada bulan Juni, jumlah SP2 terbesar juga terjadi pada bulan April dengan 112 buah SP2 dengan nilai Rp. 735,5 juta. Namun dari sisi jumlah SP2 yang dikeluarkan, penerbitan SP2 pada bulan Mei sebenarnya lebih banyak daripada penerbitan SP2 pada bulan April meskipun nilai pembayaran SP2 yang diterima lebih kecil. Dari rata-rata nilai SP2 yang dibayarkan per bulannya, besaran nilai SP2 berada pada kisaran dari Rp. 4,9 juta sampai Rp.6,7 juta. Penerbitan SP2 pada bulan Maret memiliki nilai rata-rata per SP2 paling tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Gambar 9.4 menunjukkan fluktuasi bulanan jumlah SP2 yang diterbitkan dan nilai pembayarannya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah penerbitan SP2 maupun nilai pembayarannya terjadi pada bulan Juni dan nilai terendahnya terjadi pada bulan Januari (Agustus belum satu bulan penuh).

Gambar 9.4. Fluktuasi Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 Tahun 2009



Bab 10

Bidang Kelembagaan Internasional

Kegiatan bidang kelembagaan internasional mulai mendapat tempat khusus sejak tanggal 28 November 2002 setelah struktur organisasi Ditjen Postel telah bertambah satu, yaitu Direktorat Kelembagaan Internasional. Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat ini adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Postel di bidang kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi, khususnya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang pos dan telekomunikasi dan untuk menyelenggarakan hubungan kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlunya keterlibatan dalam kegiatan kelembagaan internasional dalam bidang pos dan terutama telekomunikasi ini sejalan dengan semakin meningkatnya intensitas, kompleksitas, beban dan tantangan kerja di bidang pos dan telekomunikasi (khususnya telekomunikasi sesuai dengan kecenderungan semakin tingginya tingkat akselerasi kemajuan ICT secara nasional maupun terutama sekali dalam lingkup global). Semakin pesatnya perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menyebabkan tidak ada lagi batasan geografis maupun administratif dalam bidang ini sehingga diperlukan pengaturan dan penataan antar negara terkait dengan pemanfaatan telekomunikasi.

10.1. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penyajian data statistik bidang Kelembagaan Internasional ini meliputi kegiatan-kegiatan yang diikuti atau melibatkan Ditjen Postel dalam bentuk forum, seminar atau dalam kerangka kerjasama antar negara. Penyajian data ini meliputi :

- 1) Kegiatan kelembagaan Multilateral tahun 2008 - Juni 2009
- 2) Kegiatan kelembagaan Regional tahun 2008 - Juni 2009
- 3) Kegiatan kelembagaan Bilateral tahun 2008 - Juni 2009
- 4) Kegiatan Investasi dan Pasar Internasional tahun 2008 - Juni 2009
- 5) Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit tahun 2008 - Juni 2009

10.2. Kegiatan Kelembagaan Internasional

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Infomasi telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi Pos dan Telekomunikasi. Kegiatan tersebut dilakukan baik yang terkait dengan multilateral seperti berbagai seminar internasional dan konferensi, maupun kegiatan yang dibuat dalam kerangka kerjasama multilateral dan regional. Indonesia juga aktif melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain untuk bidang pos maupun telekomunikasi. Disamping itu juga keterlibatan atau melakukan kegiatan untuk yang terkait dengan investasi dan pasar internasional serta kegiatan pengelolaan dan orbit satelit.

10.2.1. Kegiatan Multilateral

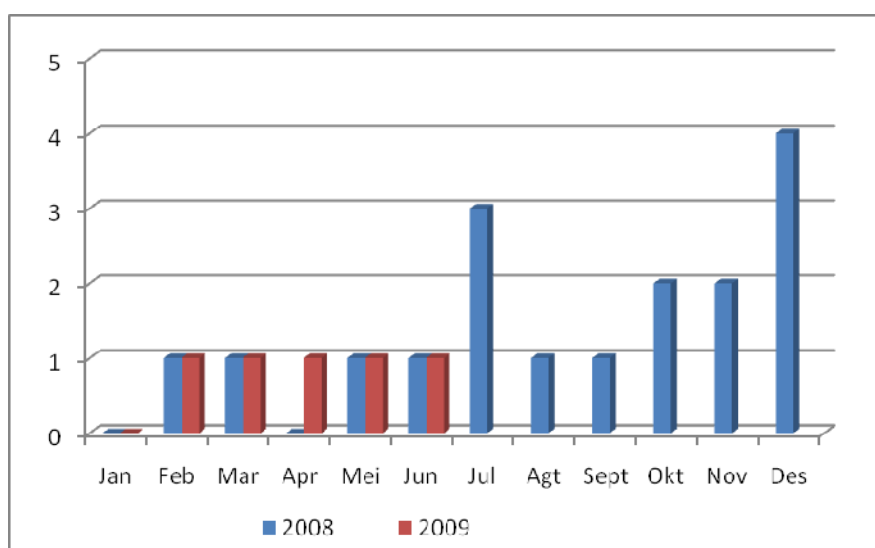
Kegiatan Multilateral yang diikuti Indonesia dalam forum-forum sidang pos dan telekomunikasi adalah dalam bentuk forum organisasi telekomunikasi dunia atau konferensi yang diselenggarakan assosiasi dan organisasi bidang pos dan telekomunikasi dunia. Sepanjang tahun 2008, Ditjen Postel mengikuti dan terlibat dalam 17 kegiatan bersifat multilateral yang diselenggarakan di berbagai negara. Kegiatan Multilateral ini tersebar di bulan-bulan sepanjang tahun seperti terlihat pada Tabel 10.1 dengan paling banyak ada di bulan Desember. Kegiatan tersebut paling banyak dilakukan di Swiss, diikuti dengan kegiatan di Malaysia, Afrika Selatan, Jepang dan Korea.

Tabel 10.1. Jumlah Kegiatan bersifat Multilateral Kelembagaan Internasional 2008 - 2009

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	1	1	0	1	1	3	1	1	2	2	4	17
2009	0	1	1	1	1	1							5

Pada tahun 2009, sampai dengan bulan Juni baru diikuti lima kegiatan multilateral, yang diselenggarakan tersebar dari bulan Februari sampai Juni 2009. Kegiatan multilateral yang diikuti pada tahun 2009 adalah kegiatan berlangsung di Swiss, Portugal, Malaysia dan di dalam negeri.

Gambar 10.1. Perkembangan Kegiatan Multilateral Tahun 2008-2009



10.2.2. Kegiatan Regional

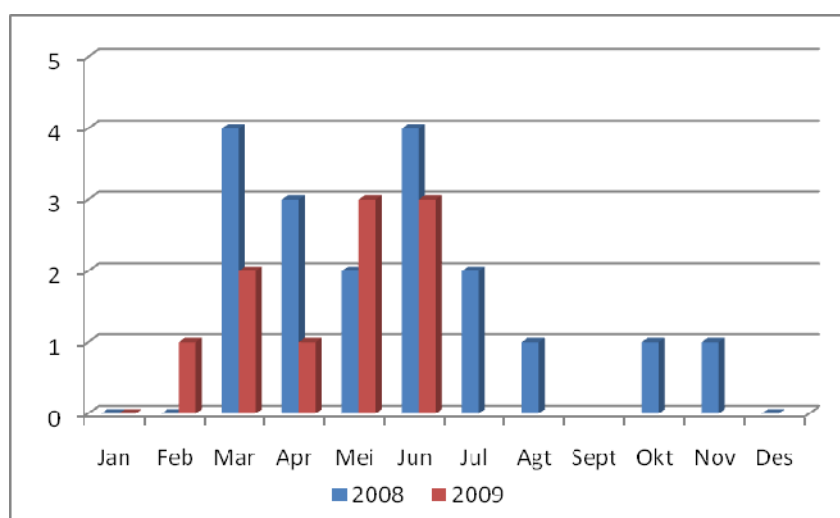
Kegiatan regional yang diikuti oleh Ditjen Postel adalah kegiatan dalam bentuk forum dialog, konferensi, maupun kerjasama yang dilakukan dalam lingkup regional Asia Pasific, Asia Timur maupun ASEAN dalam bidang Pos dan Telekomunikasi. Sepanjang tahun 2008, Ditjen Postel mengikuti 18 kegiatan skala regional yang dilakukan di beberapa negara. Kegiatan tersebar di bulan-bulan sepanjang tahun dengan paling banyak di bulan Maret dan Juni. Kegiatan regional yang paling banyak diikuti adalah kegiatan yang dilaksanakan di Thailand, diikuti dan Singapura serta beberapa negara Asia lain.

Tabel 10.2. Jumlah Kegiatan bersifat Regional Kelembagaan Internasional 2008-2009

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	4	3	2	4	2	1	0	1	1	0	18
2009	0	1	2	1	3	3							10

Pada tahun 2009, sampai dengan bulan Juni Ditjen Postel telah mengikuti 10 kegiatan forum bidang pos dan telekomunikasi yang berskala regional. Kegiatan berskala regional pada tahun 2009 yang diikuti terbanyak pada bulan Mei dan Juni masing-masing sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar terutama di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Gambar 10.2. Perkembangan Kegiatan Multilateral Tahun 2008 - 2009



10.2.3. Kegiatan Bilateral

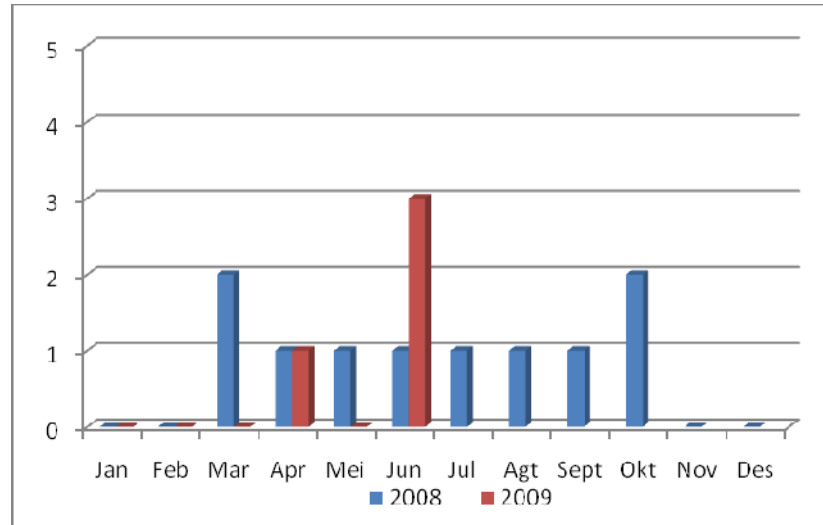
Kegiatan Bilateral dalam bidang pos dan telekomunikasi yang diikuti atau melibatkan Ditjen Postel adalah kegiatan yang umumnya dalam bentuk kerjasama dua negara atau yang merupakan bagian dari forum kerjasama dalam bidang yang lebih besar seperti forum BIMP-EAGA atau IMT-GT. Pada tahun 2008, Ditjen Postel mengikuti 10 kegiatan yang bersifat bilateral yang berlangsung tersebar pada bulan-bulan sepanjang tahun. Kegiatan yang sering dilakukan adalah dalam bentuk joint measurement, Komisi Bersama, *Joint Stamp Issue*, koordinasi satelit dan komisi bersama. Beberapa kegiatan kerjasama bidang postel dalam rangka kerjasama BIMP-EAGA dan IMT-GT juga dilakukan.

Tabel 10.3. Jumlah Kegiatan bersifat Bilateral Kelembagaan Internasional 2008-2009

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	10
2009	0	0	0	1	0	3							4

Kegiatan kerjasama bilateral pada tahun 2008 paling banyak dilakukan dengan Malaysia. Sepanjang tahun 2008, dilakukan 8 kegiatan bersama dengan Malaysia dalam berbagai bentuk kegiatan. Selain dengan negara-negara Asia yang memang banyak dilakukan, kerjasama juga dilakukan dengan negara diluar Asia seperti dengan Australia, bahkan juga dengan Turki dan Rusia. Pada tahun 2009, sampai dengan bulan Juni baru dilakukan 4 kali kegiatan. Kegiatan bilateral yang dilakukan pada Tahun 2009 ini adalah kerjasama yang dilakukan dengan Maroko, Malaysia, India dan Iran.

Gambar 10.3. Perkembangan Kegiatan Bilateral Tahun 2008 - 2009



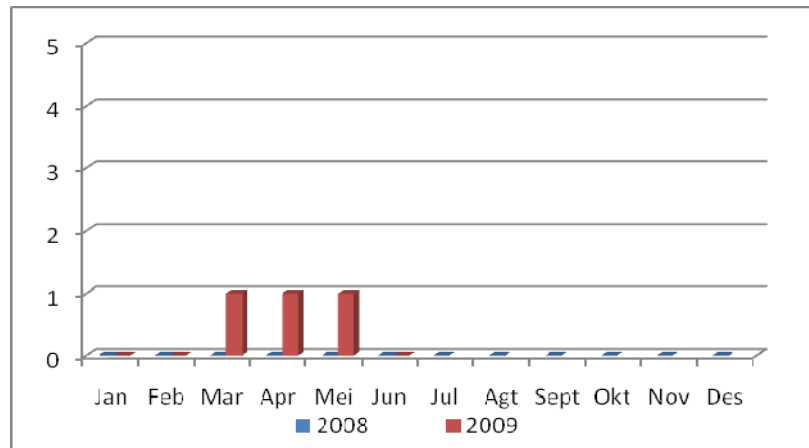
10.2.4. Kegiatan Kerjasama Investasi dan Pemasaran

Kegiatan kerjasama bidang investasi dan pasar internasional dalam bidang pos dan telekomunikasi yang diikuti atau melibatkan Ditjen Postel baru muncul pada tahun 2009. Kegiatan pada bidang ini berlangsung dalam bentuk *international meeting* dalam bidang telekomunikasi, *working group* dan kegiatan dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO). Pada tahun 2009 juga baru berlangsung 3 kali kegiatan yang berlangsung pada bulan Maret, April dan Mei yang berlangsung di Swiss dan Singapura.

Tabel 10.4. Jumlah Kegiatan terkait Investasi dan Pasar Internasional 2008-2009

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	1	1	1	0							3

Gambar 10.4. Perkembangan Kegiatan Investasi dan Pasar Internasional Tahun 2008-2009



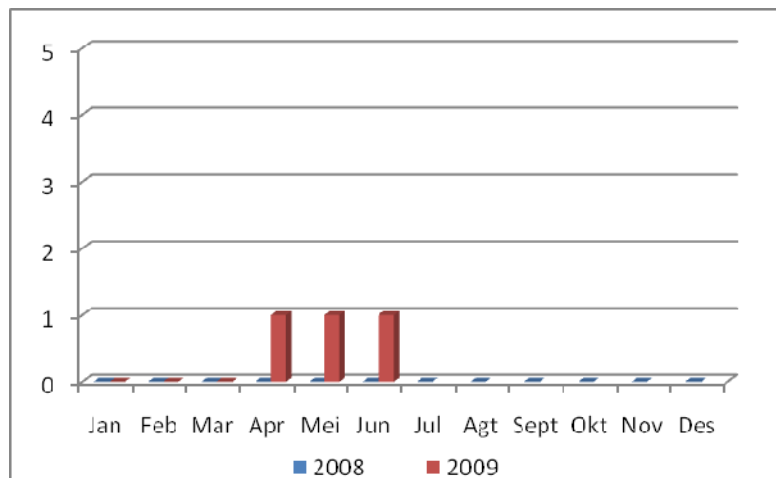
10.2.5. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Orbit dan Satelit

Kegiatan kerjasama pengelolaan orbit dan satelit yang melibatkan Ditjen Postel juga baru muncul pada tahun 2009. Sampai dengan bulan Juni 2009, sudah dilakukan 3 kegiatan terkait dengan kerjasama pengelolan orbit dan satelit yang berlangsung pada bulan April, Mei dan Juni. Dua kegiatan dilakukan dalam bentuk koordinasi orbit satelit yaitu dengan Malaysia, Vietnam dan Uni Emirat Arab (UEA) serta meeting dalam rangka efisiensi utilisasi orbit/spektrum.

Tabel 10.5. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit 2008-2009

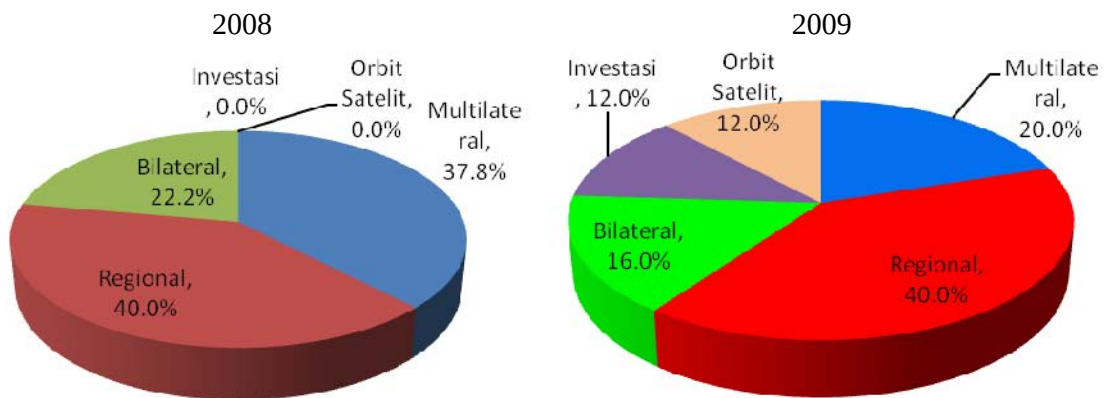
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	1	1	1							3

Gambar 10.5. Perkembangan Kegiatan kerjasama Pengelolan Orbit dan Satelit Tahun 2008 - 2009



Dari sisi komposisi kegiatan yang dilakukan, kegiatan bidang Kelembagaan Internasional pada Ditjen Postel pada tahun 2008 maupun 2009 kebanyakan adalah kegiatan yang bersifat *general*. Pada tahun 2008, 40% kegiatan internasional yang diikuti adalah kegiatan yang bersifat berskala dan bersifat regional, diikuti oleh kegiatan bersifat multilateral sebesar 37,8% serta kegiatan bilateral sebanyak 22,2% seperti terlihat pada gambar 10.6. Kegiatan yang bersifat kerjasama investasi dan pasar internasional serta kegiatan kerjasama orbit dan satelit belum muncul pada 2008. Namun pada tahun 2009, sampai dengan bulan Juni, kegiatan yang bersifat regional juga masih mendominasi yaitu sebesar 40%, diikuti dengan kegiatan multilateral yang mencapai 20%. Pada tahun 2009 ini sudah mulai ada kegiatan kerjasama terkait investasi dan kerjasama pengelolaan orbit dan satelit yang sampai Juni 2009 masing-masing mencapai 12% dari total kegiatan.

Gambar 10.6. Komposisi Kegiatan Kelembagaan Internasional Tahun 2008 dan 2009



Bab 11

Analisis Statistika Ekonomi

11.1. Ruang Lingkup

Pada bagian ini akan dilakukan analisis ekonomi berupa peran ekonomi dari kegiatan dan industri bidang pos dan telekomunikasi. Peran ini dilihat dari dua sisi yaitu kontribusi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terhadap penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan dari kegiatan Ditjen Postel. PNBP Bidang Postel adalah penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan oleh unit-unit kerja di lingkup Ditjen Postel yang mencakup PNBP dari perposan yaitu jasa titipan, PNBP dari jasa telekomunikasi, PNBP dari standardisasi dan PNBP dari Frekuensi yang meliputi PNBP dari PREOR dan SKOR dan PNBP dari BHP Frekuensi. PNBP dari bidang Postel ini menjadi bagian dari penerimaan negara yang masuk dalam pos penerimaan dalam negeri pada pos PNBP lainnya. Dengan demikian, PNBP dari bidang Postel ini turut memperkuat juga penerimaan negara dalam negeri.

Bagian kedua adalah kontribusi kegiatan bidang pos dan telekomunikasi terhadap pendapatan domestik nasional yang dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. PDB adalah ukuran output dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara pada sektor-sektor ekonomi yang ada di negara tersebut, termasuk sektor komunikasi. Sementara kontribusi dari bidang postel adalah dalam bentuk *output* yang dihasilkan dari kegiatan jasa bidang pos dan telekomunikasi yang memberi kontribusi terhadap *output* nasional.

Sumber data untuk analisis ini berasal dari internal Ditjen Postel berupa data PNBP yang dihasilkan dari kegiatan di masing-masing satuan kerja (Satker) di Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Ditjen Postel. Sementara data pembanding adalah data yang berasal dari Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan untuk data penerimaan negara

dari masing-masing sumber penerimaan dan data dari Badan Pusat Statistik untuk data PDB berdasarkan lapangan usaha dan sektor usaha. Keseluruhan data ini adalah data yang sudah dipublikasikan maupun data yang belum dipublikasikan.

11.2. Peran Ditjen Postel dalam Penerimaan Negara

Peran Ditjen Postel dalam penerimaan negara dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh Ditjen Postel terhadap penerimaan negara yang bersumber dari PNBPN yang dihasilkan dari kegiatan dan pelayanan yang diberikan unit-unit kerja di Ditjen Postel. Pada bagian awal akan dipaparkan perkembangan penerimaan Ditjen Postel dalam bentuk PNBPN dari masing-masing unit/bidang kerja.

11.2.1. PNBPN Bidang Perposan

PNBPN yang berasal dari bidang perposan berasal dari penerimaan yang berasal dari pelayanan dibidang jasa titipan. Dari tabel 11.1 yang menunjukkan perkembangan PNBPN dari bidang perposan dari 2004 sampai dengan bulan Juni 2009. Dari data tersebut terlihat adanya fluktuasi dalam penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari Bidang Perposan yang berasal dari jasa titipan ini. Setelah melonjak cukup tinggi dari tahun 2004 ke 2005, PNBPN dari jasa titipan menurun kembali pada tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya ketentuan dibolehkannya swasta terlibat dalam penyelenggaraan jasa titipan sehingga meningkatkan penerimaan dari sertifikasi jasa titipan dan jasa pelayanan lainnya yang terkait. Penurunan PNBPN pada tahun berikutnya terjadi karena tidak semua usaha jasa titipan yang *booming* pada tahun sebelumnya dapat bertahan.

Tabel 11.1. Perkembangan PNBPN Bidang Perposan dari Jasa Titipan Tahun 2005 - 2009

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
3	2005	20.000	24.700		2066,7%	123,5%
4	2006	50.000	20.000	150,0%	-19,0%	40,0%
5	2007	75.000	20.000	50,0%	0,0%	26,7%
6	2008	75.000	26.000	0,0%	30,0%	34,7%
7	2009*	25.000	23.000	-66,7%		92,0%

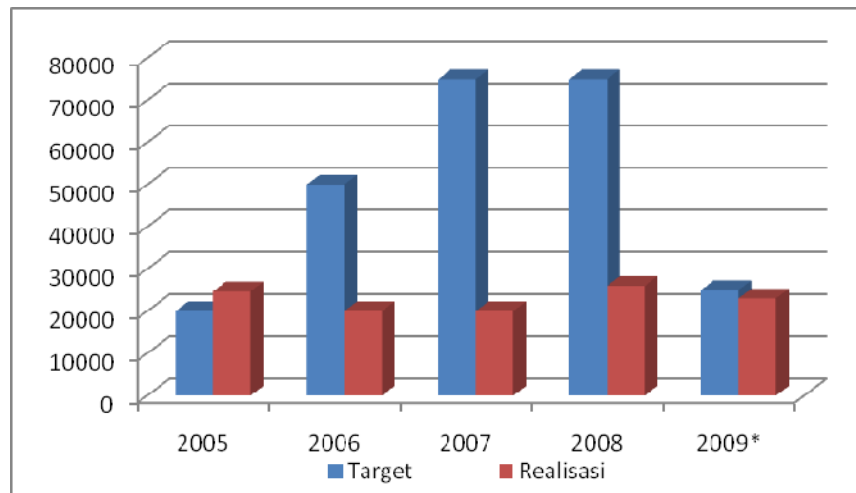
*) Sampai Juni 2009

Namun sejak tahun 2007, PNBPN dari jasa titipan ini menunjukkan kecenderungan peningkatan. Setelah meningkat sebesar 30% pada tahun 2008, PNBPN dari jasa titipan

sampai dengan semester I telah mencapai 88% dari penerimaan tahun sebelumnya. Sehingga diperkirakan PNBП dari jasa titipan pada tahun 2009 ini akan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target yang dibebankan, PNBП dari jasa titipan ini setelah tahun 2005 tidak pernah mencapai target. Bahkan pada tahun 2007 dan 2008, ketika target penerimaan dinaikan 50% dari target tahun 2006, realisasi penerimaan hanya mampu mencapai 26,7% dan 34,7% dari target yang dibebankan dari sektor jasa titipan ini. Atas dasar itulah maka pada tahun 2009, target penerimaannya diturunkan cukup besar yaitu hanya 33,3% dari target tahun sebelumnya.

Gambar 11.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBП Sektor Jasa Titipan



11.2.2. PNBП Bidang Telekomunikasi

PNBП yang berasal dari bidang telekomunikasi berasal dari penerimaan yang berasal dari penyediaan jasa-jasa yang terkait dengan kegiatan telekomunikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Tabel 11.2 yang memperlihatkan perkembangan penerimaan dari bidang telekomunikasi menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan dalam PNBП dari bidang telekomunikasi ini.

Peningkatan PNBП ini terjadi karena perkembangan sektor telekomunikasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam bidang telekomunikasi seluler dengan bermunculannya beberapa operator seluler baru. Mencermati perkembangan ini, maka

target penerimaan PNBPN dari bidang telekomunikasi ini juga ditingkatkan. Realisasi PNBPN sektor telekomunikasi ini dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 27,3% per tahun. Namun peningkatan realisasi PNBPN ini masih dibawah target peningkatan yang mencapai 32,9% per tahun. Oleh karena itu peningkatan ini harus disikapi dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor telekomunikasi ini yang masih sangat terbuka.

Tabel 11.2. Perkembangan PNBPN dari Sektor Telekomunikasi Tahun 2004-2009

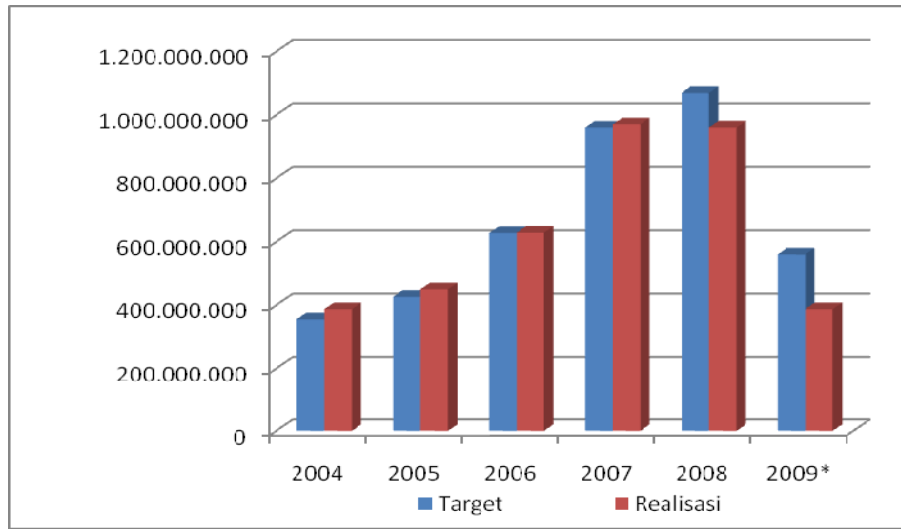
No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
2	2004	355.330.000	387.140.064,5			109,0%
3	2005	426.000.000	449.845.483,1	20,0%	16,2%	105,6%
4	2006	627.821.671	628.767.084,2	47,4%	39,8%	100,2%
5	2007	960.000.000	970.360.150,6	52,8%	54,3%	101,1%
6	2008	1.069.340.072	960.272.968,3	11,4%	-1,0%	89,8%
7	2009*	559.908.621	387.151.501,6	-47,6%		69,1%

*) Sampai Juni 2009

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PNBPN sektor telekomunikasi seperti yang diperlihatkan oleh gambar 11.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan PNBPN dari sektor ini memang selalu lebih besar daripada target yang dibebankan kecuali pada tahun 2008. Namun realisasi atas target penerimaan ini hanya sedikit lebih banyak dari target yang ditetapkan sehingga sebenarnya masih potensial untuk ditingkatkan kembali. Belum optimalnya penerimaan ini terlihat dari realisasi penerimaan PNBPN pada tahun 2008 yang 10% dibawah target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan PNBPN Telekomunikasi pada tahun 2008 disebabkan oleh dua hal yaitu terjadinya penurunan penerimaan dari operator seluler sebagai akibat pasar yang mulai jenuh dan persaingan yang semakin ketat. Kedua adalah karena sistem penarikan dari operator yang dilakukan per semester sehingga penerimaan di semester 2 tahun 2008 *carry over* ke tahun sebelumnya.

Dari Tabel 11.2 dan gambar 11.2 juga terlihat bahwa pada tahun 2009, target penerimaan diturunkan jauh lebih rendah daripada tahun 2008 dengan penurunan hampir 50%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan tarif interkoneksi dari 1% menjadi 0,5% sehingga target penerimaan yang berasal dari interkoneksi itu juga perlu dilakukan penyesuaian.

Gambar 11.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP Sektor Telekomunikasi



11.2.3. PNBP Bidang Standardisasi

PNBP bidang standardisasi adalah penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari jasa pengujian dan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Perkembangan penerimaan PNBP dari bidang standardisasi ini ditunjukkan pada Tabel 11.3. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan dari Bidang Standardisasi ini menunjukkan trend peningkatan yang baik meskipun pertumbuhan peningkatan tersebut cenderung fluktuatif. Peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2005 ke 2006 sehingga realisasi PNBP dari pengujian dan sertifikasi ini meningkat sebesar 153,3%. Peningkatan yang sangat besar ini terjadi karena Dirjen Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan yang intensif melalui razia besar-besaran terhadap barang yang masuk ke dalam negeri termasuk produk telekomunikasi yang harus melakukan pengujian. Sehingga hal ini berdampak pada lonjakan produk yang harus diuji dan berpengaruh pada peningkatan penerimaan dari pengujian ini.

Setelah tahun 2006, realisasi penerimaan ini juga cenderung meningkat lebih tinggi daripada pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan ini juga tidak terlepas dari pertumbuhan industri telekomunikasi yang sangat pesat dalam beberapa

tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan realisasi penerimaan ini mencapai 75,8% per tahun.

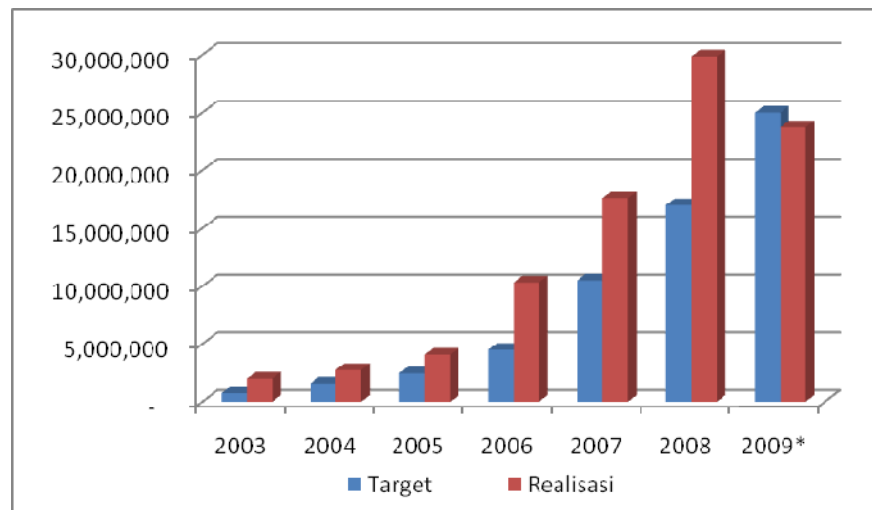
Tabel 11.3. Perkembangan PNBP dari Bidang Standardisasi Tahun 2003 - 2009

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target	Pertumbuhan Realisasi	Tingkat Pencapaian Target
1	2003	720.000	2.080.160,0			278,6%
2	2004	1.600.500	2.739.283,3	122,3%	36,6%	171,2%
3	2005	2.460.000	4.072.935,5	53,7%	48,7%	165,6%
4	2006	4.500.000	10.316.936,1	82,9%	153,3%	229,3%
5	2007	10.500.000	17.609.534,0	133,3%	70,7%	167,7%
6	2008	17.000.000	29.862.510,0	61,9%	69,6%	175,7%
7	2009*	25.000.000	23.732.738,0			94,9%

*) Sampai Juni 2009

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan bidang standardisasi ini seperti ditunjukkan pada gambar 11.3, terlihat bahwa realisasi PNBP dari pengujian dan sertifikasi ini selalu melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian realisasi penerimaan ini dalam enam tahun terakhir rata-rata mencapai 98% diatas target yang ditetapkan meskipun masih cenderung fluktuatif. Sebagaimana pertumbuhan realisasinya, pencapaian penerimaan diatas target juga menunjukkan kecenderungan meningkat setelah tahun 2006. Meskipun target penerimaan juga telah ditetapkan cukup tinggi, namun realisasi penerimaan masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Bahkan realisasi tahun 2009 pada semester I telah mencapai hampir 95% dari yang ditargetkan sehingga diperkirakan realisasi penerimaannya pada akhir tahun akan melampaui target.

Gambar 11.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN Bidang Standardisasi



*) sampai dengan bulan Juni 2009

11.2.4. PNBPN Bidang Frekuensi

PNBPN bidang frekuensi berasal dari dua sumber yaitu PNBPN dari BHP frekuensi dan PNBPN yang berasal dari PREOR dan SKOR. Kedua sumber tersebut terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan Bidang Frekuensi pada Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Tabel 11.4 menunjukkan penerimaan perkembangan PNBPN dari BHP frekuensi termasuk target, realisasi dan pertumbuhannya. Penerimaan dari BHP Frekuensi adalah sumber penerimaan terbesar bagi Ditjen Postel dalam penerimaan negara bukan pajak. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan dari BHP frekuensi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Meskipun pertumbuhan realisasi penerimaan menunjukkan pola yang masih fluktuatif, namun pertumbuhan realisasi penerimaan dari BHP frekuensi ini mencapai rata-rata 61,1% tiap tahunnya.

Tabel 11.4. PNBPN dari BHP Frekuensi Tahun 2004-2009

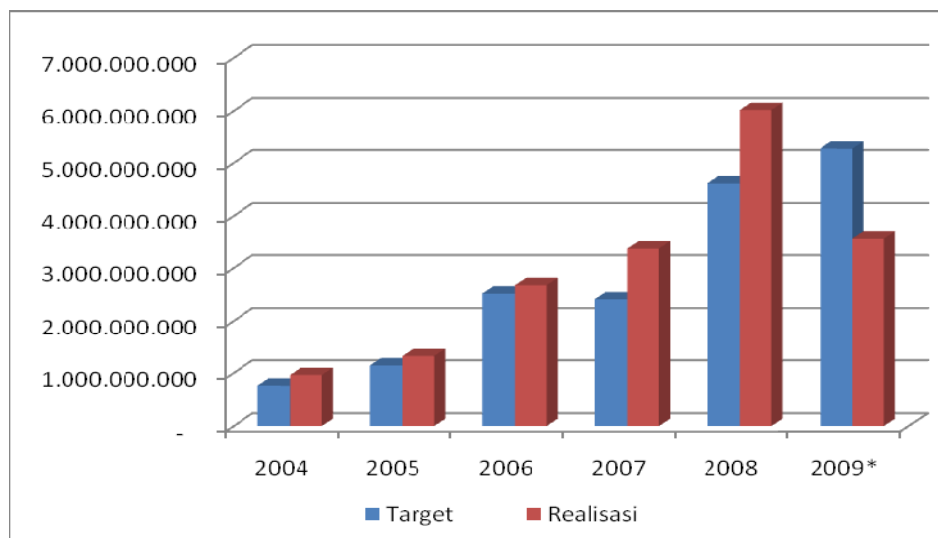
No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
2	2004	760.000.000	961.149.216,2			126,5%
3	2005	1.143.350.890	1.322.607.170,9	50,4%	37,6%	115,7%
4	2006	2.516.907.000	2.675.569.428,2	102,1%	102,3%	106,3%
5	2007	2.409.289.000	3.368.167.814,7	-4,3%	25,9%	139,8%
6	2008	4.612.975.824	6.016.990.913,7	91,5%	78,6%	130,4%
7	2009*	5.269.827.618	3.552.955.237,8			67,4%

*) Sampai Juni 2009

Namun pertumbuhan realisasi penerimaan masih dibawah pertumbuhan target yang ditetapkan yang diperkirakan tumbuh rata-rata 64% tiap tahunnya. Peningkatan penerimaan paling besar terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 106,3%. Sebagaimana pada PNBP telekomunikasi, peningkatan yang tinggi ini sejalan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi dan informasi yang sangat pesat sejak tahun 2006. Peningkatan penerimaan yang sangat besar di tahun 2006 dan berlanjut di tahun-tahun berikutnya karena pada tahun 2005 mulai dilakukan lelang untuk frekuensi 3G yang nilainya cukup besar dan penerimaannya mulai masuk ke kas negara pada tahun 2006.

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi PNBP dari BHP frekuensi ini terlihat bahwa realisasi penerimaan PNBP selalu lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Pencapaian realisasi penerimaan ini dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata 28% diatas target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PNBP dari BHP frekuensi ini ditunjukkan pada gambar 11.4. Sebagaimana pertumbuhan penerimaannya, pencapaian realisasi penerimaan yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan terutama terjadi sejak tahun 2006.

Gambar 11.4. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP dari BHP Frekuensi



Sementara untuk penerimaan PNBP dari PREOR dan SKOR juga menunjukkan trend peningkatan meskipun masih fluktuatif. Setelah meningkat pada tahun 2005, realisasi

penerimaan PNBPN dari PREOR dan SKOR ini menurun pada tahun 2006, namun kemudian meningkat kembali cukup signifikan pada tahun 2007. Peningkatan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2008 dimana realisasi penerimaan meningkat 197% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya ekstensifikasi penerimaan dengan jalan meningkatkan jenis objek yang dikenakan tarif.

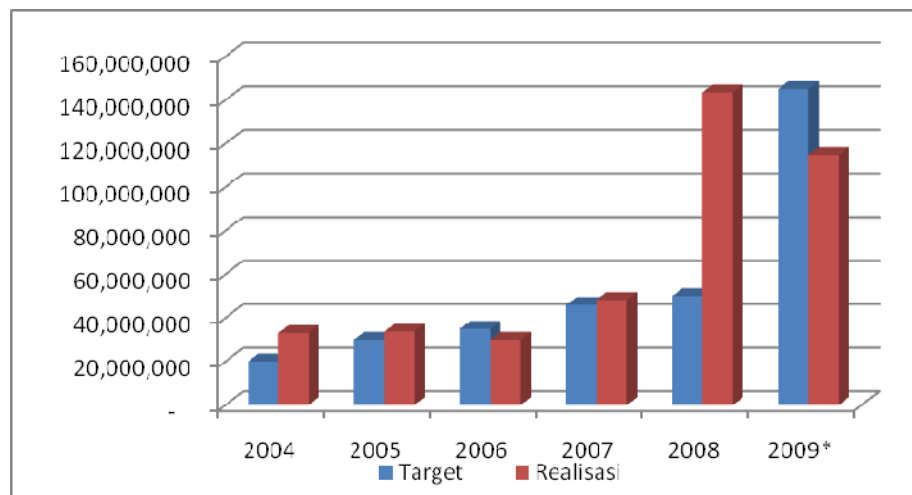
Tabel 11.5. PNBPN dari PREOR dan SKOR (Frekuensi) Tahun 2004-2009

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
2	2004	20.000.000	33.130.000			165,7%
3	2005	30.000.000	33.825.000	50,0%	2,1%	112,8%
4	2006	35.000.000	30.040.000	16,7%	-11,2%	85,8%
5	2007	46.000.000	48.250.000	31,4%	60,6%	104,9%
6	2008	50.000.000	143.467.000	8,7%	197,3%	286,9%
7	2009*	145.000.000	114.875.000	190,0%		79,2%

*) Sampai Juni 2009

Pertumbuhan realisasi penerimaan dari PREOR dan SKOR ini dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata 62% tiap tahunnya. Atas dasar itulah maka target penerimaan dari PREOR dan SKOR ini ditingkatkan 190% pada tahun 2009. Namun dengan pola peningkatan realisasi penerimaan, diperkirakan realisasi penerimaan PNBPN dari PREOR dan SKOR pada tahun 2009 ini masih dapat melampaui target yang ditetapkan.

Gambar 11.5. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari PREOR dan SKOR



Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi PNBP dari PREOR dan SKOR ini seperti ditunjukkan oleh gambar 11.5 terlihat bahwa realisasi penerimaan selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Dalam kurun waktu 2004 - 2008, tingkat pencapaian realisasi PNBP dari PREOR dan SKOR ini mencapai 91,2%. Bahkan pada tahun 2009 yang baru pada semester I, realisasi penerimaan PNBP telah melebihi dari target penerimaan dalam setahun. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan target penerimaan PNBP dari sektor ini untuk memacu penerimaan yang lebih besar lagi.

11.2.5. PNBP Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi

PNBP Kewajiban pelayanan universal telekomunikasi adalah PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban pelayanan universal (Universal Service Obligation/USO) Telekomunikasi yang merupakan program dari Ditjen Postel. Program ini dilakukan dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi yang seluas-luasnya. Karena sifat layanan yang diberikan melalui perluasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka dari program ini, Ditjen Postel juga memperoleh penerimaan dari masyarakat/*stakeholder* yang memanfaatkan pelayanan tersebut.

Peningkatan realisasi penerimaan dari USO ini masih fluktuatif sejak mulai diterima tahun 2006. Setelah meningkat pada tahun 2007, namun menurun kembali pada tahun 2008. Namun demikian target penerimaan yang ditetapkan untuk penerimaan dari USO ini tetap ditingkatkan tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2009, target penerimaan ditingkatkan sampai 75% dari tahun sebelumnya.

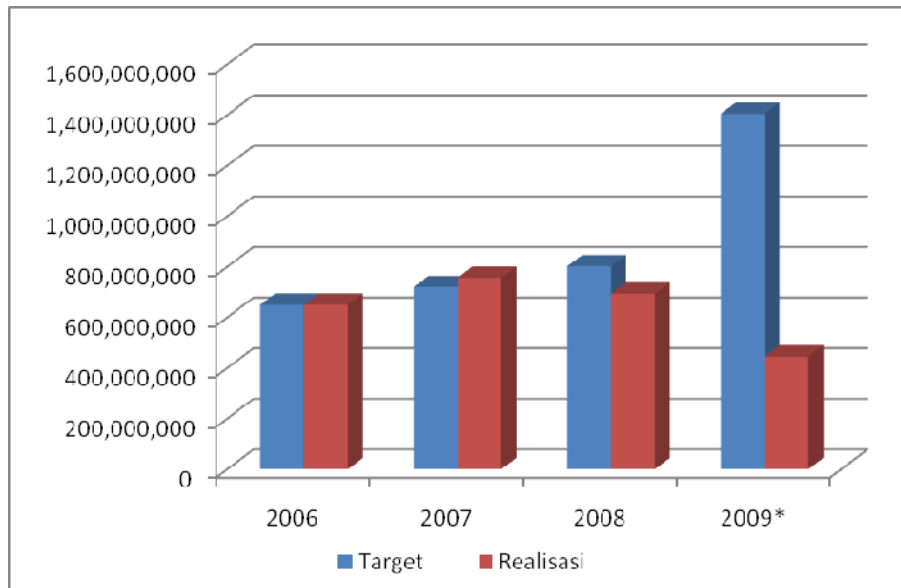
Tabel 11.6. PNBP dari Kewajiban Pelayanan Universal (USO) Tahun 2006 - 2009

No	Tahun	Target (Ribuan Rp.)	Realisasi (Ribuan Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
4	2006	649.862.074,1	650.073.747,7			100,0%
5	2007	720.000.000,0	756.447.661,5	10,8%	16,4%	105,1%
6	2008	802.005.053,9	693.502.957,2	11,4%	(8,3%)	86,5%
7	2009*	1.405.003.761,2	445.041.284,9	75,2%		31,7%

*) Sampai Juni 2009

Target penerimaan yang terus dibuat meningkat setiap tahunnya menyebabkan mulai tahun 2008, realisasi penerimaan dari USO ini tidak mencapai target yang ditetapkan seperti terlihat pada gambar 11.6. Setelah dapat melampaui target penerimaan pada 2006 dan 2007, realisasi penerimaan USO pada 2008 hanya 86,5% dari targetnya. Bahkan sampai semester I tahun 2009, realisasi penerimaan baru mencapai 31,7% dari target.

Gambar 11.6. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari USO



*) data sampai bulan Juni 2009

11.2.6. Komposisi PNBPN Bidang Posel dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara

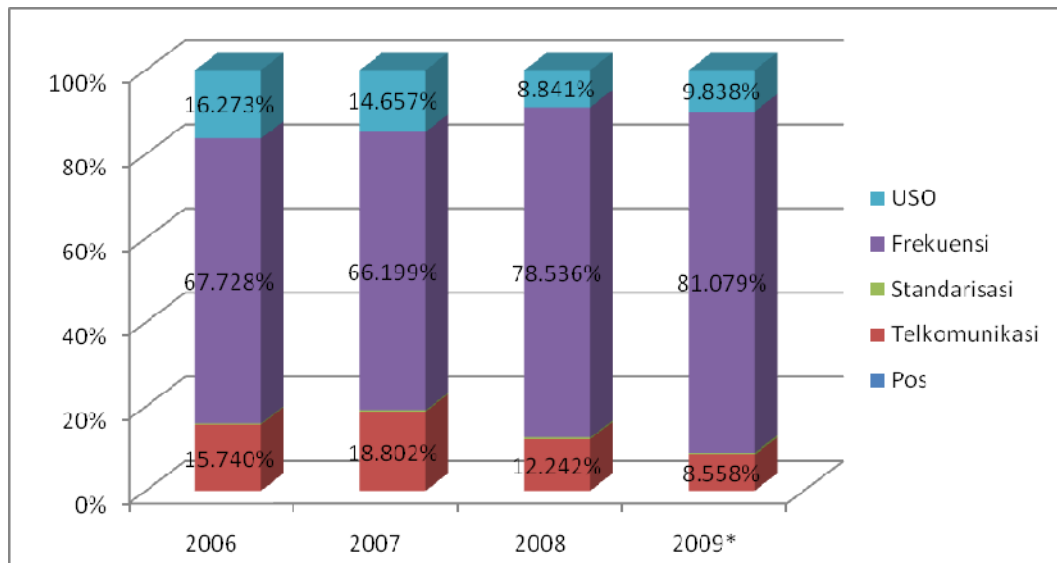
Secara total, penerimaan PNBPN bidang Pos dan telekomunikasi juga menunjukkan trend peningkatan seperti ditunjukkan oleh Tabel 11.7. Mulai masuknya penerimaan dari USO pada tahun 2006 menyebabkan PNBPN bidang Posel ini meningkat tajam sebesar 120% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan yang tinggi terjadi pada 2006 disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari standarisasi dan frekuensi dengan peningkatan yang cukup tinggi yang masing-masing meningkat 153% dan 99% dari penerimaan tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir, total PNBPN dari bidang Pos dan Telekomunikasi ini meningkat 58,2% dengan pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh penerimaan bidang frekuensi.

Gambar 11.7 menunjukkan bahwa proporsi terbesar penerimaan PNBPN Ditjen Postel berasal dari bidang frekuensi. Penerimaan yang berasal dari bidang frekuensi rata-rata mencapai lebih dari 73% dari total penerimaan PNBPN bidang Pos dan Telekomunikasi. Proporsi penerimaan dari frekuensi ini bahkan semakin meningkat dalam dua tahun terakhir dari semula kurang dari 70% menjadi diatas 70% karena mulai adanya penerimaan dari lelang frekuensi 3G. Sementara penerimaan dari bidang Pos merupakan sumber PNBPN dengan proporsi yang paling kecil karena relatif stagnannya pertumbuhan usaha jasa titipan di Indonesia

Tabel 11.7. Realisasi PNBPN Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 2004-2009

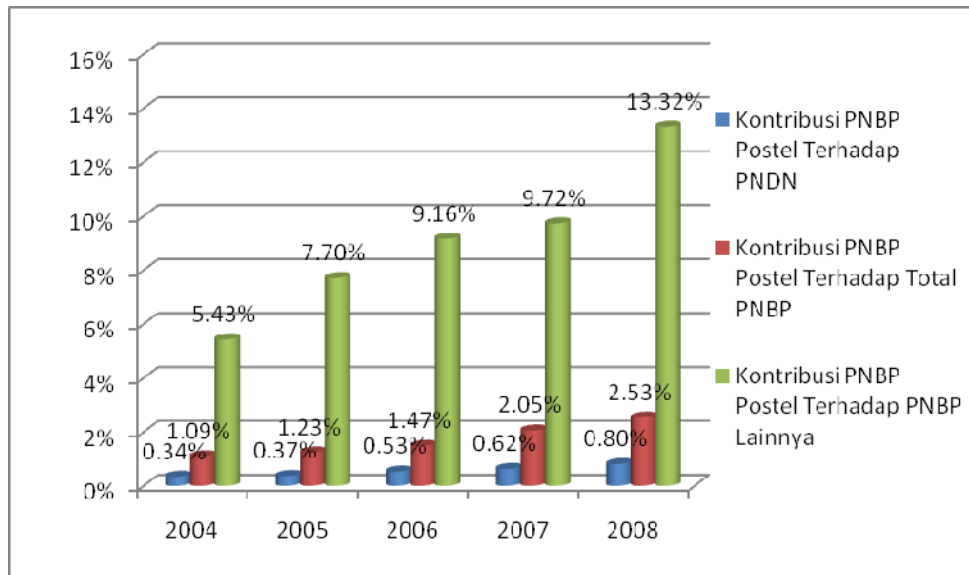
No	Tahun	Pos (Rp.000)	Telekomunikasi (Rp.000)	Standarisasi (Rp.000)	Frekuensi (Rp.000)	USO (Rp. 000)	Total PNBPN (Rp.000)
1	2004	1.140	387.140.064,5	2.739.283,3	994.279.216,2		1.384.159.704
2	2005	24.700	449.845.483,1	4.072.935,5	1.356.432.170,9		1.810.375.290
3	2006	20.000	628.767.084,2	10.316.936,1	2.705.609.428,2	650.073.747,7	3.344.713.449
4	2007	20.000	970.360.150,6	17.609.534,0	3.416.417.814,7	756.447.661,5	4.404.407.499
5	2008	26.000	960.272.968,3	29.862.510,0	6.160.457.913,7	693.502.957,2	7.150.619.392
6	2009*	23.000	387.151.501,6	23.732.738,0	3.667.830.237,8	445.041.284,9	4.078.737.477

Gambar 11.7. Proporsi penerimaan PNBPN antar Bidang dalam PNBPN Pos dan Telekomunikasi



Penerimaan PNBPN dari bidang Pos dan Telekomunikasi yang masuk ke kas negara ini dengan sendirinya memberikan kontribusi bagi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak. Gambar 11.8 menunjukkan perkembangan kontribusi PNBPN bidang Pos dan telekomunikasi terhadap penerimaan negara. Kontribusi ini dibagi dalam tiga kelompok yaitu terhadap penerimaan negara dalam negeri, terhadap total PNBPN dan terhadap PNBPN lainnya. Penerimaan negara dalam negeri (PNDN) adalah jumlah seluruh penerimaan negara dalam APBN yang bersumber dari dalam negeri yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Dengan demikian dalam PNDN ini tidak termasuk penerimaan dari hibah. Total PNBPN adalah seluruh penerimaan negara dalam negeri dalam APBN (tidak termasuk penerimaan dari perpajakan) yang meliputi penerimaan dari sumber daya alam, penerimaan dari laba BUMN dan PNBPN lainnya. Sedangkan PNBPN lainnya adalah seluruh total penerimaan negara bukan pajak diluar penerimaan dari sumber daya alam dan laba BUMN.

Gambar 11.8. Proporsi penerimaan PNBPN antar Bidang dalam PNBPN Pos dan Telekomunikasi



Dari gambar 11.8 terlihat bahwa kontribusi PNBPN dari bidang pos dan telekomunikasi menunjukkan trend peningkatan yang cukup baik. Peran PNBPN bidang pos dan telekomunikasi terhadap total penerimaan negara dalam negeri (PNDN) yaitu hanya 0,8% pada tahun 2008. Namun kontribusi ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dengan trend yang positif dari hanya 0,34% pada 2004.

Kontribusi PNBPN dari bidang pos dan telekomunikasi terhadap total PNBPN nasional juga menunjukkan trend peningkatan kontribusi yang cukup terlihat. Pada tahun 2008, kontribusi PNBPN bidang Posel ini sudah mencapai 2,53% dari total PNBPN dan ada kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2004 kontribusinya baru 1,09%.

Sementara kontribusi PNBPN bidang Posel terhadap total PNBPN lainnya sudah mulai menunjukkan peran yang signifikan dengan kontribusi sebesar 13,32% pada tahun 2008. Kontribusi ini juga menunjukkan trend peningkatan yang positif dan cukup baik. Dengan peningkatan kontribusi dalam lima tahun terakhir mencapai 26%, Dari kontribusi terhadap total PNBPN lainnya yang baru mencapai 5,43% pada 2004, pada tahun 2008 kontribusinya sudah mencapai 13,32%.

Kontribusi penerimaan (PNBPN) bidang Posel terhadap penerimaan negara dalam APBN menunjukkan trend yang semakin meningkat. Kontribusi PNBPN bidang posel terhadap total PNBPN lainnya dalam APBN pada tahun 2008 bahkan sudah mencapai 13,32%.

11.3. Peran Industri Pos dan Telekomunikasi dalam Pendapatan Nasional

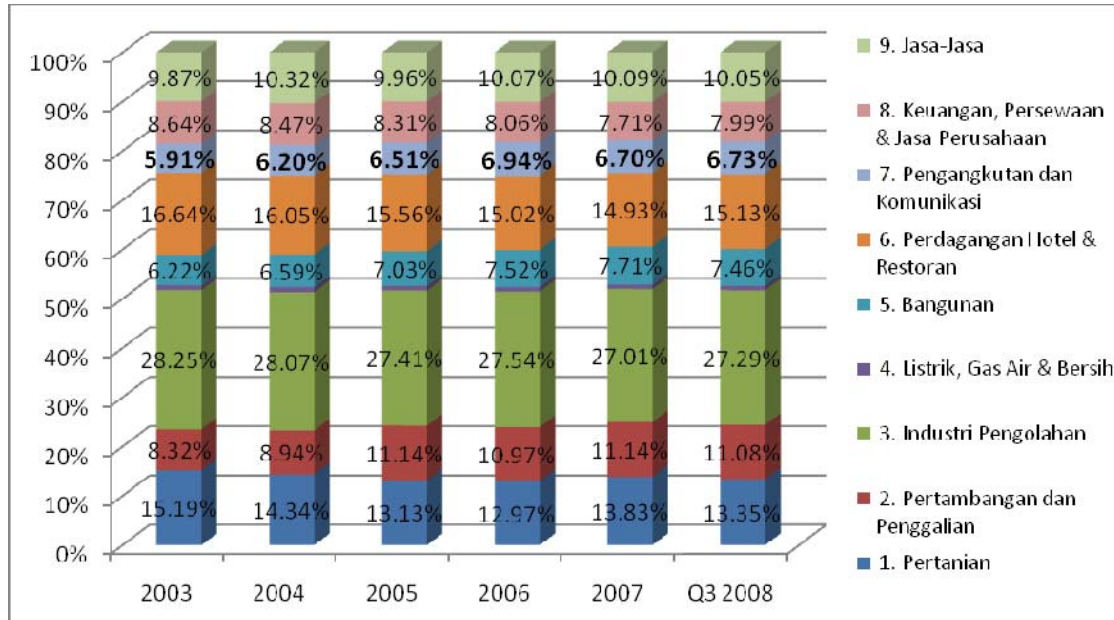
Kontribusi bidang pos dan telekomunikasi terhadap perekonomian dengan pendekatan *output* ditunjukkan oleh peran sektor pos dan telekomunikasi terhadap pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB) nasional. Tabel 11.8 menunjukkan perkembangan PDB Indonesia atas dasar harga berlaku dari tahun 2003 sampai triwulan III tahun 2008 menurut lapangan dan sektor usaha. Dari tabel tersebut terlihat bahwa PDB bidang komunikasi yang tergabung dalam lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan PDB.

Tabel 11.8. PDB atas dasar harga Berlaku Tahun 2003 - Q3 2008 (Rp. Milyar)

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007	Q3 2008
1. Pertanian	305.783,5	329.124,6	364.169,3	433.223,4	547.235,6	1.344.628,30
2. Pertambangan dan Penggalian	167.572,3	205.252,0	309.014,1	366.505,4	440.826,2	1.116.345,70
3. Industri Pengolahan	568.920,3	644.342,6	760.361,3	919.532,7	1.068.806,4	2.748.700,40
4. Listrik, Gas Air & Bersih	19.144,2	23.730,3	26.693,8	30.354,8	34.726,2	91.774,80
5. Bangunan	125.337,1	151.247,6	195.110,6	251.132,3	305.215,7	751.458,60
6. Perdagangan Hotel & Restoran	335.100,4	368.555,9	431.620,2	501.542,1	590.822,3	1.523.984,60
7. Pengangkutan dan Komunikasi	118.916,4	142.292,0	180.584,9	231.808,6	265.256,9	677.650,40
a. P e n g a n g k u t a n	79.535,5	88.310,3	110.157,3	142.799,0	149.926,6	402.882,90
b. K o m u n i k a s i	39.380,9	53.981,7	70.427,6	89.009,6	115.330,3	274.767,50
1. Pos dan Telekomunikasi	35.060,8	48.346,0	63.434,1	79.806,0	103.324,4	246.136,73
2. Jasa Penunjang Komunikasi	4.320,1	5.635,7	6.993,5	9.203,6	12.005,9	28.630,77
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	174.074,5	194.410,9	230.522,7	269.121,4	305.216,0	804.860,10
9. Jasa-Jasa	198.825,9	236.870,3	276.204,2	336.258,9	399.298,6	1.011.761,70
PDB	2.013.674,6	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9	10.071.164,60
PDB Tanpa Migas	1.840.854,9	2.083.077,9	2.458.234,3	2.967.303,1	3.540.950,1	8.966.487,50

Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDB di Indonesia dalam lima tahun terakhir disumbang oleh sektor industri pengolahan diikuti oleh sektor pertanian seperti ditunjukkan oleh gambar 11.9. Sektor industri pengolahan pada kuartal III tahun 2008 memberi kontribusi sebesar 27,3%, diikuti oleh sektor pertanian dengan kontribusi 10,05 %. Namun jika diperhatikan pada gambar 10.9 juga terlihat bahwa peran dari sektor pengangkutan dan telekomunikasi mengalami peningkatan cukup signifikan dari 5,91% pada tahun 2003 menjadi 6,73% pada kuartal III 2008. Jika dilihat kontribusinya terhadap PDB non migas maka kontribusi sektor pengangkutan dan telekomunikasi ini lebih besar lagi yaitu mencapai 7,56% pada kuartal III 2008. Bahkan peningkatan kontribusi ini berlangsung ketika sektor-sektor lain mulai berkurang maupun mengalami stagnasi perannya terhadap PDB.

Gambar 11.9. Kontribusi Sektoral Terhadap PDB dengan Migas Tahun 2003-2008



Jika dilihat dari perkembangan kontribusinya, sektor pengangkutan adalah sektor yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB bersama dengan sektor bangunan dan pertambangan dan penggalian (*minning*)

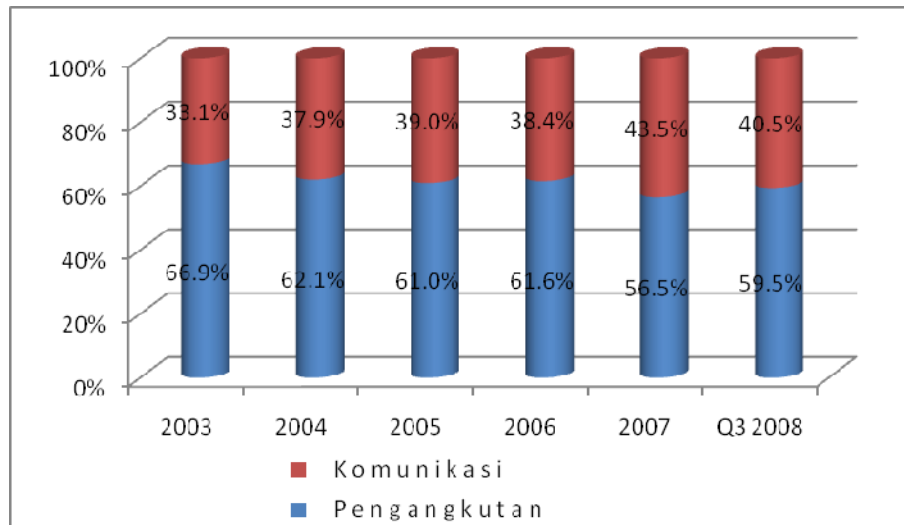
Lebih jauh lagi, Tabel 11.8 menunjukkan peran dari subsektor komunikasi terhadap pembentukan PDB bersama-sama sektor lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun peran sektor pengangkutan dan komunikasi lebih didominasi oleh subsektor pengangkutan, namun dari tahun ke tahun subsektor komunikasi menunjukkan peran yang semakin besar.

Jika pada tahun 2003 kontribusinya baru mencapai 1,96%, maka pada kuartal III 2008 kontribusi sudah mencapai 2,73%. Sementara sektor pengangkutan hanya meningkat dari 3,95% menjadi 4%. Perkembangan yang pesat dalam industri telekomunikasi turut berperan dalam mendorong peningkatan subsektor komunikasi dalam PDB nasional.

Tabel 11.9. Peran Sektor Pos dan Telekomunikasi Terhadap PDB Tahun 2003 - Q3 2008 (Rp. Milyar)

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007	Q3 2008
1. Pertanian	15,19%	14,34%	13,13%	12,97%	13,83%	13,35%
2. Pertambangan dan Penggalian	8,32%	8,94%	11,14%	10,97%	11,14%	11,08%
3. Industri Pengolahan	28,25%	28,07%	27,41%	27,54%	27,01%	27,29%
4. Listrik, Gas Air & Bersih	0,95%	1,03%	0,96%	0,91%	0,88%	0,91%
5. Bangunan	6,22%	6,59%	7,03%	7,52%	7,71%	7,46%
6. Perdagangan Hotel & Restoran	16,64%	16,05%	15,56%	15,02%	14,93%	15,13%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,91%	6,20%	6,51%	6,94%	6,70%	6,73%
- P e n g a n g k u t a n	3,95%	3,85%	3,97%	4,28%	3,79%	4,00%
- K o m u n i k a s i	1,96%	2,35%	2,54%	2,67%	2,91%	2,73%
* Pos dan Telekomunikasi	1,74%	2,11%	2,29%	2,39%	2,61%	2,44%
* Jasa Penunjang Komunikasi	0,21%	0,25%	0,25%	0,28%	0,30%	0,28%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,64%	8,47%	8,31%	8,06%	7,71%	7,99%
9. Jasa-Jasa	9,87%	10,32%	9,96%	10,07%	10,09%	10,05%

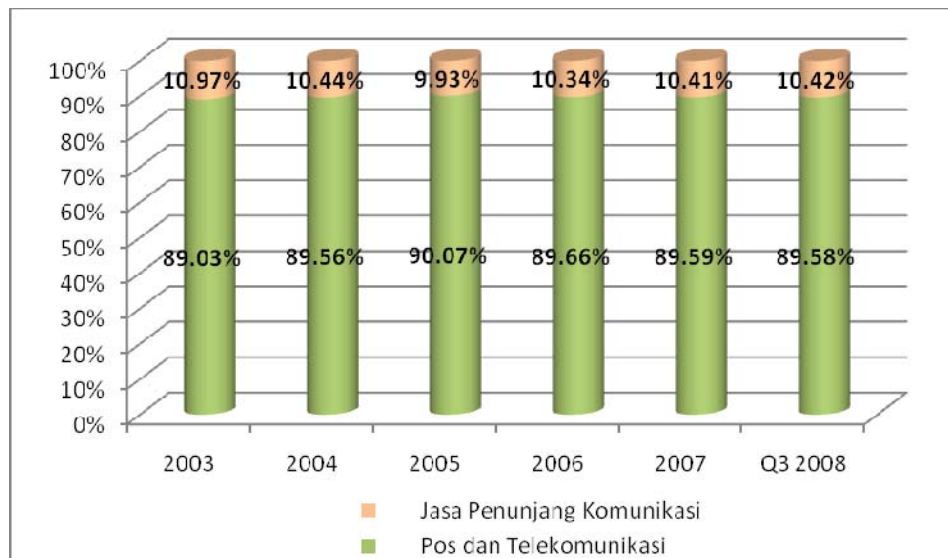
Gambar 11.10. Proporsi subsektor dalam sektor pengangkutan dan komunikasi 2003 - 2008



Gambar 11.10 semakin memperjelas mulai menuju arah pergeseran kontribusi antara sektor subsektor komunikasi dan pengangkutan dalam struktur PDB nasional. Pangsa subsektor pengangkutan yang pada tahun 2003 mencapai 66,9%, berkurang menjadi 59,% pada kuartal III 2008. Sebaliknya pangsa subsektor komunikasi meningkat dari 33,1% pada 2003 menjadi 40,5% pada 2008. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya peran bidang komunikasi dalam pembentukan PDB.

Jika dilihat lebih mendalam pada subsektor komunikasi, nampak pada PDB dari subsektor komunikasi ini lebih dominan disumbang oleh bidang pos dan telekomunikasi daripada bidang jasa penunjang telekomunikasi. Gambar 11.11 menunjukkan pangsa kontribusi antara bidang Pos dan Telekomunikasi dengan bidang jasa penunjang telekomunikasi dalam pembentukan PDB subsektor komunikasi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pangsa bidang pos dan telekomunikasi menunjukkan proporsi yang semakin meningkat dan semakin dominan meskipun peningkatannya berlangsung lambat. Namun dari kecenderungan tersebut dan dominasi bidang pos dan telekomunikasi terhadap subsektor komunikasi, menunjukkan bahwa peran subsektor komunikasi yang semakin meningkat terhadap PDB memang berasal dari peran bidang pos dan telekomunikasi yang semakin meningkat. Dengan kata lain terjadi peningkatan dalam *output* bidang pos dan telekomunikasi yang memberikan sumbangan *output* yang lebih besar terhadap pembentukan PDB nasional.

Gambar 11.11. Proporsi bidang dalam subsektor komunikasi pada PDB Tahun 2003 - 2008



Jika dilihat lebih jauh, peran subsektor komunikasi juga semakin menggeser peran subsektor transportasi dalam struktur PDRB. Peran subsektor komunikasi ini didominasi oleh bidang pos dan telekomunikasi. Peningkatan pangsa subsektor komunikasi ini juga sekaligus menunjukkan semakin meningkatnya peran pos dan telekomunikasi dalam pembentukan *output* nasional

Sumber peningkatan peran dari bidang pos dan telekomunikasi terhadap pembentukan pendapatan nasional juga dapat dilihat dari pertumbuhan bidang tersebut dibanding pertumbuhan subsektor dan sektor lain maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Tabel 11.10 menunjukkan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian (dihitung berdasarkan harga konstan) di Indonesia. Dari tabel tersebut sangat jelas terlihat bahwa pertumbuhan terbesar adalah pada sektor pengangkutan dan komunikasi khususnya pada subsektor komunikasi.

Tabel 11.10. Laju Pertumbuhan Sektoral PDB di Indonesia 2004-2007 (%)

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	2,82%	2,72%	3,36%	3,50%
2. Pertambangan dan Penggalian	-4,48%	3,20%	1,70%	1,98%
3. Industri Pengolahan	6,38%	4,60%	4,59%	4,66%
4. Listrik, Gas Air & Bersih	5,30%	6,30%	5,76%	10,40%
5. Bangunan	7,49%	7,54%	8,34%	8,61%
6. Perdagangan Hotel & Restoran	5,70%	8,30%	6,42%	8,46%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	13,38%	12,76%	14,38%	14,38%
a. P e n g a n g k u t a n	8,76%	6,25%	6,63%	2,78%
b. K o m u n i k a s i	22,88%	24,58%	26,39%	29,54%
1. Pos dan Telekomunikasi	23,61%	25,29%	25,82%	29,44%
2. Jasa Penunjang Komunikasi	16,94%	18,49%	31,61%	30,41%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,66%	6,70%	5,47%	7,99%
9. Jasa-Jasa	5,38%	5,16%	6,16%	6,60%
PDB	5,03%	5,69%	5,51%	6,32%
PDB Tanpa Migas	5,97%	6,57%	6,13%	6,92%

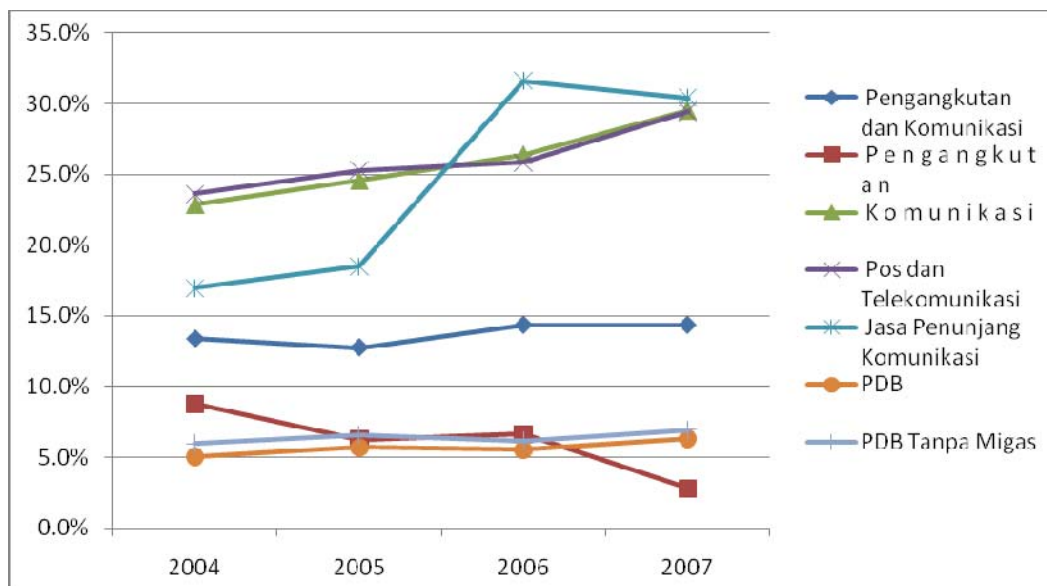
Berdasarkan perbandingan pertumbuhan terlihat bahwa ketika ekonomi hanya tumbuh antara 5,03% sampai 6,32% per tahun dan sektor lain tumbuh kurang dari 10%, maka sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan paling pesat dengan angka pertumbuhan pada tahun 2007 mencapai 14,38%.

Bahkan jika ditelusuri lebih jauh terlihat bahwa pada subsektor komunikasi, pertumbuhannya pada kuartal III 2008 mencapai 29,54% yang merupakan pertumbuhan tertinggi dan jauh lebih tinggi dari sektor maupun subsektor lainnya. Jika dilihat dari trend

pertumbuhannya, subsektor komunikasi juga menunjukkan trend pertumbuhan yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 22,88% pada 2003 menjadi 29,54% pada kuartal III 2008.

Ketika ekonomi hanya tumbuh antara 5%-6,32% per tahun dan sektor lain tumbuh kurang dari 10%, maka sektor pengangkutan dan komunikasi dapat tumbuh hingga 14,38%. Bahkan subsektor komunikasi tumbuh 29,54% dan bidang pos dan telekomunikasi tumbuh 29,55% dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir masing-masing 25,85% dan 26,04% yang menunjukkan bidang telekomunikasi tumbuh sangat pesat

Gambar 11.12. Trend pertumbuhan sektor telekomunikasi pada PDB Tahun 2003-2007



Berdasarkan trend kontribusi dan pertumbuhan terhadap pembentukan PDB ini menunjukkan bahwa bidang pos dan telekomunikasi merupakan bidang yang memiliki prospek paling cerah dibanding bidang lain. Pertumbuhan yang sangat tinggi dan kontribusi yang semakin meningkat menunjukkan bahwa dimasa datang, bidang pos dan telekomunikasi ini akan semakin memberikan peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Apalagi perkembangan pada industri ini juga merespon dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan dalam mendukung kegiatan manusia termasuk gaya hidup sehingga pertumbuhannya akan semakin pesat dimasa datang.